

Pertemuan Regional

**Pengelolaan Taman Nasional
Kawasan Timur Indonesia**

Kelembagaan Pengelolaan Taman Nasional

Manado, 24 - 27 Agustus 1999

This proceeding was prepared by the Natural Resources Management/EPIQ Program's Protected Areas & Forest Management Team. The NRM/EPIQ PAF Team works with the Ministry of Forestry & Estate Crops and other stakeholders from Indonesia's conservation community and forestry sector to strengthen protected areas and forest management. Work includes promotion of co-management models such as partnerships and community-based forest management and community conservation agreements; raising awareness of conservation and sustainable development; improving conservation financing; and building institutional and human resource capacity.

For further information, please contact:
NRM/EPIQ, Ratu Plaza 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman No. 9, Jakarta 10270, Indonesia
tel: (62-21) 720-9596; fax: (62-21) 720-4546; email: secretariat@nrm.or.id

Kata Pengantar

Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Kawasan Timur Indonesia yang diadakan dari tanggal 23-27 Agustus 1999 ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari Lokakarya Kepala Balai dan Kepala Unit Taman Nasional se-Indonesia pada bulan Oktober tahun 1998. Pertemuan regional ini dihadiri berbagai instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkepentingan terhadap pembangunan taman nasional. Berbagai materi yang berkaitan dengan pembangunan taman nasional disajikan selama pertemuan. Dalam pertemuan ini para peserta pertemuan juga berkesempatan untuk saling tukar menukar informasi dan menyamakan visi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan taman nasional. Hal ini menjadi penting dan strategis mengingat bahwa komunikasi dan koordinasi antara instansi terkait, terutama Pemerintah Daerah, dengan pengelola taman nasional merupakan komponen penting yang perlu untuk ditingkatkan dan ditindaklanjuti demi terwujudnya pengelolaan taman nasional yang efektif dan optimal.

Dengan tersusunnya prosiding ini, pengelola taman nasional di Kawasan Timur Indonesia mendapatkan gambaran dukungan dan keinginan instansi terkait terhadap pembangunan taman nasional, dan instansi terkait dapat lebih memahami prospek dan kontribusi taman nasional terhadap pembangunan daerah.

Diharapkan bahwa rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan ini dapat dipahami dan dibahas kembali untuk dikembangkan demi mewujudkan pengelolaan Taman Nasional yang optimal.

Atas kerjasama semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Dati I Sulawesi Utara dan Program NRM/EPIQ-USAID, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 Desember 1999
DIREKTUR KONSERVASI KAWASAN

Dr. Sunaryo
NIP. 08003885

Kata Pengantar

Era Reformasi telah menghembuskan angin segar di Indonesia. Saat ini berbagai perubahan sedang terjadi, antara lain perubahan yang berkaitan dengan kebijakan mengelola lingkungan dan sumber daya alam. Kekompleksitasan dari transformasi ini terlihat jelas melalui perdebatan-perdebatan yang cukup hangat mengenai pelaksanaan UU Desentralisasi Indonesia yang baru, UU 22/99 dan UU 25/99 dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Kawasan Timur Indonesia, ini merupakan satu dari serangkaian lokakarya hasil kerja sama antara Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Program NRM/EPIQ, untuk memfasilitasi dialog dan menghimpun berbagai masukan dari para pihak berkepentingan (multi stakeholders) yang dapat dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan dan panduan yang dapat mendukung UU baru tersebut.

Lokakarya ini memberi kesempatan bagi para peserta yang memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari lembaga pemerintahan, LSM hingga sektor swasta, untuk mempelajari dan mencari jalan keluar bagi pelaksanaan kedua Undang-undang baru tersebut. Pada akhir lokakarya, para peserta berhasil mengembangkan konsep tentang struktur kelembagaan taman nasional ditinjau dari UU 22/99 dan pendanaan taman nasional ditinjau dari UU 25/99. Rekomendasi-rekomendasi tersebut kemudian diserahkan kepada kelompok kerja antar lembaga di Jakarta dan akan dijadikan dasar pembahasan dalam lokakarya mendatang. Oleh karena itu sangat diharapkan bahwa rekomendasi-rekomendasi yang dikemukakan tersebut dapat berkembang menjadi peraturan serta panduan yang memadai dan disetujui untuk pengelolaan taman nasional yang efektif di Indonesia sehubungan dalam semangat desentralisasi

Walaupun lokakarya ini pada awalnya memang hanya diantisipasi untuk memperbaiki kebijakan yang berlaku serta menciptakan kondisi yang memungkinkan dilaksanakannya pengelolaan taman nasional yang partisipatoris di Indonesia, namun lokakarya ini juga

Diharapkan dapat menjadi contoh baru dalam proses perumusan kebijakan. Workshop ini berhasil mencerminkan pendekatan partisipatoris dalam pengembangan suatu kebijakan.

Para peserta yang mewakili berbagai lembaga dan berasal dari berbagai daerah mampu bekerja sama untuk menghasilkan satu visi yang sama. Dalam kondisi yang sangat beraneka ragam bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan dan membutuhkan tingkat keterbukaan, komunikasi, kesabaran dan saling menghargai yang sangat tinggi. Saya yakin kesamaan visi ini telah tercapai di Manado dan saya percaya bahwa hal tersebut akan merupakan sumbangan yang berarti dalam proses perumusan kebijakan yang lebih partisipatoris baik untuk hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam maupun yang tidak

Atas kerjasama dan bantuan semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, saya mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 December 1999

Reed Merrill
NRM/EPIQ Protected Areas & Forest Management Advisor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tema	2
1.3. Maksud	2
1.4. Tujuan	2
1.5. Waktu dan Tempat	2
1.6. Hasil yang Diharapkan	2
1.7. Metodologi	3
1.8. Peserta Pertemuan	3
1.9. Agenda Acara	4
2. HASIL DISKUSI	7
2.1. Kelembagaan Pengelolaan Taman Nasional	7
2.2. Peranan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pengelolaan TN	11
3. DAFTAR LAMPIRAN	
A. Daftar Peserta	A1 - 1
B. Sambutan-sambutan	
1. Sambutan Panitia Penyelenggara Pertemuan Regional Pengelolaan TN Kawasan Timur Indonesia	B1 - 1
2. Sambutan Gubernur Sulawesi Utara	B2 - 5
3. Sambutan Dir.Jen. PKA	B3 - 7
4. Sambutan Direktur USAID	B4 - 11
C. Pengarahan	
1. Kebijakan Pembangunan Taman Nasional dalam Rangka Otonomi Daerah oleh Prof. Dr. Herman Haeruman Js, Deputi Ketua Bappenas Bidang Regional & Daerah, Bappenas	C1 - 1

2.	Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia <i>oleh Ir. Abdul Manan Siregar, Dir.Jen. PKA</i>	C2 - 9
3.	Peranan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Kawasan Taman Nasional (Tinjauan dari Aspek U.U. No. 22, 99) <i>oleh Rapiuddin Hamarung, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah</i>	C3 - 15
4.	Penerapan U.U. No. 25 Tahun 1999 Dikaitkan dengan Pendanaan Dalam Pengembangan & Pengelolaan Taman Nasional <i>oleh Dr. Sahala Lumban Gaol, Direktur Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan DEPKEU</i>	C4 - 21
 D. Instansi Terkait		
1.	Dukungan Pemda Mengintegrasikan Pembangunan Wilayah dengan Pengelolaan Taman Nasional dalam Antisipasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, <i>oleh drs. J. Saruan, Ketua Bappeda Sulut</i>	D1 - 1
2.	Strategi Pelaksanaan Kebijaksanaan Pengelolaan Pembangunan Hutan dan Kebun, Khususnya di Bidang Konservasi Propinsi Sulawesi Selatan <i>oleh Dr. H.A. Fauzi Mas'ud, Kepala Kanwil Dephutbun dan Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan</i>	D2 - 13
3.	Peranan Taman Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Irian Jaya , <i>oleh drs. K. Watori, Kepala Bapedalda Propinsi Tk.I Irian Jaya</i>	D3 - 27
 E. Makalah Pakar		
1.	Pengelolaan Taman Nasional sebagai Komponen Pembangunan Daerah dalam Era Reformasi <i>oleh Dr.Dedi M. Masykur Riyadi, Kepala Biro Pembangunan DATI I dan Transmigrasi, Bappenas</i>	E1 - 1
2.	Peranan Taman Nasional dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat, <i>oleh Eddy Mantjoro, Prof. Ekonomi Sumber Daya Kelautan, Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan, UNSRAT</i>	E2 -15
 F. Kemitraan		
1.	Peranan Mitra Kutai dalam Mendukung Pengelolaan Taman Nasional Kutai <i>oleh S. Hadiprayitno, Wakil Presiden Direktur PT Kaltim Prima Coal</i>	F1 - 1

2. Friends of Bukit Baka – Bukit Raya, Pendekatan Kemitraan Perusahaan HPH untuk Mempromosikan Pengelolaan & Pelestarian Kawasan Konservasi, *oleh Nana Suparna & Gusti Hardiansyah, PT Alas Kusuma* F2 - 5

G. LSM & Lembaga Lain

1. Pendampingan Masyarakat oleh FPK di Taman Nasional Bunaken *oleh Rico Ngangi & Meity Mongdong* G1 - 1
2. Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat sebagai Model Konservasi Pesisir dan Laut di Indonesia *oleh J. Johnnes Tulungan, Field Program Manager, Proyek Pesisir, Brian C. Crawfors, Technical Advisor, Proyek Pesisir, dan Ferdinan Pua, KASI Lingkungan Hidup Bappeda Propinsi Sulawesi Utara* G2 – 7
3. Pengelolaan Kawasan Lindung di Sulawesi dan Desentralisasi: Pandangan & Pemecahan Permasalahannya di Masa Depan *Oleh Robert Lee & Nono Suyatno, WCS* G3 - 29
4. Penilaian Sumber Daya, *oleh Elfian Effendi, NRM/EPIQ Conservation Finance Specialist* G4 - 41

H. Taman Nasional

1. Sulawesi

- a) Prospek & Kontribusi Taman Nasional Bunaken terhadap Pembangunan Daerah, *oleh Ir. Dominggus, Kepala Balai TN Bunaken* H1a- 1
- b) Prospek & Kontribusi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Terhadap Pembangunan Daerah *oleh Suparman Rais, Kepala Balai TN Bogani Nani Wartabone* H1b- 19
- c) Prospek & Kontribusi Taman Nasional Taka Bonerate terhadap Pembangunan Daerah, *oleh Ir. Asep Sugiharta, MSc, Kepala Unit TN Taka Bonerate* H1c- 27
- d) Prospek & Kontribusi Taman Nasional Lore Lindu terhadap Pembangunan Daerah, *oleh Ir. Banjar Yulianto Laban, MM, Kepala Balai TN Lore Lindu* H1d- 33

2. Maluku

Prospek & Kontribusi Taman Nasional Manusela terhadap
Pembangunan Daerah Maluku, *oleh Ir.Sahulata R. Yohana,*
Kepala Unit TN Manusela H2 - 1

3. Irian Jaya

a) Prospek & Kontribusi Taman Nasional Wasur terhadap Pembangunan
Daerah, *oleh Ir. Maraden Purba, Kepala Balai TN Wasur* H3a- 1

b) Prospek & Kontribusi Taman Nasional Teluk Cenderawasih terhadap
Pembangunan Daerah *oleh Minto Basuki, Kepala Balai TN*
Teluk Cenderawasih H3b- 47

4. Sumatra

Penerapan *Integrated Conservation and Development Project* di TN
Kerinci-Seblat, *oleh Wandoyo Siswanto, Ketua Balai Taman*
Nasional Kerinci-Seblat H4 - 1

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Kawasan Timur Indonesia dilaksanakan sebagai tindak lanjut lokakarya Kepala Balai/Unit Taman Nasional di Lido, Bogor pada Bulan Oktober 1998. Pertemuan regional tersebut akan diadakan di lima wilayah yaitu di Manado untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya; di Samarinda untuk wilayah Kalimantan, di Sungai Penuh untuk wilayah Sumatera; di Malang untuk wilayah Jawa dan Bali; dan di Mataram untuk wilayah Nusa Tenggara. Untuk tahap pertama dilaksanakan untuk Kawasan Timur Indonesia yang bertempat di Manado, Propinsi Sulawesi Utara.

Pertemuan Regional ini menjadi penting dan strategis, didasarkan hasil survey Kepala Taman Nasional tahun 1998 yang menyatakan bahwa dukungan dan koordinasi Pemerintah Daerah merupakan komponen terpenting yang perlu untuk segera ditingkatkan dan ditindaklanjuti di lapangan bagi terciptanya pengelolaan taman nasional secara efektif dan optimal.

Di samping tindak lanjut Pertemuan di Lido, pertemuan regional pengelolaan taman nasional ini juga menjadi penting dengan telah diundangkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU tersebut memberikan otonomi penuh kepada Pemerintah Daerah untuk menangani bidang-bidang pekerjaan tertentu di daerah.

Natural Resource Management Program (NRM Program) merupakan kerjasama tahap ke dua antara Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID dan Pemerintah Indonesia, untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia. Salah satu komponen dalam bantuan tersebut adalah komponen Pengelolaan Kawasan Konservasi yang bertujuan untuk mendukung Departemen Kehutanan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam (PKA) dalam memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kemampuan personelnnya dalam mengelola kawasan pelestarian alam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal PKA bekerjasama dengan Program NRM mengadakan Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Kawasan Timur Indonesia sebagai salah satu wadah untuk berkomunikasi di antara para pengelola taman nasional dengan

instansi terkait lainnya. Diharapkan melalui lokakarya ini akan dihasilkan rekomendasi-rekomendasi dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan taman nasional sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat.

1.2 Tema

Kelembagaan pengelolaan taman nasional.

1.3 Maksud

Pertemuan regional ini dimaksudkan untuk menghimpun masukan-masukan dari berbagai instansi/pihak terkait dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan taman nasional.

1.4 Tujuan

1. Menyamakan visi dan misi pengelolaan taman nasional .
2. Mensosialisasikan fungsi dan peranan taman nasional dalam kaitannya dengan pembangunan daerah dan regional.
3. Mengembangkan dan memperkuat kerjasama kemitraan dalam mendukung kepentingan dan keterpaduan pengelolaan taman nasional di dalam wilayah regional.

1.5 Waktu dan Tempat

Pertemuan regional tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 27 Agustus 1999, di Hotel Sahid Kawanua, Manado, Sulawesi Utara

1.6 Hasil yang Diharapkan

1. Penyamaan visi dan persepsi pengelolaan dan pengembangan taman nasional di tingkat daerah.

2. Adanya komitmen yang didukung oleh semua pihak dalam rangka pengelolaan dan pengembangan taman nasional.
3. Terhimpunnya masukan-masukan dalam rangka persiapan penyusunan ketentuan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999.

1.7 Metodologi

1. Menerima pembinaan dan pengarahan dari Gubernur Kepala Daerah Provinsi, BAPPENAS, Dirjen BANGDA, Dirjen Keuangan dan Dirjen PKA mengenai pengelolaan dan pengembangan taman nasional dikaitkan dengan otonomi daerah.
2. Menerima presentasi para ahli dari lembaga-lembaga nasional dan internasional yang diperlukan seperti proyek pembangunan konservasi terpadu (ICDP), penilaian sumber daya alam (*resource valuation*) dan lain-lain.
3. Presentasi oleh wakil –wakil dari instansi terkait (Dinas Kehutanan, Bapedalda, Taman Nasional, LSM, Universitas, dll).
4. Diskusi dan membahas berbagai topik yang berkaitan dengan kebijaksanaan pengelolaan dan pengembangan taman nasional, serta dukungan pengelolaan taman nasional di tingkat regional.

1.8 Peserta Pertemuan

Peserta pertemuan terdiri dari wakil-wakil dari BAPPENAS, USAID, NRM Program, the World Bank, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, dan instansi/organisasi terkait di Kawasan Timur Indonesia (Irian Jaya, Maluku, Sulawesi) yaitu BAPPEDA Propinsi, BAPEDALDA Propinsi, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan,

1.9 Agenda Acara

Senin, 23 Agustus 1999

No.	Jam	Acara	Moderator/ Fasilitator	Keterangan
1.	19.00 – 20.00	Pembukaan/Sambutan <input type="checkbox"/> Laporan Panitia Penyelenggara <input type="checkbox"/> Kepala Kanwil Dephutbun Prop. Sulut <input type="checkbox"/> Sambutan USAID <input type="checkbox"/> Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam <input type="checkbox"/> Gubernur Tk I Sulut sekaligus membuka lokakarya		
2.	20.00 – 21.30	Makan Malam		

Selasa, 24 Agustus 1999

No.	Jam	Acara	Moderator/ Fasilitator	Keterangan
1	08.30 – 10.00	Presentasi : <input type="checkbox"/> BAPPENAS <input type="checkbox"/> Direktur Jenderal BANGDA <input type="checkbox"/> Dirjen Lembaga Keuangan, Depkeu <input type="checkbox"/> Direktur Jenderal PKA	Kepala Kanwil Dephutbun Prop. Irian Jaya	
2	10.00 – 10.15	Rehat		
3	10.15 – 11.00	Diskusi		
4	11.00 – 12.30	Presentasi <input type="checkbox"/> Ketua Bapeda Sulut <input type="checkbox"/> Ketua Bapedalda Irja <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Kehutanan Sulsel	Direktur Konservasi Kawasan	
5	12.30 – 13.30	Makan Siang		
6	13.30 – 15.00	Presentasi TN <input type="checkbox"/> Ka Balai TN Lore Lindu <input type="checkbox"/> Ka Balai TN Bunaken	Kabid PHKA Kanwil Dephutbun Prop. Sulut	
7	15.00 – 15.15	Rehat		
8	15.15 – 16.45	Presentasi <input type="checkbox"/> CRMP <input type="checkbox"/> FPK	Kepala Balai TN Bogani Nani Wartabone	
9	16.45 – 17.30	Presentasi <input type="checkbox"/> WCS	Kepala Balai TN Bogani Nani Wartabone	

Rabu, 25 Agustus 1999

No	Jam	Acara	Moderator/ Fasilitator	Keterangan
1.	08.30 – 10.30	Presentasi NRM • Resource Valuation	Direktur Kawasan Konservasi	
2	10.30 – 12.30	Presentasi Para Pakar <input type="checkbox"/> BAPPENAS <input type="checkbox"/> Universitas Sam Ratulangi	Kepala Kanwil Dephutbun Prop Maluku	
3	12.30 – 13.30	Makan Siang		
4	13.30 – 15.00	Kemitraan TN <input type="checkbox"/> Mitra TN Kutai <input type="checkbox"/> Mitra Bukit Baka Bukit Raya <input type="checkbox"/> Mitra TN Bunaken	BAPPENAS	
5	15.00 – 15.15	Rehat		
6	15.15 – 17.00	Presentasi ICDP <input type="checkbox"/> Ka Balai TN Kerinci Seblat <input type="checkbox"/> Ditjen BANGDA <input type="checkbox"/> The World Bank	Kepala Bapedalda Prop. Sulut	

Kamis, 26 Agustus 1999

No.	Jam	Acara	Ketua Kelompok	Keterangan
1.	08.30 – 09.30	Bioregional Planning Yayasan WWF-IP	Kanwil Dephutbun Prop Sulsel	
2.	09.30 – 10.00	Pembagian Kelompok		
3.	10.00 – 12.00	Diskusi Kelompok 1. Kelembagaan pengelolaan taman nasional. 2. Peranan PEMDA dalam mendukung pengelolaan taman nasional	Kanwil Dephutbun Prop Sulsel Beppeda Provinsi Sulawesi Tenggara	
4.	12.00 – 13.00	Makan siang		
5.	13.00 – 15.00	Diskusi kelompok		
6.	15.00 – 15.15	Rehat		
7.	15.15 – 16.00	Sidang Pleno		
8.	16.00 – 16.30	Perumusan		
9.	16.30 – 17.00	Penutupan		

Jum'at, 27 Agustus 1999

No.	Jam	Acara	Moderator/ Fasilitator	
1.	07.00 – 15.00	Kunjungan lapangan dan makan siang di TN Bunaken		
2.	Bebas			

2. Hasil Diskusi Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Kawasan Timur Indonesia

Dengan memperhatikan sambutan Gubernur Propinsi Sulawesi Utara, pengarahan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah dan Deputi Ketua Bappenas Bidang Regional dan Daerah, presentasi dan pembahasan pemakalah, dan diskusi kelompok, maka Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Kawasan Timur Indonesia bertempat di Hotel Sahid Kawanua Manado pada tanggal 24-27 Agustus 1999 telah menghasilkan hasil diskusi sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan pemerintah sebagai berikut :

2.1 Kelembagaan Pengelolaan Taman Nasional

Assumsi dasar :

Pengelolaan Taman Nasional berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat. yang didekonsentrasikan melalui Pemerintah Daerah.

- 1.1 Untuk pengelolaan taman nasional yang optimal diperlukan peningkatan kemampuan Kepala Taman Nasional di bidang manajerial, komunikasi, negosiasi, dan koordinasi dari berbagai aspek kegiatan teknis, politis dan hubungan kelembagaan antara kepentingan taman nasional dengan wilayah interaksi di sekitarnya.
- 1.2 Kepala Taman Nasional perlu diberi tugas, tanggung jawab dan kewenangan secara penuh di dalam pengelolaan kawasan taman nasional dan menjalin kerjasama dalam pengelolaan wilayah-wilayah interaksi di sekitarnya.
- 1.3 Tipe kelembagaan organisasi Pengelolaan Taman Nasional disarankan diklasifikasi berdasarkan beberapa indikator :
 - Letak administrasi pemerintahan (lintas batas negara/internasional, propinsi, kabupaten, dan dalam satu kabupaten,).
 - Luas kawasan taman nasional (sampai dengan 100. 000 ha, 100. 000 - 500. 000 ha, dan lebih dari 500. 000 ha)
 - Nilai kepentingan taman nasional dari aspek :

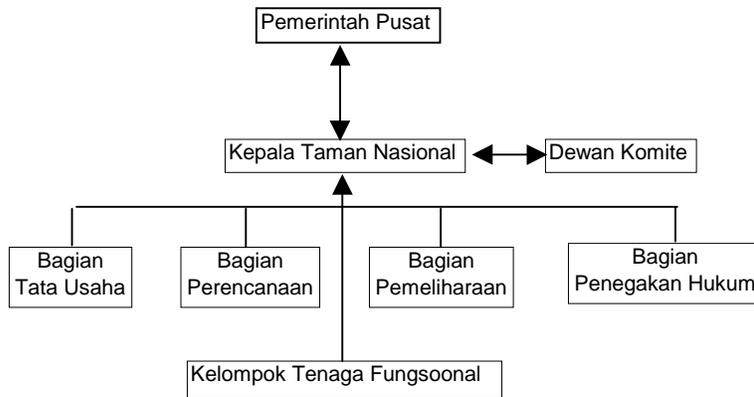
- tingkat nilai konservasi kawasan secara lokal, nasional dan internasional
- potensi biofisik dan ekologi kawasan berdasarkan tingkat kelangkaan spesies, tingkat endemis spesies, tingkat keragaman hayati, tingkat distribusi geografis, tingkat distribusi altitude, tipe hutan/ekosistem, fungsi hidrologis, dan lain-lain
- tingkat sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar (mulai dari tradisional sampai yang telah maju)

1.4 Struktur organisasi taman nasional berdasarkan klasifikasi tipe organisasinya disarankan terdiri dari :

- Struktur organisasi taman nasional diupayakan bersifat transparansi di dalam mekanisme dan hubungan kerja antara tugas, tanggung jawab dan kewenangan serta mencerminkan spesifikasi sesuai kebutuhan di setiap lokasi.
- Adanya hubungan struktural dan fungsional antara taman nasional dengan Pemerintah Pusat.
- Adanya hubungan koordinasi fungsional antara taman nasional dengan Pemerintah Daerah (Propinsi atau Kabupaten/Kota)
- Adanya Dewan/Komite Taman Nasional merupakan lembaga formal beranggotakan unsur-unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, perwakilan/tokoh masyarakat, mitra taman nasional, dan berbagai pihak terkait, yang berada dibawah koordinasi Menteri untuk tingkat internasional/nasional, Gubernur untuk tingkat propinsi, atau Bupati untuk tingkat Kabupaten. Dewan/Komite Taman Nasional mempunyai kepentingan dan tugas untuk membantu pengelola taman nasional dalam hal :
 - Mengarahkan pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan
 - Memfasilitasi berbagai kepentingan dan kebutuhan yang diperlukan dalam pengelolaan taman nasional
 - Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan taman nasional
- Di setiap taman nasional perlu adanya suatu struktur organisasi pengelolaan taman nasional yang baku yang mencakup stuktural Kepala Taman Nasional, Bagian Tata Usaha, Bagian Perencanaan, Bagian Pemeliharaan Fasilitas dan Bagian Penegakan Hukum, serta kelompok tenaga fungsional yang dikembangkan secara spesifik sesuai kebutuhan dan tuntutan beban tugas serta mampu mengakomodir kepentingan fungsi-fungsi dari perlindungan dan pengamanan, pengawetan dan pelestarian, pemanfaatan dan pengusaha. Kelompok tenaga Fungsional tersebut bersifat fleksibel dan dibentuk sesuai kepentingan dan spesifikasi setiap lokasi taman nasional.

Struktur organisasi pengelolaan taman nasional secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

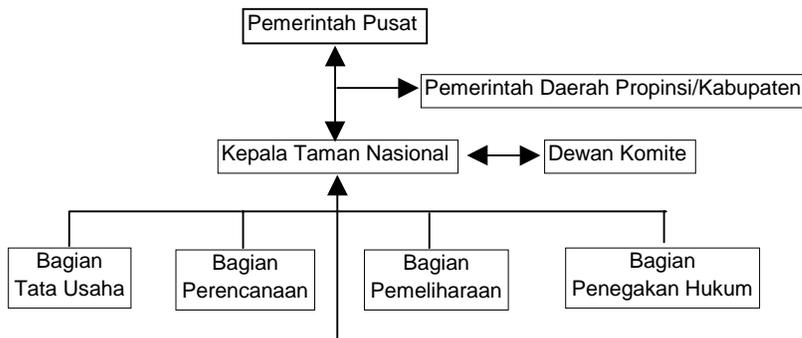
- a. Tipe Organisasi Pengelolaan Taman Nasional tingkat internasional dan nasional (lintas negara/propinsi)



Dewan/komite bersifat internasional atau nasional yang mencakup unsur di tingkat pusat dan daerah (Propinsi dan kabupaten/kota)

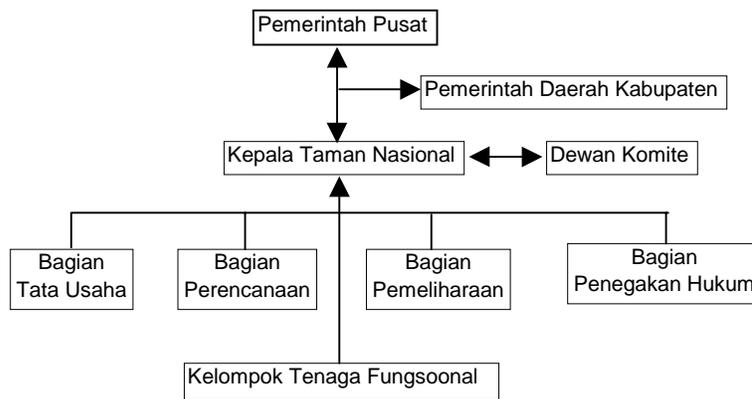
Kelompok tenaga fungsional ditentukan sesuai kepentingan dan spesifikasi setiap lokasi taman nasional dengan memperhatikan indikator pembentukan organisasi pengelolaan taman nasional

- b. Tipe Organisasi Pengelolaan Taman Nasional tingkat propinsi (lintas kabupaten)



Dewan/Komite bersifat regional yang mencakup unsur di tingkat propinsi dan kabupaten/kota Kelompok tenaga fungsional ditentukan sesuai kepentingan dan spesifikasi setiap lokasi taman nasional dengan memperhatikan indikator pembentukan organisasi pengelolaan taman nasional

c. Tipe Organisasi Pengelolaan Taman Nasional tingkat kabupaten (dalam satu kabupaten)



Dewan/Komite bersifat lokal yang mencakup unsur di tingkat kabupaten/kota Kelompok tenaga fungsional ditentukan sesuai kepentingan dan spesifikasi setiap lokasi taman nasional dengan memperhatikan indikator pembentukan organisasi pengelolaan taman nasional

1.5 Berdasarkan tuntutan kebutuhan, beban tugas dan spesifikasi lokasi keberadaan taman nasional, maka struktur organisasi pengelolaan taman nasional secara eselonisasi organisasi pemerintah sebaiknya Kepala Taman Nasional memiliki eselonisasi : Eselon II/a, Eselon II/b, Eselon III/a, dan Eselon III/b.

1.6 Untuk memfasilitasi dan meningkatkan kemampuan pengelolaan taman nasional diperlukan dukungan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penyediaan infastruktur sarana dan prasarana pengelolaan, ketentuan peraturan perundangan secara nasional dan lokal (peraturan daerah) serta ketentuan konvensi internasional.

1.7 Sumber Pendanaan untuk pengelolaan Taman Nasional akan melibatkan berbagai stakeholder (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, LSM, masyarakat dan donor lain). Pusat diharapkan mampu memfasilitasi kepentingan dalam aspek keadilan dalam pendanaan maupun skala prioritas untuk mengarahkan donatur dalam pembiayaan pembangunan dan pengelolaan Taman Nasional. Perlu adanya mekanisme pertanggung jawaban penggunaan/aliran dana yang bersifat transparan.

2.2 Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pengelolaan Taman Nasional

Assumsi dasar

Optimalisasi pengelolaan taman nasional tanpa memperhatikan siapapun nantinya yang akan melaksanakan pengelolaan taman nasional.

1.1 Ada empat program kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam upaya peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan taman nasional yaitu :

- a. Mendukung manajemen penyangga sistem kehidupan.
- b. Mendukung pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem.
- c. Mendukung pemanfaatan lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem, dan
- d. Lain-lain

Dukungan Pemerintah Daerah dalam keempat program tersebut mencakup proses mulai dari, pelaksanaan operasional, pemantauan dan pengawasan, sampai evaluasi.

1.2 Dukungan Pemerintah Daerah untuk setiap tahap dalam pokok kegiatan, baik dalam bentuk kebijaksanaan (SK Gubernur, SK Bupati dan Perda) maupun kegiatan pelaksanaan di lapangan, dibagi menjadi dua tingkatan yaitu tingkatan Propinsi dan tingkatan Kabupaten/Kota. Rincian kegiatan untuk masing-masing program baik di tingkat propinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel terlampir.

1.3 Dalam mendukung manajemen penyangga sistem kehidupan di tingkat perencanaan :

- Untuk propinsi, Pemerintah Daerah selayaknya memprioritaskan taman nasional masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan meninjaunya secara periodik.
- Untuk Kabupaten/kota, Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan peraturan pertanahan yang melindungi kawasan taman nasional atas kepemilikan pribadi, menyusun program peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat terutama yang berada di sekitar

kawasan taman nasional, dan memprioritaskan taman nasional untuk masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

- Pemerintah Daerah baik ditingkat propinsi maupun kabupaten/kota harus mendukung kepentingan pengelolaan taman nasional dan menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip konservasi yang dinamis.

- 1.4 Dalam mendukung manajemen penyangga sistem kehidupan di tingkat pelaksanaan operasional, Pemerintah Daerah secara konsisten melakukan perencanaan program pembangunan baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Sedang untuk kepentingan Pengendalian, Pemerintah Daerah tingkat propinsi perlu memastikan adanya pelaksanaan supervisi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan taman nasional, sedang Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota melakukan fungsi pelaksanaan dan penerapan tata ruang wilayah propinsi dan wilayah kabupaten/kota.
- 1.5 Program kegiatan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem taman nasional yang dilaksanakan Pemerintah Daerah di tingkat propinsi dan kabupaten/kota adalah melaksanakan perlindungan habitat dan populasi yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati dan ekosistem dalam kawasan taman nasional. Di samping itu Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota perlu mengembangkan peningkatan peranserta masyarakat lokal dalam melaksanakan pengawetan keanekaragaman hayati taman nasional.
- 1.6 Di tingkat pelaksanaan operasional, Pemerintah Daerah tingkat propinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pemulihan habitat dan populasi spesies baik di dalam maupun di luar kawasan taman nasional, Selain itu Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dalam rangka pemulihan dan pemanfaatan dari habitat dan populasi spesies.
- 1.7 Program kegiatan pemanfaatan lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem taman nasional, di tingkat perencanaan melakukan penjabaran kriteria pemanfaatan spesies lestari serta menyusun instrumen pengelolaan sumber daya alam lainnya. Untuk itu Pemerintah Daerah tingkat propinsi.

- 1.8 Di tingkat pengawasan, Pemerintah Daerah tingkat propinsi perlu melakukan kontrol pemanfaatan, sedang Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten perlu membantu pengelola taman nasional dalam melakukan pengamanan kawasan dan kontrol/pengawasan atas pelaksanaan pemanfaatan tersebut.
- 1.9 Hal-hal lain yang memerlukan dukungan peranan Pemerintah Daerah bagi pengelolaan taman nasional secara optimal adalah :
- ❑ Sumber daya manusia : Pemerintah Daerah baik di tingkat propinsi dan kabupaten/kota perlu menyiapkan SDM yang memadai serta handal, serta melaksanakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan SDM di instansinya dalam mendukung pengelolaan taman nasional.
 - ❑ Pendanaan: Pemerintah Daerah diharapkan menyediakan dana untuk kegiatan pokok pengelolaan taman nasional, serta menyusun rencana pendapatan dari taman nasional.
 - ❑ Sarana-prasarana infrastruktur: Pemerintah Daerah diharapkan dapat melaksanakan koordinasi dan evaluasi bagi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pengelolaan taman nasional, serta melakukan identifikasi kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur dalam mendukung pengelolaan taman nasional.
 - ❑ Lintas sektoral: diharapkan Kepala Taman Nasional dapat berperan sebagai fasilitator untuk koordinasi teknis di tingkat lintas sektoral dan daerah yang ada di sekitar kawasan taman nasional.

Manado,27 Agustus 1999.

Tim Perumus
Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional
Kawasan Timur Indonesia

Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pengelolaan Taman Nasional

1. Mendukung Manajemen Penyangga Sistem Kehidupan Taman Nasional

Kegiatan	Propinsi	Kabupaten/Kota
1.1 Perencanaan	Regional Plan, Tata Ruang : RTRWP	Peraturan Pertanahan Unsur Kesejahteraan Sosial : RTRWK
	Note : <ul style="list-style-type: none"> • Pemda mendukung pengelolaan TN dan penerapan prinsip konservasi dinamis • Peninjauan Ulang secara periodik RTRWP 	Note : <ul style="list-style-type: none"> • Pemda mendukung pengelolaan TN dan penerapan prinsip konservasi dinamis • Peninjauan Ulang secara periodik RTRWK
1.2 Operasional	Konsistensi pelaksanaan perencanaan dgn mempertimbangkan RTRWP	Konsistensi pelaksanaan perencanaan dengan mempertimbangkan RTRWK
1.3 Pengawasan	Propinsi memastikan pelaksanaan supervisi	Melakukan fungsi kontroling

2. Mendukung Pengawetan Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem Taman Nasional

Kegiatan	Propinsi	Kabupaten/Kota
2.1 Perencanaan	Perlindungan habitat dan populasi yang berkaitan dengan TN	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan habitat dan populasi yang berkaitan dengan TN • Pengembangan peran masyarakat lokal
2.2 Operasional	Pemulihan Habitat dan populasi spesies	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan Habitat dan populasi yang berkaitan dengan TN • Penelitian bidang spesies dan pemanfaatannya
2.3 Pengawasan	Daya dukung habitat dan populasi spesies	Pengawasan dan monitoring spesies eksotik

3. Mendukung Pemanfaatan Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Taman Nasional

Kegiatan	Propinsi	Kabupaten/Kota
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penjabaran kriteria pemanfaatan spesies lestari. • Penyusunan manajemen instrumen SDA 	Input ke propinsi untuk Perencanaan
Operasional	Kajian pemanfaatan untuk kebutuhan domestik.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian kebutuhan pemanfaatan tk. Lokasi • Inventarisasi potensi dan ancaman
Pengawasan	Kontrol pemanfaatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan kawasan • Pengawasan pemanfaatan

4. Lain-Lain

Kegiatan	Propinsi	Kabupaten/Kota
Sumber daya manusia	Menyiapkan SDM yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan SDM Pelaksana yang handal • Peningkatan SD (Pelatih n, dll)
Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dana untuk pengelolaan 1,2,3 • Menyusun rencana pendapatan dari TN 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan untuk pengelolaan 1,2,3
Sarana-prasarana infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi Kebutuhan • Pemenuhan Kebutuhan
Lintas sektoral	Ka TN sebagai Fasilitator Koordinasi teknis lintas sektoral dan daerah	Ka TN sebagai fasilitator koordinasi teknis lintas sektoral dan daerah

Lampiran-lampiran

A. Daftar Peserta

Daftar Nama Peserta

No.	Name	Institutional/ Occupation	Address	Telephone	Fax/e-mail
IRIAN JAYA					
1.	Frans Rumakiek	Kepala Seksi Lingkungan Bappeda	Jl. Soasio Diok II No. 3 Jayapura	0967-533912	0967-532402
2.	Drs. K. Watori	Kabid Pemantauan & Pemulihan Bappedalda	Jl. Megapura Skyline Jayapura	0967-523353	0967-523354
3.	Ir. Tagor S.M Pardede	Kepala Dinas Kehutanan	Jl. Tanjung Ria Base G Jayapura	0967-41522 -41922	0967-41041
4.	Ir. Sudjud	Kepala Kantor Wilayah Dephutbun	Jl. Raya Abepura Po Box 192 Abepura 99351	0967-81494, 81032	0967-81384
5.	Minto Basuki	Kepala Unit TN Teluk Cenderawasih	Jl. Trikora Wosi rendani Po Box 229 Monokwari Irian Jaya	0986-212212	0986-214719
6.	Benny Saroy	Balai TN Wasur	Jl. Raya Mandala Gang Spadem No. 2 Kotak Pos 109 Merauke, Irian Jaya	0971-22495	0971-24595
BALI					
7.	Ketut Sardjana Putra	WWF Wallacea	Jl. Hayam Wuruk 179 Denpasar 80235	0361-247125	
8.	Zulfira Warta	WWF Wallacea	Jl. Hayam Wuruk 179 Denpasar 80235	0361-247125	
JAKARTA					
9.	Herman Haeruman	Deputi Bidang Regional dan Daerah Bappenas	Jl. Taman Suropati Jakarta	334187	3144131
10.	Dedi M.M. Riyadi	Kepala Biro Pembangunan Dati I dan Transmigrasi Bappenas	Jl. Taman Suropati Jakarta	334251	
11.	Wahyuningsih Dorodjatun	Staf Biro Pembangunan Dati I dan Transmigrasi Bappenas	Jl. Taman Suropati Jakarta	334323	
12.	M. Butar Butar	Direktur BPLH Ditjen Bangda Depdagri	Jl. TMP Kalibata No. 20 Jakarta	7942661	

No.	Name	Institutional/ Occupation	Address	Telephone	Fax/e-mail
13.	Suhatmansyah	Kasubdit BKRL, BPLH Ditjen Bangda Depdagri	Jl. TMP Kalibata No. 20 Jakarta	794-26655	79190518
14.	Bambang Russanseno	Departemen Keuangan	Jl. Dr. Wahidin Jakarta	3811379 3451056	
15.	Dr. Sahala L. Gaol	Departemen Keuangan	Jl. Dr. Wahidin Jakarta	3811379 3451056	
16.	Sharon Cromer	USAID	Jl. Medan Merdeka Selatan #5 Jakarta	3442211	
17.	I Ketut Djati	USAID	Jl. Medan Merdeka Selatan #5 Jakarta	3442211	
18.	Juliana Sahulata	USAID	Jl. Medan Merdeka Selatan #5 Jakarta	3442211	
19.	Inge Susanto	USAID	Jl. Medan Merdeka Selatan #5 Jakarta	3442211	
20.	Martha Elfrana	USAID	Jl. Medan Merdeka Selatan #5 Jakarta	3442211	
21.	Ir. Abdul Manan Siregar	Direktur Jenderal PKA Dephutbun	Gd. Manggala Wanabakti Blok VII lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta		
22.	Dr. Sunaryo	Direktur Konservasi Kawasan Ditjen PKA Dephutbun	Gd. Manggala Wanabakti Blok VII lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta		
23.	Ir. Waladi Isnan	Kabag Program dan Anggaran Ditjen PKA	Gd. Manggala Wanabakti Blok VII lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta	572-0229	
24.	Ir. Agoes Driyanto	Kasubdit TN Wil. I Ditjen PKA	Jl. Ir. H. Juanda 15 Bogor	0251-324013	
25.	Ir. Prie Supriadi	Kasubdit TN Wil. II Ditjen PKA	Jl. Ir. H. Juanda 15 Bogor	0251-324013	
26.	Agus Marhadi	Ditjen PKA	Jl. Ir. H. Juanda 15 Bogor	0251-324013	
27.	Drosopolino	Subdit TN Wil. II Ditjen PKA	Jl. Ir. H. Juanda 15 Bogor	0251-324013	
28.	Yunaidi	PKAT-TN Siberut	Gedung PKA Jl. Ir. H. Juanda 15 Bogor	0251-323067	0251-323067
29.	Ahmad Munawir	PKAT-TN Siberut	Gedung PKA Jl. Ir. H. Juanda 15 Bogor	0251-323067	0251-323067

No.	Name	Institutional/ Occupation	Address	Telephone	Fax/e-mail
30.	Nana Suparna	PT. Alas Kusuma	Jl. Balikpapan Raya No. 14 Jakarta	3459421	3611675
31.	S. Hadiprayitno	PT. Kaltim Prima Coal	Wisma GKBI lantai 31 suite 31.10 Jl. Jend. Sudirman, Jakarta	5741060	5741065
32.	Asmeen Khan	The World Bank	JSEB Tower 2, 12 th floor Jl. Jend. Sudirman Jakarta	52993000	52993111
33.	Garren Bird	The World Bank	JSEB Tower 2, 12 th floor Jl. Jend. Sudirman Jakarta	52993000	52993111
34.	Wayla Wisjnu	TNC	Jl. Hang Tuah Raya #. 42 Jakarta	7221310	7245092
35.	Darwina Widjajanti	YPAN	Jl. Hang Tuah Raya #. 42 Jakarta	72794530-40	
36.	Suryo D	CIDES	Gedung ICMI lantai 2 Jl. Kebon Sirih No. 85 Jakarta	3908988	3908990
37.	P	CIDES	Gedung ICMI lantai 2 Jl. Kebon Sirih No. 85 Jakarta	3908988	3908990
KALIMANTAN TIMUR					
38.	Mulyani Martho W	PT. Badak NGL	Po Box 216 Bontang Kalimantan Timur	0548-551433	0548-21605
JAMBI					
39.	Wadojo Siswanto	Kepala Balai TN Kerinci Seblat	Jl. Basuki Rahmat No. 11 Sungai Penuh Jambi	0748-22250	0748-22300
MALUKU					
40.	Baharudin Nur	Bappeda	Jl. Pattimura I AMBON	0911-54613	
41.	Ir. Soewardjo	Kepala Kanwil	Jl. Kebun Cengkeh Ambon	0911-341987	0911-351426
42.	Juhana Sudrajat	Dinas Kehutanan	Jl. Tulukabessy No. 23 Ambon	0911-52402	0911-52402
43.	Sahulata R.Y	Kepala Unit TN Manusela	Jl. Imam Bonjol 27A Kotak Pos 09, Masohi Maluku	0914-22164 -22165	0914-22164
SULAWESI SELATAN					
44.	Drs. A. Aziz HALim	Bappedalda	Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 45 Ujung Pandang	0411-453204	0411-453489
45.	Made Subadia	Kanwil	Jl. A. Mappanyuki No. 79 Po Box 1365 Ujung Pandang	0411-854464	0411-853366
46.	M. Alwy Ruum	Ketua Bappeda	Jl. Urip Sumohardjo No. 269 Ujung Pandang	0411-453486	0411-452816

No.	Name	Institutional/ Occupation	Address	Telephone	Fax/e-mail
47.	Asep Sugiharta	Kepala Unit TN Taka Bonerate	Jl. S. Parman 40, Benteng Selayar Sulawesi Selatan 92812	0414-21565	0414-21565
SULAWESI TENGAH					
48.	Drs. Said Awad	Bappedalda	Jl. STQ jabal Nur Palu	0451-423922	0451-423612
49.	L. Abd. Rahim	Bappedalda	Jl. STQ jabal Nur Palu	0451-423922	0451-423612
50.	Zainal A. Syam	Dinas Kehutanan	Jl. S. Parman No. 9 Palu	0451-421261	
51.	Suhariyanto	Dinas Kehutanan	Jl. S. Parman . 9 Palu	0451-421261	
52.	Gunung W. Sinaga	Kanwil	Jl. Prof. Moh. Yamin 34 Palu	0451-481611 -482716	
53.	Banjar Y. Laban	Kepala Balai TN Lore Lindu	Jl. Yanjung Manimbaya 144 A Palu	0451-23439	0451-23439
54.	Arianto Sangaji	Yayasan Tanah Merdeka	Jl. Tombolututu 94 Palu	0451-24175	
SULAWESI TENGGARA					
55.	Zainal Abidin R	Ketua Bappeda	Jl. Suropati 2 Kendari	0401-21699 0401-21094 0401-330823	
56.	Gunung W. Sinaga	Kanwil	Jl. Tebao Nunggu 7 Kendari	0401-23636	0401-22335
57.	Mega Hariyanto	Kepala Unit TN Rawa Aopa W	Jl. Konggoasa 132 Unaaha, Sulawesi Tenggara	0408-21377	0408-21377
58.	Hariyanto	Kepala Unit TN Wakatobi	Jl. Murhum 47, Bau Bau, Buton Sulawesi Tenggara	0402-21823	
SULAWESI UTARA					
59.	Radmega Gimin	Bappeda	Jl. 17 Agustus Manado 95119	0431-863204	0431-867-461
60.	J. Karrow	Bappeda Minahasa	Jl. Manguni No. 12 Wewelen, Kec. Tondano	0431-322007	0431-322007
61.	Drs. Adolf Paat, MS	Bappedalda	Jl. 17 Agustus 69 Manado 95119	0431-868093 -865559	0431-868093
62.	J. Mangkareng	Bappedalda	Jl. 17 Agustus 69 Manado 95119	0431-868093 -865559	0431-868093
63.	Kuswiyanto	Bappedalda	Jl. 17 Agustus 69 Manado 95119	0431-868093 -865559	0431-868093
64.	Drs. Hanny Mongkaren	Bappedalda	Jl. 17 Agustus 69 Manado 95119	0431-868093 -865559	0431-868093
65.	Bambang Hendry N	Kepala Kanwil	Jl. Pomorow Kotak Pos 1132 Manado 95125	0431-859429	0431-855683
66.	Suparman Rais	Kepala Unit TN Bogani Nani W	Jl. AKD Mongkonai Kotamobagu 95716 Sulawesi Utara	0434-22548	0434-225478

No.	Name	Institutional/ Occupation	Address	Telephone	Fax/e-mail
67.	Asmari	Staf Unit TN Bogan Nani W	Jl. AKD Mongkonai Kotamobagu 95716 Sulawesi Utara	0434-22548	0434-22547
68.	Dominggus	Kepala Balai TN Bunaken	Jl. Raya Molas Manado	0431-859022	0431-859022
69.	Reinhard Paat	Staf Balai TN Bunaken	Jl. Raya Molas Manado	0431-859022	0431-859022
70.	Eddy Lumi	BPN	Jl. 17 Agustus Manado 95117	0431-863095	0431-856011
71.	Arnold Sangidu	Dinas Perkebunan	Komplek Kampus Pertanian Kalasey Manado	0431-821151	
72.	Erny Tomundo	Dinas Perikanan	Komplek Kampus Pertanian Kalasey Manado	0431-821170	
73.	Tirza M. Lumare	Dinas Pertanian	Komplek Kampus Pertanian Kalasey Manado	0431-821150	
74.	Bobby Roring	Dinas Pariwisata Da	Jl. 17 Agustus Manado 95117	0431-864911	0431-864911
75.	Terny Marentek	Parsenibud			
76.	Ottovart	Pertamina EP. Lahendomg	Tomohon		
77.	O. Tambunan	Pertamina EP. Lahendomg	Tomohon		
78.	Mulyono	Pertamina EP. Lahendomg	Tomohon		
79.	Masnul Amin	Pertamina EP. Lahendomg	Tomohon		
80.	Mark Erdmann	LIPI/Peneliti Biologi Laut	P.O. Box 1020 Manado 95010	0811-432649	merdmann@socrates.berk
81.	Bambang Soeroto	Univ. Sam Ratulangi	Jl. Kampus UNSRAT Manado	0431-853186	
82.	Panki Pangemanan	Univ. Sam Ratulangi	Jl. Kampus UNSRAT Manado	0431-859969	
83.	Deny Karwur	Univ. Sam Ratulangi	Jl. Kampus UNSRAT Manado	0431-859969	
84.	Eddy Mantjoro	Univ. Sam Ratulangi	Jl. Kampus UNSRAT Manado	0431-856111	
85.	Vicky Lee	Univ. Sam Ratulangi	Jl. Kampus UNSRAT Manado	0431-863786	
86.	J. Doda	IKIP Manado			
87.	Johnes Tulungen	CRMP	Jl. Wolter Monginsidi No. 5 Kleak Lingkungan I Manado 95115	0431-841671 -841672	0431-841673
88.	Robert Lee	WCS	Po Box 1131 Manado	0431-813643	Wcs@manado.wasantara.net.id
89.	Jon Riley	WCS	Po Box 1131 Manado	0431-813643	Wcs@manado.wasantara.net.id

No.	Name	Institutional/ Occupation	Address	Telephone	Fax/e-mail
90.	Rico Ngangi	FPK	Jl. Santo Yoseph No. 61 Klek Ling. III Manado 95115	0431-861062	0431-864993 fpksulut@manado.w asantara.net.id
91.	Banjamin Brown	Kelola	Jl. Bethesda VI No. 30 Ranotama Lingkungan III Manado	0431-853407	Kelola@manado.wa santara.net.id
92.	Masli Nainggolan	Kelola	Jl. Bethesda VI No. 30 Ranotama Lingkungan III Manado	0431-853407	Kelola@manado.wa santara.net.id
93.	Benyamin Fadhillah	Kelola	Jl. Bethesda VI No. 30 Ranotama Lingkungan III Manado	0431-853407	Kelola@manado.wa santara.net.id
94.	Rahman Dako	Kelola	Jl. Bethesda VI No. 30 Ranotama Lingkungan III Manado	0431-853407	Kelola@manado.wa santara.net.id
95.	Murdjito	Korem 131/ ST	Jl. Dr. Sam Ratulangi Manado	0431-862011	
96.	Komar	BRLT Tondano	Jl. Tololiu Supit Tondano	0431-862164	
97.	Gustav Mawangking	Tropical marine Mollusc Program	Jl. Kampus UNSRAT Manado	0431-863786	
98.	Markus Lasut	Fak, Perikanan UNSRAT	Jl. Kampus UNSRAT Manado	0431-856111	
99.	Veronika Kamurar				
100.	Ferry Marendek				
101.	John Warrow				
102.	Tatang Wiranto				
NRM/EPIQ					
103.	Adi Wiyana	Deputy COP	Jakarta	720-9596	awiyana@nrm.or.id
104.	Reed Merrill	PAM Advisor	Jakarta	720-9596	reedm@nrm.or.id
105.	Chris LaFranchi	STTA	Jakarta	720-9596	
106.	Danny Rothberg	STTA	Jakarta	720-9596	
107.	Retno Suratri	National Park Management Specialist	Jakarta	720-9596	retnos@nrm.or.id
108.	Yeremiah R. Tjamin	STTA	Jakarta	720-9596	
109.	Virza Sasmitawidjaja	Nat. Res. & Env. Specialist	Jakarta	720-9596	virza@nrm.or.id
110.	Sugeng Rahardjo	PLS	Kalimantan Timur	0541-270702	sugengr@smd.mega.net.id
111.	Evie Adipati	PLS	Irian Jaya	0967-584670	nrm_irja@jayapura.wasantara.net.id
112.	Zulhan Harahap	PLS	Sulawesi Utara	0431-854551	Nrm2-mdo@manado.wasantara.net.id
113.	Mirza Indra	PLS	Sulawesi Tengah	0451-747793	mirza1@palu.wasantara.net.id

B. Sambutan-sambutan

Daftar Isi

1. Sambutan Panitia Penyelenggara Pertemuan Regional Pengelolaan TN Kawasan Timur Indonesia	B1 - 1
2. Sambutan Gubernur Sulawesi Utara	B2 - 3
3. Sambutan Dir.Jen. PKA	B3 - 7
4. Sambutan Direktur USAID	B4 - 11

Sambutan Panitia Penyelenggara Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Kawasan Timur Indonesia di Manado Tanggal 23 – 27 Agustus 1999

Oleh :
Dr. Ir. Sunaryo, MSc.

Yth. 1. Bapak Gubernur KDH Tk. I Sulawesi Utara
2. Bapak Direktur Jenderal PKA
3. Bapak Direktur Jenderal Bangda, Depdagri
4. Bapak Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Depkeu
5. Bapak Deputy Bidang regional dan Daerah, BAPPENAS
6. Sdr. Direktur USAID Indonesia, serta
Hadirin sekalian yang saya hormati

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Selamat pagi dan Salam Sejahtera

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempertemukankita dalam rangka mengikuti acara pertemuan regional pengelolaan taman nasional kawasan timur indonesia. Tema dari pertemuan ini adalah : “Kelembagaan Pengelolaan Taman Nasional.”

Bapak-Bapak serta hadirin yang saya hormati,

Perkenankan kami melaporkan bahwa pertemuan regional ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut lokakarya Kepala Balai/Unit Taman Nasional yang diadakan di Lido, Bogor pada bulan Oktober 1998. Pada lokakarya tersebut, salah satu rekomendasinya adalah perlunya pertemuan koordiansi regional Kepala Balai/Unit Taman Nasional di 5 (lima) wilayah regional, yaitu untuk:

- Wilayah Sumatra dilaksanakan di TN Kerinci Seblat
- Wilayah Kalimantan dilaksanakan di TN Kutai
- Wilayah Jawa dilaksanakan di TN Bromo Tengger Semeru
- Wilayah Bali, NTB dan NTT dilaksanakan di TN Komodo
- Wilayah Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, dilaksanakan di TN Bunaken

Adapun tujuan dilaksanakannya pertemuan regional ini untuk :

1. Menyamakan visi dan persepsi pengelolaan taman nasional
2. Mengoptimalkan fungsi dan peranan taman nasional dalam kaitannya dengan pembangunan daerah dan regional
3. Mengembangkan dan memperkuat kerjasama kemitraan dalam mendukung kepentingan keterpaduan pengelolaan taman nasional dengan wilayah sekitarnya.

Pertemuan regional ini akan diikuti oleh sekitar 62 perwakilan yang terdiri dari Ditjen Bangda, Ditjen PKA, Ditjen Lembaga Keuangan, BAPPENAS, Bappdea Tk. I, dan Kepala Taman Nasional Wilayah Indonesia Bagian Timur, serta LSM dan kalangan perguruan tinggi.

Bapak Bapak serta hadirin sekalian

Pertemuan ini terselenggara atas kerjasama Pemerintah Indonesia dengan USAID melalui Proyek Natural Resources Management Program untuk mendukung pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia. Salah satu komponen dalam bantuan tersebut adalah komponen pengelolaan kawasan konservasi yang bertujuan untuk mendukung Departemen Kehutanan dan Perkebunan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam dalam memperkuat kelembagaan serta meningkatkan personalnya dalam mengelola kawasan pelestarian alam.

Diharapkan pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi rekomendasi dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan taman nasional.

Demikian laporan kami, atas kehadiran dan perhatian Bapak-Bapak serta Hadirin sekalian dalam pertemuan regional pengelolaan taman nasional kawasan timur Indonesia ini, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaiku Wr. Wb

DIREKTUR KONSERVASI KAWASAN

Selaku

KETUA PANITIA PELAKSANA

DR. Ir. SUNARYO, MSc

**Sambutan Gubernur Sulawesi Utara
pada Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional
Kawasan Timur Indonesia, 23 Agustus 1999
di Manado**

YTH :

- Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri
- Sdr. Deputi Kepala Bappenas Bidang Regional dan Daerah
- Sdr. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan
- Sdr. Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan dan Perkebunan
- Sdr. Direktur Misi USAID Indonesia
- Para peserta pertemuan regional se kawasan timur Indonesia
- Para hadirin dan undangan yang saya hormati

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Mengawali sambutan ini maka sebagai warga negara yang agamais saya mengajak saudara-saudara untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-NYA sajalah maka kita diperkenankan melaksanakan acara **Pembukaan Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional se-kawasan Timur Indonesia pada hari ini tanggal 23 agustus 1999.**

Selanjutnya sebagai tuan rumah, maka saya ingin mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara di **Bumi Nyiur Melambai** dengan harapan kiranya pertemuan ini nantinya akan mampu melahirkan konsep-konsep yang inovatif khususnya dalam rangka pengelolaan taman nasional di Indonesia

Hadirin yang saya hormati,

Kita baru saja melewati beberapa agenda nasional penting, dan monumental seperti pemilu dan penetapan anggota DPR/MPR, demikian juga baru selesai memperingati hari yang sangat bersejarah yaitu peringatan 54 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1999.

Selanjutnya kita nanti akan menghadapi hal lain yang tidak kalah penting yaitu sidang umum MPR yang dalam rangka menentukan arah kebijaksanaan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Kita semua berharap agar sidang umum MPR nantinya akan menghasilkan sesuatu yang nyata dan konkrit yang dapat mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini.

Hadirin yang saya hormati,

Kawasan Timur Indonesia dikenal sebagai kawasan yang sangat kaya sumberdaya alamnya baik sumberdaya alam di darat, di perairan maupun di udara. Kekayaan ini pun semakin ditunjang dengan tingginya keanekaragaman hayati (*biodiversity*) yang menjadi warisan dunia. Seperti kita ketahui bersama bahwa di Kawasan Timur Indonesia saja ada 9 taman nasional yang tersebar hampir merata diseluruh propinsi Kawasan Timur Indonesia.

Sesuai UU no. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dijelaskan bahwa, taman nasional ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam yang merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun di perairan. Selanjutnya berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, sert apemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa keberhasilan pengelolaan keberhasilan pengelolaan Taman Nasional berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi yaitu :

1. Sasaran bagi perlindungan sistem penyangga kehidupan yaitu, menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia
2. Sasaran bagi pengawetan sumber plasma nutfah yaitu, menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistem sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhankebutuhan manusia yang menggunakan sumberdaya alam hayati bagikesejahteraan.
3. Sasaran bagi pemanfaatan secara lestari yaitu ,mengendalikan cara-cara pemnfaatan sumberdaya alam hayati sehingga terjjamin kelestariannya.

Hadirin yang saya hormati,

Pada kenyataannya kita tahu bersama, bahwa pengelolaan taman nasional belum dapat dijalankan secara efisien dan efektif, apalagi untuk mewujudkan hasil yang optimak, masih terdapat permasalahan-permasalahan di dalam kawasan tersebut yang sampai sekarang pun belum dapat dituntaskan. Permasalahan-permasalahan tersebut disamping banyaknya tumpang

tindih kepentingan dan kewenangan dari berbagai pihak, juga sangat erat hubungannya dengan masyarakat yang didalam kawasan ataupun disekitar kawasan.

Masih terdapatnya praktek-praktek pemanfaatan sumberdaya alam yang merusak seperti penambangan tanpa ijin, perambahan hutan, (khususnya di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, penggunaan racun dan lain-lain.

Kita tidak dapat menutup mata, keadaan ini dilandasi oleh kenyataan lain bahwa walaupun Kawasan Timur Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah tetapi masih diperhadapkan pada persoalan yang sangat ironis yaitu kondidi perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya miskin dan rendah.

Hadirin yang terhormat,

Kurang berhasilnya pengelolaan tersebut akhirnya disadari terjadi akibat pendekatan pembangunan dan pengelolaan yang terlalu sentralistik dan kurang memperhatikan aspirasi daerah dan masyarakat yang terlibat didalam oengelolaan. Oleh karena itu pertemuan regional pengelolaan taman nasional ini menjadi momentum yang sangat strategis sebagai wahana menghimpun masukan-masukan dari berbagai pihak yang terlibat dalam rangka persiapan penyusunan ketentuan peraturan pemerintah di bidang pengelolaan taman nasional sebagai tindak lanjut UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999.

Hadirin Sekalian,

Perlu kita ingat bersama bahwa pada masa yang akan datang peran daerah sebagai otonom akan semakin besar dituntut. Dan perlu kita ingat pula, pengalaman telah menunjukkan bahwa tanpa dukungan masyarakat setempat, perencanaan yang telah terancang dengan sangat baik belum tentu akan berhasil baik.

Untuk itulah ingin saya garis bawahi bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama kita bersama. Pertanyaa-pertanyaan yang harus dituntaska adalah bagaimana memberdayakan masyarakat serta menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas melalui pengelolaan taman nasional, agara semakin menuju pada proses perubahan ke arah kemajuan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan yang indah ini telah hadir pula saudara-saudara dari lembaga sawadaya masyarakat se kawasan timur Indonesia, selain dari instansi pemerintah yang terkait dalam pengelolaan taman nasional. Oleh karenanya diharapkan agar semua pihak dapat duduk bersama

saling bertukar pendapat dan pengalaman untuk menghasilkan suatu rekomendasi yang benar-benar mewakili kepentingan daerah khususnya pada daerah-daerah di kawasan timur Indonesia, yang selanjutnya dapat diuruskan menjadi masukan pada perumusan pengelolaan taman nasional selanjutnya.

Hadirin yang terhormat,

Pada kesempatan ini pula . saya selaku Gubernur Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak Usaid melalui program NRM (Natural Resources Management) yang telah memfasilitasi serangkaian acara pertemuan regional ini dan mengharapkan sekiranya kerjasama ini akan semakin ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang.

Mengakhiri sambutan saya, maka dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih **Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional se Kawasan Timur Indonesia yang akan berlangsung dari tanggal 23 samapai dengan 27 Agustus 1999** secara resmi saya buka.

Dengan harapan, kiranya pertemuan ini akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi bangsa dan negara kita yang sama-sama kita cintai, terutama untuk pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Terima kasih, Pakatuan wo Pakalawiren !

**Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara**

**ttd
E.E. Mangindaan**

**Sambutan Direktur Jenderal PKA
pada Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional
Kawasan Timur Indonesia, Tanggal 23 Agustus 1999
di Manado**

- Yth.**
1. Bapak Gubernur KDH Tk. I Sulawesi Utara
 2. Bapak Direktur Jenderal Bangda, Depdagri
 4. Bapak Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Depkeu
 5. Bapak Deputy Bidang Regional dan Daerah, BAPPENAS
 6. Sdr. Deputy USAID Indonesia, serta
- Hadirin sekalian yang saya hormati

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Selamat pagi dan Salam Sejahtera

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia yang telah diberikan kepada kita sehingga pada hari ini dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti acara pertemuan regional pengelolaan taman nasional kawasan timur indonesia.

Hadirin yang saya hormati,

Pertemuan regional pengelolaan taman nasional kawasan timur indonesia ini dilaksanakan sebagai salah satu tindak lanjut lokakarya Kepala Balai/Unit Taman Nasional yang diadakan di Lido, Bogor pada bulan Oktober 1998.

Maksud dari dilaksanakannya pertemuan regional pengelolaan taman nasional Kawasan timur Indonesia adalah untuk menghimpun masukan-masukan dari berbagai instansi/pihak terkait dalam rangka evaluasi serta peran stake holder dalam pengelolaan taman nasional.

Hadirin yang berbahagia,

Terbitnya Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk menangani sebagian besar bidang pekerjaan di daerah. Dengan adanya otonomi, sudah seharusnya diadakan penagturan kembali hal-hal yang berkaitan dengan peneglolaan taman nasional, sehingga tujuan ditetapkannya suatu areal menjadi taman nasional dapat dicapai.

Hadirin yang terhormat,

Salah satu hasil yang diharapkan dari lokakarya ini adalah diperolehnya rekomendasi-rekomendasi atau masukan-masukan dari berbagai pihak di tingkat Pemerintah Daerah dalam rangka penyempurnaan pengelolaan taman nasinal, sekaligus sebagai masukan untuk menyusun Peraturan Pemerintah dibidang konservasi sumberdaya alam sebagai salah satu tindak lanjut dari Undang Undang No. 22 Tahun 1999.

Hasil lain yang diharapkan dari pertemuan ini adalah penyamaan visi dan persepsi dari semua pihak di daerah tentang pentingnya keberadaan taman nasional dalam peranannya untuk menunjang pembangunan nasional dan regional. Kesamaan persepsi ini kami anggap penting sebagai acuan dasar dalam rangka menyusun program-program pembangunan dan pengembangan yang akan dilaksanakan di taman nasional dan wilayah sekitarnya. Kami percaya bahwa untuk mengelola suatu taman nasional tanpa dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat di sekitarnya tidak akan memberikan hasil yang optimal.

Dukungan-dukungan terhadap pengelolaan dan pengembangan taman nasional dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk serta dalam berbagai bidang, baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauannya.

Harapan kami, semoga lokakarya ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan dan pengembangan taman nasional.

Hadirin yang berbahagia,

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelancaran pelaksanaan lokakarya ini. Tidak lupa kepada NRM Program, kami juga menghaturkan terima kasih yang tulus atas bantuan, baik dalam bentuk dana maupun terselenggaranya lokakarya ini.

Hadirin yang saya hormati,

Sebelum kami akhiri sambutan ini, kami mohon kepada Saudara Gubernur KDH Tk. I Sulawesi Utara untuk dapat juga memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pertemuan ini. Demikian sambutan saya dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

Ir. ABDUL MANAN SIREGAR

Eastern Indonesia Regional National Park Conference

USAID Opening Remarks

Oleh

Sharon Cromer¹

To the Governor of North Sulawesi;

The Director General of Nature Protection and Conservation;

The Head of North Sulawesi's Kanwil Kehutanan;

And distinguished workshop participants,

It is an honor to have the opportunity to meet with you to discuss the role of National Parks in regional development for eastern Indonesia. Last October, I had the opportunity to participate in the National Park Managers Workshop held in Lido, West Java, and I am happy to see so many familiar faces from that workshop here today. More important, I am pleased to see that the results of that workshop have evolved into this. At Lido, Indonesia's National Park managers had the opportunity to develop new skills and share experiences necessary for more participatory approaches to National Park management. A common theme from the Lido workshop was the importance of forging effective coordination and partnerships. This workshop evolves from this, bringing together so many other government and non-government stakeholders that must work together to achieve more participatory National Park management.

Indonesia is one of the world's richest countries in terms of biodiversity, and the National Park system is the cornerstone to Indonesia's commitment to conservation of this important biodiversity. Spanning the archipelago, Indonesia's National Parks comprise almost 70% of the country's protected areas system. This includes more than 10 million hectares of forest and almost 4 million hectares of marine ecosystems.

¹ Deputy Director, USAID

While we often hear of the international and national values of Indonesia's National Parks, probably the most important values are those that are captured at the regional level. The conservation of National Parks does not conflict with regional development, but compliments it. A case in point is Bunaken National Park. A recent resource valuation study has demonstrated that effective conservation management of Bunaken National Park contributes more than \$8 million per year to the local economy. This contribution comes from a healthy balance of a growing tourism industry with local fishing and mariculture activities. Effective conservation management of Bunaken can ensure that these important economic development endeavors remain sustainable and compatible.

This workshop provides us with an opportunity to determine new strategies for the effective conservation management of Bunaken and all other National Parks in Indonesia during this historical era of change in Indonesia. Recently past legislation on local government administration and central-local fiscal balance provide much greater autonomy at the local level. And increased involvement in governance – especially from local community groups and NGOs – is creating the opportunity to achieve truly participatory and decentralized governance in Indonesia. Commitment to this change is clearly reflected in the diversity of workshop participants here today. All of us, bringing a diversity of visions and resources to this workshop, can contribute to the development of a more effective National Park system managed by appropriate stakeholders at the local level.

This workshop is the first of a series of five workshops that will provide inputs toward regulations and implementation guidelines for more decentralized National Parks management. Inputs addressing the institutional structure of National Parks will address new legislation on local government administration, while inputs for park financing will address legislation on central-local fiscal balance. Such work has serious, long-term implications for integrating the conservation of Indonesia's National Parks with sustainable regional development. Thus, it is essential that we are able to work together, share our technical expertise, analyze our successful lessons learned from past experience, and, from this, develop effective strategies for conservation management of Indonesia's National Parks.

On behalf of the United States Agency for International Development, I look forward to working with all of you to develop effective institutional and financing structures necessary to ensure a healthy balance between National Parks conservation and sustainable regional development.

Thank you.

C. Pengarahan

Daftar Isi

1. Kebijakan Pembangunan Taman Nasional dalam Rangka Otonomi Daerah *oleh Prof. Dr. Herman Haeruman Js, Deputi Ketua Bappenas Bidang Regional & Daerah, Bappenas* C1 - 1
2. Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia *oleh Ir. Abdul Manan Siregar, Dir.Jen. PKA* C2 - 9
3. Peranan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Kawasan Taman Nasional (Tinjauan dari Aspek U.U. No. 22, 99) *oleh Rapiuddin Hamarung, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah* C3 - 15
4. Penerapan U.U. No. 25 Tahun 1999 Dikaitkan dengan Pendanaan Dalam Pengembangan & Pengelolaan Taman Nasional *oleh Dr. Sahala Lumban Gaol, Direktur Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan DEPKEU*..... C4 - 21

Kebijaksanaan Pembangunan Taman Nasional dalam Rangka Otonomi Daerah¹

Oleh :

Prof. Dr. Herman Haeruman Js²

Pendahuluan

1. Taman Nasional dalam konteks yang kita kenali selama ini merupakan bagian dari kawasan lindung dengan fungsi utama memberikan perlindungan kepada fungsi lingkungan hidup dan ekosistem baik yang berada dalam kawasan maupun di sekitarnya yang mendapat manfaat keberadaan kawasan lindung tersebut.
2. Ada 3 Peraturan Perundangan yang berbentuk undang-undang yang sudah menjadi suatu arahan bagi keberadaan dan kepentingan kawasan tersebut bagi masyarakat. Undang-Undang tersebut adalah (1) Undang-undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, (2) Undang-Undang Tentang Pelestarian Alam, dan (3) Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Ketiga peraturan Perundangan tersebut menyatakan bahwa kawasan taman nasional sebagai kawasan yang strategis dari segi pelestarian fungsi ekologis bagi perlindungan berbagai sektor dan daerah, di masa kini dan jauh kedepan sebagai warisan nasional yang amat berharga. Keberadaan Taman Nasional tersebut, juga amat penting dalam pergaulan internasional sehingga mendapat banyak perhatian dunia yang menjadikannya sebagai kawasan warisan dunia³
4. Dari ketiga peraturan perundangan tersebut, Undang-Undang Tentang Penataan Ruang memberikan wawasan otonomi daerah dalam pengaturan fungsi ruang melalui Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 Tentang RTRWN. Dalam hal ini Taman Nasional yang

¹ Penjelasan disampaikan pada Pertemuan Regional Peneglolaan Taman Nasional Kawasan Timur Indonesia, diselenggarakan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Manado 24 – 27 Agustus 1999.

² Deputi Bidang Regional dan Daerah, Bappenas

³ Program Man and Biosphere, yang disponsori UNESCO, mencatat banyak Taman Nasional yang menjadi Biosphere Reserves, antara lain Leuser, Kerinci Seblat, Siberut, Ujung Kulon, Dumoga Bone, Lore Lindu dan Lorentz. Masyarakat Ekonomi Eropa menjadikan Taman Nasional Leuser sebagai kawasan kerjasam alingkungan antara Indonesia dengan MEE.

menjadi bagian penting dari Kawasan Lindung harus dipelihara dan ditingkatkan mutu fungsinya oleh daerah dan pusat bersama-sama, meskipun penetapannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

5. Sebelum kita sempat menjabarkan ketiga peraturan perundangan tersebut muncul Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang mengarahkan otonomi daerah. Pada waktu ini kedua undang undang ini menjadi acuan dahsyat dalam otonomi daerah, dan seringkali dilupakan bahwa undang undang lain yang juga sama kekuatannya dalam mengatur tanggung jawab dan kewenangan pemerintah.
6. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan gagasan sebagai masukan kebijaksanaan dalam pembangunan Taman Nasional yang dapat dijadikan masukan dalam penyusunan peraturan sebagai gambaran dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No..25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan adanya undang undang otonomi daerah tersebut, daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar dari hasil pemanfaatannya dibandingkan sebelum undang undang otonomi ini ada.
7. Otonomi daerah memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada daerah untuk melestarikan Taman Nasional, dan tanggungjawab ini disertai kewenangan untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam ini sehingga kelestariannya berkelanjutan bagi kepentingan generasi yang akan datang. Untuk itu, hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian Taman Nasional perlu dipersiapkan peraturannya dalam hubungannya dengan otonomi daerah agar kawasan-kawasan tersebut dapat tetap dipelihara kekayaan alamnya untuk kepentingan daerah, nasional maupun dunia.
8. Dari segi pelayanan pemerintah, maka otonomi berarti memberikan tanggungjawab kepada daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tanggungjawab itu didukung oleh sumber dana dan sumber daya manusia serta kelembagaannya yang lebih baik yang memberinya wewenang untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut serta bertanggungjawab.

9. Patut kita sadari bahwa kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus kawasan lindung dan Taman Nasional akan memberi beban yang besar kepada daerah dalam menyeimbangkan antara kepentingan masa kini dengan kepentingan lebih besar di masa datang.

Taman Nasional Sebagai Kawasan Lindung

10. Dari segi ketataruangan, kawasan dibagi dalam dua kategori besar yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung. Hal ini dapat dilihat dalam RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) yang aspek legalitasnya telah cukup mendetail dimulai dari UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1997 tentang RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional).
11. Penentuan kawasan-kawasan berfungsi lindung didasarkan pada prinsip melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu faktor-faktor fisik seperti sifat-sifat tanah, kemiringan, ketinggian permukaan bumi, penutupan lahan, kondisi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, teknologi yang tersedia, nilai sejarah dan budaya bangsa digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan kawasan berfungsi lindung. Kawasan-kawasan yang berfungsi lindung diupayakan agar dapat membentuk suatu kesatuan pada setiap pulau.
12. Di dalam pola pengelolaan kawasan lindung, Taman Nasional termasuk dalam kawasan Pelestarian Alam. Perlindungan terhadap kawasan pelestarian alam yang terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dilakukan untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.
13. Kriteria Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Hutan Wisata adalah kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari. Untuk itu Taman Nasional yang merupakan salah satu kawasan konservasi yang memiliki multi fungsi baik sebagai sumber plasma nutfah dan daerah wisata serta budidaya terbatas perlu dikelola secara terpadu dengan sistem zonasi agar penerapan fungsi-fungsi tersebut mempunyai daerah pengelolaan yang jelas.

Dengan demikian Taman Nasional yang mempunyai ekosistem asli dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, dan pariwisata.

14. Arahan pengelolaan kawasan lindung disusun dalam RTRWP dan RTRWK. Penetapan kawasan lindung dilakukan secara satu kesatuan dengan penetapan rencana tata ruang wilayah Dati I dan Dati II. Pemerintah Dati I dan Dati II mengumumkan kawasan-kawasan lindung sebagaimana dimaksud kepada masyarakat. Selain itu pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk mengupayakan kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya dalam pengelolaan kawasan lindung.

Pengelolaan Taman Nasional dalam Rangka Otonomi Daerah

15. Otonomi daerah memberi kesempatan yang sangat besar kepada pemerintah dan masyarakat daerah untuk mengatur dan melayani pemenuhan kebutuhan mereka dalam rangka hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Berdasarkan undang undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 7 ayat 1 mengenai Kewenangan Daerah, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.
16. Pada ayat 2 kewenagn bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasioanl dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, **pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi**, dan standarisai nasional. Sedangkan di dalam pasal 10 daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan.
17. Dari kedua pasal tersebut dengan memperhatikan bahwa Taman Nasional yang digolongkan ke dalam daerah konservasi, maka kewenangan daerah menjadi terbatas di dalam pengelolaannya. Di dalam konteks pengembangan wilayah dan masyarakat di sekitar Taman Nasional yang merupakan kewenangan daerah perlu dicari suatu model yang terpadu antara konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam.

18. Sampai dengan saat ini dari 366 wilayah konservasi yang telah ditetapkan 38 di antaranya adalah Taman Nasional yang meliputi luas total \pm 15 juta hektar.
19. Model-model pengelolaan taman nasional yang sedang dikembangkan saat ini juga mendapat bantuan dari donor yang sangat peduli terhadap program konservasi sumber daya alam di Indonesia. Di antaranya Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang mempunyai nilai strategis sebagai penjaga ekosistem dunia dan secara internasional diakui sebagai wilayah konservasi yang penting di Asia Tenggara, mempunyai luas sekitar 1,3 juta hektar yang tersebar di 4 propinsi (Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Bengkulu). Strategi pendekatannya adalah dengan pendekatan *Intergrated Conservation and Development Project (ICDP)/ Pembangunan Wilayah dan Konservasi terpadu* dan mendapat bantuan dari *Loan Bank Dunia (Loan No. 4008-IND)*. Demikian pula strategi pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu di Propinsi Sulawesi Tengah dengan pendekatan ICDP yang memperoleh bantuan dari ADB.
20. Taman Nasional Siberut di Pulau Siberut dan Taman Wisata Alam Ruteng di Pulau Flores merupakan dua kawasan konservasi yang mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia dan UNESCO (*Loan ADB No. 1187-INO*), yakni sebagai wahana pelestarian ekosistem hutan tropis dan keanekaragaman hayati didalamnya. Pendekatan yang dipakai untuk menangani kedua kawasan konservasi tersebut adalah *IPAS (Integrated Protected Areas System)*, yakni sistem perlindungan kawasan konservasi secara terpadu guna memperbaiki lingkungan hidup demi pembangunan berkelanjutan yang lebih baik.
21. Taman Nasional Berbak di Propinsi Jambi merupakan lahan basah yang memiliki kekhasan ekosistem, diantaranya yang cukup menarik adalah sebagai tempat singgah/migrasi burung endemik dari Benua Australia menuju benua Amerika. Disamping itu pula banyak jenis flora maupun fauna yang endemik. Karena subur dan luasnya (162.700 ha) lahan basah di daerah Taman Nasional Berbak yang dapat menarik masyarakat sekitar (di daerah penyangga) untuk menanam tanaman dan membudidayakan berbagai satwa di dalam kawasan yang dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem asli TN Berbak. Pembangunan daerah penyangga diharapkan mampu mengalihkan perhatian masyarakat terhadap sumber daya di dalam kawasan Taman Nasional. Bantuan *Loan Bank Dunia (Loan No. 3755)* diharapkan dapat menghasilkan *Manajemen Plan* dari Taman Nasional Berbak. Model-model pengelolaan lainnya adalah *LIL (Learning for Innovation Loan)* untuk Konservasi Sumber daya Alam Maluku (MACONAR) dan model penanganan kawasan penyangga bantuan MEE di Taman Nasional Lauser.

22. Dengan adanya model-model tersebut diatas, diharapkan dapat dijadikan acuan dan arahan dalam mengembangkan model dasar bagi pengelolaan Taman Nasional lainnya di Indonesia. Penekanan dari aktivitas perencanaan berbagai kegiatan diatas adalah pada daerah penyangga. Dengan harapan agar mampu memberi alternatif usaha untuk mengalihkan keterikatan dan ketertarikan masyarakat terhadap kawasan konservasi. Dalam hal ini pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996.
23. Di dalam model-model yang dikembangkan, alternatif kegiatan usaha diarahkan untuk pemeliharaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dengan titik berat pada penyediaan alternatif tanaman pangan, tanaman bahan sandang, dan tanaman obat-obatan, yang diarahkan pada jenis unggulan daerah yang memiliki potensi pasar, mudah dibudidayakan, resisten/tahan untuk jangka waktu lama (terhadap serangan hama/penyakit dan goncangan iklim/alam), dan cukup dengan teknologi sederhana dalam pengolahannya. Alternatif kegiatan usaha, terutama untuk masyarakat di seputar kawasan Taman Nasional, agar kepentingan jangka pendeknya tercapai tanpa mengurangi kepentingan jangka panjang, pelestarian ekosistem Taman Nasional.
24. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan data inventarisasi sumber daya alam dan potensi sosial budaya masyarakat di sekitar Taman Nasional. Tata batas daerah penyangga dan pengelolaannya memerlukan koordinasi yang bersifat lintas sektoral dan kerjasama dengan semua pihak yang terlibat di dalamnya seperti masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, asosiasi-asosiasi lingkungan hidup dan swasta.
25. Dalam pembahasan otonomi daerah dengan para pelaku pembangunan di daerah, masalah pemanfaatan Taman Nasional akan selalu menjadi topik yang menarik. Aparat Pemda tentu akan bertanya berapa manfaat Taman Nasional yang akan diperoleh kalau Pemda harus mengelola Taman Nasional tersebut?
26. Contoh: Bunaken di Sulawesi Utara ini. Masih sering kita dengar cerita bahwa Pemda tidak mendapat apa-apa dari Taman Nasional Bunaken, uang masuknya saja kecil dan banyak tidak bolehnya ketimbang bolehnya, tidak boleh memanen karang dan ikannya, dan tidak boleh membuat hotel atau warung di atas lautnya. Barangkali pertanyaannya harus dibalik; apakah akan ada hotel-hotel berdiri di Manado ini kalau tidak ada Taman Nasional Bunaken? Apakah akan banyak turis belanja di kota Manado ini kalau tidak ada Taman Nasional

Bunaken? Hasil pendapatan Pemda dari hotel-hotel itu dari uang belanja turis yang datang ke Manado pasti lebih besar daripada karcis masuk ke Taman Nasional Bunaken.

27. Hal ini bukanlah kesalahan melainkan kelengkapan pemerintah daerah untuk mengurus tujuan jangka panjang dan upaya pelestarian ekosistem yang belum tersedia sehingga kemampuan Pemda untuk mengurus Taman Nasional belum terlihat nyata pada waktu ini. Apabila daerah kabupaten belum mampu, maka UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintah yang mampu (propinsi atau pusat) yang harus mengurusnya dan kewenangan itu mengikutinya. Demikian juga apabila pemda kabupaten dan propinsi tidak mampu, maka pemerintah pusat yang mengurusnya lengkap dengan wewenangnya pula.

Benturan Kepentingan dan Perselisihan Antar Daerah

28. Keutuhan Taman Nasional dalam kurun waktu terakhir dipertanyakan kualitas dan kuantitasnya. Eksploitasi oleh masyarakat, usaha ekonomi produktif (HPH, perkebunan, pertambangan) dan usaha pertanian ekstensif di hutan-hutan yang ada diperkirakan telah merambah ke dalam Taman Nasional yang telah ditetapkan. Konflik kepentingan antar sektor dan antar sektor dengan daerah perlu dicari jalan keluarnya agar kepentingan yang lebih besar tetap dapat dipertahankan dan pelaksanaan pembangunan dapat lebih efisien.
29. Berdasarkan RTRWN apabila dalam penetapan kawasan lindung terjadi perbenturan kepentingan antar sektor dan antar sektor dengan daerah, Pemerintah Daerah Tingkat I dapat mengajukan permasalahan dalam kawasan tersebut kepada Tim Koordinasi Tata Ruang Daerah Tingkat I dan apabila tidak dapat diselesaikan, diajukan kepada Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) untuk memperoleh penyelesaian.
30. Sedangkan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 pasal 87 berkaitan dengan Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan, daerah dapat membentuk sebuah badan kerjasama antar daerah atau badan lain yang diatur dengan keputusan bersama dalam rangka kerjasama antar daerah. Perselisihan antar daerah diselesaikan oleh Pemerintah secara musyawarah. Apabila dalam perselisihan salah satu pihak tidak dapat menerima keputusan Pemerintah, pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaian kepada Mahkamah Agung.
31. Dari peraturan tersebut diatas dapatlah kiranya bahwa Badan Koordinasi Tata Ruang dipandang sebagai badan kerjasama antar daerah untuk mengadakan kerjasama maupun

penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan pengelolaan Taman Nasional maupun kawasan lindung yang bersifat musyawarah.

Penutup

32. Dari berbagai segi, baik dari segi peraturan perundangan, kerjasama internasional, kemampuan penyelenggaraan, maupun dari segi pemanfaatan, pengelolaan Taman Nasional memerlukan kerjasama yang amat erat antar pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota), antara pemerintah dengan masyarakat, dan antara pemerintah dan masyarakat dengan dunia usaha.
33. Pengelolaan Taman Nasional adalah bagian dari kegiatan penataan ruang wilayah nasional yang bersifat konservasi meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Pemanfaatan kekayaan alam di daerah kawasan lindung dapat diijinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mengganggu fungsi lindung serta melaksanakan rehabilitasi wilayahnya.
34. Dari jiwa otonomi daerah, dimungkinkan bahwa daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya tanpa melupakan kebijaksanaan dan kepentingan yang bersifat nasional secara keseluruhan. Sedangkan kewenangan pusat tidaklah berarti bahwa pusat menerapkan kebijaksanaan tanpa menerima masukan dari daerah maupun pihak-pihak yang terlibat. Manfaat Taman Nasional tidak terbatas di dalam kawasan Taman Nasional, tetapi jauh keluar kawasan ke berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu pembagian tanggung jawab dan kewenangan yang menyertainya memerlukan pengaturan baik secara horisontal maupun vertikal antar wilayah dan antar waktu serta antar kelompok masyarakat.
35. Pada setiap Taman Nasional mempunyai keunikan dan kekayaan masing-masing, maka pengelolaan maupun perlakuan terhadap tiap Taman Nasional adalah unik dan spesial bergantung kepada kondisi daerahnya masing-masing dan kamauan masyarakat disekitarnya maupun pihak-pihak lain yang terlibat tanpa melupakan kepentingan nasional.
36. Akhirnya, perlu kita sepakati bahwa kebijaksanaan nasional yang berupa arahan (*guidelines*) hendaknya tidak dipandang sebagai penyeragaman pengelolaan dan pemanfaatan Taman Nasional melainkan sebagai informasi standard yang mampu memelihara sifat keberadaan dan keberlanjutan dari Taman Nasional.

Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia¹

Oleh : Ir. Abdul Manan Siregar²

I. Pendahuluan

Sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1990, taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Sampai dengan 31 Maret 1999, kawasan taman nasional yang telah diumumkan / ditunjuk di seluruh Indonesia sebanyak 39 lokasi yang tersebar di 24 propinsi dengan luas mencapai $\pm 14,7$ juta Ha, 10 lokasi diantaranya tersebar di Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya dengan luas $\pm 7 087.239$ Ha.

Kelestarian taman nasional yang mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi dengan ruang lingkup habitat yang luas mulai dari hutan dataran rendah sampai sub-alpin sangat tergantung pada upaya pengelolaan yang berkelanjutan. Kita menyadari bahwa pengelolaan taman nasional di Indonesia masih belum dapat berjalan mulus karena banyaknya ancaman dan gangguan dengan berbagai skala. Permasalahan pengelolaan taman nasional diantaranya adalah:

- a. permasalahan kawasan, yaitu adanya berbagai *conflict of interest* sehingga target untuk mencapai semua tipe ekosistem dalam skala tempat, ruang dan waktu belum tercapai;
- b. permasalahan keamanan; yaitu masih banyaknya perusakan yang disebabkan oleh perladangan berpindah, perkebunan, pembalakan, pertambangan, pembangunan jalan dan lain-lain;

¹ Disampaikan pada Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Indonesia Bagian Timur, di Manado, tanggal 24 - 27 Agustus 1999.

² Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam

- c. permasalahan lainnya; yaitu masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana.

Di samping itu belum adanya persepsi yang sama mengenai fungsi, kedudukan dan peranan taman nasional di mata masyarakat dan pihak yang terkait lainnya..

II. Kebijakan

Kebijakan nasional pembangunan bidang perlindungan dan konservasi alam tidak terlepas dari kebijakan pembangunan kehutanan dan perkebunan yaitu :

- Mewujudkan integritas dan sinergitas pelaksanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan yang berazaskan pada kelestarian ekologi, ekonomi dan sosial yang menuju pada terwujudnya *forest and estate crops for people*.
- Melakukan pergeseran kebijakan pembangunan dari bobot *timber management* mengarah kepada bobot *multipurpose forest management*.
- Menyempurnakan kelembagaan, peraturan perundang-undangan yang mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat, serta mengembangkan sistem informasi manajemen kehutanan dan perkebunan.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, serta mempertimbangkan lingkungan strategis, komitmen masyarakat serta pengalaman dan hasil evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam menetapkan kebijakan pembangunan dan pengelolaan taman nasional sebagai berikut:

1. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai fungsi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Taman Nasional dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

3. Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi, yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai keperluan. Zona inti adalah bagian dari kawasan Taman Nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia. Zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman Nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan pengunjung, dan zona lain adalah zona di luar tertentu seperti zona rimba dan zona pemanfaatan tradisional.
4. Kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di dalam kawasan taman nasional meliputi penelitian dan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak mengurangi fungsi pokok dari kawasan taman nasional tersebut.
5. Kegiatan pariwisata dan rekreasi dapat dikembangkan secara terbatas pada zona pemanfaatan taman nasional, serta pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan pariwisata alam kepada BUMN/BUMD atau swasta atau koperasi selama jangka waktu tiga puluh tahun untuk penyediaan sarana dan prasarana pariwisata alam di zona pemanfaatan taman nasional berdasarkan Rencana Pengelolaan Pariwisata Alam Taman Nasional.
6. Pembangunan dan pengelolaan taman nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta saling terkait dan menunjang dengan kepentingan pembangunan wilayah di sekitarnya (*Integrated Conservation and Development Programme*), sehingga mampu menjamin upaya konservasi sumber daya alam hayati dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Kewenangan pembangunan dan pengelolaan di dalam kawasan Taman Nasional sepenuhnya berada dalam tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Sementara itu kegiatan pembangunan dan pengelolaan di luar kawasan taman nasional dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat berada dalam tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dinas/Instansi terkait.
8. Pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan taman nasional dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II yang dikaitkan dengan program pengembangan daerah. Koordinasi perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk tingkat nasional merupakan wewenang BAPPENAS, dan untuk tingkat daerah ditangani oleh BAPPEDA tingkat II dan BAPPEDA tingkat II setempat.

9. Untuk meningkatkan kepedulian dan peranserta masyarakat dalam menunjang kepentingan pengembangan dan pengelolaan taman nasional ditempuh melalui upaya; melaksanakan koordinasi antar sektor/dinas/instansi terkait dalam penyusunan program pembangunan wilayah secara terpadu, penyuluhan kepada masyarakat dan pembinaan peranserta masyarakat yang berada disekitar kawasan taman nasional, dan pengembangan dan pengelolaan daerah penyangga taman nasional.
10. Upaya pokok untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan taman nasional ditempuh kegiatan;
 - (1) perencanaan,
 - (2) penataan kawasan,
 - (3) pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem,
 - (4) pemanfaatan kawasan,
 - (5) penelitian dan pengembangan,
 - (6) perlindungan dan pengamanan kawasan,
 - (7) pembinaan kelembagaan,
 - (8) koordinasi,
 - (9) pembangunan asrana dan prasarana,
 - (10) pembinaan peran serta masyarakat, dan
 - (11) pemantauan dan evaluasi.

III. Langkah - langkah

Sejalan dengan kebijaksanaan pengembangan dan pengelolaan taman nasional di Indonesia serta mengantisipasi permasalahan yang ada di dalam taman nasional maka pemerintah menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemantapan pengelolaan kawasan taman nasional, serta melakukan identifikasi kawasan yang sesuai sebagai taman nasional dengan tingkat keterwakilan ekosistem yang tinggi.
2. Pengembangan wisata alam atau ekowisata di taman nasional merupakan harapan usaha di masa mendatang. Beberapa hal yang akan diintegrasikan dalam pengembangan pemanfaatan potensi wisata alam tersebut adalah:

- Perluasan kesempatan berusaha bagi penduduk di sekitar kawasan, koperasi dan pengusaha kecil atau lemah.
 - Perluasan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan wisata alam.
 - Pembinaan seni budaya lokal.
3. Kawasan taman nasional yang dengan keanekaragaman hayati yang kaya harus dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan umat manusia. Dengan mengacu kepada strategi konservasi dunia, keanekaragaman hayati tersebut termasuk flora dan fauna yang dilindungi oleh undang-undang dapat dimanfaatkan. Dalam pola pemanfaatan ini dikembangkan unit-unit usaha budidaya bagi penduduk sekitar kawasan taman nasional. Budidaya tersebut diarahkan pada upaya peningkatan gizi masyarakat, obat-obatan, tanaman hias dan sebagainya yang betul-betul bermanfaat dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama mereka yang bermukim di sekitar kawasan taman nasional.
 4. Memantapkan konsep pembinaan masyarakat di daerah penyangga taman nasional dengan memberdayakan potensi sumber daya alam di sekitarnya. Pembinaan masyarakat merupakan langkah strategis bagi keutuhan dan kelangsungan keberadaan potensi dan kawasan taman nasional.
 5. Menggalakan penyuluhan dan merubah perilaku masyarakat, serta menyadarkan publik dengan program-program yang diintegrasikan dengan program-program lainnya. Melalui program ini diharapkan adanya pemahaman akan pentingnya konservasi alam dan dapat ditumbuhkan partisipasi positif dari masyarakat dalam pelestarian dan perlindungan taman nasional.
 6. Menggalakan dan memantapkan pembinaan kader konservasi dan kelompok pelestarian alam, baik dari aspek metode maupun jangkauan dan intensitasnya.
 7. Mengembangkan sumber daya manusia dan kelembagaan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan di era reformasi.
 8. Mengingat terbatasnya dana pemerintah, dan tumbuhnya komitmen masyarakat dunia terhadap konservasi alam di Indonesia, maka hal tersebut dapat dijadikan upaya untuk menggali sumber pendanaan untuk pembangunan dan pengelolaan taman nasional di masa yang akan datang, terutama sumber daya bantuan yang bersifat hibah.

9. Mendorong peran LSM serta mengintegrasikan program-program perlindungan dan konservasi alam agar dapat menciptakan akselerasi maksimal bagi pematapan pengelolaan kawasan taman nasional.
10. Meningkatkan langkah-langkah pengamanan potensi dan kawasan taman nasional, terutama melalui strategi :
 - Meningkatkan kemampuan jagawana dan mengoperasionalkan dengan sistem pengendalian yang jelas.
 - Law enforcement terhadap pelanggaran peraturan perundangan dengan sasaran membuat jera para pelaku dan peminat lainnya.
 - Memantapkan sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan, perambahan hutan, pencurian hasil hutan dan sebagainya dengan mengikutsertakan peran aktif masyarakat dan instansi terkait lainnya.
11. Meningkatkan dukungan dari instansi/lembaga lain melalui kesepakatan bersama, forum komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi baik di pusat, daerah maupun di lapangan.

IV. Penutup

Keterpaduan pengelolaan taman nasional dengan pembangunan wilayah/daerah merupakan hal yang harus dikembangkan dan dapat dirumuskan secara operasional di lapangan. Kerjasama diantara *stakeholders* juga akan turut menentukan keberhasilan pengelolaan taman nasional. Oleh karena itu penguatan semua unsur atau lembaga yang secara fungsional memiliki komitmen dengan konservasi perlu diupayakan. Penerapan UU. No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah merupakan momentum yang sangat penting dalam mereaktualisasikan keterpaduan dan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan taman nasional yang berlandaskan UU. No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Kawasan Taman Nasional ¹⁾ (Tinjauan Dari Aspek UU Nomor 22 Tahun 1999)

Oleh :
Rapiuddin Hamarung ²⁾

I. Pendahuluan

Taman Nasional merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang banyak mengandung sumber daya alam hayati sebagai penyangga kehidupan dan sebagai paru-paru nasional dan dunia, dan pemerintah telah menetapkan 36 lokasi Taman Nasional di seluruh Indonesia. Untuk itu kegiatan konservasi sumber daya alam Taman Nasional dan ekosistemnya menjadi penting peranannya dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.

Taman Nasional merupakan kawasan yang banyak memikul fungsi, di antaranya sebagai kawasan konservasi sumber daya alam hayati, kegiatan wisata alam, wahana penyelenggaraan pendidikan/ pengetahuan dan penelitian, pengembangan budaya, sumber flasma nutfah serta aktivitas budidaya secara terbatas. Mengingat kompleksnya fungsi dari taman nasional, maka keberadaannya sangat penting bagi pemerintah, masyarakat dan dunia Internasional.

Berdasarkan pengalaman empiris penyebab kegagalan konservasi Taman Nasional sebagian besar disebabkan oleh pendekatan ekologi yang kurang memperhatikan sosial ekonomi serta keanekaragaman daerah, disamping itu perencanaan yang sentralistik telah membuat daerah kurang berperan dalam mengayomi aspirasi masyarakatnya. Dengan diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang merestruktur/mendefinisikan peranan Pemerintah di Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, hal ini akan lebih memperjelas peranan pemerintah terhadap pengelolaan kawasan Taman Nasional yang disesuaikan dengan fungsinya. Reformasi kebijaksanaan tersebut mendesentralisasikan

1) Makalah disampaikan pada rapat Regional Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Timur di Manado, tanggal 23 – 26 Agustus 1999

2) Direktur Jenderal Pembangunan Daerah

kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada tingkat-tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat karena makna dari desentralisasi memandirikan dan memberdayakan Daerah untuk melaksanakan pembangunan dan pelayan masyarakat.

Kebijaksanaan pembangunan kawasan Taman Nasional di era otonomi luas tentu harus sinkron dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu untuk mengembangkan demokrasi, partisipasi masyarakat, meningkatkan pemerataan dan keadilan, serta lebih memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, karena kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

II. Kebijakan Pembangunan Daerah

1. Proses penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dimaksud Pasal 133 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, sampai saat ini masih berlangsung, termasuk perubahan Undang-undang KEHUTANAN yang sedang dalam proses pembahasan di DPR. Namun untuk menyikapi perubahan tatanan politik dan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan kebijaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas dan utuh kepada Daerah Kabupaten/Kota serta otonomi yang terbatas pada Daerah Propinsi yang didukung dengan kebijaksanaan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah, maka petunjuk atau pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tetap berlaku, dan sebaliknya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan undang-undang tersebut harus segera diadakan penyesuaian.
2. Seiring dengan jiwa dan semangat otonomi dimana perwujudan demokratisasi pembangunan melalui pemantapan pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh pada Daerah Kabupaten dan Kota serta otonomi daerah yang terbatas pada Daerah Propinsi menjadi tuntutan dan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi, maka upaya pembaharuan/peningkatan bobot perencanaan pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat setempat harus segera diwujudkan. Demikian juga dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah pada era otonomi adalah mekanisme tigaraksa yaitu

Pemerintah Daerah, DPRD, dan Masyarakat, yang berlangsung dalam proses yang transparan, dan akuntabel sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan nyata daerah, serta tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Salah satu wujud dari negara kesatuan, Daerah diberikan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya nasional yang tersedia diwilayahnya dan bertanggung jawab dalam memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, disamping itu wilayah Propinsi diberikan kewenangan 12 mil laut yang diukur dari pantai kearah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan. Hal ini mengandung bahwa dalam era otonomi ini daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam (termasuk hutan), sumber daya buatan serta sumber daya manusia.
4. Bidang kehutanan, termasuk Taman Nasional, merupakan kewenangan bidang pemeritahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota yang bahkan juga lintas Propinsi yang kewenangannya diletakkan pada Daerah Propinsi, artinya pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah terutama yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah. Untuk itu guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, maka kebijakan konservasi serta kebijakan pemberdayaan sumber daya alam merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, artinya dalam pengelolaan sumber daya alam yang merupakan kekayaan nasional harus dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat, untuk itu diperlukan standarisasi dan kebijakan secara nasional.
5. Berdasarkan kecenderungan-kecenderungan tersebut maka pedoman kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebelum peraturan pendukung Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 keluar, maka daerah diharapkan mencoba mengakomodasikan berbagai isu penting dan strategis, sesuai dengan aspirasi masyarakat serta prakarsa Pemerintah Daerah, sedangkan terhadap Taman Nasional, isu penting yang harus diperhatikan daerah adalah perencanaan pembangunan daerah penyangga Taman Nasional yang harus disinkronisasikan serta dikoordinasikan dengan Managemen Plan Taman Nasional dan pembangunan wilayah, karena sebagian besar gangguan terhadap Taman Nasional dimulai dari daerah penyangga.

III. Makna dan Manfaat Taman Nasional

1. Masyarakat dan Pemerintah Daerah belum menyadari betul akan keberadaan Taman Nasional, sebagai kawasan pelestarian alam dan penyangga kehidupan di muka bumi, karena kebijaksanaan konservasi sumber daya alam yang dilaksanakan selama ini, ternyata sangat sedikit sekali dirasakan dan dinikmati secara langsung oleh masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah, sehingga kurang ada unsur motivasi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat.
2. Untuk itu strategi dan kebijaksanaan konservasi sumber daya alam perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi serta tingkat kehidupan masyarakat daerah, karena permasalahan pokok yang terjadi adalah perbedaan kebutuhan atas potensi yang dimiliki. Disatu pihak, terjadi peningkatan kebutuhan pangan, sandang dan papan yang mengakibatkan masyarakat “merambah hutan” dan kawasan lindung, karena yang dianggap merupakan tempat terakhir yang masih tersisa untuk ruang hidup mereka, disamping itu para pengusaha, tambang dan lainnya ikut mempunyai andil dalam kerusakan Taman Nasional dengan memanfaatkan kemarginalan masyarakat. Dilain pihak, dengan kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, komonikasi serta teknologi yang membuat orang jenuh dengan kesibukan kerja, dengan kondisi demikian membuat orang berfikir untuk mencari suasana alami guna mendapatkan hawa segar.
3. Stuai kontradiktif yang demikian itu, di mana disatu pihak cenderung untuk mengganggu/merusak dan di pihak lain mempunyai kebutuhan menikmati tatalingkungan yang masih alami. Cara pemecahannya ialah harus mengarahkan kebijaksanaan pengelolaan Taman Nasional kepada 2 (dua) tujuan; **pertama**, melakukan perlindungan dan pelestarian yang efektif efisien terhadap sistem penyangga kehidupan dan **kedua**, memanfaatkan yang dilindungi dan lestarikan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dicapai dengan menyusun Manajemen *Plan* yang telah memberikan kejelasan tentang zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan tradisional serta zona penyangga, karena titik pangkal dalam pengelolaan Taman Nasional selama ini belum jelas batas antar zonasi, terutama batas antara taman itu sendiri dengan zona penyangga, yang mengakibatkan informasi potensi dan komunikasi terputus dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

IV. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Kawasan Taman Nasional

1. Integritas dan pengamanan kawasan Taman Nasional di masa yang akan datang tidak hanya tergantung kepada efektifitas pelaksanaan konservasi dan penegakan hukum, akan tetapi sangat tergantung kepada dukungan masyarakat lokal dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam nasional yang berada di daerahnya. Sedangkan kondisi yang ada saat ini adalah akses masyarakat terhadap sumber daya alam (hutan, tanah dan air) di sekitar tempat mereka tinggal semakin rendah akibat eksploitasi sumber daya alam dari berbagai sektor (perkebunan, kehutanan, pertambangan), sedangkan sumber pendapatan masyarakat di sekitar hutan/daerah penyangga umumnya tergantung kepada sumber daya alam seperti pertanian/perladangan, pengumpulan hasil hutan non kayu dan kegiatan lainnya.
2. Berdasarkan pengalaman tersebut di atas dan Rencana Jangka Menengah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (*National Biodiversity Action Plan*, 1993) sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ratifikasi Konvensi Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992, maka pendekatan pelaksanaan konservasi kawasan Taman Nasional dilakukan secara terpadu antara kegiatan konservasi dan pembangunan wilayah, khususnya daerah penyangga.
3. Dengan didasarkan kepada *National Biodiversity Action Plan* 1993, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berperan dalam 2 (dua) aspek penting :

Pertama: berperan dalam menterpadukan pembangunan wilayah dan konservasi Taman Nasional. Kawasan penyangga merupakan area/wilayah di luar taman yang merupakan wilayah Kabupaten atau antar Kabupaten dan berbatasan langsung dengan taman, berfungsi untuk menjaga integritas perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati yang terdapat dalam taman, melindungi kawasan pertanian/budidaya di luar taman dari gagasan satwa liar. Agar fungsi tersebut dicapai langkah pertama yang harus dilakukan Pemerintah Daerah adalah, penentuan area/daerah penyangga yang diakomodasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten, sehingga pemanfaatan ruang daerah penyangga dapat disesuaikan dengan Action Plan Zonasi Taman.

Kedua : sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

serta pasal 11 ayat (2), bahwa lingkungan hidup dan pertanahan merupakan salah satu kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Kota.

Pasal tersebut mencirikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, artinya dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah berperan meramu secara seimbang faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, sumber daya alam dan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang, dan tentunya harus mengacu kepada kebijakan konservasi dan pemberdayaan sumber daya alam yang sedang dipersiapkan.

4. Oleh karena itu peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung kawasan Taman Nasional terwujud dalam upaya penataan ruang yang di paduserasikan dengan *Management Plan* Taman Nasional dengan memperhatikan :
 - a. Perlindungan terhadap proses ekologi dan sistem penyangga kehidupan.
 - b. Pelestarian keanekaragaman ekosistem, jenis dan plasma nutfah.
 - c. Menciptakan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan ekonomi dan sosial budaya yang didasarkan kepada keanekaragaman.
 - d. Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

V. Penutup

1. Masyarakat dan Pemerintah Daerah belum menyadari akan keberadaan Taman Nasional sebagai kawasan pelestarian alam dan penyangga kehidupan, karena kebijaksanaan konservasi sumber daya alam yang dilakukan selama ini belum dirasakan dan dinikmati secara langsung oleh masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah.
2. Upaya-upaya konservasi keanekaragaman hayati di dalam maupun di luar kawasan perlu dikembangkan melalui pengembangan ilmu dan teknologi, penelitian, penetapan zonasi, pengelolaan, peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat lokal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerintah Daerah berperan dalam menterpadukan pembangunan wilayah dan konservasi Taman Nasional, serta meramu secara seimbang dalam suatu perencanaan terpadu antara faktor sosial, budaya, ekonomi, politik sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Penerapan Undang Undang No. 25 Tahun 1999 Dikaitkan dengan Pendanaan dalam Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional

Oleh:

Dr. Sahala Lumban Gaol¹

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

1.1 Taman Nasional

Pada saat ini di seluruh Indonesia terdapat 39 Taman Nasional dengan luas areal \pm 14,6 juta hektar. Pengelolaan Taman Nasional dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan c.q Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam. Tarif masuk ke dalam taman nasional didasarkan kepada Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Pungutan Masuk Taman Nasional di samping kepada pengunjung biasa juga diberlakukan kepada peneliti, kendaraan air, kendaraan darat, pengambilan/*snapshot* dan olahraga/rekreasi di alam bebas. Dalam pengelolaan taman nasional, Departemen Kehutanan dan Perkebunan juga mengadakan kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat melalui USAID dalam bentuk Progam NRM (Natural Resources Management). Salah satu program NRM tersebut adalah pengelolaan kawasan konservasi melalui kerjasama antar instansi terkait terutama Bappenas dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Program ini ditujukan untuk mendukung kemitraan, peningkatan kesadaran akan konservasi, mendukung pendanaan konservasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi.

1.2 Undang-undang No. 25 Tahun 1999

Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemberlakuan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

¹ Direktur Penerimaan Minyak & Bukan Pajak Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan DEPKEU

Otonomi daerah adalah hak kewenangan daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sebagai daerah otonom, Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyelenggaraan otonomi daerah lebih dipertegas lagi dalam Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari Tap MPR ini perlu diatur lebih lanjut UU tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta UU tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU no. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sedangkan UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan pengganti UU No. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, maka pemerintahan suatu negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni: (I) fungsi alokasi yang meliputi, antara lain, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat; (ii) fungsi distribusi yang meliputi antara lain, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan (iii) fungsi stabilisasi yang meliputi, antara lain, pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, karena Daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi ini sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara jelas dan tegas.

2. Penerimaan Daerah sebagai Pendanaan Taman Nasional

Taman Nasional merupakan kekayaan Negara sehingga pengelolaannya tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah Pusat tetapi juga pemerintah Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dapat diminta peran sertanya dalam pendanaan untuk mengembangkan Taman Nasional. Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 peran serta pemerintah daerah tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaannya.

Penerimaan Daerah sesuai Undang-undang No. 25 Tahun 1999 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan terdiri dari :
 - Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari sumber daya alam;
 - Dana Alokasi Umum;
 - Dana Alokasi Khusus;
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain Penerimaan yang sah.

Pendanaan dari Pemerintah Daerah dalam pengembangan Taman Nasional dapat dilakukan dengan memanfaatkan penerimaannya yang berasal dari Dana Perimbangan. Penerimaan Daerah dari Dana Perimbangan pada hakekatnya diperoleh melalui kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sehingga pengalokasian dana untuk pengembangan Taman Nasional mempunyai dasar yang kuat.

II. Penerimaan dari Pengelolaan Taman Nasional

1. Penerimaan Taman Nasional

Penerimaan dari Taman Nasional sebagai obyek wisata merupakan salah satu penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Sumber Penerimaan ini berasal dari tiket masuk dan pemberian izin usaha pariwisata alam. Penerimaan dari Taman Nasional relatif masih kecil. Sebagai gambaran dapat disampaikan bahwa dalam tahun anggaran 1993/1994 – 1997/1998 penerimaan yang berhasil diperoleh dari tiket masuk hanya mencapai Rp. 3 miliar, sedangkan penerimaan yang diperoleh dari pengeluaran izin usaha pariwisata alam tahun anggaran 1994/1995 – 1997/1998 hanya Rp. 395 juta. Hal ini antara lain karena tarif yang berlaku belum didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

2. Kewenangan Daerah sesuai Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

- 2.1 Kewenangan Daerah mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang :
- Politik Luar Negeri
 - Pertahanan Keamanan
 - Peradilan
 - Fiskal dan Moneter
 - Agama
 - Bidang lain yang meliputi :
 - Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional
 - Dana perimbangan keuangan
 - Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara
 - Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia
 - Pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis
 - Konservasi
 - Standarisasi nasional
- 2.2 Kewenangan Daerah antara lain adalah mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2.3. Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka Desentralisasi harus disertai penyerahan dan pengalihan : pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia.

Ketentuan pada butir 2.2 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah perlu berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam.

3. Pokok-pokok Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Berdasarkan Tap MPR No. XV/MPR/1988 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan Serta

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah perlu diatur lebih lanjut dalam undang-undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

3.1 Pengertian Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tatacara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

3.2 Tujuan Pokok Undang-undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.
- Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab, akuntabel, dan pasti.
- Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi daerah
- Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh Pemerintah Daerah
- Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah.

3.3 Dana Perimbangan dari Sumber Daya Alam di Bidang Kehutanan:

- Penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan, 20% untuk pusat dan 80% Daerah (16% propinsi dan 64% kabupaten/Kota penghasil)

- Penerimaan Propinsi Sumber Daya Hutan, 20% untuk Pusat dan 80% Daerah (16% propinsi, 32% kabupaten/kota penghasil, 32% Kabupaten/Kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan)
- Dana Reboisasi 60% untuk Pusat dan 40% untuk daerah, yang dikategorikan dalam dana alokasi khusus.

III. Pendanaan dalam Pengembangan Taman Nasional

1. Rencana Pendanaan untuk Pengembangan Taman Nasional

Dalam rangka pengelolaan 39 taman nasional dengan luas \pm 14,6 juta hektar kontribusi APBN melalui alokasi anggaran selama periode fiskal 1993/1994 sampai dengan 1998/1999 masih terlihat kurang proporsional dimana semakin luas taman nasional yang harus dikelola, semakin kecil anggaran yang diterima.

Sebagai gambaran pada tahun fiskal 1993/1994 kontribusi APBN terhadap pembiayaan pengelolaan taman nasional mencapai 73 persen dan komponen bantuan luar negeri hanya sebesar 10 persen. Sedangkan pada tahun fiskal 1998/1999 kontribusi APBN hanya sebesar 41%, namun bantuan luar negeri meningkat menjadi 38%. Sementara itu sebagaimana telah dijelaskan di atas, sumber penerimaan tersebut adalah besarnya tarif pungutan masuk ke Hutan Wisata, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Laut belum didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998.

Sebagai gambaran rata-rata tarif masuk yang lama berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 878/Kpts-II/92 adalah sebesar Rp.1.800/orang tanpa membedakan antara wisatawan mancanegara dan nusantara. Sementara itu tarif rata-rata yang dikenakan kepada pengunjung taman nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.000/orang untuk wisatawan mancanegara dan Rp. 1.650/orang untuk wisatawan Nusantara.

Untuk pendanaan dalam pengembangan taman nasional terutama taman nasional yang berasal dari penerimaannya sendiri dapat dilakukan dengan mengacu ketentuan Pasal 8 Undang-undang No. 20 Tahun 1997. Oleh karena itu besarnya tarif Taman Nasional harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 agar penerimaan Taman Nasional dapat ditingkatkan.

2. Sumber Pendanaan Taman Nasional

2.1. Sumber dari Dalam Negeri

- Pendanaan Taman Nasional dilihat dari Undang-undang No. 25 Tahun 1999. Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999, pendanaan dalam pengembangan Taman Nasional dapat dilakukan sepanjang melibatkan peran serta Pemerintah Daerah. Sementara itu sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk pendanaan ini adalah Dana Perimbangan.

Sebagai gambaran dana perimbangan yang berasal dari sumber daya alam di sektor kehutanan adalah :

- Penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan, 20% untuk Pusat dan 80% Daerah (16% Propinsi dan 64% Kabupaten/Kota penghasil).
 - Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan, 20% untuk Pusat dan 80% Daerah (16% Propinsi, 32% Kabupaten/Kota penghasil, 32% Kabupaten/Kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan)
 - Dana reboisasi 60% untuk Pusat dan 40% untuk Daerah, yang dikategorikan dalam dana alokasi khusus.
-
- Pendanaan dilihat dari Undang-undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - a. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
 - b. Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi :
 - Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
 - Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
 - Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah;
 - Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
 - Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah;
 - Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.
 - c. Sebagian dana dari suatu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak tersebut oleh instansi yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan sistem APBN. Kegiatan tertentu meliputi kegiatan :

- Penelitian dan pengembangan teknologi;
- Pelayanan Kesehatan;
- Pendidikan dan pelatihan;
- Penegakan hukum;
- Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu;
- Pelestarian sumber daya alam.

Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1999 Tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu, antara lain mengatur :

- a. Instansi dapat menggunakan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan.
- b. Permohonan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak diajukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan, paling sedikit dilengkapi dengan :
 - Tujuan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Rincian kegiatan pokok instansi dan kegiatan yang akan dibiayai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak beserta tarif yang berlaku;
 - Laporan realisasi dan perkiraan tahun anggaran berjalan serta perkiraan untuk 2 (dua) tahun anggaran mendatang.

2.2 Sumber dari Luar Negeri

- Dapat diperoleh dari hibah (grant) atau pinjaman lunak (soft loan) baik melalui Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Dapat diperoleh dalam bentuk bantuan teknis.

IV Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Taman Nasional merupakan kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah.

2. Pengembangan Taman Nasional perlu didorong agar lebih terencana, sistematis dan terkoordinasi mengingat fungsinya sebagai penyangga kelestarian hutan dan penghasil penerimaan negara.
3. Pendanaan dalam pengembangan Taman Nasional dapat diperoleh dari Dalam Negeri dan Luar Negeri.
 - Pendanaan dari Dalam Negeri :
 - Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dana Perimbangan.
 - Berdasarkan Undang-undang No. 29 Tahun 1997 dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS).
 - Pendanaan dari Luar Negeri dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah melalui grant atau soft loan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pendekatan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai pentingnya Pengembangan Taman Nasional dan partisipasi mereka.
2. Perlu dilakukan secara khusus mengenai pendanaan dalam Pengembangan Taman Nasional dengan Departemen Keuangan.
3. - Perlu melakukan pendekatan dengan negara-negara tetangga seperti Jepang, Australia dan Singapura untuk membantu upaya pengembangan Taman Nasional.
 - Perlu meyakinkan Amerika Serikat untuk meningkatkan bantuannya dalam rangka pengembangan Taman Nasional melalui pinjaman lunak maupun bantuan teknis.

Pengembangan Taman Nasional

DANA



PENDANAAN

PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH DAERAH	BANTUAN LUAR NEGERI
<ul style="list-style-type: none">➤ DIP➤ DIK➤ DIKS (UU No. 20/1997)	DANA PERIMBANGAN (UU No. 25/1995)	<ul style="list-style-type: none">➤ GRANT➤ SOFT LOAN

D. Instansi Terkait

Daftar Isi

1. Dukungan Pemda Mengintegrasikan Pembangunan Wilayah dengan Pengelolaan Taman Nasional dalam Antisipasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, *oleh drs. J. Saruan, Ketua Bappeda Sulut* D1 - 1
2. Strategi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Hutan dan Kebun, Khususnya di Bidang Konservasi Propinsi Sulawesi Selatan *oleh Dr. H.A. Fauzi Mas'ud, Kepala Kanwil Dephutbun dan Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan* D2 - 13
3. Peranan Taman Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Irian Jaya , *oleh drs. K. Watori, Kepala Bapedalda Propinsi Tk.I Irian Jaya* D3 - 27

Dukungan Pemda Mengintegrasikan Pembangunan Wilayah dengan Pengelolaan Taman Nasional dalam Antisipasi Pelaksanaan Otonomi Daerah ¹

Oleh :
Drs. J. Saruan ²

1. Pendahuluan

Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang lebih dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat sekarang ini menjadi salah satu agenda reformasi. Krisis moneter semenjak tahun 1997 dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif yang semakin besar pada pola konsumsi sumber daya alam. Karena itu upaya-upaya pelestarian sumber daya alam perlu lebih ditingkatkan sekarang ini, apalagi dengan adanya paradigma baru mengenai otonomi daerah yang harus ditindaklanjuti secara cepat.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990, upaya pelestarian alam dilakukan melalui, : perlindungan sistem penyangga kehidupan; pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Untuk melakukan ketiga misi tersebut dilakukan pengalokasian wilayah-wilayah asli dalam status Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian alam, serta perlindungan dan pembinaan populasi spesies yang terancam kepunahan.

Taman Nasional merupakan salah satu bentuk Kawasan Pelestarian Alam, seperti diungkapkan dalam UU No. 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Konservasi alam merupakan *strategi pelaksanaan* kegiatan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, dengan sasaran kesejahteraan rakyat masa kini dan masa

¹ Disampaikan Pada Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Se-Kawasan Timur Indonesia di Manado.

² Ketua Bappeda Sulawesi Utara

mendatang. Ada dua unsur kegiatan yang harus saling menunjang, meskipun tampaknya berpotensi konflik, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan upaya pelestarian sumber daya alam. Untuk itu, secara teknis Departemen Kehutanan didukung oleh fungsi dan peranan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (Ditjen PHPA).

2. Arti Penting Kawasan Konservasi

a. Aspek Konservasi

Indonesia sebagai salah satu dan 7 negara *megadiversity* dunia, harus mampu mengekspresikan dan mempertahankan kualitasnya melalui pengalokasian kawasan konservasi yang didasarkan atas keunikan tumbuhan, satwa serta ekosistem. Kawasan konservasi ini arus mencakup keterwakilan dari berbagai tipe ekosistem.

Sebagai negara di daerah tropis yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia telah lama menjadi perhatian dunia, sehingga kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia yang akhir-akhir ini banyak disoroti negara lain apalagi memasuki era globalisasi sekarang ini berkembang konsep konservasi yang memandang sumber daya alam suatu negara sebagai "*world heritage*" atau warisan milik dunia.

Taman Nasional yang ada di Sulawesi Utara adalah Taman Nasional Bogani-Nani Wartabone (BNW) yang merupakan kawasan konservasi yang mewakili perlindungan hutan dengan ekosistem yang kompleks dan beragam; dan Taman Nasional Bunaken merupakan kawasan konservasi yang mewakili perlindungan terhadap ekosistem laut yang sangat potensial. Di dalam kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone tersebut diternukan empat tipe ekosistem utama, antara lain : hutan lumut, hutan hujan pegunungan rendah, hutan hujan dataran rendah dan hutan sekunder. Berbagai satwa langka Sulawesi terdapat di taman nasional tersebut, yaitu maleo, anoa, tarsius dan kuskus.

Keanekaragaman hayati yang terdapat di wilayah Taman Nasional yang disadari sebagai asset nasional maupun daerah ini memerlukan perlindungan dan pengamanan khusus. Misalnya keanekaragaman spesies kupu-kupu di Taman Nasional Nani Wartabone, dan ikan raja laut /coelecanth (ikan purba) di Taman Nasional Bunaken. Selain spesies yang dilindungi seperti duyung, penyu, napoleon, lumba-lumba, triton, dll. Keanekaragaman sumber daya alam wilayah tropis ini juga menyimpan kekayaan plasma nutfah yang besar. Ini salah satu

pertimbangan mengapa aspek konservasi merupakan hal utama yang mutlak diperhatikan dalam keberadaan Taman Nasional.

Taman Nasional Bunaken dan Taman Nasional Bogani-Nani Wartabone merupakan "*Wallacea Area*" yang mempunyai ekosistem spesifik. Yang sangat potensial sebagai wahana penelitian. Sebagai daerah peralihan formasi ekosistem beserta potensi flora dan fauna antara zona Indo-Malaya dengan zona Australia. Posisi yang demikian ini merupakan daerah yang strategis bagi pengembangan penelitian, dimana TNBNWB merupakan area penelitian yang sekaligus mewakili Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur, yang tentunya merupakan hal yang menguntungkan bagi kegiatan penelitian.

Seiring dengan makin meningkatnya populasi memberikan dampak makin tingginya aktivitas dan tingkat eksploitasi sumber daya alam, maka untuk mengimbangnya pihak PHPA mempunyai target untuk menciptakan kawasan konservasi. Misalnya untuk kawasan konservasi perairan target yang hendak dicapai hingga akhir tahun 2000 adalah seluas 30juta hektar.

Di Sulawesi Utara kawasan suaka alam sebagian besar telah ditetapkan sebagai cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, dan taman wisata. Secara keseluruhan luas kawasan ini diperkirakan 397.437,5 ha yang terdiri dari luas kawasan Suaka Alam 103.687,5 ha (3,77%), luas pantai berhutan bakau 11.250 ha (0,41%), luas kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya 4.250 ha (0,16%) dan luas taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam 278.250 ha (10,12%).

b. Aspek Ekonomi Dan Sosial

Dalam pengelolaannya, kegiatan yang diperbolehkan dilakukan dalam sebuah Taman Nasional meliputi penelitian dan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya serta wisata alam. Sedangkan kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi segala bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan dan proporsi zona inti taman nasional.

Taman nasional pada kenyataannya memiliki potensi yang sangat besar. Sesuai dengan misi yang diembannya maka pengelolaan Taman Nasional diharapkan dapat menjadi kawasan "*tabungan*" sekaligus kawasan yang dapat memberikan arti penting dan segi ekonomi dan

sosial bagi masyarakat sekitar dan bagi pembangunan daerah. Contohnya, peranan Taman Nasional diharapkan akan memberikan kontribusi untuk sektor pariwisata yang merupakan salah satu sektor unggulan pembangunan Propinsi Sulawesi Utara. Sektor ini diharapkan merupakan penggerak sektor lainnya sehingga pada gilirannya nanti diharapkan akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan turut memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara khusus ditinjau dari aspek ekonomi, taman nasional dapat memberikan manfaat yaitu:

- Meningkatkan pariwisata daerah dan meningkatkan devisa negara.

Semua taman nasional di Sulawesi Utara selain untuk tujuan konservasi juga merupakan daerah pariwisata. Di Taman Nasional BNW kunjungan wisata terutama untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Untuk Taman Nasional BNW menurut catatan manajemen taman nasional, jumlah pengunjungnya (tahun 1985 - 1994) mencapai sekitar 253.000 pengunjung atau rata-rata sekitar 76 orang per hari. Sedangkan TN Bunaken merupakan ujung tombak promosi bagi wisatawan manca negara, seperti yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara dalam mengantisipasi maksud gerak maju Sulawesi Utara untuk periode 1990-2020 (30 tahun).

- Memberikan kontribusi bagi PAD

Kunjungan wisatawan ini pada gilirannya nanti akan memberikan kontribusi kepada PAD. Belakangan ini kawasan taman nasional Bunaken dikenal pula sebagai wilayah penghasil rumput laut terbesar di Sulawesi Utara. Rumput laut merupakan penyumbang ekspor perikanan terbesar untuk Propinsi Sulawesi Utara. Ekspor ini memberikan kontribusi yang cukup besar untuk PAD. Jika PAD yang meningkat maka kemandirian daerah dalam membiayai pembangunannya akan lebih tinggi.

- Turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Akibat krisis moneter yang terjadi sejak tahun 1997 sampai sekarang ini, laju pertumbuhan ekonomi sangat rendah (minus). Sasaran pembangunan bidang ekonomi Sulawesi utara adalah tercapainya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang diperkirakan rata-rata sekitar 4 persen per tahun. Majunya usaha di bidang pariwisata diharapkan pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena diharapkan dapat memacu usaha di sektor informal dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengaruh tidak langsung adanya TN BNW adalah meningkatkan pendapatan petani di daerah sekitarnya. Karena adanya bendungan Kosinggolan dan Bendungan Toraut yang sungainya berasal dari TN BNW, Kecamatan Dumoga pada saat ini merupakan lumbung beras andalan Propinsi Sulut dan merupakan daerah sentra ekonomi yang penting bagi Kabupaten Bolmong.

Terjaganya fungsi ekologis dan ekonomis akan sangat berpengaruh juga terhadap kondisi sosial masyarakat. Keberadaan adanya taman nasional ini diharapkan dapat menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi selama ini, sekaligus memelihara kehidupan sosial-budaya masyarakat yang berada di dalam taman nasional.

3. Integrasi Pembangunan Wilayah dengan Pengelolaan Taman Nasional

Dalam PERDA Tk. I No. 3 Tahun 1991, tentang Tata Ruang Daerah Tingkat I Sulawesi Utara telah diupayakan untuk memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah tertentu sebagai daerah konservasi, pada dokumen ini disebutkan mengenai kebijaksanaan pengembangan khusus diantaranya untuk wilayah Taman Nasional Bogani Nani Wartabone sedangkan Taman Nasional Bunaken termasuk kawasan cepat tumbuh.

Ciri utama Taman Nasional adalah pengelolaan berdasarkan mintakat (zonasi) untuk mencapai tujuan pengelolaan. Dimana pengembangan wilayah tersebut di dasarkan pada mintakat-mintakat yang ditentukan sesuai kondisi sumber daya alam. Kawasan khusus dibuat mintakat inti, pemanfaatan, penyangga dan mintakat lainnya, sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah. Selama ini untuk pengembangannya dari sisi daerah, lebih dititik beratkan pada mintakat pemanfaatan, mengingat ketersediaan sumber daya alam sekitar telah dijamin oleh pengelola mintakat inti.

4. Permasalahan Kelembagaan Taman Nasional di Sulawesi Utara

Pengelolaan Taman Nasional bukan sekedar pengelolaan ekosistem dan sumber daya yang ada di dalamnya melainkan juga pengelolaan masyarakat setempat yang tinggal di wilayah tersebut yang sangat mempengaruhi pengaturan dalam Taman Nasional itu sendiri.

Adapun permasalahan kelembagaan yang dihadapi dalam pengelolaan Taman Nasional antara lain:

- Pengambilan Keputusan untuk Taman Nasional.

Yang paling utama untuk pengelolaan Taman Nasional adalah mekanisme dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan Taman Nasional. Misalnya secara *de jure*, taman nasional memang diberikan otoritas untuk mengelola Taman Nasional kepada Balai Taman Nasional dan pertanggungjawaban pengelolaannya kepada Departemen Kehutanan. Namun untuk penentuan kebijakan yang berlaku di dalam Taman Nasional Bunaken masih tumpang tindih antara satu instansi dengan instansi lainnya, misalnya: kebijakan budidaya rumput laut, kebijakan mengenai pembangunan cottage di sempadan pantai, dll. Ego sektoral sesuai dengan kepentingan masing - masing yang masih nampak dalam pengelolaan.

Ditinjau dari segi pengambilan keputusan, Balai Taman Nasional selama ini lebih berfungsi sebagai lembaga yang memberikan jasa konsultasi kepada instansi-instansi dibanding sebagai penentu kebijakan pengelolaan di wilayah Taman Nasional yang memiliki wilayah dan struktur masyarakat yang spesifik.

- Manajemen lembaga mempunyai keterbatasan dalam melakukan aktivitas pengamanan. Pengamanan akan membutuhkan tenaga, sarana dan biaya yang besar. Sebaliknya, peningkatan keamananlah yang paling sering mengakibatkan meningkatnya konflik antara manajemen dengan masyarakat. Misalnya masalah pengamanan untuk pertambangan liar di dalam kawasan TN BNW tidak pernah dapat diselesaikan dan mengakibatkan masalah sosial yang cukup besar.
- Kebijakan pengelolaan yang harus dilakukan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat tidak sesuai dengan kondisi wilayah dan kondisi masyarakat setempat. Hal ini menurunkan kualitas lembaga dalam pengelolaan itu sendiri.
- Perangkat hukum untuk upaya konservasi wilayah atau sumber daya alam yang ada belum sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum oleh masyarakat (karena kebutuhan hidup yang mendesak).
- Tanggung jawab dan konflik besar sedang wewenang kurang. Tanggungjawab yang harus dipikul oleh lembaga sangatlah besar sedangkan wewenang yang diberikan untuk lembaga ini masih sangat kurang. Luas lokasi yang harus ditangani

sangatlah besar. Wilayah Taman Nasional Bunaken luasnya 79056 ha sedangkan luas wilayah TN BNW adalah 280115 ha. Semua Taman Nasional ini berada pada 2 wilayah administrasi daerah tingkat II (Kab/kota), sehingga perencanaannya harus bisa mengakomodir kepentingan 2 daerah tingkat II (Kab/kota). Begitupun konflik yang terjadi di dalamnya sangat kompleks dan membutuhkan penanganan yang serius. Padahal wewenang yang diberikan untuk menangani wilayah tersebut dan menyelesaikan konflik-konflik tersebut.

5. Antisipasi Pemda dalam Rangka Otonomi Daerah

Dalam kondisi krisis ekonomi seperti yang kita hadapi saat ini, seiring makin meningkatnya potensi kerusakan sumber daya alam, peranserta daerah dan masyarakat lokal menjadi modal utama untuk menjaga dan mengelola taman nasional sesuai kondisi dan keragaman wilayahnya masing-masing. Saat ini merupakan saat yang tepat untuk menyiapkan masyarakat daerah menyambut era otonomisasi daerah dengan pemberdayaan daerah dan masyarakat. Dengan meningkatnya peranserta pemerintah daerah dan masyarakat setempat diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan taman nasional itu sendiri.

Sesuai dengan GBHN 1993 dan 1998, pembangunan otonomi daerah diarahkan untuk mengembangkan dan memacu Pembangunan Daerah, memperluas peran serta masyarakat, serta meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan memperhatikan kemungkinan pengembangan potensi daerah secara sinergis dengan kemampuan nasional.

Sekarang ini semakin diberikan peluang untuk upaya-upaya pengelolaan sumber daya alam oleh daerah dengan adanya iklim perencanaan yang lebih menekankan bottom up planning utamanya nuansa desentralisasi dan demokratisasi dengan keluarnya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengganti UU No. 5 Tahun 1974 dengan mensahkan UU No. 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berbeda dengan UU No. 5 tahun 1974, dalam UU No 22 Tahun 1999 ini pengertian Otonomi Daerah adalah: kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan **masyarakat setempat** menurut **prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat** sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Melalui pasal 7 UU No. 22 Th 99 **kewenangan Daerah** telah diberikan dalam **seluruh bidang pemerintahan, kecuali** *kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain (kebijakan tentang perencanaan Nasional dan pengendalian Pembangunan nasional secara makro; dana perimbangan kenangan; sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara; pembinaan dan pemberdayaan sdm; pendayagunaan sda serta teknologi tinggi yang strategis; konservasi; standardisasi nasional).*

Untuk **kewenangan yang sifatnya lintas kabupaten dan kota**, seperti kewenangan di bidang PU, perhubungan, kehutanan dan perkebunan serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya (termasuk pengendalian lingkungan hidup, dan promosi dagang dan budaya/pariwisata) kewenangan dimiliki oleh **propinsi** sebagai daerah otonom.

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 10 UU No. 22 tahun 1999 mengenai kewenangan daerah dalam pengelolaan SDA bahwa: **Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional** (sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sdm) yang tersedia **di wilayahnya** dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari segi kewenangan pengelolaan laut terdapat perubahan yang sangat besar. Visi pemerintah pada masa orde lama adalah mempersatukan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga perairan laut tidak dapat dibagi-bagi menjadi bagian daerah otonom. Pada masa orde baru karena sangat mendesaknya kebutuhan akan potensi SD laut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tidak diberikan otonomi dan kewenangan yang jelas dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir kepada Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, UU No. 5 Tahun 1974 mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah tidak sampai mengatur otonomi dan kewenangan daerah ke perairan laut.

Sekarang ini dengan adanya UU No. 22 tahun 1999 (pasal 10) daerah diberikan kewenangan untuk wilayah laut yang meliputi:

- **Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;**
- **Pengaturan kepentingan administratif;**
- **Pengaturan fata ruang;**
- **Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan**
- **Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.**

Upaya - upaya yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan otonomi daerah dengan implikasi dan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 dalam pengelolaan taman nasional antara lain:

- Kenyataan bahwa sumber keuangan pada masa orde yang lalu masih didominasi dari sumber pembiayaan pusat. Saat ini perlu segera dipikirkan langkah strategis untuk menghitung sumber pendapatan dan pengeluaran daerah agar mampu membiayai kegiatan pembangunan daerah masing - masing. Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber yang sudah dilakukan selama ini dan mencoba melakukan terobosan bagi sumber - sumber pendapatan lain yang belum digali.
- Penguatan kelembagaan dan kapasitas UPT Taman Nasional, agar menjalankan fungsinya secara maksimal dalam pengelolaan Taman Nasional terutama mampu melakukan perhitungan berapa kebutuhan dana pengelolaan dan berapa yang dapat dibiayai secara mandiri.
- Proses perencanaan didalam taman nasional, berorientasi pada masyarakat kelompok bawah *grassroot* atau *bottom up planning* perlu diprioritaskan dan mendapat perhatian serius sehingga tenaga *planner* dari seluruh lapisan harus diperkuat.
- Penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan Taman Nasional dengan menciptakan mekanisme manajemen yang profesional dan transparan. Perilaku birokrat harus dirubah dari birokrat yang berorientasi manajemen tradisonal, tidak fleksibel, dan tertutup ke arah manajemen modem, transparan, profesional dan birokrat yang berwawasan *enterpreneurship*.
- Penguatan konservasi berbasis masyarakat dalam Taman Nasional dengan tetap meningkatkan ekonomi masyarakat lokal agar masalah - masalah klasik dalam masyarakat dapat dikurangi sekaligus dapat menunjang ekonomi daerah yang lebih luas.

- Kaji ulang terhadap aturan - aturan pelaksanaan pengelolaan taman nasional yang sudah tidak sejiwa dengan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999. Dan perlu segera dipikirkan upaya penegakan hukumnya pada seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu beberapa harapan yang dapat dipertimbangkan untuk otonomisasi daerah dalam pengelolaan Taman Nasional antara lain:

- Pusat sebagai lembaga koordinasi, sedangkan daerah diberikan otonomi untuk pengelolaan. Selanjutnya untuk menentukan teknis pelaksanaan pengelolaan taman nasional diserahkan kepada daerah. Untuk pengaturan secara teknis akan diatur sesuai Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur.
- Pelaksanaan Pengelolaan Taman Nasional akan diserahkan sepenuhnya kepada UPT atau Balai Taman Nasional. Kebijakan pengaturan pengelolaan taman nasional tersebut tidak ditentukan oleh masing-masing instansi tetapi oleh UPT/Balai Taman Nasional, sehingga kebijakan pengelolaannya bisa ditangani secara cepat dan spesifik wilayah. Untuk mengakomodir aspirasi dan masing-masing instansi akan dibentuk Badan Pengarah Taman Nasional.
- Pertanggungjawaban pengelolaan adalah kepada Pemda dalam hal ini Gubernur KDH Tk. I
- Pengaturan sumber dana sebagai konsekuensi pembiayaan pengelolaan taman nasional perlu dipikirkan bersama dengan melihat peluang - peluang yang ada mengingat mungkin saja dana pemerintah daerah untuk saat ini masih diprioritaskan pada sektor - sektor yang krusial dalam kaitannya dengan reformasi dan restrukturisasi ekonomi daerah (perlu diperhatikan tidak lagi sepenuhnya di danai dari APBN).
- Perlu pula sejak awal diperhitungkan pengaturan pendapatan dari pengelolaan taman nasional yang adil bagi pemerintah daerah. Mengingat biaya pemeliharaannya tinggi sedangkan pendapatan dari Taman Nasional itu sendiri sangat rendah, maka untuk biaya pemeliharaannya perlu mendapat suplai dari Pemerintah Pusat, atau dari subsidi silang pemerintah daerah dari berbagai sektor.
- Biaya pemeliharaan taman nasional tidaklah sedikit, karena itu untuk pengelolaan yang efisien dan efektif perlu dilakukan upaya penguatan usaha-usaha konservasi oleh masyarakat di daerah Taman Nasional untuk menurunkan biaya pemeliharaannya. Upaya ini tentunya harus diimbangi dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar Taman Nasional untuk menunjang pelestarian itu sendiri.

Penetapan kriteria taman nasional selama ini telah memenuhi kriteria internasional yang antara lain ditetapkan oleh IUCN (1993). Namun kriteria ini masih dirasakan sangat jauh dari kondisi lokal di lapangan dan kebutuhan masyarakat maupun daerah. Seiring dengan upaya - upaya mencapai target kantong-kantong konservasi, maka perlu dikaji bersama dengan dilakukan penyesuaian kriteria - kriteria yang sesuai dengan kondisi spesifik daerah. Untuk memenuhi target menciptakan kantong-kantong konservasi yang menjadi sasaran dari Departemen Kehutanan, bentuk-bentuk daerah perlindungan/kawasan konservasi yang diusulkan oleh daerah yang berbeda dengan format kawasan konservasi dari Departemen Kehutanan dapat dipertimbangkan. Sehingga untuk masa depan tidak lagi berupa taman nasional mengingat biaya pemeliharaannya yang sangat tinggi, sementara pengelolaannya perlu lebih memperhatikan desakan kebutuhan masyarakat maka diusulkan untuk dapat dibuat kawasan konservasi berdasarkan versi daerah yang mekanisme pengelolaannya ditentukan oleh daerah.

Sebagai contoh yaitu usulan taman laut Selat Lembeh. Daerah ini merupakan wilayah dengan intensitas kepentingan dan aktivitas yang sangat tinggi, namun ternyata mempunyai potensi sumber daya alam dan lingkungan yang diperlukan untuk proses ekologis tingkat dunia, selain merupakan satu-satunya tempat wisata untuk mengamati biota mikro yang khas. Untuk wilayah yang demikian diharapkan Pemda yang akan menjadi koordinator pengelolaan taman laut ini.

Skenario yang lebih memacu peran serta masyarakat untuk upaya – upaya konservasi lingkungan yang oleh dan bagi masyarakat adalah daerah perlindungan yang dikelola oleh desa. Wewenang kepada masyarakat untuk membuat aturannya sendiri dalam rangka upaya konservasi di wilayahnya. Misalnya seperti yang dilakukan oleh masyarakat desa Blongko yang telah memiliki Badan Pengelola yang terdiri dari masyarakat desa itu sendiri untuk melakukan konservasi sumber daya alam di Daerah
Perlindungan Laut Desa Blongko.

Peranan masyarakat adat yang telah memiliki kelembagaan adat dengan peraturannya mengenai konservasi laut di wilayahnya juga perlu diperkuat dan dapat diperhitungkan sebagai modal penting dalam upaya konservasi di daerah. Misalnya masyarakat adat di Desa Kakorotan (Kab. Sangihe Talaud) yang memiliki sistem eha (pantang berkala dalam pemanfaatan SDA) yang telah dilaksanakan selama lebih dari 300 tahun. Wilayah eha ini (eha laut, maupun eha darat), telah memiliki daerah perlindungan lautnya sendiri yang secara adat memiliki pengawasnya sendiri.

6. Penutup

Otonomi pengelolaan sumber daya alam tidak dapat berjalan mulus dengan sendirinya. Pemerintah masih mempunyai tugas untuk mempersiapkan perangkat hukum pendukung lainnya. Otonomi ini perlu didukung oleh semua pihak dan sangat bergantung pada kesiapan semua pihak dan kesamaan ide untuk penerapannya. Dan mungkin saja beberapa bentuk pemikiran ini dapat menjadi masukan - masukan yang berarti dalam rumusan - rumusan selanjutnya utamanya dalam hal pengelolaan taman nasional.

Strategi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Hutan dan Kebun Khususnya di Bidang Konservasi Propinsi Sulawesi Selatan

Oleh:

Dr. H. A. Fauzi Mas'ud¹

I. Pendahuluan

Hutan adalah anugerah TYMH dan merupakan sumber daya alam, telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta TAP MPR XIV/1998, guna diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi-fungsinya.

Sulawesi Selatan mempunyai luas hutan sebesar 3.834.657 Ha atau 61,5 % dari luas daratannya, di mana peruntukkannya didominasi oleh Hutan Lindung (\pm 50 % sesuai paduserasi). Manfaat hutan bagi pembangunan SULSEL telah dirasakan baik langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana diketahui sampai saat ini Propinsi Sulsel dikenal sebagai salah satu lumbung pangan terbesar di kawasan Timur Indonesia.

Namun akibat berbagai hal, utamanya karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, kelestarian fungsi hutan dan manfaatnya tidak dapat dinikmati lagi secara optimal dan lestari.

Profesionalisme dalam pengelolaan hutan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tantangan bagi para Pemangku wilayah guna mengantisipasi merosotnya fungsi dan manfaat hutan, sejalan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk.

¹ Kepala Kanwil Dephutbun/ Kepala Dinas Kehutanan Prop. Dati I Sulawesi Selatan

Guna pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan yang lestari, baik kawasan lindung maupun kawasan konservasi, telah dilakukan berbagai upaya, antara lain melalui penetapan kebijaksanaan dan strategi pembangunan kehutanan dan perkebunan bidang konservasi. Dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan dan kendala, mengingat kondisi dan potensi sumber daya alam hutan sudah berbeda keadaannya sebelumnya (pada saat penunjukkannya).

Untuk mengembalikan kondisi dan potensi tersebut agar sesuai dengan peruntukkan, sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud; diperlukan kemampuan menciptakan peluang serta kemampuan mengatur dan melaksanakan strategi pelaksanaannya.

UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999; telah memberikan peluang yang lebih besar kepada Daerah untuk memanfaatkan semua potensi sumber daya alam yang ada bagi kepentingan pembangunan di daerah, guna percepatan tercapainya kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar kawasan hutan.

II. Gambaran Umum

A. Pemerintahan

Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai luas daratan \pm 6.236.171 Ha, terbagi dalam 22 daerah Kabupaten Daerah tingkat II serta dua Kotamadya. Sulawesi Selatan juga mempunyai beberapa daerah gugusan pulau penting, antara lain wilayah gugusan Pulau Spermonde (di selat Makasar) dan gugusan Pulau Macan (wilayah Kabupaten Selayar); karena keunikan wilayah perairan di sekitar gugusan pulau tersebut, sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.

Jumlah penduduk Sulsel 7.738.114 KK (data tahun 1996), sebagian besar di antaranya adalah petani.

Selain sektor Pertanian yang merupakan andalan utama, andalan lainnya untuk menopang pendaratan daerah Sulsel adalah pariwisata, baik itu pariwisata alam maupun wisata budaya. Kunjungan wisata ke Sulsel sebelum terjadinya krisis politik dan keamanan setiap tahun terus meningkat.

B. Luas Kawasan Hutan

Luas seluruh kawasan hutan berdasarkan hasil paduserasi tahun 1999 adalah 3.834.657 Ha, sedangkan luas seluruh kawasan konservasi di Propinsi Sulawesi Selatan adalah 2.717.663 Ha, terdiri dari 789.066 Ha kawasan konservasi bagi perlindungan satwa dan habitatnya serta 1.928.597 Ha daerah lain yang berfungsi sebagai kawasan konservasi lahan/air (Hutan Lindung dan Kawasan Lindung di luar kawasan hutan Negara).

Penyebaran serta luas kawasan dapat diperiksa pada lampiran satu dan dua.

C. Potensi Kawasan Konservasi

Sebagai bagian dari wilayah zone Wallacea, Sulsel sebagaimana juga wilayah Propinsi lainnya di Pulau Sulawesi, mempunyai nilai keragaman dan kekayaan jenis yang unik dan tinggi. Sulsel dikenal sebagai bagian daerah peralihan penyebaran satwa liar antara Benua Asia dan Australia. Beberapa satwa dan tumbuhan liar tersebut antara lain Anoa, Maleo, Musang Sulawesi, Burung Manddar, Tarsius, Nuri Sulawesi, Kera Sulawesi, Ebony, berbagai jenis Kupu-kupu dan lain-lain.

Daerah Sulsel juga kaya akan potensi biota laut/perairan, keindahan alam dan keunikan alam. Beberapa kawasan tersebut saat ini telah menjadi salah satu daerah tujuan wisata unggulan, seperti TWA Bantimurung (dikenal sebagai pusat kerajaan kupu-kupu), TWA Lejja (dikenal luas sebagai daerah permandian air panas), TWA Malino dan sebagainya.

D. Pengelolaan

Pemangkuan kawasan Hutan Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawab beberapa instansi, yaitu Dinas Kehutanan Tk. I yang membawahi delapan buah CDK, dua buah Unit KSDA, Taman Nasional Taka Bonerate serta sebuah Dinas Kehutanan TK. II (Gowa).

Pemangkuan dan pengawasan kawasan konservasi di luar kawasan hutan (kawasan lindung di luar kawasan hutan) di mana luasnya mencapai ± 271.357 Ha, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah c/q instansi teknis terkait.

Jumlah personil pelaksana pemangkuan hutan tersebut adalah; 1.836 orang, termasuk didalamnya 559 orang tenaga penyuluh serta 423 orang Polisi khusus kehutanan.

III. Masalah

Dalam upaya pemanfaatan secara lestari jenis tumbuhan dan satwa liar serta kawasan konservasi, ditentukan beberapa masalah pokok yaitu:

1. Kebutuhan lahan bagi pembangunan sektor lain

Pembangunan sektor lain di Sulsel, utamanya pembangunan sektor Transmigrasi serta Pertambangan dan Energi, masih berjalan dengan pesat sesuai dengan kebutuhan pembangunan Nasional saat ini. Kegiatan ini kadang dilaksanakan secara tergesa-gesa tanpa pertimbangan kepentingan konservasi dalam arti luas.

Pada saat ini sebagian wilayah Transmigrasi (\pm 80.000 Ha) masih bermasalah karena dilaksanakan tanpa mengikuti kaedah-kaedah hukum/kesepakatan antara DepTrans dengan DepHutBun. Beberapa diantaranya telah memasuki kawasan fungsi lindung.

Kebutuhan lahan bagi pembangunan tambang & energi (Dam, semen, marmer, dll), setelah melalui kajian yang mendalam, sering harus mengorbankan keutuhan satu kawasan konservasi.

2. Data dan Informasi

Data potensi kawasan maupun data jumlah dan penyebaran potensi satwa dan tumbuhan liar belum tersedia dalam jumlah yang cukup dan *up to date*. Kondisi ini menyebabkan aktivitas pembangunan konservasi belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Peningkatan peran Swasta, Pengusaha menengah dan kecil serta Koperasi dalam pengelolaan kawasan konservasi, khususnya Taman Wisata Alam belum mengalami percepatan, antara lain akibat lemahnya data dan informasi yang tersedia.

Informasi yang berkaitan dengan teknologi penangkaran serta informasi pasar juga menjadi salah satu masalah dalam peningkatan peran swasta dalam usaha pelestarian jenis.

3. Tekanan penduduk

Akibat berbagai sebab, sebagian penduduk sering memberi tekanan terlalu besar pada upaya konservasi yang telah dilakukan selama ini, malah dalam beberapa kasus masyarakat cenderung merusaknya.

Perambahan hutan, perburuan liar adalah contoh kasus yang akhir-akhir ini semakin marak berkembang. Kegiatan masyarakat dalam kasus ini cenderung sudah sangat membahayakan kelestarian konservasi.

Perambahan hutan telah menjadi secara terencana, terkoordinasi dan merupakan kegiatan bisnis yang menguntungkan oknum tertentu. Pesatnya perkembangan perambahan didorong oleh berbagai faktor yang telah berkembang sebagai bagian dari euforia reformasi serta lemahnya upaya penegakan hukum.

Selama tahun 1998-1999, diperkirakan telah menjadi pembukaan Hutan Lindung dan kawasan konservasi secara liar tidak kurang dari 3.000 Ha.

4. SDM

Kualitas, kuantitas SDM belum banyak berubah atau perubahannya belum sebanding dengan kecepatan berkembangnya masalah dan kebutuhan organisasi.

SDM yang berkualifikasi di bidang Perlindungan (PPNS, Jagawana, dll), Pengawetan (Peneliti, penyuluh, Inventory dll) masih sangat terbatas di Sulsel. Masalah ini merupakan masalah klasik dan kelihatannya akan terus menghantui kegiatan pembangunan yang sedang kita pacu kembali pertumbuhannya.

5. Peraturan perundangan

Aturan hukum, kebijaksanaan pengelolaan yang berkaitan dengan kegiatan konservasi masih sering dirasakan kurang sejalan dengan aspirasi masyarakat. Pada umumnya masyarakat sangat ingin berpartisipasi penuh dalam pengelolaan kawasan/jenis, namun aturan main yang berlaku tidak semudah itu mengijinkannya.

Pendekatan dasar pengaturan yang memakai pola “dari pada rusak karena salah dalam pemanfaatannya lebih baik dilindungi dan atau diawetkan” nampaknya perlu ditinjau kembali, disesuaikan dengan kemampuan aparat, dana serta aspirasi masyarakat luas.

Kebijakan sentralistik dalam upaya konservasi yang didukung oleh berbagai argumen, seperti “daerah belum siap, dampaknya tidak mengenal batas wilayah administrasi, tekanan dunia Internasional dan lain-lain; kurang memberi peluang bagi Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan kegiatan konservasi.

IV. Strategi Pelaksanaan Pembangunan

A. Kebijakan

1. TAP MRP No. XIV/MPR/1998, telah mengamanatkan Pembangunan Kehutanan diarahkan untuk mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan peran pengusaha kecil, menengah dan Koperasi.
2. Undang-undang No. 5 tahun 1990 menetapkan konservasi dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Perlindungan Sistem Penyangga kehidupan.
 - b. Pengawetan keanekaragaman jeni tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
 - c. Pemanfaatannya secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Kebijaksanaan Departemen Kehutanan dan Perkebunan bidang konservasi yang telah ditetapkan dan disosialisasikan dalam rakernas DEPHUTBUN 1999, menggariskan antara lain hal-hal sbb:
 - a. Optimalisasi fungsi-fungsi Kawasan Pelestarian Alam agar mampu meningkatkan kontribusinya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia.
 - b. Peningkatan partisipasi masyarakat luas dengan pendekatan manfaat yang menimbulkan sinergi dan saling menguntungkan semua pihak.
 - c. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara profesional dengan dukungan aparatur yang tangguh, teknologi maju dan dana yang cukup.
4. Kebijaksanaan pembangunan Hutan dan Kebun Propinsi Daerah Sulawesi Selatan, antara lain:

- a. Optimalisasi pemanfaatan Hutan dan Kebun melalui pengelolaan yang profesional guna mendorong pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
- b. Meningkatkan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam setiap kegiatan pembangunan, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam.
- c. Peningkatan nilai ekspor produksi hasil Hutan dan Kebun, dua kali lipat (GRATEKS-2).

B. Strategi Pelaksanaan

Memperhatikan kondisi dan kebijaksanaan umum dan kebijaksanaan teknis tersebut di atas, ditetapkan beberapa strategi pelaksanaan pembangunan bidang konsevasi di Propinsi Sulawesi Selatan sbb:

1. Penyusunan data base

Melalui penyusunan database ini diharapkan akan diketahui semua potensi yang dimiliki baik berupa jenis dan penyebaran spesies, penyebaran habitat, kekhasan daya tarik kawasan serta potensi lainnya. Untuk maksud tersebut, strategi penyusunan diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan:

a. Inventarisasi potensi Kawasan Pelestarian Alam

Kegiatan ini terutama diarahkan pada kawasan-kawasan yang berbatasan langsung dengan pemukiman atau yang telah memiliki aksesibilitas yang baik. Penekanan inventarisasi lebih diarahkan kepada peluang dan hambatan yang berhubungan dengan perluasan kesempatan usaha bagi penduduk sekitar kawasan, Koperasi dan Pengusaha kecil, menengah serta perluasan lapangan kerja guna terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari 11 buah kawasan pelestarian alam, untuk tahun 1999-2000 rencana kegiatan lebih diprioritaskan kepada tiga buah kawasan wisata alam (Bantimurung, Lejja, Pattunuang), serta Taman Nasional Taka Bone Rate.

b. Inventarisasi potensi Sosial budaya dan Ekonomi masyarakat.

Inventarisasi ini berkaitan erat dengan pengumpulan data potensi kawasan. Sasaran kegiatan adalah masyarakat sekitar hutan serta masyarakat pengusaha yang memiliki keterkaitan usaha dengan pemanfaatan usaha pengembangan Wisata Alam. Dengan diketahuinya potensi yang ada pada masyarakat, diharapkan akan timbul kemudahan

dalam usaha pemberdayaan masyarakat dan sinergi pengelolaan kawasan serta pemanfaatan hasil.

c. Inventarisasi jenis flora-fauna yang tidak dilindungi dan mempunyai pangsa pasar ekspor

Dalam rangka menunjang program GRATEKS-2, dilakukan kegiatan inventarisasi potensi satwa liar yang telah dikenal mempunyai pangsa pasar ekspor. Beberapa jenis saat ini sangat dibutuhkan pasar Asia, seperti koral, kupu-kupu, kura-kura air tawar dan beberapa jenis reptil lainnya. Usaha pemanfaatann jenis tersebut harus selalu memperhatikan aspek kelestariannya. Salah satu langkah yang telah dilakukan Sulsel adalah pengusulan/penetapan Loka merah sebagai satwa buru yang diatur perburuannya dengan kuota.

2. Pembinaan Habitat dan Evaluasi fungsi

Beberapa kawasan konservasi telah mengalami kemunduran akibat berbagai gangguan, hal ini menyebabkan fungsinya tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Oleh sebab itu perlu dilakukan berbagai upaya pembinaan habitat, agar kondisi habitat/lingkungannya mendekati kondisi asli/semula. Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang kerusakannya tidak/belum terlalu parah sehingga masih bisa direhabilitasi.

Bagi kawasan yang kondisinya telah rusak perlu dilakukan usaha evaluasi fungsi, agar terjadi kecocokan antara kondisi dengan fungsi serta guna dapat dimanfaatkannya kawasan tersebut secara optimal sesuai dengan fungsinya.

Saat ini sedang diproses usulan perubahan fungsi sebuah Suaka margasatwa menjadi Taman Wisata Alam serta sebuah kawasan campuran Taman Wisata Alam dan Hutan Lindung menjadi Taman Hutan Raya.

3. Pemantapan status hukum kawasan konservasi

Sampai saat ini belum semua kawasan konservasi memiliki status hukum yang kuat, karena sebagian belum selesai ditata batas serta sebagian lagi belum dikukuhkan. Hal ini sangat menyulitkan dalam setiap usaha penegakan hukum dalam upaya perlindungan kawasan dari gangguan keamanan hutan.

4. **Perlindungan/pengamanan kawasan konservasi.** Penertiban pemanfaatan hasil hutan, terutama spesies satwa liar yang dilindungi serta perlindungan dan pencegahan hama penyakit.

Usaha perlindungan dan penertiban dilakukan dengan meningkatkan kerjasama antar sektor khususnya aparat keamanan lainnya, peningkatan kualitas Penyuluh & Polhut, pengembangan sarana serta pengaturan perwilayahan komoditi kebun.

5. **Rehabilitasi kawasan**

Beberapa kawasan dengan fungsi konservasi (Hutan Lindung) saat ini telah rusak akibat perambahan, perladangan maupun kebakaran hutan. Guna dapat berfungsi kembali kawasan hutan tersebut, secara kontinyu dilakukan kegiatan Reboisasi, baik dengan pola “Inpres penghijauan dan Reboisasi” maupun pola hutan kemasyarakatan yang dikenal dengan “Pola Sulsel”.

6. **Penyusunan Rencana Pengelolaan**

Agar diperoleh kepastian usaha dan guna menghindari terjadinya kerusakan kawasan karena pengelolaannya tidak terencana dengan baik, usaha penyusunan rencana pengelolaan sangat diprioritaskan bagi kawasan Taman Wisata Alam, sekalipun dana pemerintah masih sangat terbatas.

7. **Pemberdayaan masyarakat**

Sebagian masyarakat sekitar hutan, telah dikenal mempunyai kearifan sosial budaya dalam menikmati fungsi hutan lestari. Kearifan ini harus diberdayakan melalui berbagai kegiatan antara lain:

a. **Peningkatan kesempatan berusaha**

Pengembangan lapangan kerja dengan memperbanyak program pembinaan daerah penyangga serta program padat karya dan program peningkatan ketrampilan masyarakat sekitar kawasan.

b. Sosialisasi fungsi kawasan bagi masyarakat sekitar kawasan

Pada saat ini, belum semua lapisan masyarakat mengetahui peran dan fungsi kawasan konservasi, terutama fungsinya dalam memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya penyuluhan fungsi sosial ekonomi kawasan konservasi, serta aturan kebijaksanaan pemanfaatan kawasan lestari.

c. Promosi

Promosi dilakukan guna pengenalan obyek wisata potensial agar minat pengusaha dan koperasi untuk ikut mengelola kawasan pelestarian alam terus tumbuh dan berkembang. Promosi dilakukan melalui massa media, media cetak, poster dll.

d. Pengembangan teknologi tepat guna

Usaha pemanfaatan secara lestari satwa dan tumbuhan liar yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, terutama dari jenis yang dilindungi melalui usaha penangkaran/budidaya maupun pembesaran, belum berkembang, hal ini antara lain sebagai akibat dari belum dikenalnya teknologi tepat guna bagi usaha tersebut. Berkaitan dengan hal itu telah dan akan dijalin kerjasama yang erat dengan perguruan tinggi setempat bagi pengembangan teknologi penangkaran kupu-kupu serta mengoptimalkan peran Balai Penelitian Kehutanan Ujung Pandang dalam penelitian pemanfaatan lestari Maleo, Anoa dll.

e. Kemitraan

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan secara lestari kawasan konservasi dilakukan kerjasama dengan beberapa LSM dan Instansi terkait lainnya. Kerjasama ini ditekankan pada kegiatan rekayasa sosial budaya, pengawasan dan monitoring serta pemanfaatan potensi kawasan bagi pengembangan wisata alam dan HPHKM.

8. Monitoring dampak lingkungan

Dampak pembangunan Hutan dan Kebun, setiap saat harus dimonitor secara tepat dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah pengawasan sebagaimana telah dicantumkan dalam RKL-RPL setiap unit usaha.

9. Pengembangan kelembagaan

- a. Telahan hukum terhadap peraturan perundangan yang mengatur kegiatan bidang Konservasi perlu terus dilaksanakan melalui wadah forum reformasi Kehutanan dan Perkebunan daerah; terutama kaitannya dengan rencana pelaksanaan UU No. 22/99. Prioritas diberikan kepada evaluasi pengaturan tentang penyerahan urusan pemanfaatan atau pemangkuan obyek wisata alam (Taman Wisata Alam) kepada daerah Tk. II serta pengaturan pungutan jasa lingkungan, kaitannya dengan peningkatan kontribusi pendapatan kepada daerah Tk. II.
- b. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan kawasan, dipandang perlu mengadakan peningkatan kajian rencana pembangunan/pengembangan unit Taman Nasional baru pada kawasan konservasi tertentu seperti kawasan hutan sekitar Maros-Pangkep, yang merupakan penyatuan pengelolaan HL, TWA dan CA dengan total luas 86.000 Ha serta kawasan HL dan CA disekitar Kec. Malili, Kec. Mangkutana Kab. Luwu, yang luas keseluruhannya mencapai 185.000 Ha; di samping mengembangkan satu unit Taman Hutan Raya \pm 12.000 Ha (Malino-Gowa).
- c. Guna menjamin terselenggaranya semua strategi tersebut diatas, upaya peningkatan kualitas SDM terus dilaksanakan secara kontinyu melalui pelatihan-pelatihan; baik yang dilakukan melalui kursus maupun “*on the job training*”.

V. Penutup

Demikian bahan presentasi tentang Strategi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Hutan dan Kebun di bidang konservasi Prop. Sulawesi Selatan, semoga bagi peningkatan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya pengelolaan Taman Nasional Wilayah Indonesia bagian Timur.

Lampiran satu: Luas Kawasan Hutan (Sesuai Hasil Paduserasi)

Kabupaten	Luas Kawasan	Luas Berdasarkan Fungsi			Keterangan
		HP	HL	KSA	
Mamuju	835.214	398.613	436.601	-	
Pinrang	72.831	26.049	46.782	-	
Polmas	237.805	55.265	181.640	900	
Majene	58.889	7.772	51.117	-	
Pangkep	82.503	10.872	21.631	50.000	TWA. Laut
Barru	65.185	15.384	49.801	-	
Pare-Pare	1.407	339	1.068	-	
Sidrap	71.177	26.948	43.729	500	
Wajo	19.691	17.150	2.541	-	
Enrekang	87.352	14.597	72.755	-	
Tator	156.906	18.805	138.101	-	
Luwu	1.219.247	307.862	728.061	183.324	
Sinjai	18.894	7.100	11.794	-	
Bone	145.053	110.766	32.612	1.675	
Soppeng	46.205	11.465	33.359	1.381	
U. Pandang	68.509	33.651	25.817	9.041	
Maros	8.264	3.482	86	4.696	
Takalar	9.189	257	8.932	-	
Jeneponto	6.222	3.449	2.773	-	
Bantaeng	8.453	1.440	3.538	3.475	
B. Kumba	552.562	10.164	11.633	530.765	TN
Selayar	63.099	35.564	24.226	3.309	
Gowa	-	-	-	-	
Jumlah	3.834.657	1.116.994	1.928.597	789.066	

Catatan: Luas daratan Prop. Sulawesi Selatan : 6.236.171 Ha

Lampiran 2:

Kawasan konservasi yang berada di luar kawasan hutan seluas \pm 271.357,85 Ha dengan perincian sebagai berikut:

No.	Kabupaten	Resapan Air	Sepadan Sungai (Ha)	Cagar Budaya (Ha)	Sempadan Pantai (Ha)	Hutan Bakau (Ha)	Sekitar Danau/Mata Air (Ha)
1.	Mamuju	-	8.290	5,25	-	3.112	-
2.	Luwu	-	15.200	25	-	20.671	62.680
3.	Enrekang	-	2.405	-	778	425	-
4.	Polmas	-	-	-	-	-	-
5.	Majene	-	1.900	3	1.230	2460	377
6.	Pinrang	600	3.000	-	187	633	-
7.	Tana Toraja	-	39.645	210	-	-	975
8.	Wajo	-	22.750	-	26.700	5450	550/6.000
9.	Sidrap	-	2.275	-	-	-	-
10.	Pare-pare	-	460	-	144	-	13,50
11.	Maros	-	1530	6,5	1.300	260	-
12.	Barru	-	4.272	-	1.500,6	-	-
13.	Pangkep	-	1.000	-	-	-	1.900
14.	Bone	-	-	-	-	-	-
15.	Soppeng	-	-	-	-	-	-
16.	Gowa	-	1.040	-	-	-	-
17.	Takalar	-	1.000	3	7.000	-	-
18.	Jeneponto	-	7.100	-	3.500	-	-
19.	Bantaeng	-	105	-	-	-	25
20.	Bulukumba	32	59	331	217	329	-
21.	Sinjai	-	-	-	726	-	-
22.	Selayar	200	570	-	2.340	-	300
	Jumlah	832	112.601	583,75	45.622,60	44.898	66.820,50/6.000

Peranan Taman Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Irian Jaya

Oleh:
Drs. K.Watori¹

I. Pendahuluan

Propinsi Irian Jaya ditinjau dari sisi fisiografis memiliki luas wilayah 422.915 Km², dengan jumlah penduduk pada tahun 1998 mencapai 2.111.500 jiwa. Sebagian besar (74 %) masyarakat Irian Jaya hidup di pedesaan (baca: hidup di pedesaan pinggiran pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan lereng-lereng pegunungan). Desa-desa tersebut berada didalam kawasan zona perlindungan (*enclave*) maupun diluar kawasan tersebut seperti zona penyangga (*buffer zone*), maupun zona pemanfaatan sesuai tata ruang yang telah disepakati.

Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 pasal 1 ayat (6) menyebutkan kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya. Sedangkan wilayah sendiri memiliki pengertian ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsure terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional .

Selanjutnya arti kawasan lindung sendiri menurut peraturan perundang-undangan (baca: UU Nomor 24 Tahun 1992 dan UU Nomor 5 tahun 1990) adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Berdasarkan fungsi utama dan cakupan kawasan lindung tersebut maka kawasan lindung memiliki beberapa pengertian berdasarkan spesifikasi peruntukannya yaitu kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan lindung dan taman buru.

Taman Nasional merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang memiliki ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem

¹ Kepala Bapedalda Propinsi Tk. I Irian Jaya

penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selanjutnya di dalam kawasan nasional terdapat aktifitas pengelolaan ekosistem asli dengan menggunakan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi alam.

Di Propinsi Irian Jaya terdapat 3 (tiga) kawasan Taman Nasional yaitu:

Taman Nasional Wasur, Taman Nasional Teluk Cenderawasih dan Taman Nasional Lorentz.

Kawasan Nasional Wasur ditetapkan oleh pemerintah sebagai Taman Nasional pada tanggal 6 Maret 1990 melalui surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 448/Kehut-VI/1990, dengan luas kawasan 308.000 Ha.

Taman Nasional Wasur terletak di Kabupaten Dati II Merauke dan berbatasan langsung dengan salah satu kawasan suaka di negara PNG yaitu Tonda Wildlife Reserve. Taman Nasional memiliki keunikan dan spesifikasi antara lain merupakan daerah dataran rendah dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Vegetasi hutan dataran rendah, savana, hutan rawa dan mangrove mewarnai kehidupan vegetasi di taman nasional ini.

Di samping itu dalam habitat demikian hidup berbagai jenis burung endemic, mamalia endemic dan juga jenis burung dan mamalia eksotik. Akhir-akhir ini jenis eksotik mulai mendominasi niche (relung) jenis endemic, sehingga timbul kompetisi dalam mempertahankan kehidupan masing-masing jenis. Di dalam Taman Nasional ini terdapat sumber air minum masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke.

Sumber air tersebut berupa rawa yang disebut Rawa Biru. Rawa Biru sering mendapatkan perhatian disamping sebagai sumber air minum yang esensial bagi masyarakat, juga dikhawatirkan mengalami kerusakan ekosistem akibat berkembangnya jenis Gulma air (Tebu Air). Selain itu didalam taman nasional ini hidup suku Marind, Kanum, Mandobo dan Jei. Suku-suku tersebut berinteraksi dengan taman nasional Wasur sejak dahulu, sebagai pemburu, peramu dan nelayan tradisional sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kehidupan masyarakat yang berada di Taman Nasional Wasur berbeda dengan kehidupan masyarakat di Taman Nasional Teluk Cenderawsih. Pada tahun 1993 melalui surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 472/Kpts-II/1993 ditetapkan Tanam Nasional Teluk Cenderawsih sebagai Taman Nasional Laut dengan luas 1.453.500 Ha meliputi 2 (Dua)

wilayah administrasi yaitu Kabupaten Daerah Tingkat II Manokwari dan Kabupaten Daerah Tingkat II Nabire. Taman Nasional ini meliputi 5 (Lima) ekosistem yaitu ekosistem hutan tropis daratan pulau, hutan mangrove, hutan pantai, padang lamun dan terumbu karang.

Taman Nasional Teluk Cenderawasih memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi berupa Coral, Mamalia, Ikan, Aves dan vegetasi, sehingga dengan keunikan dan keanekaragaman tersebut Taman Nasional ini memegang peranan yang sangat strategis. Strategis terutama berkaitan dengan pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi terpadu dan isu pemekaran wilayah Propinsi Irian Jaya.

Pembangunan di Propinsi Irian Jaya berdampak pula pada keberadaan Cagar Alam Lorentz dimana pada bulan Maret 1997 Lorentz berubah status dari status cagar alam (tahun 1978) menjadi status Taman Nasional. Taman Nasional ini secara administratif berada pada Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya dan Daerah Tingkat II Mimika.

Sampai saat ini Taman Nasional Lorentz belum memiliki institusi, akan tetapi taman nasional ini memiliki keunikan dan spesifikasi, antara lain di samping sebagai calon warisan situs dunia, juga terdapat 5 (lima) Zona ketinggian berdasarkan vegetasi yaitu zona dataran rendah, zona pegunungan, zona Sub-Alpin, zona Alpin dan zona nival (ketinggian > 4585 meter dpl) (Van Steenis 1934,1959, 1972; Hope 1976a; Jonhs 1982; PT. Hatfindo 1997; Frank Momberg *et.al* 1998).

Taman Nasional Lorentz merupakan wilayah konservasi tersebar di Indonesia dari aspek kawasan (*wetland*), keanekaragaman hayati maupun dari aspek sosial budaya masyarakat. Berbagai kriteria Taman Nasional Lorentz yang digunakan sebagai bahan justifikasi situs warisan dunia antara lain meliputi sejarah geologi bumi, catatan purbakala, ciri geomorfologis dan fisiografis, proses evolusi ekologis, fenomena alam serta habitat alam yang mendukung keanekaragaman hayatinya.

Berbagai keunikan dan spesifikasi masing-masing taman nasional yang terdapat di Propinsi Irian Jaya menuntut adanya pengelolaan yang bijaksana baik dari aspek pemanfaatan maupun pelestariannya, diharapkan dapat memberikan kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat terutama masyarakat yang hidup di dalam kawasan taman nasional tersebut.

II. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kebijakan merupakan suatu keputusan dalam upaya memecahkan suatu permasalahan yang melibatkan banyak pihak. Sumber daya yang diperlukanpun tidak sedikit sehingga diperlukan suatu pertimbangan yang serius dalam menentukan serta menetapkan suatu kebijakan. Kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup tergolong pada kebijakan bagi kepentingan umum. Dengan demikian kepentingan seluruh lapisan masyarakat akan ditentukan oleh kebijakan tersebut.

Pengelolaan lingkungan diartikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara serta memperbaiki kualitas lingkungan agar dapat menjamin pemenuhan kebutuhan hidup. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Secara umum kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Propinsi Irian Jaya meliputi kelestarian alam dan rehabilitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengembangan kelembagaan, peran serta masyarakat, dan kemampuan sumber daya manusia, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya baku mutu dan fungsi lingkungan, penataan ruang dan keterpaduan antara sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia serta sistem informasi lingkungan. Kebijakan tersebut dimaksud agar pembangunan yang dilaksanakn di Propinsi Irian Jaya dapat menjamin kelestarian lingkungan hidup serta keseimbangan dan keserasian pembangunan berkelanjutan.

Didasarkan atas arah kebijakan pengelolaan hidup di Irian Jaya tersebut, maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat I Irian Jaya mengembangkan konsep Tri Karya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didasari atas asas kemitraan demi pencapaian tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Pertama adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ini antara lain melalui pelatihan, dan peningkatan pendidikan di bidang lingkungan. Dengan sumber daya manusia yang handal dan kelembagaan yang solid dan profesional maka diharapkan pengelolaan lingkungan akan lebih terarah dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Kedua, peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kondisi lingkungan hidup sangat menentukan kehidupan masyarakat di Irian Jaya. Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui kegiatan penyadaran (*public awareness*) masyarakat, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pengembangan kelembagaan termasuk penyimpanan data dan informasi melalui jaringan sistem informasi lingkungan. Kegiatan ini antara lain melalui inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan, pengembangan system komputerisasi, pengembangan neraca kualitas sumber daya alam dan lingkungan serta pengembangan manajemen lingkungan melalui penyusunan program pengelolaan lingkungan hidup.

Berbagai upaya pengelolaan lingkungan sedang dan terus dilaksanakan di Irian Jaya. Akan tetapi masih seringkali terjadi benturan konflik kepentingan antara pembangunan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang semakin merumitkan permasalahan lingkungan. Di satu sisi pembangunan membutuhkan sumber daya alam namun di sisi lain nilai-nilai konservasi semakin diabaikan dengan melakukan eksploitasi secara besar-besaran dan tidak terkendali.

Dengan terpilihnya suatu alternatif yang dianggap tepat untuk menyelesaikan konflik kepentingan tersebut di Irian Jaya, bukanlah berarti bahwa masalah tersebut benar-benar selesai. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan terutama dari aspek sosial budaya masyarakat di Irian Jaya. Aspek sosial budaya telah menjadi isu penting di Irian Jaya terutama dalam pengambilan keputusan menghadapi permasalahan pembangunan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan.

III. Isu-isu Lingkungan Hidup di Taman Nasional

Beberapa isu lingkungan hidup di Taman Nasional di propinsi Irian Jaya meliputi aspek kelembagaan, aspek Biogeofisik aspek social budaya. Secara umum ketiga aspek tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, isu lingkungan hidup di Taman Nasional yang perlu mendapatkan perhatian antara lain, koordinasi pengelolaan Taman Nasional dengan pembangunan sector dan regional, penegakan hukum atas pelanggaran Undang-undang di Taman Nasional, kemampuan perencanaan pengelolaan Taman Nasional serta

peningkatan sarana dan prasarana kegiatan pengelolaan. Koordinasi yang dimaksudkan antara lain pembangunan jalan, pembukaan lahan perkebunan, pertambangan galian C maupun galian vital serta strategis tidak dikoordinasikan secara optimal.

b. Aspek Biogeofisik

Isu lingkungan dari biogeofisik di Taman Nasional yang paling menonjol adalah kehadiran spesies eksotik. Spesies eksotik adalah hama yang menyebabkan terjadinya degradasi terhadap kompetisi, keragaman dan dominasi salah satu spesies. Dan kehadiran spesies eksotik kedalam suatu habitat atau *niche* dapat mempengaruhi keberadaan spesies endemik.

Oleh sebab itu introduksi spesies eksotik baik oleh manusia maupun secara alami (migrasi) perlu dikendalikan mengingat kondisi dominansi, kompetisi dan keanekaragaman hayati yang ada di taman nasional. Pengendalian sejak tahap awal akan lebih baik dibandingkan apabila cara pemusnahan secara besar-besaran dalam kondisi spesies eksotik telah mendominasi Taman Nasional, hal ini akan sulit untuk dilakukan.

Dari aspek geofisik kawasan sering kawasan Taman Nasional berada pada suatu kawasan terbuka, sehingga mempersulit aspek pengamanan dan pengawasan. Aksesibilitas serta lalulintas darat maupun laut mempengaruhi tata batas yang terkesan saling tumpang tindih dalam pemanfaatannya.

c. Aspek Sosial Budaya

Isu lingkungan di Irian Jaya berkaitan dengan aspek sosial budaya sangat mendominasi permasalahan di Taman Nasional. Beberapa isu tersebut antara lain meliputi, sistem pemilikan tanah, pengakuan hak ulayat, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional, pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat serta kekerabatan antara klen (marga).

Seringkali isu-isu tersebut terabaikan dalam pengelolaan taman Nasional sehingga ketika dimunculkannya suatu rencana pengelolaan, justru pada saat itu awal dari konflik kepentingan antara masyarakat dengan pemilik hak ulayat dengan pemerintah sebagai institusi pengelola taman nasional.

Sebelum pemerintah menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan taman nasional, aktifitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya telah berlangsung sejak lama. Kearifan tradisional masyarakat ditunjukkan dengan kesederhanaan peralatan,

kesederhanaan konsep pemenuhan kebutuhan serta nilai-nilai sumber daya alam yang dipandang secara religius. Kondisi ini perlu dipahami dan menjadi pertimbangan bagi pengambilan keputusan pengelolaan taman nasional.

IV. Peranan Taman Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Pasal 1 ayat (14) memerintahkan taman nasional kepada dua kepentingan yaitu kepentingan perlindungan dan kepentingan pemanfaatan. Seringkali terjadi pada taman nasional terutama zona pemanfaatan, dikelola tanpa terkendali sedangkan di sisi lain pada zona perlindungan terjadi perusakan yang disebabkan introduksi spesies eksotik maupun aktifitas pembangunan.

Berdasarkan isu-isu lingkungan yang terdapat di Taman Nasional, maka taman nasional dapat memegang peran (*role*) dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peran tersebut antara lain taman nasional dapat menjadi mediasi penataan, pengawasan, pemeliharaan, pengembangan, pemulihan dan pengendalian pada zona inti perlindungan maupun zona pemanfaatan taman nasional.

Pengelolaan pada zona pemanfaatan diperintahkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, pariwisata dan rekreasi. Dalam zona pemanfaatan potensi kerusakan lebih banyak dibandingkan zona perlindungan. Terutama pada tujuan pariwisata dan rekreasi.

Untuk itu peran taman nasional sebagai mediasi pengendalian lingkungan hidup diperkuat pula oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup. Antara lain setiap aktifitas yang akan berlangsung di kawasan lindung diwajibkan melaksanakan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menjamin penegakan hukum bagi pelanggaran lingkungan yang terjadi. Bagi siapapun yang berbuat melanggar ketentuan undang-undang tersebut maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Taman nasional dapat pula memegang peran pengembangan dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama dari aspek sosial budaya. Peran tersebut antara lain berupa peran serta masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lingkungan dan media mempertahankan zona inti yang memang dari hak ulayat diperintahkan untuk zona

perlindungan. Pelanggaran terhadap hak ulayat masyarakat dan nilai-nilai kearifan lingkungan masyarakat merupakan kesejahteraan lingkungan masyarakat merupakan kejahatan lingkungan. Hal ini terakomodasi di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 pada pasal 5-7 tentang hak dan kewajiban masyarakat alam pengelolaan lingkungan hidup.

Peran pengembangan lainnya dari taman nasional dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan ekoturisme yang dapat mendatangkan pemasukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Ekoturisme yang langsung melibatkan partisipasi masyarakat dapat mendukung upaya pengendalian pemanfaatan pada zona inti kawasan. Melalui taman nasional dapat pula mendukung upaya pemenuhan kebutuhan wisatawan akan penjelajahan hutan, penyelaman maupun menyusuri gua-gua alamiah yang memang telah tersedia dalam taman nasional (*Mainstream ecotourist*).

Peran penataan dan pengawasan yang dilaksanakan di taman nasional membutuhkan kerjasama dan kordinasi antara pengelola serta masyarakat. Misalnya dalam penentuan kegiatan yang diperbolehkan dalam zona pemanfaatan dan zona perlindungan. Selain itu peran pengawasan taman nasional dapat diaplikasikan melalui koordinasi kerjasama Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) dan masyarakat terhadap kasus-kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di dalam taman nasional.

V. Penutup

Demikian beberapa uraian singkat tentang peranan taman nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup di Irian Jaya. Selanjutnya sangat diharapkan kerjasama antara berbagai pihak terutama pihak pengelola taman nasional, sektor swasta dan masyarakat guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan di propinsi Irian Jaya.

E. Makalah Pakar

Daftar Isi

1. Pengelolaan Taman Nasional sebagai Komponen Pembangunan Daerah dalam Era Reformasi *oleh Dr.Dedi M. Masykur Riyadi, Kepala Biro Pembangunan DATI I dan Transmigrasi, Bappenas* E1 - 1
2. Peranan Taman Nasional dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat, *oleh Eddy Mantjoro, Prof. Ekonomi Sumber Daya Kelautan, Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan, UNSRAT* E2 -15

Pengelolaan Taman Nasional Sebagai Komponen Pembangunan Daerah dalam Era Reformasi¹

Oleh :

Dr. Dedi M. Masykur Riyadi²

I. Perubahan Konstelasi Perundang-undangan: Transisi Kewenangan Antara Pusat dan Daerah

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) secara teoritis telah memberikan 2 (dua) bentuk otonomi kepada 2 (dua) daerah, yaitu **otonomi terbatas** kepada daerah propinsi dan **otonomi luas** kepada daerah kabupaten/kota. Seiring dengan pengembangan otonomi tersebut, maka secara terbalik konsekuensinya adalah dibatasinya atau berkurangnya kewenangan pusat.
2. Dalam UUPD pasal 7 ayat (1) tertulis bahwa seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan adalah merupakan kewenangan daerah, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain dimaksud dalam ayat (2) pasal yang sama tertulis meliputi : 1) kebijakan tentang perencanaan nasional dan pembangunan nasional secara makro; 2) dana perimbangan keuangan; 3) sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian; 4) pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, 5) pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis; 6) konservasi; dan 7) standarisasi nasional.
3. Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan/atau kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.

¹ Disampaikan dalam Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Indonesia Bagian Timur, di Manado, Tanggal 24 - 27 Agustus 1999.

² Kepala Biro Pembangunan Dati I dan Transmigrasi, Bappenas.

4. Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota meliputi: 1) pekerjaan umum; 2) perhubungan; 3) kehutanan; dan 4) perkebunan. Kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya meliputi: 1) perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro; 2) pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial, dan penelitian yang mencakup wilayah propinsi; 3) pengelolaan pelabuhan regional; 4) pengendalian lingkungan hidup; 5) promosi dagang dan budaya/pariwisata; 6) penanganan penyakit menular dan hama tanaman; dan 7) perencanaan tata ruang propinsi.
5. Kewenangan kabupaten dan kota sebagai daerah otonom mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan pusat dan propinsi. Bidang pemerintahan yang **wajib** dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi : 1) pekerjaan umum; 2) kesehatan; 3) pendidikan dan kebudayaan; 4) pertanian; 5) perhubungan; 6) industri dan perdagangan; 7) penanaman modal; 8) lingkungan hidup; 9) pertanahan; 10) koperasi; dan 11) tenaga kerja.
6. Singkatnya, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang secara legal formal merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka telah terjadi pergeseran titik pandang dalam melihat kewenangan dalam bidang pemerintahan. Dalam Undang-Undang yang lama, titik pandang kewenangan dimulai dari Pusat (*Central Government Looking*), sedangkan dalam Undang-Undang yang baru, titik pandang kewenangan dimulai dari daerah (*Local Government Looking*).

II. Perencanaan Pembangunan Pra Reformasi: Kuatnya Pendekatan Sentralistik

1. Perencanaan pembangunan selama ini menggunakan pendekatan yang bersifat komprehensif (*comprehensive planning*), yang mengkombinasikan pendekatan perencanaan dari atas ke bawah (*top-down planning*) dan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*). Perencanaan dari atas menggunakan acuan Repelita, yang secara komprehensif-indikatif mencakup rencana pembangunan seluruh sektor selama lima tahun dalam kerangka pola pembangunan jangka panjang 25 tahun. Repelita ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan tahunan yang menggunakan kerangka

pendekatan sektoral. Perencanaan dari bawah terutama dicerminkan oleh mekanisme perencanaan tahunan yang dilaksanakan melalui berbagai forum koordinasi/konsultasi perencanaan. Pendekatan “proses” ini dilakukan mengingat luasnya negara kita yang terdiri atas 27 propinsi dan lebih dari 310 kabupaten/kota dan sistem perundang-undangan yang berlaku menyebabkan diterapkannya mekanisme perencanaan secara berjenjang (*hierarchical*).

2. Berdasarkan pelaksanaannya selama ini, pendekatan perencanaan pembangunan mempunyai beberapa permasalahan seperti antara lain:
 - a. ***Proses perencanaan membutuhkan waktu cukup lama.*** Hal ini terjadi antara lain karena proses pengambilan keputusan bersifat sentralistis dan dilakukan secara berjenjang. Mekanisme perencanaan tahunan misalnya membutuhkan waktu kurang lebih 9 bulan.
 - b. ***Perencanaan dari atas ke bawah lebih menggunakan pendekatan yang bersifat sektoral dan parsial,*** termasuk pula pada perencanaan sektor pembangunan daerah.
 - c. ***Kualitas dan kapasitas perencanaan sangat beragam.*** Perencanaan dari atas ke bawah, walaupun mempunyai konsep yang baik seringkali sulit diimplemetasikan, sedangkan perencanaan dari bawah seringkali hanya berbentuk semacam pengajuan usulan keinginan (*wishing list*) tanpa memperhatikan kondisi daerah, aspirasi masyarakat setempat, dan kebutuhan nyata daerah.
 - d. ***Proses perencanaan dinilai kurang transparan,*** karena tidak memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan di daerahnya.
 - e. ***Sumber daya atau pembiayaan pembangunan bersifat sentralistik.*** Keterkaitan pembiayaan menjadikan pemerintah daerah sangat bergantung kepada pusat dalam hal perencanaan pembangunannya. Belum adanya pengaturan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah selama ini menjadi salah satu kendala utama perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Melihat berbagai permasalahan tersebut di atas, di masa mendatang, perencanaan yang menggunakan pendekatan kombinasi antara *top-down planning* dan *bottom-up planning* ini mungkin masih perlu digunakan, namun dengan kerangka, proses dan mekanisme perencanaan yang sama sekali baru, yang berlandaskan kepada keterbukaan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban.

III. Reformasi Perencanaan Pembangunan: Tuntutan Demokratisasi, Transparansi, Desentralisasi, dan Otonomi

1. Salah satu tuntutan yang berkembang dalam era reformasi akhir-akhir ini bagi pembangunan daerah adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk semua daerah, yang menjamin kehidupan demokrasi dalam masyarakat. Pada masa transisi seperti sekarang ini, pembangunan daerah lebih diarahkan untuk mengatasi krisis ekonomi di daerah dalam waktu sesingkat-singkatnya, terutama untuk pemulihan usaha ekonomi produktif baik dalam *level* daerah maupun *level* nasional. Hal ini dilakukan sebagai upaya menciptakan stabilitas daerah dan nasional, yang pada gilirannya diharapkan dapat mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) yang sesungguhnya.
2. Dalam kerangka perencanaan pembangunan, mekanisme perencanaan pembangunan tahunan yang diterapkan selama ini yang dikenal dengan nama P5D sudah selayaknya disesuaikan dengan berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi, terutama perubahan konstelasi perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pusat dan daerah, baik dalam hal kewenangan keuangan maupun kewenangan pemerintahan.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, maka reformasi yang mendesak untuk dilakukan adalah pada praktik dari mekanisme perencanaan tahunan. Sesuai dengan Undang-Undang yang baru maka diharapkan pola dan pendekatan mekanisme perencanaan tahunan mulai dari **Musbangdes, Temu Karya UDKP, Rakorbang Kabupaten/Kota, Rakorbang Propinsi, Konregbang, dan Konasbang**, harus diarahkan dan dipusatkan kepada penyelesaian dokumen usulan perencanaan sesuai dengan tingkat kewenangan yang ada (*planning by authority level*).
4. Dengan format mekanisme perencanaan tersebut maka diharapkan usulan perencanaan yang akan dilaksanakan di daerah dapat diselesaikan sepenuhnya di daerah, yang secara keseluruhan telah memasukkan pertimbangan-pertimbangan lokalitas yang ada, baik potensi maupun kebutuhan daerah (*planning by locality*).
5. Implikasi dari format mekanisme perencanaan tersebut adalah adanya pembagian tanggungjawab (*shared responsibility*) dalam menyelesaikan usulan perencanaan di masing-masing tingkatan serta adanya konsentrasi (*focusing*) terhadap penyelesaian usulan perencanaan yang menjadi kewenangan di masing-masing tingkatan.

IV. Perencanaan Pembangunan Dalam Era Reformasi: Orientasi Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat

1. Setelah kita melampaui masa transisi, perencanaan pembangunan daerah harus segera ditata kembali agar tahap pembangunan selanjutnya dapat dilaksanakan secara sistematis. Tujuan pembangunan daerah pada masa mendatang mencakup antara lain:
 - a. Mengembangkan otonomi daerah melalui perluasan dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menciptakan stabilitas daerah dan nasional.
 - b. Memperluas kesempatan dan pilihan yang seluas-luasnya dalam seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan masyarakat madani.
 - c. Mengupayakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat yang serasi antar golongan dan daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan keanekaragaman daerah.
 - d. Mengembangkan pola pengelolaan sumber daya alam yang bertanggungjawab dan memperhatikan nilai-nilai kelestarian lingkungan hidup.
2. Pencapaian tujuan pembangunan daerah tersebut sangat bergantung kepada keberhasilan pelaksanaan desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Salah satu keuntungan dari desentralisasi adalah lebih dekatnya pengambil keputusan, dalam hal ini pemerintah daerah dengan masyarakat yang dilayaninya yang merupakan penerima dampak keputusan, dan -terutama- sebagai *stakeholders*. Dengan demikian, prioritas pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat diharapkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat di suatu daerah. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan dapat berjalan dan berkembang. Beberapa prinsip yang perlu dikembangkan agar desentralisasi berjalan baik adalah: **kejelasan, keterbukaan, ketangungjawaban, dan keberkelanjutan.**
3. Dengan semakin meningkatnya desentralisasi maka proses perencanaan berjenjang seperti yang berjalan selama ini nampaknya tidak diperlukan lagi. Untuk itu, ruang lingkup perencanaan pembangunan dapat dibagi berdasarkan fokus pembangunan di masing-masing tingkat pemerintahan seperti digambarkan dalam tabel berikut ini:

TINGKAT	FOKUS
Pusat	Stabilisasi perencanaan makro: <ul style="list-style-type: none"> - Kerangka ekonomi makro dan regional. - Antisipasi masalah-masalah internasional dan kawasan. - Penetapan standard dan kualitas pembangunan (dekonsentrasi/sektoral) - Masalah-masalah khusus terkait dengan upaya strategis nasional
Propinsi	Pengelolaan sumber daya: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan prasarana ekonomi terpadu (jalan, irigasi, dan lain-lain). - Pengembangan investasi terpadu (kawasan industri/andalan, dan lain-lain) - Pembangunan yang berkelanjutan (rehabilitasi DAS, hutan, dan lain-lain)
Kabupaten/Kota	Pelayanan masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kebutuhan prasarana dasar (perumahan, air, sanitasi, listrik, dan lain-lain). - Penunjang dasar (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain). - Pengembangan usaha ekonomi produktif lokal. - Pelayanan administrasi dan pemerintahan umum

V. **Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*): Sebuah Tawaran Alternatif Perencanaan**

1. Dengan ruang lingkup perencanaan yang mempunyai titik berat pembangunan yang berbeda tersebut, maka perencanaan komprehensif yang membutuhkan waktu lama, basis data dan informasi yang besar, serta koordinasi dan mekanisme yang tidak efektif dan efisien (*complicated*) tidak dapat digunakan lagi. Pendekatan perencanaan yang mungkin dapat menjadi alternatif adalah perencanaan strategis (*strategic planning*).
2. Perencanaan strategis ini bukan suatu bentuk atau pendekatan perencanaan yang baru. Teori mengenai perencanan ini berkembang sejak tahun 1970-an, diadaptasi dari manajemen dan cara kerja sektor swasta untuk diaplikasikan dalam sektor pemerintahan. Pengembangan pendekatan perencanaan ini sangat bervariasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang diperlukan. Ciri-ciri perencanaan strategis ini antara lain adalah:

- a. Menggunakan lingkup waktu jangka pendek (2-3 tahun)
 - b. Ada tujuan dan sasaran yang jelas
 - c. Ada tahap pencapaian yang jelas, yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada masing-masing tahap.
 - d. Tidak memerlukan data yang komprehensif rinci, namun senantiasa diperbarui karena selalu terdapat evaluasi pada setiap tahap pelaksanaan.
3. Dengan menggunakan pendekatan perencanaan strategis tersebut, kerangka perencanaan regional secara makro perlu ditetapkan dan disepakati oleh semua pelaku perencanaan di pusat dan di daerah. Kerangka rencana regional tersebut dapat ditetapkan untuk jangka waktu menengah yaitu 5 tahun, namun terdapat tahap-tahap pencapaian yang disusun atau diatur dengan pendekatan strategis dengan jangka waktu yang lebih pendek, misalnya 1 atau 2 tahunan. Rencana jangka menengah adalah rencana bergulir (rolling-plan) yang disesuaikan secara berkala dalam rencana jangka pendek dengan perubahan-perubahan yang terjadi.
4. Keberhasilan pendekatan ini memerlukan beberapa kondisi sebagai berikut :
- a. Dikembangkannya perangkat desentralisasi (peraturan perundang-undangan, struktur kelembagaan, struktur anggaran).
 - b. Dikembangkannya mekanisme perencanaan, termasuk mekanisme penganggaran tahunannya.
 - c. Dikembangkannya sistem analisis yang mengevaluasi dan memonitor perkembangan keserasian pembangunan antar daerah.
 - d. Dikembangkannya sistem analisis hubungan pusat dan daerah secara berkelanjutan.
 - e. Reformasi sistem-sistem perencanaan dan administrasi pembangunan yang dipandang tidak efektif lagi.
 - f. Berkembangnya kualitas aparat daerah, khususnya kemampuan analisis, modeling, dan membuat sistem yang transparan.
 - g. Dikembangkannya sistem pemerintahan yang bersih, jujur dan berwibawa.

VI. Pengelolaan dan Pembangunan Taman Nasional Dalam Rangka Otonomi Daerah dan Desentralisasi

1. Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi—termasuk di dalamnya Taman Nasional- harus diarahkan kepada suatu pola keseimbangan kaitan antara fungsi ekologis, fungsi ekonomi, dan fungsi sosial budaya yang ada guna mewujudkan suatu masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan.
2. Sebagai salah satu bentuk kawasan konservasi, Taman Nasional mempunyai fungsi dan peranan yang sedemikian besar bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang tidak dapat diganti dengan yang lain. Di sini unsur hubungan ketergantungan antara masyarakat sekitarnya dengan Taman Nasional sangat besar. Kebijakan pengelolaan Taman Nasional di era reformasi ini menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan tetap mendasarkan pada kelestarian keberadaan dan peran keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
3. Pengembangan dan pembangunan Taman Nasional hendaknya memperhatikan pengembangan wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu ruang lingkup pengembangannya perlu memperhatikan keterkaitan dinamis antar ekosistem regional dalam suatu kerangka pembangunan wilayah secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan sistem. Dengan demikian pengembangan dan pembangunan Taman Nasional selain mampu melindungi dan melestarikan jenis serta menyediakan objek wisata alam/ekoturisme, sekaligus harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu orientasi baru, yaitu berorientasi pada partisipasi aktif masyarakat dan instansi terkait dalam pola pembangunan yang berwawasan konservasi alam dan lingkungan.
4. Kebijakan pembangunan Taman Nasional yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah/daerah atau biasa dikenal dengan *Integrated Conservation and Development Program (ICDP)*, sangat ditentukan kepada kepedulian/kesadaran dan peranserta aktif masyarakat, swasta, instansi pemerintah yang terkait, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada. Berbagai program sektoral dan regional yang dikembangkan, serta adanya karakteristik kebutuhan dan penggunaan lahan di sekitar kawasan Taman Nasional akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kelestarian Taman Nasional. Keadaan ini mengharuskan pengelola Taman Nasional untuk selalu memperhatikan faktor-faktor lain di luar batas kawasan Taman Nasional.

5. Dalam memulai babak baru, operasionalisasi pemberdayaan masyarakat di sekitar Taman Nasional tersebut harus ditunjang dengan iklim kondusif yang diciptakan oleh pemerintah, melalui perencanaan sosial, yakni perencanaan yang memihak dan perencanaan yang berkeadilan, selain perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat (*participatory planning*) dalam satu konsep pembelajaran sosial yang komprehensif, yang mengintegrasikan proses saling belajar antara aparat pengelola dan warga masyarakat. Dengan demikian mekanisme pembangunan dilaksanakan lebih transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan.
6. Namun kebijakan dalam perencanaan itu baru bisa efektif berjalan jika didasarkan pada **otonomi daerah** dan **desentralisasi**, dengan mengubah kebijakan politik yang sentralistik ke arah desentralisasi, di mana dalam pembangunan ekonomi nasional faktor pertumbuhan regional punya kontribusi yang signifikan. Potensi daerah dikembangkan sesuai dengan kondisi, aspirasi dan dengan mengembangkan kebijakan daerah.
7. Perubahan mendasar dalam sistem ekonomi kita yaitu menuju ke arah sistem ekonomi rakyat merupakan momentum yang tepat untuk mengimplementasikan paradigma ekonomi yang berbasiskan sumber daya lokal. Landasan penting dalam sistem ini harus dinyatakan secara terbuka, termasuk penjelasan-penjelasaannya mengenai hal-hal yang paling baik untuk dilakukan. Sehubungan dengan itu, sebagai sumber daya lokal – Taman Nasional merupakan aset penting daerah yang dapat memberikan sumbangan dalam menggerakkan ekonomi daerah.
8. Dewasa ini isu otonomi daerah dan desentralisasi menjadi salah satu agenda reformasi yang utama. Sejalan dengan isu tersebut maka Tap MPR RI No. XV/MPR/1998, dimaksudkan untuk memberikan wewenang yang lebih besar bagi jajaran birokrasi pemerintah daerah beserta segenap jajaran masyarakat lokal guna mengembangkan dan mengelola segenap potensi dan peluang yang ada di daerah dalam kegiatan ekonomi serta memajukan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah.
9. Kebijakan desentralisasi di bidang kehutanan sebenarnya telah diawali sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah. Makna dari dikeluarkannya PP ini adalah pemberdayaan pemerintah daerah (terutama Kabupaten) dan masyarakat dalam pendayagunaan sumber daya alam hutan yang ada di daerahnya. Secara keseluruhan terdapat 12 urusan yang diserahkan kepada daerah dengan perincian 2 (dua) urusan

diserahkan kepada Daerah Tingkat I, yaitu : Pengelolaan Taman Hutan Raya dan Penataan Batas Hutan. Sedangkan 10 (sepuluh) urusan lainnya diserahkan kepada Daerah Tingkat II, meliputi: (1) Penghijauan dan Konservasi Tanah; (2) Persuteraan Alam; (3) Perlebahan; (4) Penyuluhan; (5) Pengelolaan Hutan Rakyat dan Hutan Milik; (6) Pengelolaan Hutan Lindung; (7) Pengelolaan Hasil Hutan Non Kayu; (8) Perburuan Tradisional Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Peraturan Perundang-undangan pada Areal Buru; (9) Perlindungan Hutan; dan (10) Pelatihan Keterampilan Masyarakat di Bidang Kehutanan. PP ini perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

10. Walaupun PP tersebut telah satu tahun berjalan, namun demikian urusan-urusan tersebut belum secara total diimplementasikan. Hambatan utama yang menjadi masalah adalah masalah kelembagaan dan status kepegawaian; kemampuan dan keterampilan teknis aparat di daerah; kesiapan kontribusi daerah dalam mengalokasikan APBD-nya ke dalam kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusannya; serta koordinasi vertikal dengan pusat dan horisontal dengan instansi teknis lain di daerah.
11. Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 khususnya pasal 7 ayat 2, dijelaskan bahwa pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi merupakan kewenangan pusat. Disini jelas bahwa urusan konservasi yang merupakan sebagian besar tugas kehutanan pada saat ini tetap merupakan kewenangan pusat. Namun demikian dengan melihat permasalahan yang ada, pada hakikatnya urusan konservasi tersebut merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
12. Pengelolaan Taman Nasional sebagai salah satu upaya konservasi memerlukan koordinasi dan kerjasama yang mantap serta berkesinambungan antara pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini mengingat semua jenjang pemerintahan memiliki kewenangan terhadap lingkungan, meskipun dengan kadar kewenangan (cakupan) yang berbeda. Persoalan yang selama ini muncul dalam pengelolaan suatu kawasan konservasi adalah kewenangan sentralistik oleh pemerintah pusat yang berdampak negatif akibat dari kurangnya keterlibatan dan peranserta daerah dalam pengelolaan kawasan konservasi, sehingga tanggung jawab dan rasa kepemilikan daerah relatif kecil terhadap aset yang ada di wilayahnya. Akibat dari persoalan ini, maka timbul banyak kasus seperti: pencurian hasil hutan, penyerobotan kawasan, dan kebakaran hutan yang terjadi hampir di semua lokasi kawasan konservasi.

13. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah perlu ditelaah adalah seberapa jauh/besar daerah dapat mengambil manfaat ekonomi dari adanya aset Taman Nasional yang ada di wilayahnya tanpa mengganggu kelestariannya. Dengan pengaturan yang baik antara pengelola Taman Nasional, Pemerintah Daerah, Swasta, dan masyarakat akan dapat disusun suatu pola dan bentuk kerjasama yang sinergis dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Taman Nasional atau kawasan konservasi lainnya tidak menjadi “**beban**” bagi daerah, tetapi sebagai suatu “**anugerah**”/aset yang memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat dan daerah.
14. Rencana pengembangan Taman Nasional yang disusun secara terpadu (*Integrated Management Plan*) yang menjadi bagian dari rencana pembangunan wilayah, hendaknya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak di daerah sebagai acuan dalam pengembangan wilayah di sekitarnya. Dengan demikian peluang yang ada seperti *tourisme*, industri kecil, transportasi, perhotelan, perdagangan, dan sistem perbankan dapat ditangkap oleh swasta dan masyarakat sebagai suatu alternatif dalam menciptakan lapangan kerja dan berusaha di daerah. Agar dapat dijadikan acuan, maka rencana tersebut harus disosialisasikan sehingga disepakati oleh semua pihak terkait. Rencana itu tidak boleh hanya menjadi “**milik**” pengelola Taman Nasional.
15. Implikasi besar dalam era otonomi daerah dan desentralisasi yang harus segera diselesaikan adalah masalah penguatan kelembagaan di daerah (pemerintah dan masyarakat) yang disertai dengan status kepegawaian yang jelas, serta peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat dan masyarakat merupakan tiga hal utama yang harus segera dilakukan.
16. Hal lain yang perlu diingat pula adalah sifat “khas” pembangunan kawasan konservasi, yaitu mengenai keberadaannya yang bersifat melampaui batas-batas fisik kawasan hutan, batas sosial dan ekonomi serta administrasi pemerintahan. Dengan sifatnya yang demikian ini maka diperlukan penyelenggaraan pengelolaan yang “khas setempat” tetapi acapkali bersifat lintas batas-batas dimaksud. Oleh karena itu pengelolaan yang didasarkan kepada “mutual interest”, “mutual benefit”, dan dengan mengembangkan “jaring” menjadi sangat penting untuk menjamin konsistensi pengelolaan di berbagai tingkatan dan waktu. Untuk menjamin keberhasilannya maka diperlukan keterbukaan baik dalam manajemen maupun informasi dapat dipertanggungjawabkan, partisipatif, saling percaya, dan demokratis. Seluruh pihak terkait merupakan “mitra sederajat” yang bekerja untuk kepentingan masing-masing dan bersama secara sinergis.

17. Tidak kurang dari 20 Taman Nasional berada di Wilayah Indonesia Bagian Timur, yang tersebar di pulau Kalimantan, Sulawesi, Seram, Lombok, Komodo, dan Irian. Keberadaan Taman Nasional tersebut belum sepenuhnya dapat berfungsi dengan baik, apalagi dalam memberikan sumbangannya bagi pendapatan daerah. Dalam era pemberdayaan masyarakat, maka keberadaan Taman Nasional harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu pengelolaannya harus diupayakan pada pencapaian dampak positif berupa peningkatan manfaat langsung maupun tidak langsung sesuai dengan fungsi, daya dukung, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang tersedia di masing-masing Taman Nasional.
18. Sebagai langkah awal untuk mendukung pemanfaatan Taman Nasional secara optimal adalah upaya penyediaan informasi yang lengkap dan terbuka, pengelolaan pengunjung, serta penggalian objek dan daya tarik wisata lainnya. Hal baru yang perlu dikembangkan adalah pengembangan budidaya plasma nutfah yang dapat kelola masyarakat, sekaligus dapat dijadikan sebagai tujuan agrowisata bagi para wisatawan. Untuk itu konsep pengembangan daerah penyangga perlu terus dikembangkan secara koordinatif dengan pemerintah daerah, sektor-sektor terkait, LSM, swasta dan masyarakat. Pengembangan daerah penyangga yang merupakan “bagian” dari pengelolaan Taman Nasional tetapi merupakan “kewenangan” daerah diharapkan dapat akan memacu keterlibatan masyarakat dalam pengamanan kawasan secara swadaya. Kegiatannya harus dapat diarahkan untuk memberikan kesempatan bekerja dan berusaha, serta lebih jauh lagi untuk mendidik sumber daya manusia yang mandiri dan mampu mengurus dirinya serta lingkungan hidupnya (*self-propelling growth*).
19. Dalam pemanfaatan Taman Nasional yang menerapkan prinsip keterbukaan dan kebertanggungjawaban diperlukan: 1) peranserta aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang ada; 2) penataan kelembagaan yang disusun secara terpadu antarunsur pembangunan; dan 3) pemantapan otonomi dan desentralisasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Bersamaan dengan itu tentunya diperlukan adanya penetapan sumber-sumber keuangan bagi daerah secara adil, serta menyiapkan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya alam (termasuk Taman Nasional) yang dapat memperluas kewenangan pemerintah daerah.
20. Tantangan daerah yang dihadapi saat ini adalah kemampuan daerah dan masyarakat dalam menghimpun dan menyerap dana yang digunakan untuk menggerakkan kegiatan sosial ekonomi produktif yang berkelanjutan. Dalam kaitan ini salahsatu tugas pemerintah adalah

mengupayakan pemberdayaan aparat di daerah dan masyarakat (*capacity building*) dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat lokal.

VII. Penutup

1. Kebijakan pembangunan Taman Nasional di era reformasi diarahkan untuk mengupayakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui perbaikan sistem pengelolaan keterkaitan berdasarkan pada pemantapan fungsi ekologi, serta peningkatan fungsi ekonomi dan sosial-budaya sumber daya hutan. Namun kebijakan ini baru bisa efektif jika otonomi daerah yang luas dapat terlaksana dengan baik. Kebebasan masyarakat untuk menentukan pilihannya diharapkan akan meningkatkan upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan melalui pembangunan yang demokratis.
2. Untuk menumbuhkan peranserta aktif masyarakat seluas-luasnya, maka peran pemerintah baik di pusat maupun di daerah diharapkan seminimal mungkin. Peran pemerintah cukup membuka peluang dan mendorong agar tercipta keserasian dalam pelaksanaan, dan kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan oleh masyarakat harus diserahkan dan diselenggarakan sendiri oleh masyarakat. Sejalan dengan semangat otonomi seluas-luasnya, peran aparat pemerintah perlu dimantapkan sebagai fasilitator, dinamisator, dan katalisator dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam kaitan ini pemfokusan program dan anggaran perlu dirumuskan secara teliti berdasarkan kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah dan masyarakat. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan.

Peranan Taman Nasional Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat¹

Oleh:
Eddy Mantjoro²

I. Pendahuluan

Taman nasional dibagi ke dalam beberapa jenis menurut karakteristik lingkungan seperti taman nasional laut dan hutan. Secara umum taman nasional berisi tiga jenis sumber daya yaitu; (1) sumber daya non-hayati, (2) sumber daya hayati dan (3) sumber daya manusia. Yang disebut pertama meliputi mineral, seperti logam, emas, timah nikel, minyak, gas dll. Sedangkan yang kedua adalah mahluk hidup tumbuhan, hewan dan yang ketiga adalah sumber daya manusia. Sedikit jika ada manusia yang hidup sendirian, hampir seluruhnya berkelompok dalam satu komunitas yang biasa disebut dengan *local community* atau masyarakat setempat.

Sebetulnya secara alami, ketiga jenis sumber daya di atas berada dalam satu sistem kehidupan bersama (*ecosystem*) yang seimbang dan serasi. Sumber daya pertama dan kedua berperan sebagai pemasok (*supplier*) dan sumber daya ketiga yakni manusia sebagai pemakai (*consumers*). Hubungan pemasok dan pemakai ini berlangsung seimbang pada masyarakat setempat yang masih menganut sistem ekonomi subsisten (*Subsistence economic system*) dengan alat produksi yang masih tradisional. Keseimbangan mulai terganggu ketika masyarakat setempat mulai menerapkan sistem ekonomi pasar (*Market economic system*) dengan alat produksi moderen.

Gangguan keseimbangan berlangsung hingga kondisi sumber daya hayati dan non-hayati semakin berkurang di satu pihak dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat di pihak lain. Kondisi seperti ini mendorong orang berpikir untuk mengembalikan hubungan pemasok dan pemakai dalam keadaan seimbang seperti sediakala. Upaya menciptakan keseimbangan hubungan ketiga jenis sumber daya tersebut berdasarkan metode ilmiah disebut orang dengan istilah pengelolaan atau *management*.

¹ Paper dibacakan dalam Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Indonesia Bagian Timur 24 - 27 Agustus 1999 di Manado.

² Profesor Ekonomi Sumber Daya Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi, Manado

Sudah banyak orang tahu bahwa pengelolaan yang baik harus melaksanakan 4 fungsi utama yaitu perencanaan, organisasi, koordinasi, dan pengawasan. Pembentukan taman nasional adalah suatu wujud dan pelaksanaan fungsi organisasi dalam pengelolaan. Sumber daya hayati dan non-hayati diorganisir dalam bentuk taman nasional, hutan lindung, hutan produksi, hutan HPH, cagar alam, kebun raya, taman laut, taman safari dll. Ujung-ujungnya tidak lain hanya satu yaitu agar tercipta keseimbangan hubungan antara sumber daya alam sebagai pemasok dan sumber daya manusia sebagai pemakai.

Di dalam topik bahasan "Peranan taman nasional untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat" tersirat kebutuhan untuk menemukan rumusan hubungan yang serasi antara sumber daya hayati dan non-hayati sebagai pemasok kebutuhan di satu pihak dengan sumber daya manusia sebagai pemakai di lain pihak. Secara rinci rumusan tersebut akan diuraikan dalam makalah ini.

II. Definisi

Mengingat interpretasi dan setiap istilah bisa sama banyaknya dengan jumlah peserta seminar maka ada baiknya bila dibuat batasan tentang beberapa istilah yang ada dalam makalah ini seperti masyarakat setempat pemberdayaan ekonomi dan taman nasional. Istilah masyarakat setempat dalam artikel ini menunjuk kepada sekelompok orang yang secara fungsional terkait dalam hal pemanfaatan sumber daya alami sekitarnya dan secara bersama-sama diikat oleh tali kekeluargaan, pertalian pekerjaan, tempat tinggal serta agama yang dianut.

Pemberdayaan ekonomi adalah istilah yang muncul setelah krisis ekonomi 1997 melanda negeri ini. Ekonomi masyarakat dibayangkan sebagai benda hidup yang tergeletak di tanah tak berdaya karena kehabisan tenaga sehingga perlu diberi tenaga agar bisa berdaya dan bangkit lagi serta bergerak berputar seperti sediakala. Sebetulnya, pemberdayaan ekonomi adalah upaya mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Dengan kata lain, topik ini mencari sistem pengelolaan sumber daya alam taman nasional yang secara ekologis tetap lestari dan secara ekonomis mendatangkan manfaat dalam jangka panjang.

Istilah taman nasional dalam tulisan ini adalah suatu wilayah lingkungan hidup berisi sumber daya alam yang diberi perhatian khusus oleh pemerintah untuk dilindungi dan dilestarikan karena dianggap penting dari sudut pandang ekologis, sosio-ekonomis dan budaya serta hankamnas.

III. Konsep dan Prasyarat Pengelolaan

Konsep taman nasional belum terdefinisi dengan jelas karena ada banyak istilah lain yang bermuatan serupa tetapi sama seperti cagar alam, taman margasatwa, taman safari dll. Tetapi untuk keperluan pengelolaan, taman nasional pasti masuk kedalam salah satu dari 4 bentuk pemilikan sumber daya alam berikut ini.

(1) Tanpa pemilik (*res nullius*):

Pada bentuk ini sumber daya alam baik di darat maupun di laut tidak dimiliki oleh siapa pun (*Open access*) dan oleh karena itu tidak ada upaya pengelolaan. Sumber daya alam tanpa pemilik akan menimbulkan masalah sosial-ekonomi dan ekologis karena semua orang berhak mengambil manfaat tetapi tidak seorang pun yang mau bertanggung jawab atas kelestarian sumber daya alam tersebut

(2) Milik Negara (*respublica*):

Hak pemilikan atas sumber daya alam milik negara berada di tangan pemerintah (*state property juga di sebut common-property*), dengan demikian upaya pengelolaan ditangani oleh pemerintah. Mengingat bahwa milik negara adalah juga milik seluruh rakyat maka setiap warga negara termasuk abdi negara merasa berhak memanfaatkan sehingga terjadilah permainan *petak umpet* antara pengelola dengan masyarakat. Di satu pihak pemerintah melarang tetapi di lain pihak masyarakat berlomba menghabiskan karena pada pikiran mereka bila saya tidak mengambil semua hari ini maka besok akan diambil oleh orang lain. Ujung-ujungnya nasib sumber daya milik negara sama dengan nasib sumber daya alam tanpa pemilik (*Open access*).

(3) Milik masyarakat setempat (*rescommunee*):

Sumber daya alam yang ada di dalam wilayah satu desa dan dimiliki dan dikelola secara bersama oleh komunitas desa itu dikategorikan sebagai milik masyarakat setempat atau *communal property*. Kebanyakan dari status pemilikan seperti ini dikelola oleh warga desa melalui lembaga adat yang yang diwariskan oleh leluhur secara turun temurun di dalam komunitas itu. Dengan kata lain, pengelolaan mengikuti sistem tradisional yang diterapkan oleh leluhur sejak ratusan tahun sebelumnya. Hasil studi menunjukkan, upaya merubah sistem pengelolaan dari sistem tradisional ke sistem moderen merupakan awal dari malapetaka

kepunahan sumber daya alam. Komunitas desa di negara moderen seperti di Eropa, Jepang, Amerika, Asia dan kawasan Pacifik selatan yang masih menerapkan sistem tradisional ternyata masih menikmati manfaat ekonomi yang besar dari sumber daya alam milik desa dalam kurun waktu ratusan tahun. Sebaliknya komunitas desa yang telah beralih pada sistem pengelolaan moderen menghadapi kenyataan semakin hari sumber daya alam semakin langka.

(4) Milik perorangan (*res individue*):

Hak pemilikan sumber daya alam berada di tangan perorangan atau beberapa orang yang sepakat memilikinya secara bersama (*private property*). Fakta menunjukan bahwa sumber daya alam yang dikelola berlandaskan milik perorangan berlangsung dengan baik dan dapat di katakan hampir sempurna, dalam arti memberi manfaat ekonomis yang besar tanpa mengabaikan kelestariannya.

Ada dua hal pokok yang tersirat di dalam empat landasan pengelolaan di atas yakni posisi atau status taman nasional dan prasyarat pengelolaan. Status taman nasional berada pada nomor (2) yaitu milik negara (*public property atau common-property*). Oleh sebab itu bila mengenang 32 tahun bahkan 54 tahun kebelakang maka akan terekam bahwa pengelolaan sumber daya alam taman nasional khususnya dan sumber daya alam Indonesia urnumnya merupakan masalah abadi yang makin hari makin rumit dan belum ditemukan cara pemecahannya hingga saat ini.

Hal kedua yang juga terlihat dari uraian di atas ialah status pemilikan merupakan prasyarat utama di dalam pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam tanpa pemilik dan milik negara (*common- property resources'*) sampai kapan pun akan menghadapi kesulitan bahkan kegagalan dalam pengelolaanya. Hal ini disebabkan karena pada sumber daya milik bersama semua orang merasa berhak menikmatinya tetapi tidak seorang pun yang merasa wajib untuk melestarikannya. Itulah sebabnya maka sumber daya milik bersama yang berada di dalam lingkup wilayah taman nasional mengalami penyusutan dari waktu ke waktu. Pada gilirannya keadaan ini akan membuat ekonomi masyarakat setempat lebih tak berdaya lagi.

IV. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Perekonomian adalah suatu sistem, oleh sebab itu ia harus bergerak dan berfungsi. Perekonomian bergerak menurut putaran lingkaran, mulai dari lingkaran kecil berkembang

menjadi lingkaran besar. Dengan kata lain mulai dan usaha subsisten, usaha kecil, menengah dan akhirnya menjadi usaha skala besar.

Umumnya usaha subsisten dan usaha skala kecil dipandang sebagai unit ekonomi lemah dan tidak berdaya. Atas dasar itu maka orang-orang pandai menganjurkan agar ekonomi masyarakat yang berada pada skala ini perlu diberdayakan. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat skala kecil sudah banyak dilakukan oleh pemerintah antara lain dapat disebutkan program KIK, KMKP, IDT, TASKIN, JPS, KUT dan kini sedang diupayakan melalui peran taman nasional. Hal yang istimewa dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil melalui sejumlah program di atas ialah semuanya menempatkan koperasi di garis depan. Pada banyak negara di Eropa, Amerika dan Asia timur jauh koperasi memang berhasil sebagai wadah pemberdayaan ekonomi skala kecil-lemah tetapi pengalaman selama 54 tahun di Indonesia menunjukkan koperasi belum berhasil memberdayakan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian di sisi lain koperasi berhasil menjadi wadah tempat pengurus untuk memperkaya diri. Dengan kata lain, koperasi tidak bisa dipakai sebagai institusi pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil di negeri ini. Bila dipaksakan akan mengakibatkan ekonomi masyarakat semakin tidak berdaya karena aset dan laba koperasi habis dijarah oleh pengurusnya sendiri.

Kalau koperasi tidak bisa lalu unit atau institusi ekonomi apa yang harus digunakan?, jawabnya ialah unit ekonomi yang mereka sudah atau sedang mereka tekuni. Kenyataan menunjukkan rumah tangga merupakan unit ekonomi terkecil. Di dalam unit ini berlangsung kegiatan ekonomi dalam bentuk produksi dan konsumsi. Kegiatan ekonomi itu bisa berupa menangkap ikan (*nelayan*), menanam jagung (petani), menebang kayu (*perambah hutan*), pedagang hasil bumi dan laut (*tibo-tibo*), tukang kayu, tukang jahit, tukang gunting bahkan tukang tipu (*balai fle*) dan lain-lain. Urnumnya mereka yang menekuni kegiatan ekonomi ini termasuk dalam skala ekonomi lemah tidak berdaya. Mereka juga ada yang bermukim di dalam atau di sekitar taman nasional.

Dalam kerangka pemberdayaan ekonomi golongan masyarakat ini, rumusannya sederhana saja yaitu berikan rangsangan dan dorongan langsung kepada unit usaha yang mereka tekuni itu. Pengalaman menunjukkan rangsangan yang paling efektif dan mujarab adalah ciptakan sistem pemasaran yang menjamin harga jual produk mereka mendatangkan laba yang memadai. Membagi-bagi dana JPS dan KUT seperti yang dilakukan akhir-akhir ini hanya akan mendatangkan kesenangan sesaat dan setelah dana itu habis dibelanjakan untuk konsumsi mereka kembali seperti sediakala bahkan tambah tidak berdaya karena terhimpit utang KUT yang harus di kembalikan.

V. Peranan Taman Nasional

Sepintas lalu tidak terlihat hubungan sebab-akibat positif antara taman nasional dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat malahan yang nampak jelas adalah hubungan sebab-akibat negatif yakni saling meniadakan atau saling menghambat satu sama lain. Sudah menjadi persepsi umum bahwa taman nasional adalah suatu wilayah yang padat dipagari oleh peraturan yang melarang penduduk berbuat sesuatu di dalamnya. Sedangkan pemberdayaan ekonomi menghendaki masyarakat setempat aktif bergiat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah taman nasional. Jadi bila pengelolaan taman nasional harus menerapkan peraturan secara konsekuen maka upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat akan terhambat. Sebaliknya bila pemberdayaan ekonomi yang digiatkan maka peraturan konservasi tidak dapat ditegakkan karena penduduk dibolehkan mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalam taman nasional.

Tetapi kenyataannya ada juga taman nasional yang ditetapkan justru mencakup wilayah pemukiman seperti taman nasional Bunaken yang meliputi wilayah darat dan laut. Pada kasus seperti ini jelas bisa dicari hubungan sebab-akibatnya atau paling tidak peranannya karena masyarakat desa sudah sejak lama menggantungkan ekonomi rumah tangganya pada sumber daya alam di wilayah taman nasional tersebut. Hal serupa juga berlaku pada taman nasional Dumoga Bone di Bolang Mongondow di mana masyarakat setempat sudah sejak lama menjadikan wilayah ini sebagai lahan kegiatan produksi berupa penebangan kayu, mencari telur Maleo dan menambang emas secara tradisional. Pada contoh kasus seperti Bunaken dan Dumoga Bone, jelas ada peranan yang bisa dimainkan oleh taman nasional untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bermukim di dalam atau disekitar taman nasional. Peranan tersebut antara lain, sebagai wilayah atau lahan pengembangan sektor ekonomi primer, sekunder, dan tertier.

5.1. Sektor Ekonomi Primer

Kegiatan sektor primer meliputi kegiatan ekonomi yang mendayagunakan sumber daya alam di wilayah taman nasional seperti menangkap ikan, mengambil kayu, bercocok tanam dan kegiatan ekstraktif lainnya. Mengingat status wilayah tersebut adalah taman nasional maka kegiatan ekonomi masyarakat setempat harus berwawasan konservasi yakni kegiatan ekonomi bukan hanya produktif melulu tetapi juga harus reproduktif. Dengan demikian bukan saja sumber daya alam yang tetap lestari tetapi juga kegiatan ekonomi masyarakat setempat

berlangsung sinambung dalam jangka panjang. Pengamatan pada taman nasional Bunaken menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi primer masyarakat setempat tidak mengganggu kelestarian sumber daya alam di sana. Kelestarian mulai terganggu justru setelah wilayah itu ditetapkan sebagai taman nasional dan obyek wisata. Artinya gangguan kelestarian sumber daya alam di sini bukan disebabkan oleh kegiatan ekonomi masyarakat setempat tetapi oleh masyarakat dari luar kawasan taman nasional.

5.2. Sektor Ekonomi Sekunder

Kegiatan ekonomi sekunder seperti penambangan emas di kawasan taman nasional Dumoga Bone juga dapat dilakukan oleh masyarakat setempat dengan cara tradisional dan pada kuota tertentu. Melarang masyarakat setempat menambang emas di situ tidak realistis karena ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, masyarakat setempat akan menambang secara liar dan habis-habisan kalau perlu kegiatan produksi selama setahun dikuras dalam satu hari. Kedua, bila mereka pasrah tidak menambang maka orang dari luar yang akan datang memanfaatkannya yang ujung-ujungnya menimbulkan konflik massa seperti di Dumoga Bone yang sampai mendatangkan serdadu dari Ujungpandang.

5.3. Sektor Ekonomi Tertier

Pariwisata, restoran, hotel, dagang souvenir, dagang valas, kegiatan seni budaya dll adalah kegiatan sektor ekonomi tertier yang bisa dilakukan oleh masyarakat setempat tentu saja dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam di wilayah taman nasional tersebut.

5.4. Media Pendidikan

Taman nasional bisa berperan sebagai media pendidikan ilmu alam dan ilmu sosial. Bila memasuki taman nasional di negara maju akan terlihat disana-sini papan kecil yang berisi tulisan nama-nama sumber daya hayati dan non-hayati yang ada di dalam taman nasional tersebut. Untuk mendapatkan informasi lebih rinci tersedia brosur di loket pembelian karcis masuk yang memuat asal usul serta penyebaran sumber daya tersebut. Dari segi ilmu sosial taman nasional berperan sebagai media percontohan bagaimana mengelola sumber daya alam yang baik yang benar. Bila masuk taman di Singapura misalnya, di sana tersedia tempat sampah, tempat istirahat, tempat merokok dan tempat muda-mudi duduk berdua-duaan. Di sana pengunjung dididik tatakrama menghargai lingkungan dengan membuang sampah dan merokok pada tempatnya. Mengusik muda-mudi yang sedang berduaan di taman keburu ditangkap polisi sebelum kedua insan tersebut mengetahui ada yang mau usil.

VI. Kesimpulan

Ada beberapa peranan taman nasional dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat yaitu sebagai wilayah pengembangan sektor ekonomi primer, sekunder dan tertier serta media pendidikan masyarakat. Tentu saja dalam pelaksanaannya memerlukan pengelolaan yang baik dan benar. Bagaimana bentuk pengelolaan yang bisa memberdayakan ekonomi masyarakat setempat tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya alam di dalamnya sangat ditentukan oleh status taman nasional apakah milik negara, milik masyarakat setempat, ataukah milik perorangan.

Studi di beberapa negara termasuk di Indonesia menunjukkan sistem pengelolaan tradisional mampu mempertahankan kelestarian sumber daya alam sekaligus juga mempertahankan kesinambungan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Pengelolaan sistem moderen dan di dominasi oleh campur tangan instansi pemerintah lebih banyak menciptakan konflik ketimbang memberdayakan ekonomi masyarakat setempat.

Referensi

Gordon, S.H. 1954. The Theory of Common Property Resources. Journal of Environmental Economics. Dorfman & Norton New York pp.88-99

Hardin,G. 1968. The Tragedy of the Common. Science (162) 143-1248

Mantjoro,E. 1996. Traditional Management of Communal Property Resources: The Practice of Sasi system. Ocean and Coastal Management Elsevier Ltd. Britain. 32(1)17-37

Mantjoro, E. 1996. Management of Common Fishing Grounds: The Experience of Para Community. Coastal Management. Franci & Taylor USA 24: 229-250.

F. Kemitraan

Daftar Isi

1. Peranan Mitra Kutai dalam Mendukung Pengelolaan Taman Nasional Kutai *oleh S. Hadiprayitno, Wakil Presiden Direktur PT Kaltim Prima Coal* F1 - 1
2. Friends of Bukit Baka – Bukit Raya, Pendekatan Kemitraan Perusahaan HPH untuk Mempromosikan Pengelolaan & Pelestarian Kawasan Konservasi, *oleh Nana Suparna & Gusti Hardiansyah, PT Alas Kusuma* F2 - 5

Peranan Mitra Kutai dalam Mendukung Pengelolaan Taman Nasional Kutai

Oleh:
S. Hadiprayitno¹

A. Latar Belakang

Taman Nasional Kutai (TNK) seluas kurang lebih 200.000 hektar di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Kalimantan Timur. TNK memiliki kawasan hutan hujan dataran rendah dengan lebih dari 500 jenis pohon, serta hutan ulin cukup luas yang merupakan ciri khas Kalimantan Timur.

Dulunya TNK memiliki 80% dari seluruh species burung dan setengah dari seluruh mamalia yang ada di Kalimantan. Kawasan ini merupakan persebaran orangutan Kalimantan yang terluas. Namun, sejak ditetapkan pertama kali sebagai Suaka Margasatwa tahun 1936. Kawasan ini terus mengalami ancaman seperti kebakaran, penebangan liar dan penambahan jumlah pemukim.

B. Mitra Kutai (*Friends of Kutai*)

Lokasi TNK dikelilingi oleh beberapa perusahaan besar di bidang industri sumber daya alam dan kehutanan, seperti Pertamina, PT. Kaltim Prima Coal, PT. Badak LNG dan PT. Surya Hutani Jaya. Kehadiran industri besar ini menimbulkan dampak nyata berupa pesatnya pertumbuhan penduduk di sekitar kawasan TNK.

Tahun 1991 PT. Kaltim Prima Coal mensponsori sebuah penelitian yang menghasilkan Rencana Pengembangan TNK 1992-1996 yang kemudian dikenal sebagai *green book* TNK. Salah satu rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya pembentukan Tim Pengarah Pengembangan TNK yang dapat mempertemukan masyarakat industri dan pemerintah dalam satu wadah bagi pengembangan dan pelestarian TNK.

¹ Wakil Presiden Direktur PT. Kaltim Prima Coal

Setelah melalui serangkaian pertemuan dan diskusi intensif, tanggal 15 Juli 1994 akhirnya terbentuk Mitra Kutai (*Friends of Kutai*). Organisasi kemitraan ini bertujuan untuk membantu melestarikan dan pengembangan Taman Nasional Kutai agar dapat berfungsi sepenuhnya sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman flora dan fauna, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk pemanfaatan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Pembentukan Mitra Kutai yang merupakan model kemitraan pertama kalinya di Indonesia ditandai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* antara Dirjen PHPA dengan para anggota Mitra, yakni PT. Kaltim Prima Coal, Pertamina, PT. Pupuk Kaltim, PT. Badak LNG, PT. Porodisa, PT. Surya Hutani Jaya, dan PT. Kiani Lestari. Kemudian bergabung pula PT. Indominco Mandiri.

UNDP-UNESCO yang melihat kemitraan ini sebagai hal yang positif membantu memantapkan kerangka kerja kemitraan dengan menempatkan seorang *project manager*.

C. Ruang Lingkup dan Tata Kerja

Secara garis besar ruang lingkup kegiatan Mitra Kutai difokuskan pada hal – hal sebagai berikut :

1. Membuat foto udara kawasan TNK
2. Mengadakan rehabilitasi kawasan yang mengalami kerusakan / gangguan – I
3. Membangun dan mengembangkan prasarana / sarana pengelolaan-
4. Mengembangkan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang konservasi.

Setiap tahun Mitra Kutai mengadakan rapat untuk menetapkan proyek – proyek yang akan dikerjakan. Setiap anggota Mitra diberikan kebebasan untuk mengusulkan proyek yang relevan sesuai dengan kemampuan pendanaannya. Pada dasarnya setiap anggota membiayai sendiri proyek yang telah diusulkan, tentu saja setelah mendapat persetujuan dari Panitia Pengarah.

D. Struktur Organisasi

Mitra Kutai memiliki dua organ utama, yakni Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dirjen PHPA tanggal 29 Juni 1995. Panitia Pengarah diketuai Direktur Bina Kawasan Pelestarian Alam dan memiliki 12 anggota antara lain para direktur utama perusahaan anggota Mitra Kutai, Bupati Kutai, Kepala Kanwil dan Kepala Dinas Kehutanan Kaltim. Panitia Pengarah bertanggung jawab kepada Dirjen PHPA. Tugas pokok Panitia Pengarah adalah penetapan kegiatan – kegiatan pengembangan TNK, menetapkan skala prioritas serta anggaran biayanya.

Panitia Pelaksana diketuai oleh Kepala TNK, dibantu seorang sekretaris, bendahara dan enam anggota. Kecuali Ketua dan sekretaris, semua anggota Panitia Pelaksana berasal dari perusahaan – perusahaan yang menjadi anggota Mitra Kutai. Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Panitia Pengarah. Tugas pokoknya adalah melaksanakan semua program Mitra Kutai sesuai dengan petunjuk dari Panitia Pengarah. Setiap bulan Panitia Pelaksana mengadakan rapat untuk mengevaluasi program –program yang sedang berjalan.

E. Masalah – Masalah TNK

1. Kebakaran

Masalah paling serius yang dihadapi kawasan TNK saat ini adalah kebakaran, dimana 71.099 hektar (sekitar 30%) dari luas hutan TNK sudah musnah terbakar. Kabupaten Kutai memang mengalami kebakaran hutan yang paling parah, dimana 338.745,72 hektar (dari 392.745,72 hektar total hutan terbakar di Kaltim) terdapat di Kabupaten ini (*Kompas*, 20 April 1998).

2. Penebangan Liar dan perambahan Lahan

Penebangan Liar dan perambahan Lahan merupakan masalah lain yang juga mengancam kelestarian TNK. Meski sudah diawasi secara ketat, masih ada anggota masyarakat yang mengambil kayu dari kawasan TNK. Sedangkan perambahan dilakukan penduduk untuk mendapatkan areal perkebunan, dimana lambat laun berubah menjadi areal pemukiman.

F. Peranan Mitra Kutai

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Mitra Kutai untuk mempertahankan kelestarian TNK. Upaya – upaya tersebut antara lain peningkatan sarana dan prasarana pengawasan untuk mencegah setiap ancaman terhadap TNK dan upaya penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya pelestarian TNK.

Untuk menganggulangi kebakaran, Mitra Kutai ikut berpartisipasi membantu pemerintah melakukan upaya pemadaman dengan menjatuhkan air dari pesawat udara ke titik – titik api. Mitra juga aktif dalam menggalang kerjasama yang melibatkan Kepolisian, Kodim, Jagawana dan masyarakat untuk bersama – sama memadamkan api. Kesulitan dalam menangani masalah kebakaran ini antara lain karena titik api yang terpencar di banyak lokasi serta minimnya peralatan yang tersedia.

Kegiatan – kegiatan lain yang telah dilakukan Mitra Kutai adalah: penyuluhan kepada para petani disekitar TNK, pembuatan tapal batas, pembuatan pos jaga, pembuatan kebun bibit, serta pemberian tunjangan untuk anggota Jagawana.

G. Kesimpulan

Upaya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan alam perlu terus dikembangkan. Mitra Kutai dapat menjadi model bagi upaya – upaya kemitraan ditempat lain. Namun, upaya seperti ini hanya akan mendapatkan hasil maksimal jika didukung oleh semua komponen masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan konservasi.

“Friends Of Bukit Baka – Bukit Raya”:
Pendekatan Kemitraan Perusahaan HPH untuk
Mempromosikan Pengelolaan & Pelestarian Kawasan
Konservasi ¹

Oleh :

Nana Suparna & Gusti Hardiansyah²

I. Pendahuluan

1. Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut memberikan sumbang buah pemikiran dalam acara Pertemuan ***Regional Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Indonesia Bagian Timur***, di Manado 24 – 27 Agustus 1999. Forum ini merupakan forum yang tepat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang lebih maju dalam upaya peningkatan kualitas dan gerak memantapkan perencanaan pengelolaan taman nasional yang efektif dan efisien, khususnya **untuk membangun kerjasama kemitraan dalam pelestarian taman nasional Bukit Baka – Bukit Raya.**
2. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Dalam pengertian ini mencakup Taman Nasional secara keseluruhan yang berlokasi di daratan dan lautan, serta mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga

¹ Disampaikan dalam “Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Kawasan Indonesia Timur” di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 23 s/d 27 Agustus 1999.

² Departemen Pengusahaan Hutan Alas Kusuma Group

kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. Kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama nirlaba antara pihak pengelola Daerah penyangga dengan pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka optimasi fungsi Taman Nasional dan Daerah Penyangga.
4. Taman Nasional Bukit Baka – Bukit Raya (TNB3R) dengan luas lebih kurang 190.000 hektar terletak di dalam dua wilayah propinsi yaitu propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Taman Nasional tersebut merupakan salah satu dari presentasi hutan hujan tropis di pusat pulau “borneo” (hot-spot). Kondisi geografisnya yang merupakan rantai pegunungan Shcwaner merupakan daerah tangkapan air (catchment area) utama baik untuk sungai Kapuas di Kalimantan Barat maupun sungai Katingan di Kalimantan Tengah.
5. TNB3R adalah aset negara, bangsa dan dunia yang harus dijaga sehingga tetap dapat dinikmati fungsi dan perannya sebagai wahana penelitian, pengembangan iptek, pendidikan, pelatihan, pengembangan budidaya, pengembangan wilayah, pemuliaan jenis tumbuhan dan satwa asli oleh umat manusia sekarang dan generasi-generasi mendatang.
6. Pembangunan TNBBBR (TNB3R) adalah kegiatan konservasi di dalam kawasan hutan sebagai upaya untuk melindungi proses ekologi yang menunjang sistem penyangga kehidupan, mengawetkan keanekaragaman jenis dan ekosistem, serta melestarikan pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan umat manusia.
7. Secara umum kawasan taman nasional di Indonesia menghadapi permasalahan kompleks dan mendasar antara lain :
 - a. **Pengelolaan kawasan** yang menyangkut status kawasan, kelembagaan, sumber daya manusia, perencanaan, keperluan sarana dan prasarana, pendanaan dan lain-lain.
 - b. **Sosial ekonomi dan budaya** masyarakat di sekitar kawasan, yang menyangkut tingkat kesejahteraan/ income, perkembangan kependudukan, kebutuhan lahan & sumber daya alam, persepsi dan kepedulian mengenai konservasi alam.

- c. Koordinasi dengan sektor lain mengenai pembangunan dan konservasi alam.

Oleh karena itu dalam penanganan pengelolaan taman nasional diperlukan adanya kerjasama **kemitraan** antar *stakeholder* : pemerintah (TN), masyarakat dan HPH. Dengan membangun kerjasama kemitraan yang terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat luas, diharapkan terjadi adanya suatu kontribusi peran dari berbagai stakeholder yang diperlukan untuk menanggulangi berbagai permasalahan di tingkat pengelolaan taman nasional. Pendekatan kemitraan tersebut dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan spesifikasi lokal.

8. Eksploitasi hutan yang dilakukan oleh pemegang HPH telah memasuki dasawarsa ke-3. Fenomena ini, disatu sisi telah memberikan sumbangan yang besar terhadap devisa negara tetapi disisi lain juga memberikan dampak negatif terhadap komponen lingkungan dan sosial budaya masyarakat sekitar.
9. Kawasan Taman Nasional Bukit Baka – Bukit Raya (TNB3R) dikelilingi oleh beberapa HPH yang tercatat masih aktif beroperasi sampai saat ini, di antaranya:

Orientasi	HPH	Propinsi
Di sebelah Barat	PT Sari Bumi Kusuma PT Inhutani III	Kalteng Kalbar
Di sebelah Selatan	PT Meranti Mustika PT Kayu Waja	Kalteng Kalteng
Di sebelah Utara	PT Tunas Indo Timber	Kalteng
Di sebelah Timur	PT Inhutani III	Kalbar

10. Maksud penyajian makalah ini adalah dalam rangka menawarkan pola atau bentuk konkrit kegiatan kerjasama kemitraan Taman Nasional Bukit Baka – Bukit Raya dengan perusahaan-perusahaan HPH sekitar khususnya dan masyarakat umumnya dalam rangka mempromosikan pengelolaan dan pelestarian kawasan konservasi TNB3R. Diharapkan terbentuknya suatu lembaga kemitraan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemecahan permasalahan yang dihadapi taman nasional tersebut. Sehingga kesamaan visi dan misi konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan dapat dikembangkan secara integral sesuai prinsip-prinsip dasar kerjasama kemitraan.

II. Kelemahan-Kelemahan Mendasar

Adapun kelemahan-kelemahan yang di antaranya dapat ditemukan di lapangan antara lain:

1. **Pengakuan dan Pengukuhan**; Realisasi pengakuan dan pengukuhan pemancangan tata batas hutan masih sangat terbatas. Sehingga akan berdampak negatif terhadap penegakan ketentuan perlindungan taman nasional. Ketiadaan pengakuan tata batas hutan yang nyata dan pasti akan menimbulkan okupasi tanah hutan, perladangan berpindah, perambahan hutan, pencurian kayu, pendulangan emas, *overlapping* penguasaan atas tanah dan bahkan sering terjadi jual beli kawasan hutan. Akibat-nya menimbulkan kekaburan hukum antara *stakeholder* (masyarakat, HPH & pemerintah) mengenai areal hutan yang harus dilindungi. Kekaburan hubungan hukum antara warga masyarakat dengan lingkungannya berdampak pada kesadaran hukum yang sifatnya semu. Sehubungan dengan masalah tata batas ini, maka perlu dipikirkan suatu model dan tata batas hutan yang mampu mengakomodir kepentingan semua pihak sehingga jelas, nyata dan mudah dikenal oleh masyarakat serta dapat dipatroli oleh petugas lapangan. Model yang sekarang populer dikenalkan adalah metode pemetaan partisipatif.
2. Tidak ada **jaminan keamanan** terhadap kawasan TNB3R; Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat di taman nasional telah berlangsung lama sebelum Bukit Baka – Bukit Raya ditetapkan sebagai taman nasional. Semenjak ditetapkan menjadi taman nasional yang merupakan kawasan konservasi bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati lokal, tidak urung menimbulkan dampak bagi masyarakat setempat. Pembatasan tersebut yang diiringi laju pertumbuhan penduduk menyebabkan tekanan terhadap nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Keadaan inilah yang menyebabkan masyarakat mencari alternatif-alternatif lain untuk dapat terus melangsungkan kehidupannya.
3. Kurangnya **sosialisasi &** pengetahuan masyarakat yang relatif rendah; Keberadaan TNB3R sebagai kawasan konservasi telah dikenal oleh berbagai kalangan baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki ekosistem terkomplek dan didukung oleh berbagai jenis flora dan fauna. Ternyata keunikannya membuat polemik tersendiri di dalam keberlangsungan pengelolaannya. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat di sekitar kawasan TNB3R yang mempunyai peran yang sangat besar bagi terciptanya kelestarian

kawasan tersebut hanya mengetahui TNB3R hanya sebagai hutan lindung saja, sementara keunikan dan kelebihan-kelebihan lain yang seharusnya membuat masyarakat menjadi lebih bangga terhadap kawasan tersebut kurang diketahui. Indikator lain kurangnya sosialisasi ditandai dengan adanya ketakutan masyarakat sekitar mengenai proyek TNB3R, sejak masuknya proyek masyarakat asli/ adat tidak bisa menangkap ikan dan berburu lagi. Selain itu adanya persepsi bahwa setiap proyek yang masuk ke daerah baik HPH, perkebunan, HTI maupun aktivitas proyek TNB3R, ternyata lebih senang menarik pekerja dari luar ketimbang masyarakat adat setempat. Tingkat pendidikan masyarakat di sekitar TNB3R yang relatif rendah memang merupakan masalah penting sehingga perlu dicari sistem-sistem pendekatan dan pembinaan yang tepat agar tujuannya dapat diterima oleh masyarakat tersebut.

4. **Terancamnya kawasan inti dan penyangga;** Degradasi kawasan inti dan penyangga TNB3R ternyata tidak dapat dielakkan karena ketergantungan masyarakat TNB3R terhadap perburuan, pengambilan hasil hutan kayu dan non kayu, lahan perladangan dan pendulangan emas relatif cukup besar, bukan hanya untuk keperluan pribadi (subsisten) tetapi juga sebagai sumber pendapatan ekonomis yang tinggi karena didukung oleh keberadaan pasarnya masing-masing aktivitas tersebut. Kawasan penyangga yang diharapkan sebagai kawasan yang dapat mencegah tekanan-tekanan terhadap kelestarian kawasan inti TNB3R belum dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Padahal apabila kawasan penyangga dikelola oleh masyarakat dengan baik dan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan setempat akan memperkuat eksistensi kawasan TNB3R.
5. Kebijakan pemerintah mengenai larangan bermukim di daerah TN dan hukuman bagi penduduk setempat yang melanggar aturan itu. Adanya perbedaan konsepsi antara pemerintah yang memprioritaskan pemanfaatan kawasan hutan sebagai kepentingan konservasi tanpa mengakomodir pola pemanfaatan lain atas kawasan tersebut sesuai keberadaan masyarakat yang telah ada sejak lama jelas menimbulkan permasalahan yang pelik. Dengan menetapkan fungsi konservasi pemerintah biasanya mengharuskan masyarakat untuk tidak “mengutak-utik” TNB3R atau bahkan bagi yang telah bermukim untuk dipindahkan dari lokasi TN. Alasannya adalah keberadaan masyarakat dianggap mengancam kelestarian hutan melalui aktivitas perambahan, baik perladangan, ekstraksi kayu maupun pendulangan emas. Sementara masyarakat bersikeras juga memiliki hak untuk hidup dan memanfaatkan lahan pertanian, peternakan maupun perkebunan yang

selama beberapa puluh tahun telah menjadi sumber penghidupan mereka, dengan sistem sosial, ekonomi dan budayanya yang terbukti tidak mengganggu fungsi kawasan.

6. Permasalahan lain yang dapat ditemukan selain lima poin kelemahan yang telah disebutkan yaitu:
 - (1) Unit-unit usaha masyarakat sekitar TNB3R tidak berkembang karena belum diberikan peluang dan atau pengetahuan masyarakat yang relatif rendah.
 - (2) Pengusahaan hasil hutan non-kayu oleh masyarakat tradisional terhambat oleh peraturan yang kurang kondusif.
 - (3) Petugas unit TNB3R tidak termotivasi untuk berada di lapangan.
 - (4) Belum adanya keterpaduan yang holistik/ multidimensi dalam pengelolaan TNB3R.
 - (5) Kawasan penyangga TN terancam akibat kebutuhan penduduk setempat jauh lebih kuat dari kemampuan pemerintah menegakkan hukum.
 - (6) Sering terjadi konflik sosial.

Selanjutnya kelemahan-kelemahan tersebut di atas perlu dikaji untuk mencari solusi pemecahannya. Sehingga strategi kedepan untuk mengatasinya perlu didiskusikan bersama stakeholder terkait.

III. Strategi Percepatan

Strategi percepatan di sini berupaya menjawab bagaimana melaksanakan tugas pengelolaan TNB3R sehingga ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam dapat diminimalisir dan atau diatasi sepenuhnya demi pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem taman nasional. Berbagai upaya yang dapat dilaksanakan untuk lebih mendorong pengelolaan dan pengembangan TNB3R antara lain:

1. Menindak lanjuti secepatnya, semua agenda rapat pembentukan kerja sama kemitraan TNB3R dengan HPH ke dalam kesepakatan formal dalam bentuk MOU (Memorandum of understanding) mitra TN Bukit Baka-Bukit Raya. Draft MOU terakhir telah

dirapatkan pada tanggal 20 Juli 1999. Yang perlu dicatat dalam draft kesepakatan “The friends of Bukit Baka – Bukit Raya “ memberikan pesan bahwa kesepakatan (MOU) tersebut mempunyai aspek strategis yaitu:

- Sebagai media & proses di mana pihak-pihak berkepentingan bertemu dan saling mengenal, saling menyampaikan aspirasi dan saling menyesuaikan.
- Sebagai alat untuk melaksanakan pengendalian proses desentralisasi pengelolaan sumber daya alam dari pemerintah kepada masyarakat.
- Sebagai alat untuk menunjukkan keterbukaan dan transparansi semua pihak.
- Sebagai alat untuk menjamin diakuinya hak-hak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh pihak yang berkepentingan.

Jadi Kesepakatan MOU: Mitra TNB3R **bukan menunjukkan *ekklusivisme* antara pihak Taman Nasional dengan pihak perusahaan HPH.**

2. Dibentuknya forum komunikasi TNB3R yang berasal dari kelompok-kelompok masyarakat/ desa/ dusun yang mempunyai minat dan berkepentingan terhadap eksistensi TNB3R. Dalam pembentukan kelompok, yang terpenting adalah membuat kesepakatan-kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam aturan dan mekanisme kelompok serta sanksi bagi yang melanggar yang harus ditaati bersama. Setelah aturan disepakati baru dipilih pengurus kelompok yang mampu memenuhi hak dan kewajiban sesuai yang tertuang dalam aturan kesepakatan. Dari banyaknya kelompok dibentuklah suatu forum komunikasi kelompok (FKK) yang mampu mewadahi keberadaan mereka. Tentunya akan ada suatu model FKK-TNB3R dimana terdapat aturan main dan mekanisme yang telah disepakati oleh semua pihak.

Dua faktor penting yang harus selalu dikedepankan dalam pembentukan “the friends of TNB3R” adalah penerapan ***pola partisipatif dan transparansi***. Artinya, semua anggota masyarakat sejauh mungkin diusahakan untuk dapat ikut terlibat secara aktif dalam setiap pertemuan pembahasan masalah. Di samping itu, berbagai hasil musyawarah perlu disosialisasikan secara terbuka tanpa ada yang perlu ditutup-tutupi. Dengan demikian anggota masyarakat memiliki peran yang sejajar tanpa ada yang superior atau inferior atas anggota masyarakat yang lain.

3. Jika MOU, kelompok-kelompok dusun dan Forum komunikasi kelompok “the friends of TNB3R” sudah terbentuk dan eksis aktivitasnya, diharapkan masalah lahan dapat diselesaikan. Hak pengelolaan atas lahan dari setiap anggota masyarakat menjadi jelas, dengan demikian akan mendorong ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, adanya *kepastian aturan* yang telah disepakati bersama juga akan mampu menjadi pembatas bagi setiap anggota masyarakat yang akan melakukan kegiatan perambahan atas kawasan lindung yang telah disepakati bersama. Baik untuk kepentingan kayu maupun lahan. Terlebih perambahan oleh pihak luar, jelas akan lebih sulit. Dengan kata lain, aktivitas pengamanan dan perlindungan hutan akan menjadi lebih efektif.

4. Jika supremasi hukum di sini adalah aturan kesepakatan telah dibuat, eksis dan diakui keberadaan serta dijunjung tinggi dan dihormati, maka saatnyalah kita berbicara masalah manfaat ekonomi dari pengelolaan kawasan lindung dan konservasi TNB3R. Kebijakan pemerintah Indonesia saat krisis moneter yang paling bergaung bunyinya adalah mengenai ekonomi kerakyatan. Institusi koperasi sebagai ujung tombak ekonomi kerakyatan dapat dibentuk oleh forum komunikasi kelompok TNB3R. Koperasi yang mencerminkan ciri spesifik sosial dibutuhkan masyarakat sekitar untuk memperoleh hak kelola atas lahan di kawasan lindung TNB3R melalui mekanisme Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKM). Potensi HPHKM yang sangat potensial untuk dikembangkan di sekitar TNB3R adalah Rotan, bambu, dan tengkawang. Selain itu koperasi HPHKM dapat diarahkan untuk memasarkan potensi hasil kerajinan anyam-anyaman masyarakat adat setempat seperti tas, topi, lampit, dan lain sebagainya. Beberapa benefit yang dapat dicatat atas HPHKM ini adalah:

Stakeholders	Benefit
Pihak Pemerintah / TNB3R	<ul style="list-style-type: none"> - Tekanan atas perambahan TNB3R dapat dikurangi. - Program Kesejahteraan masyarakat tidak tergantung dari bantuan program sosial pemerintah (JPS).
Pihak HPH	<ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya kondisi yang kondusif dalam pengelolaan hutan yang lestari antara HPH dan masyarakat,
Pihak Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya peluang untuk peningkatan keahlian dengan proses pembelajaran bersama. - Memperoleh akses untuk mendayaguna-kan lahan terlantar. - Meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Pengusaha HPH yang dipandang lebih maju dan mapan baik dalam hal keterampilan, SDM dan finansial harus dapat berperan lebih proaktif sesuai kemampuannya. Misalnya memberikan bantuan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tata batas kawasan TNB3R: survey batas, rekontruksi dan identifikasi kawasan inti TNB3R, kawasan penyangga dan batas luar kawasan dengan kepemilikan serta peruntukan lainnya. Fasilitas ini dapat berbentuk bantuan transportasi kendaraan dari dan ke sekitar kawasan TN maupun bantuan tenaga ahli dari perusahaan (surveyor, perencana, logistik,dll). Tentunya mekanisme pemberian fasilitas ini perlu diatur sedemikian rupa sehingga efektif. Oleh karena itu transparansi kontribusi masing-masing pihak perlu diagendakan secara khusus. Apresiasi bagi para kontributor perlu diketahui masyarakat umum secara luas dan proporsional, sehingga mampu menumbuhkembangkan kepedulian terhadap pengelolaan TNB3R.

6. Mengingat potensi lingkungan, lanskap, keaneragaman hayati, sosial budaya dan posisi strategis TNB3R yang terletak di antara areal HPH-HPH, areal perladangan berpindah, areal HTI, areal penggembalan ternak masyarakat (*ranch area*),areal pertambangan emas, dan sebagainya – patut untuk dipikirkan dalam jangka panjangnya sebagai daerah

kunjungan wisata alam. Di mana kita dapat membuat suatu model yang harmonis bahwa TNB3R dapat eksis dan berkembang dengan “memanfaatkan” atraksi kegiatan-kegiatan sekitar TN menjadi pusat ekoturisme yang patut dikunjungi oleh turis domestik dan mancanegara. Bayangkanlah suatu model kawasan wisata alam yang bernama “TNB3R *Rain Forest Lodge*”. Di mana kita menawarkan pariwisata dengan minat khusus (*special interest*) bukan hanya menemukan keindahan hutan perawan dengan pohon-pohon diptero yang menjulang dan dihubungkan oleh *canopy walk* di antara pepohonan tersebut, keanekaragaman vegetasi hutan, koleksi anggrek hutan, adanya penangkaran hewan hutan tertentu, keragaman jenis primata dan burung; tetapi kepariwisataan yang bersifat petualangan (*adventure*) di mana wisatawan tertarik pada hal-hal menguji tantangan secara fisik, kepribadian dan terkadang aktivitas-aktivitas bahaya (atau dirasa membahayakan) seperti perjalanan di daerah-daerah pedalaman/ terpencil, trekking, hiking, mendaki gunung, arung jeram dan naik perahu menyusuri sungai-sungai. Fasilitas lodge dilengkapi dengan zonasi-zonasi kawasan wisata dengan sarana & prasarana: berkemah (*camping*), berenang (*swimming*), berperahu (*boating*), piknik (*picnicking*), tipe berjalan mendaki/ jalan darat (*hiking/trekking*), memancing (*fishing*), berburu (*hunting*) dan pelancong tamasya (*sightseer*). Lodge tersebut merupakan usaha terpadu yang dikelola secara patungan oleh *friends of Bukit Baka-Bukit Raya* . Pengusaha terbuka untuk menjadi investornya dan masyarakat lokal akan memperoleh peluang usaha yang lebih meningkat lagi. Sayangnya, **aksesibilitias** masih merupakan kendala.

7. Sistem pengelolaan dan pengembangan taman nasional akan membuka berbagai macam peluang usaha dan bisnis. Peluang ini tentunya tidak akan dapat dimanfaatkan dengan baik apabila masyarakat tidak memiliki keterampilan atau keahlian yang diperlukan untuk menangkap peluang tersebut. Oleh karena itu perlu untuk diketahui potensi dan kemampuan yang ada pada masyarakat, untuk selanjutnya digali dan dikembangkan lebih lanjut. Melalui upaya penyiapan kondisi masyarakat ini diharapkan masyarakat dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dalam kerjasama kemitraan pengelolaan taman nasional. Untuk konkritnya penulis mengajukan usulan suatu sistem pengelolaan TNB3R seperti terlampir pada lampiran makalah ini.

IV. Penutup

1. Ruang lingkup untuk membina kemitraan memang luas. Universitas dan lembaga riset baik di Indonesia maupun di manca negara dapat membina kerja sama dengan PKA (Perlindungan dan Konservasi Alam) dalam melaksanakan riset ilmiah maupun pemantauan yang sedang dilaksanakan saat ini. LSM dan kelompok-kelompok masyarakat dapat membantu dalam program-program kepedulian dan penyebarannya. Instansi pemerintah daerah, ditingkat kecamatan dan kelurahan dapat membantu pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat di zona-zona penyangga sebagai wilayah pengembangan dan keberadaan TNB3R sehingga dapat meningkatkan pendapatan, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam upaya konservasi SDA hayati dan ekosistemnya. Sedangkan sektor swasta dapat berpartisipasi dalam kemitraan melalui bantuan pendanaan jangka panjang dan prasarana dasar pengelolaan.
2. Mengembangkan penelitian dan kajian sosial budaya masyarakat dalam rangka optimalisasi bentuk kemitraan yang efektif sesuai spesifik lokal TNB3R. Adopsi pengalaman-pengalaman negara-negara seperti Sabah, Costa Rica, dllnya dalam memadukan trend-trend internasional ekoturisme, konservasi dan konsep pembangunan berkelanjutan. Termasuk belajar dari pengalaman yang positif terhadap organisasi kemitraan nasional seperti Konsorsium Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sahabat Taman Nasional Kutai, dllnya. Pengalaman-pengalaman tersebut dapat menjadi catatan mengenai praktek-praktek pengelolaan yang terbaik.
3. Karena letak TNB3R dikelilingi oleh berbagai kegiatan ekonomi produktif seperti HPH, perkebunan, pertambangan, dsbnya, maka paket wisata yang ditawarkan hendaknya tidak saling berbenturan tapi saling mendukung dan mengisi, sehingga ada sinkronisasi. Fleksibilitas dalam pemilihan titik-titik pusat perhatian kawasan wisata alam hendaknya disesuaikan dengan sistem perusahaan yang ada serta memperhatikan daya dukung lingkungannya.
4. Berkembangnya kerja sama kemitraan dalam pengelolaan taman nasional diharapkan hasil-hasil secara konkrit dapat dirasakan dalam bentuk peningkatan kemampuan pengelolaan taman nasional, mendorong tumbuhnya kepedulian dan kesadaran konservasi, dan peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar taman nasional.

G. LSM & Lembaga Lain

Daftar Isi

1. Pendampingan Masyarakat oleh FPK di Taman Nasional Bunaken
oleh Rico Ngangi & Meity Mongdong G1 - 1
2. Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat sebagai Model Konservasi
Pesisir dan Laut di Indonesia *oleh J. Johnnes Tulungan, Field Program
Manager, Proyek Pesisir, Brian C. Crawfors, Technical Advisor, Proyek
Pesisir, dan Ferdinan Pua, KASI Lingkungan Hidup Bappeda Propinsi
Sulawesi Utara* G2 – 7
3. Pengelolaan Kawasan Lindung di Sulawesi dan Desentralisasi:
Pandangan & Pemecahan Permasalahannya di Masa Depan
Oleh Robert Lee & Nono Suyatno, WCS G3 - 29
4. Penilaian Sumber Daya, *oleh Elfian Effendi, NRM/EPIQ Conservation
Finance Specialist* G4 - 41

Pendampingan Masyarakat oleh FPK di Taman Nasional Bunaken*

Oleh

Rico Ngangi dan Meity Mongdong

Hakekat Pendampingan

Sudah lebih dari satu dasawarsa kata partisipasi masyarakat menjadi kata kunci dalam bahasa sehari-hari pembangunan masyarakat. Mulai dari petugas lapangan di tempat-tempat terpencil sampai pada para pejabat di pusat pemerintahan selalu menyebut-nyebut mutlakunya partisipasi masyarakat dalam langkah dan gerak pembangunan. Namun walaupun cita-cita dan gagasan dasar yang dicerminkan oleh kata itu telah diterima secara luas dan alasan-alasan yang menunjukkan keunggulan pendekatan yang partisipatif telah dipahami, tetapi kenyataannya adalah bahwa banyak program pengembangan masyarakat masih dilakukan dengan cara-cara lama yang sudah biasa dan jauh dari pendekatan partisipatif itu sendiri.

Pendampingan yang selama ini dikembangkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat adalah bentuk interaksi dimana pihak lain (masyarakat) merasa setara, menjadi teman dan punya daya tawar (*bargaining position*) terhadap apa yang ditawarkan. Dengan demikian masyarakat tidak hanya menjadi pekerja sebuah program atau malah menjadi penghambat terlaksananya sebuah proyek tapi juga benar-benar berpartisipasi. Penggalan yang sungguh-sungguh apa yang hidup dalam masyarakat akan menghasilkan keyakinan diri masyarakat bahwa apa yang dilakukan adalah program mereka. Dan petugas lapangan (pendamping) adalah mitra kerja yang bisa memberikan *technical assistance* untuk apa yang belum mereka ketahui.

Dalam suasana kesetaraan tadi, ketika penggalan kebutuhan masyarakat dilakukan, banyak hal yang sebetulnya perlu dikuatkan. Khususnya untuk masyarakat yang tingkat ketergantungannya terhadap subsidi cukup tinggi, pendampingan dibutuhkan untuk membantu mereka melihat potensi dalam diri mereka sendiri yang selama ini sepertinya diabaikan. Membangkitkan rasa percaya diri komunitas bahwa mereka bisa melakukan sendiri tanpa terlalu banyak suport dari luar sangat penting dilakukan. Ini merupakan sebuah langkah pemberdayaan. Masyarakat akan

* Dibawakan dalam Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Kawasan Timur Indonesia, 23 -27 Agustus 1999 di Manado, Sulawesi Utara

kritis jika mereka berpijak pada apa yang ada dalam diri mereka sendiri, sehingga selalu apa yang ditawarkan dari luar akan dianalisa atau diperbandingkan dengan apa yang telah mereka capai.

Sekilas FPK Sulut

Forum Petaupan Katouan Sulawesi Utara, disingkat FPK Sulut, lahir atas kesepakatan bersama 9 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 3 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam Semiloka LSM Sulut tentang "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Berbasis Masyarakat" di Manado dan Tomohon, September 1996. Kesepakatan membentuk aliansi ini didasarkan pada niat untuk saling menguatkan sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

Sejak didirikan 13 September 1996 hingga pleno tahunan (Oktober 1998), partisipan FPK Sulut sudah bertambah menjadi 16 lembaga (LSM/KSM). Visi bersama FPK adalah menciptakan rasa aman masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di kampung sendiri berdasarkan hak-hak rakyat yang diakui dan dihargai negara.

Dua tahun terakhir ini, FPK telah berkegiatan bersama-sama masyarakat di kawasan penyangga Taman Nasional Bunaken. Ada dua program yang dilaksanakan yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Kerakyatan (**PSAK**) dan Program Pendampingan Kelompok Masyarakat-Daerah Penyangga Taman Nasional Bunaken (**PKM-DPTNB**).

Tujuan PSAK adalah terciptanya rasa aman masyarakat kampung dalam penataan ruang untuk mengelola sumber daya alam di wilayah setempat. Artinya, tercipta suatu kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan teknis serta paham dan mampu mempertahankan hak-hak rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam di kampungnya.

Program PKM-DPTNB bertujuan,

- Mengembangkan mata pencarian alternatif masyarakat di zona penyangga
- Penguatan kelompok masyarakat dalam mengembangkan konservasi desa di daerah penyangga

Model Pendampingan FPK di Taman Nasional

Untuk mencapai tujuan program-program FPK dan sejalan dengan Strategi pengelolaan Taman Nasional Bunaken (sesuai Rencana Pengelolaan dalam Buku II), yaitu mempertimbangkan tiga nilai dan fungsi kawasan, yaitu mengakomodasi :

- pelestarian sumber daya alam dan habitat
- menjamin pemanfaatan ekstraktif sumber daya secara berlanjutan, mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat setempat
- menjamin pemanfaatan estetika secara berlanjutan, mendukung pengembangan pariwisata alam.

Pendampingan masyarakat yang intensif merupakan suatu hal yang strategis bagi FPK dalam pencapaian tujuan-tujuan program dan dalam pengelolaan Taman Nasional itu sendiri.

Oleh karena itu, FPK mengembangkan pendampingan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan, Seperti :

1. Kajian dan Perencanaan Desa Partisipatif (*participatory rural appraisal-PRA*)

Tujuan PRA adalah menyadarkan masyarakat bahwa mereka mampu merancang sendiri perencanaan pembangunan di desanya berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada di kampungnya.

Output dari kegiatan ini adalah Rencana Kegiatan masyarakat.

2. Pemetaan Kampung secara Partisipatif (*Community Mapping*)

Tujuannya melalui peta desa yang lengkap masyarakat dapat melihat potensi keruangan di wilayahnya, mendokumentasikan pengetahuan tradisionalnya, untuk berperan serta di dalam perencanaan tata guna lahan dan pengelolaan konservasi.

Output : beberapa jenis peta dari satu desa dan tenaga trampil pemetaan dari desa.

3. Kajian dan Disain Monografi Desa

Tujuannya adalah untuk mengkaji data-data dan informasi yang sesuai dengan kondisi obyektif desa serta membuat desain format monografi yang lebih sederhana sehingga memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya terlebih dalam kebutuhan perencanaan di kampung.

Output : adanya model dan sistem informasi berbasis desa, perangkat monografi dan tenaga pengelola.

4. Pelatihan, Pendidikan dan Diskusi Kampung

Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Jenis pelatihan yang dilaksanakan yaitu pelatihan inventarisasi partisipatif, pendamping masyarakat, media komunikasi dan informasi, pendidikan rakyat, manajemen kelompok usaha, teknologi tepat guna, pengelolaan konflik.

Output : tenaga-tenaga trampil dari masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

5. Pengembangan Percontohan (demplot)

Tujuannya untuk mengimplementasi model PSAK di desa yang meliputi bidang kehutanan (hutan keluarga), pertanian (terasering), perikanan dan peternakan.

Output: adanya model pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang diadopsi masyarakat sebagai alternatif pengembangan ekonomi masyarakat.

Catatan Penutup

Pengelolaan sumber daya alam yang dikembangkan selama orde baru lebih ditekankan pada pengelolaan oleh pemerintah yang didukung dengan beberapa dasar hukum. Hal ini mungkin berdasar bahwa pengelolaan oleh pemerintah pasti akan efektif karena ada muatan kekuasaan, namun ternyata lebih banyak yang gagal daripada berhasil. Anggapan yang sering muncul di masyarakat yaitu sumber daya alam itu milik negara dan semua orang berhak mengambil dan memanfaatkannya jika memungkinkan tanpa ada rasa tanggung jawab untuk melestarikannya karena bukan miliknya. Kenyataan bahwa para pemilik modal mempunyai peluang yang lebih besar untuk memanfaatkan sumber daya alam secara besar-besaran tidak bisa dipungkiri.

Bagi masyarakat, pelestarian alam oleh pemerintah merupakan suatu usaha untuk tidak melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam tertentu. Manfaat pelestarian alam bagi kehidupan masyarakat dianggap sama sekali tidak ada, bahkan merugikan karena hanya melarang tanpa diberi penjelasan tentang alasannya dan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapinya. Bahkan ada yang menganggap pelestarian alam hanya untuk kepentingan pariwisata sehingga menguntungkan pihak tertentu saja bukan masyarakat setempat.

Sebenarnya masih banyak masyarakat di Indonesia memiliki sistem pengelolaan secara tradisional yang berhasil. Di antaranya *Sasi* di Maluku, *Mane'e* dan *eha* di Talaud dan *Seke* di Sangir. Sistem pengelolaan ini terbukti berhasil melestarikan sumber daya alam di desa dan dapat dinikmati oleh masyarakat sampai sekarang. Di Taman Nasional Bunaken, tepatnya di Pulau Mantehage, sebenarnya pernah ada sistem pengelolaan sumber daya mangrove secara berkelanjutan yaitu sistem *block tua* yang mengatur pemanfaatan mangrove. Dan mungkin saja masih ada atau pernah ada sistem-sistem yang lain di setiap desa yang sudah ditinggalkan karena adanya kebijakan pengelolaan oleh pemerintah dan atau hal lainnya. Penghargaan pemerintah terhadap model atau sistem pengelolaan tradisional ini hampir tidak ada. Malahan itu dilihat sebagai sesuatu yang unik dan bisa menjadi atraksi menarik bagi turis sehingga dijadikan obyek pariwisata saja.

Untuk menumbuhkan kembali kepercayaan diri masyarakat akan kemampuan dan pengetahuannya, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam maka usaha pendampingan masyarakat intensif sangat perlu dilakukan. Usaha ini hendaknya menjadi bagian utama untuk melakukan penguatan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam seluruh proses pencapaian tujuan program misalnya konservasi. Jadi, diharapkan akan mampu menciptakan masyarakat dan atau kelompok masyarakat yang bersifat mandiri dalam mengkaji, merencanakan dan mengelola potensi serta mengatasi permasalahan pengelolaan sumber daya alam.

Selama ini program-program pembangunan diturunkan dari atas dan masyarakat tinggal melaksanakannya. Program itu direncanakan oleh lembaga penyelenggara program tanpa melibatkan secara langsung warga masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Kalaupun disadari bahwa perencanaan program semestinya dimulai dengan peninjauan kebutuhan (*need assesment*) masyarakat, hal tersebut seringkali dilaksanakan hanya berdasarkan suatu survei, studi atau penelitian formal yang dilakukan oleh petugas lembaga, atau oleh ahli-ahli dari lembaga penelitian atau perguruan tinggi.

Sebenarnya jika masyarakat dapat dilibatkan secara berarti dalam keseluruhan proses, selain program itu akan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan rasa memiliki program itu menjadi tinggi, juga ketrampilan-ketrampilan analitis dan perencanaan teralihkan pada masyarakat. Dengan demikian di masa yang akan datang secara bertahap ketergantungan pada pihak luar dalam pengambilan prakarsa dan perumusan program akan bisa dikurangi.

Akhirnya, pendampingan masyarakat tidak selalu dan tidak harus berkonotasi pada suatu gerakan atau mobilisasi secara fisik. Dalam konteks pengembangan masyarakat (*community development*), yang terpenting justru mobilisasi yang non-fisik, yaitu pola pikir dan pola laku masyarakat. Karena tanggung jawab terbesar yang harus dipikul oleh pendamping dan lembaganya adalah bagaimana supaya proses ini terus berlangsung hingga programnya berakhir.

Daerah Perlindungan Laut Berbasis-Masyarakat sebagai Model Konservasi Pesisir dan Laut di Indonesia

Oleh:

J. Johnnes Tulungen¹, Brian C. Crawford² dan Ferdinand Pua³

Pendahuluan

Daerah Perlindungan Laut (DPL) berbasis-masyarakat dapat dipakai sebagai salah satu cara dan tujuan untuk melindungi habitat penting di wilayah pesisir dan laut, khususnya ekosistem terumbu karang. Selain itu DPL berbasis-masyarakat juga penting bagi masyarakat setempat (lokal) sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produksi perikanan serta dapat menciptakan alternative/tambahan mata pencaharian mereka melalui kegiatan penyelaman wisata bahari. Di beberapa negara, seperti pengalaman di Filipina, DPL berbasis-masyarakat seperti ini sudah dilaksanakan dalam sepuluh tahun terakhir ini. Di Indonesia, lewat Proyek Pesisir (*Coastal Resources Management Project – CRMP*), secara formal telah dikembangkan Daerah Perlindungan Laut di Desa Blongko Kabupaten Minahasa sejak bulan September 1998 melalui Keputusan Desa Blongko yang kemudian di sepakati oleh Kepala Wilayah Kecamatan Tengah, dan pada bulan April 1999 DPL ini telah diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Utara.

Bagi Proyek Pesisir, DPL berbasis-masyarakat seperti di Blongko ini dapat diterima sebagai salah satu cara/model dalam rangka “desentralisasi dan penguatan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir di Indonesia”. Sebagaimana tujuan strategis dari Program Pengelolaan Sumber Daya Alam II (*Natural Resources Management II - NRM II*) USAID-BAPPENAS misi pengelolaan ini dicapai dengan model-model desentralisasi, partisipasi dan kegiatan pengelolaan berbasis-masyarakat (Crawford *et.al.*, 1999). Pelajaran yang diperoleh dari pengembangan dan implementasi model ini di tingkat desa akan dijadikan dasar bagi dokumentasi dan diseminasi untuk kegiatan dan kebijakan yang dapat memacu pengelolaan sumber daya pesisir yang lebih efektif di tingkat propinsi maupun secara nasional.

¹ Field Program Manager, Proyek Pesisir (Coastal Resources Management Project), Jl. Wolter Mongisidi 5 Kleak Lk.1, Manado. Sulawesi Utara. Fax: 62-431-841673, E-mail: crmp@manado.wasantara.net.id.

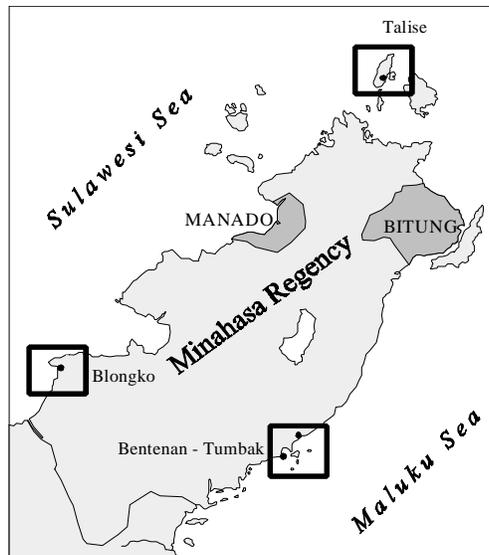
² Technical Advisor, Proyek Pesisir (Coastal Resources Management Project), Coastal Resources Center University of Rhode Island, Narragansett, RI 02882 USA. Fax: 401-789-4670. E-mail: crawford@gsosun1.gso.uri.edu.

³ Kasi Lingkungan Hidup, BAPPEDA Propinsi Sulawesi Utara, Jl. 17 Agustus, Manado Telp 854550

Dengan demikian di tingkat Propinsi pelajaran dari tingkat desa ini dipakai sebagai alat untuk memperbaiki dan mengembangkan perencanaan dan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir di daerah. Pendekatan desentralisasi (yang berbasis-masyarakat) ini didasarkan pada hipotesis bahwa pendekatan pengelolaan secara desentralisasi, partisipatif dan kolaboratif akan menghasilkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya pesisir yang lestari (*sustainable*) dan lebih adil daripada pendekatan secara sentralistik. Dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola pesisir dan laut sejauh 12 mil untuk propinsi dan 4 mil untuk kabupaten serta diberikannya keluasaan kepada desa untuk membuat dan mengembangkan aturan lokalnya membuka peluang yang luas bagi pengembangan model desentralisasi berbasis-masyarakat bagi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Dengan berlakunya undang-undang ini maka kasus tumpang tindih perencanaan, konflik kebijakan, dan kompetisi yang tidak sehat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkibat pada ketidak jelasan kewenangan dan terabainya upaya pelestarian sumber daya pesisir dan laut (Ginting, 1998) dapat diminimalkan atau dihilangkan.

Metode Pendekatan

Proyek Pesisir (CRMP) yang merupakan bagian dari USAID-BAPPENAS *NRM II Project* secara sengaja memosisikan diri untuk bekerja dan berinteraksi dengan berbagai instansi dan lembaga untuk menjawab berbagai isu pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dari tingkat lokal sampai ke tingkat nasional maupun global. Sejak bulan Juli 1997 tiga lokasi lapang (*field sites*) dipilih dan ditetapkan di Sulawesi Utara (gambar 1) melalui konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat setempat, pemerintah desa (lokal) dan propinsi serta didukung oleh suatu survey awal secara cepat bagi 20 desa pesisir di Kabupaten Minahasa (Pollnac *et.al.*, 1997). Penetapan lokasi ini diikuti dengan proses sosialisasi dengan masyarakat desa setempat untuk menjelaskan tujuan, harapan dari kegiatan Proyek Pesisir selain mengidentifikasi pendekatan pengelolaan yang akan diterapkan di masing-masing desa. Sejak Oktober 1997, penyuluh lapangan Proyek Pesisir ditempatkan secara tetap di masing-masing lokasi untuk memfasilitasi pelaksanaan program (Tulungen *et.al.*, 1998).



Gambar 1. Lokasi Proyek Pesisir di Sulawesi Utara

Tujuan Proyek Pesisir di lapangan (*field sites*) adalah untuk mengembangkan contoh-contoh dari cara/metode yang baik dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir lewat penerapan metode-metode, strategi, kegiatan, aturan lokal dan rencana yang dapat mendorong untuk memperbaiki atau mempertahankan kualitas hidup masyarakat di wilayah pesisir, dan mempertahankan atau memperbaiki kondisi sumber daya wilayah pesisir dimana banyak orang menggantungkan kehidupan mereka.

Asumsi utama proyek adalah bahwa di negara seluas dan beraneka ragam budaya dan kondisi seperti Indonesia ini, tidak ada satu model perencanaan yang akan sesuai atau tepat bagi semua daerah, propinsi atau bagi ribuan desa atau masyarakat pesisir di negara ini. Karena itu sejumlah model desentralisasi akan diperlukan, dan pendekatan yang dilakukan akan tergantung pada beberapa faktor termasuk keadaan sumber daya (masih baik atau sudah buruk), tingkat perkembangan (desa miskin atau kaya), tekanan penduduk (padat atau jarang), kapasitas lembaga/institusi lokal (pemerintah, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat), ketersediaan sumber daya (dana dan tenaga profesional) bagi perencanaan dan pelaksanaan, dan sebagainya.

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam tahun pertama kegiatan proyek, program lapangan Sulawesi Utara sekarang ini memfokuskan programnya pada tiga pendekatan spesifik pengelolaan berbasis-masyarakat yakni:

- Daerah perlindungan laut berbasis-masyarakat tingkat-desa

- Rencana pengelolaan sumber daya wilayah pesisir terpadu berbasis-masyarakat tingkat-desa
- Aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan sumber daya wilayah pesisir berbasis-masyarakat tingkat-desa

Program-program ini merupakan program pilihan (*voluntary program*) bagi masyarakat dan desa di wilayah pesisir di mana dalam pelaksanaannya bantuan teknis dan pendanaannya ditopang/dianggarkan oleh lembaga/instansi pemerintah kabupaten maupun propinsi ataupun lewat swadaya dan usaha masyarakat/desa. Sedangkan tujuan, rencana pengelolaan dan pelaksanaan program ditentukan oleh masyarakat setempat berdasarkan dan mengikuti kebijakan/aturan/pedoman yang dibuat atau disepakati oleh pemerintah setempat.

Adapun acuan kerangka kerja konsep (*conceptual framework*) proses perencanaan dan pelaksanaan berbasis-masyarakat di Sulawesi Utara mengikuti langkah-langkah sebagai berikut (Crawford *et.al.*, 1998):

1. Identifikasi masyarakat
2. Orientasi dan penyiapan masyarakat untuk proses perencanaan
3. Pengumpulan data dasar
4. Identifikasi isu
5. Prioritas dan kesepakatan isu
6. Pengembangan alternatif pengelolaan
7. Penetapan dan penerimaan alternatif pengelolaan
8. Memulai pelaksanaan
9. Mengadakan tinjauan, evaluasi, dan adaptasi.

Di dalam setiap langkah, asumsi-asumsi cara/metode yang baik yang akan dicoba telah disepakati dan dibuat. Asumsi-asumsi ini adalah merupakan serangkaian hipotesa berdasarkan situasi setempat dan pengalaman ditempat lain (dunia), mengenai bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan harus diambil atau dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat di wilayah pesisir dan mempertahankan dan memperbaiki kondisi sumber daya wilayah pesisir.

Identifikasi Masyarakat: Satu rangkaian kriteria yang dipakai untuk memperkirakan penerimaan secara cepat atau mudah metode/cara pemanfaatan sumber daya yang lestari dan juga dalam membangun kapasitas masyarakat dalam mengambil alih tanggungjawab pengelolaan adalah antara lain sebagai berikut:

- Tingkat tekanan atau derajat kerusakan sumber daya karena pemanfaatan yang tidak berkelanjutan (rendah/kecil)
- Ikatan sosial dan politis masyarakatnya (tinggi)
- Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya pesisir bagi kehidupannya (tinggi)
- Kecenderungan masyarakat untuk konservasi sumber daya (tinggi)
- Ketertarikan masyarakat pada kegiatan dan tujuan proyek (tinggi)

Orientasi dan penyiapan masyarakat untuk proses perencanaan: Upaya awal perlu dilakukan untuk menerangkan dan menjelaskan tujuan proyek, proses yang akan dilalui, dan manfaat yang akan diperoleh kepada masyarakat. Keterlibatan dan hubungan yang terus-menerus dalam masyarakat sangat penting dan dilakukan dengan penempatan secara tetap penyuluh lapangan dari orang di luar desa dan melibatkan seorang asisten/motivator desa dari masyarakat setempat. Tenaga lapangan ini harus ditopang atau dibantu oleh tim teknis yang akan memberikan bantuan atau pelayanan teknis untuk isu-isu tertentu jika diperlukan.

Pengumpulan data dasar: Data dasar mengenai kondisi sosial ekonomi dan lingkungan diperlukan untuk menentukan atau menilai pencapaian hasil dari adanya intervensi proyek. Dalam rangka kesepakatan dan mencoba model dan cara yang baik di lokasi percontohan, survey dan analisa secara mendalam yang memadukan teknik empiris dan sistematis dengan tehnik partisipatif perlu dilaksanakan. Hal yang sama harus juga dilakukan di desa kontrol untuk membandingkannya dengan desa percontohan dimana intervensi proyek dilakukan.

Identifikasi isu: Identifikasi isu dilaksanakan berdasarkan penilaian dari tenaga teknis ahli/pakar lewat survey/study lingkungan dan sosial ekonomi, juga oleh masyarakat lewat pertemuan-pertemuan formal dan informal, diskusi mendalam dengan informan-informan kunci, diskusi dengan masyarakat umum dari berbagai tingkatan dan kelompok-kelompok *stakeholder*, serta observasi langsung dari penyuluh lapangan dan asisten penyuluh lapangan.

Prioritas dan kesepakatan isu: Perkiraan empiris mengenai beratnya isu dibuat oleh tim teknis. Persepsi mengenai berat tidaknya isu dan prioritas kegiatan yang perlu dilakukan ditentukan oleh masyarakat lewat pertemuan-pertemuan formal maupun informal, diskusi maupun workshop. Monitoring partisipatif dimulai oleh dan bersama masyarakat tergantung pada isu (misalnya monitoring dan pemetaan terumbu karang, monitoring pantai akibat erosi pantai). Studi teknis mengenai isu-isu spesifik dapat dilakukan oleh konsultan luar jika diperlukan informasi tambahan yang lebih detail diperlukan bagi penentuan rencana pengelolaan dan pengambilan keputusan. Namun demikian hasil dari studi teknis dan rekomendasinya harus di sampaikan kepada masyarakat.

Isu-isu yang diidentifikasi baik oleh masyarakat yang didukung oleh studi teknis dan survey oleh tenaga teknis dan penyuluh lapangan diverifikasi, dikumpulkan dan diprioritaskan oleh masyarakat yang produk akhirnya didokumentasi dalam bentuk Profil Sumber daya Wilayah Pesisir Desa (Kasmidi *et.al.*, 1999; Tangkilisan *et.al.*, 1999). Profil ini dipakai sebagai dasar bagi masyarakat desa menyusun rencana pengelolaan terpadu berbasis-masyarakat di masing-masing lokasi/desa.

Pengembangan alternatif pengelolaan: Pilihan yang dikembangkan adalah kombinasi dari masukan dan usulan teknis dari staf teknis yang dipadukan dengan rekomendasi dan ide/pikiran dari masyarakat sendiri. Harus ada komitmen dan kesepakatan dari sebagian besar masyarakat sebelum kegiatan dilaksanakan. Pelaksanaan awal untuk mencoba prosedur dan struktur pengelolaan, dan membangun dukungan bagi rencana jangka panjang dan rencana yang menyeluruh dikembangkan dan diusulkan oleh masyarakat dengan atau tanpa dukungan proyek seperti: penanaman bakau, pembuatan MCK, pengadaan air bersih, dan pembuatan tanggul; atau diusulkan oleh tim proyek dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan masyarakat seperti: pembersihan Bintang Laut Berduri (*Crown of Thorns –CoTs*), pembuatan daerah perlindungan laut, dan pembuatan pusat informasi.

Penetapan dan penerimaan alternatif pengelolaan: Masyarakat menentukan prioritas isu dan tujuan bagi pengelolaan dan kegiatan. Penyuluh lapangan dapat menambahkan/memberikan masukan, rekomendasi dan tambahan ide tetapi keputusan pilihan adalah hak dan tanggungjawab masyarakat. Proses penetapan dan kesepakatan diupayakan setelah ada konsensus dan dukungan dari mayoritas masyarakat. Proses pengambilan keputusan harus transparan dan adil agar supaya dipahami oleh semua pihak bahwa proses penentuan/pengambilan keputusan diketahui dan didukung oleh mayoritas. Rencana pengelolaan dan aturan lokal harus disepakati secara formal oleh unsur pemerintah dan kepala desa.

Memulai pelaksanaan: Pelaksanaan kegiatan sedapat mungkin dilaksanakan oleh masyarakat yang bertindak sebagai pengelola sumber daya utama. Pendanaan dan bantuan teknis dapat diberikan oleh proyek maupun pemerintah kabupaten/propinsi jika diperlukan. Apabila ada kegiatan tertentu yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat misalnya: pengaspalan jalan dan pembuatan sarana air bersih. Kegiatan ini disampaikan kepada pemerintah setempat yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan teknis bagi pelaksanaan kegiatan tersebut lewat usulan dalam DIP/DUP untuk APBD/N. Rencana kegiatan tahunan dikembangkan oleh masyarakat berdasarkan rencana pengelolaan jangka panjang dan diusulkan kepada pemerintah

desa dan diteruskan ke pemerintah di tingkatan yang lebih tinggi lewat pertemuan-pertemuan Rapat Musyawarah Pembangunan (Musbang) dan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang).

Pelaksanakan tinjauan, evaluasi, refleksi dan adaptasi: Review tahunan dilaksanakan oleh masyarakat dengan atau tanpa bantuan atau dukungan pemerintah setempat, dan dilaksanakan sebelum siklus pendanaan tahun anggaran berikutnya dimulai sebagai masukan bagi rencana kegiatan tahunan.

Proyek Pesisir belum menyelesaikan semua tahapan di atas, dan masih membutuhkan waktu dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan sampai rencana pengelolaan berbasis-masyarakat tingkat-desa ini disepakati dan dilaksanakan. Lewat pelaksanaan awal atau *early action* (yang dirancang untuk membangun dukungan dan kapasitas masyarakat bagi perencanaan jangka panjang serta mencoba prosedur pelaksanaan), beberapa kegiatan pelaksanaan yang tidak memerlukan perencanaan dan pelaksanaan jangka panjang serta tidak membutuhkan dana yang besar untuk menjawab isu-isu penting sudah dilaksanakan.

Penyuluh Lapangan Sebagai Katalisator Pengelolaan Terpadu

Satu hal yang kami percaya sangat penting dalam membantu mitra kerja baik di tingkat lokal maupun Kabupaten/Propinsi untuk mencapai hasil yang diharapkan adalah mendorong partisipasi yang tinggi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Penyuluh lapangan bertindak sebagai katalisator dan koordinator kegiatan-kegiatan dan perencanaan berbasis-masyarakat yang di dukung oleh kantor Proyek Pesisir Manado, konsultan lokal, LSM dan lembaga-lembaga pemerintah setempat.

Penyuluh lapangan proyek pesisir hidup dan bekerja secara tetap dan penuh dengan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai latar belakang ilmu, dari ilmu kelautan sampai pengembang masyarakat (Penyuluh Lapangan Proyek Pesisir didominasi oleh latar belakang sarjana Ilmu Kelautan dan Perikanan). Walaupun penyuluh lapangan adalah sarjana (S1) namun masih diperlukan investasi demi mengembangkan kapasitas mereka untuk secara efektif berinteraksi dengan masyarakat maupun dalam memahami isu pengelolaan sumber daya pesisir setempat. Untuk menjamin proses koordinasi dan pelaporan yang cukup, penyuluh lapangan sebulan sekali mengadakan pelaporan dan pertemuan di kantor Proyek Pesisir (Manado).

Penyuluh lapangan tidak akan tinggal secara permanent di desa sampai proyek selesai. Setelah rencana pengelolaan dan/atau aturan dikembangkan, disepakati dan pelaksanaan dimulai, dan masyarakat sudah memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan sendiri kegiatan mereka, penyuluh lapangan akan ditarik dari lokasi/desa/masyarakat. Mereka kemudian akan memulai kegiatan perencanaan dan pengembangan (*outreach*) di desa-desa lain atau sekitar lokasi desa mereka. Lama waktu penempatan penyuluh lapangan di lokasi/desa/masyarakat berkisar antara satu sampai tiga tahun yang diikuti oleh kunjungan-kunjungan singkat (*part time*) minimal dalam jangka waktu satu tahun setelah mereka ditarik dari lokasi. Untuk meneruskan kegiatan penyuluh lapangan ini asisten penyuluh lapangan (anggota masyarakat) yang sudah bekerja sama dan dilatih oleh penyuluh lapangan dan proyek akan melanjutkan kegiatan di lokasi sebagai motivator dan katalisator.

Proses Pembuatan DPL di Desa Blongko

Adaptasi pengalaman global kedalam konteks pengembangan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan di Indonesia telah diusulkan oleh Dahuri *et.al.* (1996). Keberhasilan pengelolaan daerah perlindungan laut berbasis-masyarakat di Filipina (White, 1989; Calumpong, 1993) merupakan model khusus yang ingin dicoba /diadaptasikan di Sulawesi Utara melalui Proyek Pesisir.

Sebagai bagian dari hasil studi banding ke Pulau Apo, Filipina, dan kunjungan dari Masyarakat Apo ke Blongko dan lokasi Proyek Pesisir lain di Sulawesi Utara maka masyarakat Desa Blongko berkeinginan untuk mengadaptasi model daerah perlindungan laut berbasis-masyarakat Pulau Apo. Model ini dapat diadopsi/diadaptasi di desa Blongko selain karena keinginan masyarakat, juga sesuai dengan kebijakan, peraturan dan pedoman Pemerintah Indonesia dalam rangka Pengelolaan (melestarikan dan melindungi) lingkungan. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997) dikemukakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam pengelolaan lingkungan ini setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan dan berkewajiban memelihara kelestarian dan fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi perusakan lingkungan hidup.

Mengacu pada undang-undang tersebut dan aturan yang ada maka dalam rangka menjamin dan meningkatkan produksi ikan diperairan desa Blongko, mempertahankan dan meningkatkan kualitas terumbu karang, melindungi keanekaragaman hayati laut dan melindungi tempat berkembang biaknya biota laut maka masyarakat desa Blongko menetapkan satu wilayah pesisir dan laut sebagai daerah perlindungan pesisir dan laut yang akan dikelola oleh masyarakat setempat.

Pengalaman global dari pengelolaan terumbu karang secara kolaboratif dan berbasis-masyarakat (White *et.al.*, 1994) merupakan dasar dan pendekatan yang digunakan dalam pengembangan daerah perlindungan laut di Desa Blongko. Secara garis besar penetapan daerah perlindungan laut di desa Blongko mengikuti langkah-langkah proses (langkah, kegiatan, hasil yang diharapkan dan indikator hasil/tujuan secara rinci dilihat dalam tabel terlampir) sebagai berikut (Crawford, 1999):

- Pengenalan masyarakat dan sosialisasi proyek
- Pelatihan, pendidikan dan pengembangan kapasitas masyarakat
- Pertemuan-pertemuan konsultasi masyarakat dan pembuatan aturan daerah perlindungan
- Keputusan Desa disepakati
- Pelaksanaan

Pengenalan masyarakat dan sosialisasi proyek: Penetapan daerah perlindungan laut ini melalui suatu proses panjang dimulai dengan penempatan penyuluh lapang secara tetap di desa (Oktober 1997) yang bertugas untuk membantu masyarakat mengidentifikasi isue pengelolaan wilayah pesisir bersama dengan masyarakat juga mengkoordinasi pertemuan dan konsultasi masyarakat untuk menyatukan ide dan pendapat. Dalam pengenalan masyarakat dan sosialisasi ini penyuluh lapangan bersama-sama masyarakat mengadakan pertemuan-pertemuan formal dan informal serta mengadakan penilaian secara partisipatif menyangkut sejarah, kondisi dan isu-isu pengelolaan sumber daya wilayah pesisir di desa.

Pelatihan, pendidikan dan pengembangan kapasitas masyarakat: Proyek Pesisir memfasilitasi masyarakat dengan kegiatan-kegiatan pelatihan seperti pelatihan pengamatan terumbu karang (*manta tow training*), penyuluhan dan pendidikan umum menyangkut terumbu karang dan konsep daerah perlindungan laut, hukum lingkungan laut dan pesisir, habitat dan ekosistem wilayah pesisir, pelatihan pengorganisasian kelompok dan pengelolaan keuangan, termasuk studi banding ke Pulau Apo dan kunjungan kelompok masyarakat dari Pulau Apo ke Blongko. Setelah dilatih ternyata bahwa masyarakat desa dapat melakukan pengamatan yang

cukup tepat terhadap kondisi terumbu karang yang ada disekitar mereka dan dapat melakukan pengelolaan sumber daya dan dana dengan baik. Pengalaman Proyek Pesisir di desa Blongko menunjukkan bahwa jika diberi tanggung jawab dan kesempatan untuk mengelola sendiri sumber daya yang tersedia maka masyarakat dalam proses belajar akan mampu secara mandiri menjadi pengelola yang baik. Lewat pelatihan dan pendidikan masyarakat ini penyuluh lapangan mengadakan identifikasi dan mengembangkan kelompok inti (*core group*) yang merupakan pemimpin dan pelopor bagi proses perencanaan dan pengelolaan selanjutnya.

Pertemuan konsultasi dan pembuatan aturan daerah perlindungan: Berbagai pertemuan konsultasi, musyawarah dan rapat dilakukan baik secara formal maupun informal, di tempat pertemuan masyarakat, rumah-rumah penduduk, gereja, mesjid, halaman rumah dan di tepi pantai untuk memberikan pemahaman, tukar pendapat, dan mendapatkan kesepakatan dan dukungan dari semua masyarakat dan *stakeholder*. Dari berbagai pelatihan, penyuluhan, pertemuan, musyawarah dan konsultasi ini muncul keinginan dari masyarakat untuk membuat aturan mengenai daerah perlindungan laut dan tim pengelola daerah perlindungan laut. Dalam setiap kegiatan di atas, kelompok pemanfaat dan pihak terkait (*stakeholder*) dilibatkan secara partisipatif, sehingga penentuan lokasi dan persetujuan peraturan mendapat dukungan dari mayoritas *stakeholder* dan pemanfaat wilayah pesisir. Untuk pembuatan peraturan dilakukan musyawarah khusus di setiap dusun dan musyawarah dengan kelompok-kelompok pemanfaat seperti nelayan soma dampar, nelayan panah, nelayan yang menggunakan perahu lampu, nelayan pajeko, pengumpul hasil laut di daerah terumbu karang (*gleaner*) dan pemanfaat hutan bakau. Dalam pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan seringkali ditemukan ada kelompok pengguna (seperti *gleaner*) yang tidak hadir atau tidak mau mengungkapkan pendapatnya dalam pertemuan. Dalam kasus seperti ini pertemuan-pertemuan informal perlu dilakukan untuk menggali pendapat mereka mengingat kelompok nelayan inilah yang akan mendapat dampak langsung dari adanya daerah perlindungan laut. Musyawarah-musyawarah dan pertemuan-pertemuan ini dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan semua pendapat dari semua *stakeholder* di daerah perlindungan yang akan ditetapkan ini untuk dimasukkan dalam aturan yang akan dibuat. Perumusan aturan ini dilaksanakan oleh penyuluh lapang dibantu oleh konsultan hukum yang ditunjuk oleh Proyek Pesisir. Setelah rumusan peraturan ini dibuat dilanjutkan dengan musyawarah bersama tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama untuk mendapatkan dukungan mereka. Rumusan peraturan ini beserta lokasi daerah perlindungannya kemudian dibahas kembali dengan masyarakat untuk disosialisasikan kembali kepada masyarakat serta mendapatkan koreksi, tambahan masukan dan persetujuan masyarakat.

Keputusan Desa: Setelah melalui tahap musyawarah, konsultasi dan pertemuan-pertemuan serta sosialisasi, aturan daerah perlindungan laut ini kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Keputusan Desa melalui satu musyawarah umum masyarakat desa. Keputusan Desa ini kemudian diusulkan untuk disahkan oleh Camat dan pemerintah di tingkat Kabupaten dan Propinsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Garis besar dari keputusan desa ini berisi:

1. Pertimbangan dan aturan-aturan hukum yang ada yang menunjang daerah perlindungan laut serta tujuan penetapan daerah perlindungan laut.
2. Lokasi daerah perlindungan.
3. Tugas dan tanggung jawab kelompok pengelola
4. Kewajiban dan kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan dalam daerah perlindungan laut
5. Kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang di daerah perlindungan laut
6. Sanksi dan Pengawasan
7. Peta lokasi, di lampirkan dalam keputusan desa tersebut.

Pelaksanaan: Pelaksanaan daerah perlindungan laut ini dimulai dengan penentuan tim pengelola daerah perlindungan yang sudah terbentuk untuk melaksanakan pengelolaan daerah perlindungan serta melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan. Pusat informasi lingkungan laut, pemasangan tanda-tanda batas di darat dan tanda batas pelampung, papan informasi mengenai lokasi daerah perlindungan sudah dilaksanakan. Rencana pengelolaan DPL sementara dibuat oleh masyarakat dan penyuluh lapangan. Pemantauan dan penegakan hukum oleh masyarakat sudah berjalan. Penyebar luasan informasi ke desa atau daerah sekitar desa dan nelayan dari desa-desa yang jauh tentang daerah terlindung akan dilakukan untuk mengurangi potensi pelanggaran aturan oleh nelayan dan masyarakat dari luar desa Blongko. Pelanggaran oleh masyarakat dari Desa Blongko di DPL belum pernah terjadi. Berdasarkan monitoring langsung oleh kelompok pengelola dan anggota masyarakat, telah ada indikasi bahwa semakin banyak hasil tangkapan ikan oleh nelayan disekitar DPL dan perairan desa Blongko, ikan berukuran besar (seperti ikan layar) ditangkap oleh nelayan tidak jauh dari DPL dan dalam monitoring mereka menemukan berbagai jenis ikan besar dan kecil bermain dan berkunjung di dalam DPL. Ada beberapa kejadian dimana ada nelayan dari luar desa yang melakukan pengeboman di daerah yang dekat dengan DPL dan coba-coba memasuki DPL namun setelah didekati oleh kelompok pengelola dan diberitahu mengenai DPL maka nelayan dari luar desa tersebut memaklumi dan tidak masuk dan menangkap di dalam dan sekitar DPL. Laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran dari mahasiswa Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan UNSRAT sudah dua kali dilakukan yakni masuk dan mengadakan penelitian dan pengambilan sampel di DPL tanpa ijin kelompok pengelola dan Kepala Desa walaupun sudah ditegur oleh masyarakat. Ada satu peristiwa dimana dicurigai bahwa ada nelayan dari desa

tetangga memotong pelampung tetapi setelah diselidiki oleh kelompok pengelola dan Kepala Desa tidak terbukti. Hilangnya pelampung (yang kemudian dikembalikan oleh masyarakat dari desa tetangga) mungkin disebabkan karena putusya tali pengait. Kesadaran dari masyarakat (nelayan) desa luar menurut informasi dari kelompok pengelola sudah mulai nampak lewat upaya nelayan dari desa luar mengembalikan pelampung yang hanyut/putus sebanyak dua kali. Kepala Desa Blongko dan anggota Kelompok Pengelola setiap kali mengadakan/menghadiri pertemuan formal di tingkat Kecamatan atau Kabupaten pada setiap kesempatan mensosialisasikan DPL ini kepada peserta pertemuan.

Manfaat Daerah Perlindungan Laut Berbasis-Masyarakat Sebagai Model Konservasi Laut

Dalam pertemuan terakhir para ahli daerah perlindungan laut (McManus, *et.al.*,1998) penyebarluasan pengadaan daerah perlindungan laut skala-kecil direkomendasikan sebagai suatu strategy penunjang bagi daerah perlindungan berskala-besar (seperti Taman Nasional Laut) karena berbagai alasan antara lain:

- Efektifitas Biaya: biaya (dan manfaat) secara umum dapat ditanggung oleh masyarakat atau pemerintah lokal dibandingkan dengan harus memasukkannya dalam anggaran nasional,
- Perubahan dari pengguna sumber daya menjadi pengelola sumber daya: Peran dan tanggung jawab yang jelas dapat dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi sumber daya dimana mereka menggantungkan hidupnya,
- Efektifitas konservasi: terbukti bahwa DPL skala kecil berpotensi dan dapat memberikan kontribusi bagi meningkatnya luasan konservasi ekosistem terumbu karang dunia (White, 1989; Calumpong, 1993),
- Manfaat ekonomi: secara khusus penting bagi masyarakat setempat karena fungsi ekonomis dari daerah perlindungan laut dalam menjaga dan meningkatkan produksi perikanan disekitar DPL dan dilain pihak berpotensi pula sebagai daerah tujuan wisata yang bisa membuka mata pencaharian baru bagi masyarakat setempat.

Daerah perlindungan laut berbasis-masyarakat di Sulawesi Utara diharapkan bukan hanya ada di Desa Blongko, dan desa-desa dimana Proyek Pesisir ada (Talise, Bentenen dan Tumbak yang proses konsultasi dan penentuan lokasi sementara dimusyawarahkan oleh masyarakat), tetapi dapat dilaksanakan pada setiap desa pesisir di Propinsi Sulawesi Utara. Fungsi daerah

perlindungan bagi masyarakat setempat adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil produksi ikan di daerah perlindungan laut dan meningkatkan hasil tangkapan ikan nelayan disekitar daerah perlindungan laut tersebut. Fungsi lain adalah sebagai tempat memijah bagi biota laut yang mengalami fase larva planktonik dalam siklus hidupnya. Diharapkan, larva ini akan dibawah oleh arus dan menetap (settle) diperairan sekitar, seperti TNL Bunaken, yang kemudian diharapkan dapat mempertahankan keanekaragaman hayati yang ada dalam perairan sekitar (TNL Bunaken), maupun mempertahankan keanekaragaman hayati yang ada di perairan Sulawesi Utara (Kasmidi *et.al.*, 1998).

Kegiatan penyelaman di TNL Bunaken saat ini semakin meningkat akibat kegiatan pariwisata. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas terumbu karang di perairan tersebut. Daerah Perlindungan laut di desa-desa pesisir di Sulawesi Utara ini dapat dijadikan sebagai alternatif untuk kegiatan penyelaman selain di TNL Bunaken. Bagi Masyarakat desa dan pemerintah daerah dengan adanya tambahan kegiatan pariwisata di desa-desa pesisir akan dapat membuka lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan perekonomian mereka dan menambah pendapatan daerah. Tidak semua DPL mempunyai kapasitas sebagai daerah tujuan wisata untuk ekoturisme namun bagi masyarakat setempat DPL tersebut penting dan dapat berperan sebagai konservasi keanekaragaman hayati desa dan dapat mempertahankan dan meningkatkan produksi perikanan mereka.

Lewat daerah perlindungan laut berbasis-masyarakat ini pula tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pesisir dan laut menjadi tanggung jawab masyarakat desa pesisir itu sendiri sehingga biaya-biaya penjagaan dan pengelolaan kelestarian lingkungan pesisir dan laut di tingkat kabupaten, propinsi dan pusat akan menjadi lebih rendah dan lebih efektif. Selain itu lewat daerah perlindungan laut berbasis-masyarakat ini maka tanggung jawab keamanan laut dan pesisir bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah (termasuk pihak berwajib seperti Kepolisian dan Angkatan Laut) tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat desa pesisir.

Daerah perlindungan laut berbasis-masyarakat di desa-desa pesisir ini diharapkan dapat menjadi satu program desentralisasi dan program pilihan (*voluntary program*) bagi desa, dimana masyarakat yang berpartisipasi dalam program ini dilatih dalam pengamatan terumbu karang secara partisipatif serta ditingkatkan kapasitas mereka untuk mengelola daerah perlindungan mereka sendiri sehingga aturan/kebijakan dan rencana pengelolaan sumber daya lingkungan dan pesisir dapat mereka lakukan sendiri demi menjamin kelestarian sumber daya yang ada di desa mereka. Hal ini sejalan dan menopang UU No. 22 Tahun 1999 yang memberikan otonomi

kepada daerah untuk mengelola wilayah pesisir secara terpadu dan lestari. Lewat undang-undang ini pula daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan program, kebijakan, dan perencanaan dalam pengelolaan sumber daya pesisirnya.

Tantangan bagi Upaya Replikasi/Adopsi Model Daerah Perlindungan Laut Berbasis-Masyarakat

Perubahan-perubahan dan konteks pemerintahan di Indonesia seperti gerakan reformasi dan upaya untuk meningkatkan partisipasi dan otonomi dari pemerintah daerah – lewat UU No. 22 Tahun 1999 - memberikan kesempatan yang cukup baik bagi upaya replikasi model-model berbasis-masyarakat (seperti DPL ini) di desa-desa pesisir secara nasional (sekitar 6000 desa pesisir di Indonesia) atau desa-desa di Propinsi Sulawesi Utara (sekitar 500 desa pesisir) yang berada di luar Taman Nasional.

Daerah perlindungan laut yang berhasil dapat memberikan sumbangan yang besar bagi konservasi sumber daya pesisir dan laut tetapi perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor dan kondisi yang diperlukan agar supaya replikasi model ini di lokasi lain dapat berjalan secara mudah dan benar. Replikasi yang berhasil membutuhkan antara lain (Crawford & Tulungen, 1999a):

- Ketersediaan sumber daya manusia yang trampil dalam jumlah yang cukup untuk bertindak sebagai fasilitator dan pelatih serta mampu memberikan bantuan teknis secara terus-menerus kepada masyarakat setempat.
- Dokumentasi yang benar dan terbukti mengenai faktor-faktor dan metode yang menentukan bagi adaptasi model.
- Institusi yang ada atau yang dikembangkan yang menjamin keberlanjutan pelaksanaan di masyarakat setempat.
- Ketersediaan sumber daya, dana, dan material yang cukup untuk menjamin dan melaksanakan kegiatan di lapangan.
- Komitmen dan dukungan politis yang nyata dari pemimpin dan pengambil kebijakan di daerah (Gubernur, Bupati, Bappeda dan instansi terkait lainnya), kelompok-kelompok *stakeholder* dan masyarakat terhadap program replikasi.

Faktor dan kondisi yang bisa menghambat replikasi model berhasil dengan baik antara lain keinginan atau tekanan/harapan dari pemberi dana dan atau instansi untuk secepat dan sebanyak

mungkin membuat daerah perlindungan laut di lokasi lain dengan dana terbatas. Tekanan seperti ini menyebabkan proses-proses partisipatif dan pengembangan kapasitas (perorangan, masyarakat dan lembaga lokal) dipaksakan dan tidak cukup yang bisa membawa akibat pada sulitnya atau gagalnya replikasi. Terkadang pula replikasi dilaksanakan sebelum model yang dicobakan sampai pada tahap dimana model tersebut telah berhasil memberikan keuntungan secara sosial ekonomi dan lingkungan yang nyata atau sebelum faktor-faktor yang menentukan keberhasilan adaptasi model didokumentasi dengan baik. Masalah di atas bisa berakibat pada tidak dimanfaatkannya secara efisien sumber daya manusia dan dana yang terbatas secara baik dan hasilnya akan menyebabkan ketidak seriusan komitmen dari masyarakat dan *stakeholder* di wilayah pesisir untuk terlibat dalam upaya-upaya konservasi selanjutnya yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana program.

Replikasi model DPL di Sulawesi Utara akan memfokus pada DPL berbasis-masyarakat yang sederhana dan dalam ukuran yang sesuai dengan kemampuan masyarakat desa. DPL berbasis-masyarakat ini merupakan pilihan yang baik karena selain telah secara luas diterima sebagai salah satu pendekatan yang efektif bagi konservasi dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, juga diterima sebagai model yang sederhana dimana hasil dan manfaatnya dapat lebih cepat dilihat (sekitar 2-3 tahun).

Kesimpulan

Masyarakat desa di wilayah pesisir apabila dilatih dan diperkuat kemampuan dan kapasitas mereka serta diberi kepercayaan secara partisipatif akan mampu bertanggungjawab secara baik dalam mengelola sumberdana dan sumber daya secara baik, mampu melakukan pemantauan/monitoring kondisi sumber daya pesisir secara tepat serta dapat dirubah dari pemanfaat murni sumber daya menjadi pengelola (manager) sumber daya mereka sendiri.

Pengelolaan sumber daya berbasis-masyarakat memerlukan waktu yang lama dalam prosesnya dan harus mengikuti kecepatan dan kemampuan masyarakat bukan kecepatan dan kemampuan proyek. Waktu yang dibutuhkan mulai dari proses pengenalan sampai terbentuknya satu daerah perlindungan laut membutuhkan waktu minimal satu tahun.

Untuk mencapai keberhasilan pendekatan berbasis-masyarakat hal yang penting adalah perlunya menempatkan secara tetap tenaga penyuluh lapangan yang berpengalaman dan terlatih yang akan memotivasi, mengkoordinasi, memfasilitasi dan melatih masyarakat dalam kegiatan-kegiatan

pengelolaan berbasis-masyarakat di desa. Sumber daya dan perhatian khusus dalam membangun kapasitas sumber daya manusia untuk program-program berbasis-masyarakat perlu dilakukan sejak dari awal yang di barengi dengan pelatihan jangka pendek yang mampu diterima oleh masyarakat desa dapat dilaksanakan jika ada tenaga penyuluh lapangan yang mencurahkan waktu dan tenaganya secara penuh di desa.

Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong desentralisasi pengelolaan sumber daya wilayah pesisir untuk menjamin kualitas dan kelestarian sumber daya wilayah pesisir dimana banyak penduduk miskin menggantungkan hidupnya sangat diperlukan. Program-program desentralisasi dapat lebih efektif/murah biayanya, lebih adil/seimbang dan lebih lestari/berkesinambungan dibanding program-program terpusat (*centralized*).

Daerah perlindungan laut berbasis-masyarakat dapat dijadikan salah satu model bagi desentralisasi/otonomi pengelolaan sumber daya wilayah pesisir yang bisa menjamin kondisi dan kualitas lingkungan dan sumber daya wilayah pesisir dan lautan dan dapat menjamin kualitas kehidupan masyarakat di wilayah pesisir. Pemerintah Daerah Kabupaten/Propinsi dapat menjadikan model DPL ini sebagai salah satu kebijakan dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir. DPL berbasis-masyarakat ini dapat dikembangkan sebagai salah satu metode/cara dalam meningkatkan produksi perikanan bagi nelayan di wilayah pesisir, juga sebagai salah satu strategi dalam konservasi lingkungan pesisir dan laut (terumbu karang, mangrove, padang lamun) dan dalam meningkatkan keanekaragaman hayati di daerah ini. Model daerah perlindungan laut ini dapat juga dipakai sebagai salah satu pendekatan dalam menambah daerah tujuan wisata bahari (ekowisata) di daerah yang bisa menjadi suplemen bagi taman nasional atau tujuan wisata yang sudah ada.

Pengembangan model-model berbasis-masyarakat untuk pengelolaan sumber daya wilayah pesisir di Sulawesi Utara dan secara nasional merupakan hal penting bagi keberhasilan proyek dan bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi desentralisasi dan otonomi daerah dalam pengelolaan pesisir dan lautan secara lebih efektif sebagaimana diharapkan oleh UU No. 22 Tahun 1999. Namun demikian Proyek Pesisir masih dalam tahap awal untuk mencapai suatu model yang baik yang dapat dilaksanakan. Kami yakin proyek ini tidak akan berhasil dengan baik apabila model-model yang dikembangkan di Sulawesi Utara ini tidak secara baik didokumentasi, disebarluaskan dan diadopsi di daerah lain di Indonesia

Penghargaan

Proyek Pesisir Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih kepada EPIQ/NRM yang telah mengundang Proyek Pesisir untuk menyampaikan makalah ini. Terima kasih kepada BAPPEDA Tk I Sulawesi Utara dan lembaga terkait dalam Tim Pengarah Propinsi dan Tim Kerja Kabupaten Minahasa yang memberikan bantuan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan Proyek Pesisir di Sulawesi Utara. Kami berterima kasih kepada USAID sebagai penyandang dana kegiatan proyek pesisir di Sulawesi Utara. Opini dan pandangan yang dikemukakan dalam paper ini adalah opini dan pandangan penulis dan tidak merupakan pandangan dari CRC-URI, USAID, maupun mitra kerja dari Pemerintah Indonesia.

Daftar Pustaka

- Calumpong H. 1993. The Role of Academe in Community Based Coastal Resource Management: The Case of APO Island. In: *Proceedings of the Seminar Workshop on Community-Based Coastal Resources Management: Our Sea Our Life*. Lenore P. C. (eds.). Voluntary Services Overseas, New Manila, Quezon City, Philippines.
- Crawford, B.R. 1999. *Monitoring and Evaluation of a Community-Based Marine Sanctuary: the Blongko Village Example*. Working Paper. Coastal Resources Management Project – Indonesia. Coastal Resources Center, University of Rhode Island and the US Agency for International Development. Jakarta.
- Crawford, B.R., I. Dutton, C. Rotinsulu, L. Hale. 1998. *Community-Based Coastal Resources Management in Indonesia: Examples and Initial Lessons from North Sulawesi*. Paper presented at Internaional Tropical Marine Ecosystem Management Symposium, Townsville, Australia, November 23-26
- Crawford, B.R., J.J. Tulungen. 1999a. *Scaling-up Initial Models of Community-Based Marine Sanctuaries into a Community Based Coastal Management Program as a Means of Promoting Marine Conservation in Indonesia*. Working Paper. Coastal Resources Management Project – Indonesia. Coastal Resources Center, University of Rhode Island and the US Agency for International Development. Jakarta.
- Crawford, B.R., J.J. Tulungen. 1999b. *Preliminary Documentation of the Village Profiling Process in North Sulawesi*. Working Paper. Coastal Resources Management Project – Indonesia. Coastal Resources Center, University of Rhode Island and the US Agency for International Development. Jakarta.
- Crawford, B.R., J.J. Tulungen. 1999c. *Marine Sanctuary as a Community Based Coastal Resources Management Model for North Sulawesi and Indonesia*. Working Paper. Coastal Resources Management Project – Indonesia. Coastal Resources Center, University of Rhode Island and the US Agency for International Development. Jakarta.
- Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting, dan M.J. Sitepu. 1996. *Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. P.T. Pradnya Paramita, Jakarta.

- Ginting, S.P. 1998. Reformasi Pembangunan Kelautan dalam Mengatasi Konflik Pengelolaan Wilayah di Daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*. 1 (5): 1-6.
- Kasimidi, M., P. Kussoy, B. Crawford, J. Tulungen 1998. *Daerah Perlindungan Laut di Desa Blongko Sebagai Sebuah Model Program Decentralisasi Pengelolaan Sumber daya Pesisir Berbasis-Masyarakat*. Working Papper. Proyek Pesisir. Coastal Resources management Project – Indonesia.
- Kasmidi, M., A. Ratu, E. Armada, J. Mintahari, I. Maliasar, D. Yanis, F. Lumolos, dan N. Mangampe. 1999. *Profil Sumber daya Wilayah Pesisir Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara*. In press. Proyek Pesisir. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Naragansett, Rhode Island, USA.
- Pollnac, R.B., C. Rotinsulu and A. Soemodinoto. 1997. *Rapid Assesment of Coastal Management Issues on the Coast of Minahasa*. Coastal Resources Management Project – Indonesia. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, and the US Agency for International Development, pp. 60.
- McManus, J.W., C. vanZwol, L.R. Garces and D. Sadacharan. Editors. 1998. A framework for future training in marine and coastal protected area management. *Proceeding ICLARM Conference 57*. 54p.
- Tangkilisan, N., V. Semuel, F. Masambe, E. Mungga, I. Makaminang, M. Tahumul dan S. Tompoh. 1999. *Profil Sumber daya Wilayah Pesisir Desa Talise, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara*. In press. Proyek Pesisir. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Naragansett, Rhode Island, USA.
- Tulungen, J.J., P. Kussoy, B.R. Crawford. 1998. *Community Based Coastal Resources Management in Indonesia: North Sulawesi Early Stage Experiences*. Paper presented at Convention of Integrated Coastal Management Practitioners in the Philippines. Davao City. 10 – 12 Nopember.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. 1997. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/BAPEDAL. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
1999. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.

White A.T. 1989. Two Community-based marine reserves: Lessons Learned for Coastal Management. P. 85-96. In: *Coastal Area Management in Southeast Asia: Policies, Management Strategies and Case Studies. Proceeding ICLARM Conference 19.* T.E Chua and D. Pauly (eds.) 254 p. Ministry of Science and Technology and the Environment, Kuala Lumpur; Johor State Economic Planning Unit, Johore Baru, Malaysia; and International Center for Living Aquatic Resources Mangement, Manila, Philippines.

White A.T., L. Z. Hale, Y. Renard, L. Cortesi. 1994. *Collaborative and Community-Based Management of Coral Reefs: Lesson from Experience.* Kumarian Press. West Hartford, Con. USA.

Lampiran: Langkah, kegiatan, hasil yang diharapkan dan indikator bagi pembuatan daerah perlindungan laut berbasis-masyarakat

Langkah dalam proses perencanaan dan pengelolaan	Kegiatan yang dilakukan	Hasil yang diharapkan	Indikator hasil/tujuan yang dicapai
1. Pengenalan masyarakat dan sosialisasi proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi desa dipilih • Penyuluh lapangan ditempatkan di lokasi desa secara tetap • Survey data dasar dilaksanakan • Sejarah lingkungan dan kegiatan study teknis dilaksanakan • Pertemuan/rapat (formal dan informal) dan diskusi mengenai proyek dilaksanakan oleh penyuluh lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Isu-isu pengelolaan pesisir di dalam masyarakat diidentifikasi • Konteks sosio-ekonomi, budaya dan lingkungan dipahami oleh proyek • Pendekatan dan tujuan proyek dipahami oleh masyarakat umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan data dasar disiapkan dengan deskripsi isu-isu pengelolaan pesisir • Sejarah lingkungan desa disiapkan dan didistribusikan kepada masyarakat • Jumlah pertemuan/presentasi formal dan informal mengenai proyek dilaksanakan oleh penyuluh lapangan • Diskusi dengan informan kunci dan masyarakat yang menunjukkan pemahaman mereka tentang tujuan proyek
2. Pelatihan, pendidikan dan pengembangan kapasitas masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan silang dengan lokasi DPL yang sudah berhasil • Penyuluhan mengenai ekosistem terumbu karang, konsep daerah perlindungan, hukum lingkungan • Pelatihan pemetaan dan pengawasan terumbu karang partisipatif • Pemberian dana program pelaksanaan awal (<i>early action</i>) dimulai • Pelaksanaan awal dimulai • Pelatihan mengenai pengelolaan keuangan • Studi banding dan pelatihan mengenai ekoturisme dan pengembangan mata pencaharian tambahan • Pelatihan kelompok inti (<i>core group</i>) mengenai pengelolaan pesisir terpadu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman masyarakat mengenai dampak aktifitas manusia terhadap lingkungan dan sumber daya pesisir dan pemahaman konsep DPL • Peta terumbu karang dibuat oleh masyarakat sebagai dasar penentuan lokasi DPL • Kesadaran masyarakat mengenai kondisi terumbu karang lokal dan munculnya peningkatan kapasitas pengawasan • Adanya dukungan masyarakat umum mengenai tujuan proyek pesisir dan konsep DPL • Kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan secara partisipatif dan pengelolaan keuangan secara transparan dikembangkan dan diperkuat • Kapasitas masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah pengelolaan sumber daya pesisir lewat solusi dan kegiatan sederhana diperkuat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyuluhan, kunjungan silang dan pelatihan yang dilakukan • Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan, pelatihan dan kunjungan silang (pria dan wanita) • Peta yang dihasilkan oleh masyarakat mengenai kondisi terumbu karang desa disiapkan • Jumlah pertemuan yang dilaksanakan dalam rangka mengambil keputusan mengenai jenis dan proses kegiatan pelaksanaan awal. • Jumlah peserta dan kelompok stakeholder yang mengikuti pertemuan-pertemuan perencanaan pelaksanaan awal • Jumlah proposal pelaksanaan awal yang disiapkan dan diusulkan oleh masyarakat • Pelaksanaan awal yang berhasil diselesaikan oleh masyarakat dan laporan penggunaan dana disampaikan kepada lembaga pemberi dana

<p>3. Pertemuan-pertemuan konsultasi masyarakat dan pembuatan aturan daerah perlindungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan draf isi aturan desa • Diskusi dan pertemuan (formal dan informal) masyarakat dilaksanakan • Isi aturan desa diperbaiki dan draft final diselesaikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam pembuatan aturan DPL • Konsensus dari mayoritas masyarakat desa mengenai lokasi, ukuran kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, sanksi dan pengelola DPL 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pertemuan (formal dan informal) yang dilaksanakan untuk menetapkan dan menyiapkan lokasi DPL dan isi aturan desa • Jumlah peserta dan kelompok stakeholder yang menghadiri pertemuan untuk menyiapkan dan memutuskan lokasi DPL dan isi aturan desa • Jumlah orang dan stakeholder yang setuju dan tidak setuju mengenai aturan dan lokasi DPL selama dalam pertemuan
<p>4. Keputusan Desa disepakati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Musyawarah desa dalam kesepakatan aturan desa • Penandatanganan Surat Keputusan Desa oleh Kepala Desa dan Camat • Peresmian formal DPL oleh Gubernur 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan secara formal DPL oleh masyarakat dan pemerintah desa sampai propinsi • Dasar hukum yang tepat dalam rangka pengelolaan dan penegakan aturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat musyawarah umum desa dalam menetapkan aturan desa • Tambatan musyawarah menyatakan bahwa aturan desa telah disepakati • Keputusan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa • Keputusan Desa ditandatangani oleh Camat (mengetahui/menyetujui) • Peresmian DPL yang dihadiri oleh pejabat tinggi yang memberikan support terhadap DPL dan dipublikasikan lewat Surat Kabar, Radio dan Televisi.
<p>5. Pelaksanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda batas di pasang dan dijaga • Papan informasi didirikan • Rencana pengelolaan dikembangkan • Pertemuan-pertemuan kelompok pengelola • Monitoring terumbu karang dan biota laut (ikan) dilaksanakan • Penegakan hukum dilaksanakan • Sanksi diberikan bagi pelanggar aturan • Penyuluhan dan pendidikan umum diteruskan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat ketaatan yang tinggi dari masyarakat sesuai aturan aturan • Pengelolaan DPL yang efektif berjalan dengan baik • Tutupan dan kondisi terumbu karang meningkat di dalam DPL • Kepadatan biota laut (ikan) di dalam DPL meningkat • Hasil tangkapan nelayan disekitar DPL (khususnya jenis-jenis ikan karang) meningkat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pelanggaran di DPL yang dilaporkan • Jumlah yang tertangkap dan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kelompok pengelola • Jumlah beberapa kali sanksi bagi pelanggaran dilakukan • Jumlah pertemuan kelompok pengelola yang dilaksanakan • Survey Manta Tow untuk tutupan karang dilakukan • Transek LIT untuk tutupan karang dan survey sensus ikan • Data statistik sederhana mengenai spesies ikan oleh masyarakat di DPL dan yang ditangkap oleh masyarakat di sekitar DPL

Pengelolaan Kawasan Lindung di Sulawesi dan Desentralisasi: Pandangan dan Pemecahan Permasalahannya di Masa Depan¹

Oleh:

Robert Lee dan Nono Suyatno

Abstrak

Indonesia dengan keadaan geografisnya yang unik telah memberikan kehidupan bagi jenis-jenis satwa dan tanaman yang paling besar di Asia, dan terbesar kedua di dunia. Kawasan konservasi dan khususnya Taman Nasional, merupakan tempat perlindungan terakhir bagi spesies-spesies terancam punah berikut ekosistemnya. Tiga puluh dua lokasi Taman Nasional (*non-marine*) mewakili 64% dari total luas kawasan lindung, dan diperkirakan mengandung seluruh komplemen dari satwa liar yang terancam di Indonesia. Karena kebutuhan manusia dan perkembangan ekonomi yang terus meningkat, kawasan konservasi khususnya Taman Nasional diharapkan dapat lebih meningkatkan tanggungjawabnya dalam memelihara keanekaragaman hayati Indonesia. Namun demikian, sistem yang ada sekarang belum mampu untuk memberikan perlindungan yang luas terhadap hutannya, dan oleh karena itu perannya terhadap perlindungan keanekaragaman hayati masih terus dibicarakan. Permasalahannya mencakup tiga hal, yaitu: (1) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan dana yang perlu dikelola dan sumber daya yang dilindungi, (2) masih rendahnya keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengawasi dan mengelola sumber daya, (3) masyarakat setempat yang memiliki minat dalam kontribusi untuk mengelola seringkali tidak dilibatkan dalam pelaksanaan dan isu-isu manajemen. Contoh yang jelas di mana dibutuhkan penguatan pengelolaan adalah di Sulawesi Utara di mana populasi spesies-spesies yang terancam punah di kawasan konservasinya telah turun sebesar 95% dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.

¹ Disampaikan pada Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Kawasan Timur Indonesia di Manado, 24 – 27 Agustus 1999.

Menghadapi kebijakan desentralisasi yang akan datang, rencana dan prioritas konservasi harus diubah secara tepat. Yayasan lokal, mahasiswa dan anggota masyarakat memiliki gagasan, tenaga dan sumber daya manusia yang sangat besar yang harus ditanggapi oleh pemerintah dan lembaga donor. Namun demikian, saat sekarang, keterampilan teknis mereka masih sangat rendah. Pelatihan bagi yayasan, lembaga lokal dan mahasiswa merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi di masa yang akan datang. Sekali mereka mendapat pelatihan dalam teknik dan prinsip konservasi, maka mereka akan dapat membantu kegiatan konservasi dalam bentuk monitoring, penelitian, patroli, penyuluhan dan memberikan pola pengelolaan serta pelaksanaannya.

Abstract

Indonesia's unique geography endows it with the greatest number of species of plants and animals in Asia, and the second greatest biodiversity in the world. Protected areas and national parks, in particular, represent the last stronghold for many of Indonesia's threatened species and ecosystems. The 32 national parks (non-marine) represent 64% of the total protected area, and is estimated to contain a full complement of Indonesia's endangered wildlife. As human needs and economic development increase, protected areas, particularly national parks, will be expected to bear an increasingly greater responsibility in maintaining Indonesia's biodiversity. However, the protected areas system has not been able to cope with the broad suite of threats to its forests, and therefore, the role of biodiversity preservation is being compromised. The problems are three-fold: 1) the human and financial resources needed to manage and protect resources are below capacity; 2) technical skills needed to monitor and manage protected areas are very low; and 3) local stakeholders who have an interest in contributing to management are often not involved in management issues and practices. A clear example of the need for management strengthening is in North Sulawesi where populations of threatened and endangered species in protected areas have dropped by as much as 95% in the last twenty years.

In the face of the imminent decentralization, conservation priorities and plans must shift accordingly. Local NGOs, university students, and community members represent a vast pool of ideas, energy, and human resources from which government and donor agencies should tap. At the moment, however, technical skills of local NGOs, university students, and community members to actually contribute to conservation management is far below par. Training of local NGOs and university students is the next critical step to the successful management of protected areas in the future. Once these stakeholders have been trained in conservation techniques and principles, they can provide immense assistance in the form of: monitoring; research; patrolling; awareness; and management design and implementation.

Pendahuluan

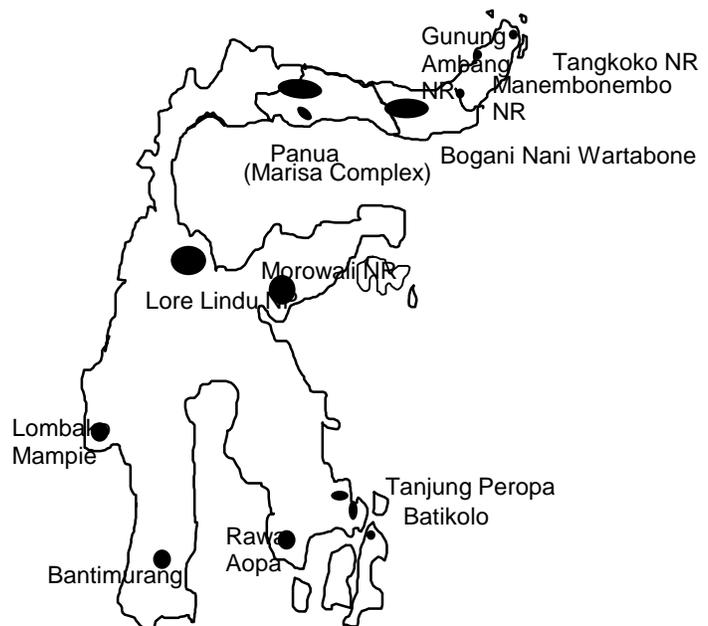
Di Indonesia, kawasan lindung berarti suatu areal yang dilindungi dari segala kegiatan yang dapat mengubah karakter tanah, hewan, dan tumbuhan di dalam kawasan dengan cara apapun, serta kegiatan yang dapat mempengaruhi keaslian kawasan.

Namun dalam kenyataannya masih banyak kawasan lindung yang sumber dayanya terus dimanfaatkan terutama oleh masyarakat setempat walaupun secara hukum hal tersebut dilarang.

WCS telah menjalankan penelitian ekologi dan dampak kegiatan manusia di sejumlah kawasan lindung di Sulawesi untuk memonitor populasi satwa dan kegiatan manusia. WCS juga telah melaksanakan penelitian terhadap arus perdagangan satwa liar di pasar Minahasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa populasi hidupan liar di kawasan lindung sedang dalam penurunan pada tingkat kritis yang disebabkan oleh perburuan, penambangan emas, pengambilan rotan, dan bentuk-bentuk gangguan lainnya.

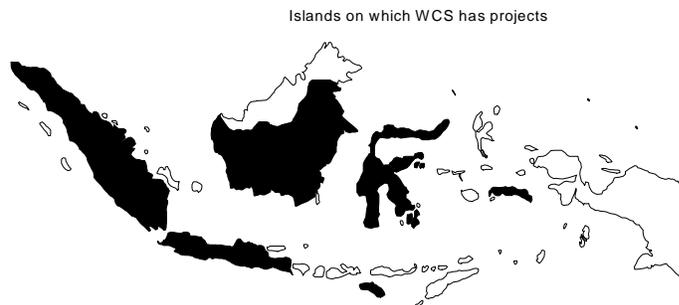
Kawasan Lindung di Sulawesi

Sulawesi, secara biologis adalah pulau yang paling khas di Kepulauan Indonesia. Ia berada pada tengah-tengah Wallacea – kawasan biogeografis antara Asia dan Australia. Sejarah geologis Sulawesi yang kompleks dan terisolasi telah menyebabkan daerah ini memiliki tingkat endemisitas hidupan liar paling tinggi. Umpamanya, 98 persen spesies mamalia (tidak termasuk kelelawar) yang ada di sini tidak ditemukan di manapun ditempat lain.



Satwa-satwa tersebut sebagian besar ditemukan di kawasan lindung. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah kenyataan perbedaan dalam distribusi dan kelimpahan populasi hidupan liar antara kawasan lindung dengan daerah lainnya cukup mencolok. Kawasan lindung, khususnya Taman Nasional, telah menjadi satu-satunya tempat perlindungan bagi sebagian besar populasi hidupan liar. Karena begitu pentingnya taman nasional, dan ancaman yang serius yang

dihadapi populasi hidupan liar ini, kita perlu memusatkan usaha-usaha terhadap pengelolaan taman nasional yang lebih kuat.



Program Kegiatan WCS-IP

Saat ini WCS – IP menjalankan program di sejumlah lokasi di 6 pulau di Indonesia. WCS telah bekerja di Sulawesi sejak 1991. Strategi WCS sangat berbasiskan pada lapangan dan ilmiah. Konservasi yang tepat guna adalah berasal dari apa yang terjadi di lapangan. Hal ini bukan untuk menyangkal pentingnya kebijakan,

bahkan itu sangat penting. Namun apa yang WCS coba lakukan adalah bekerja dan tinggal di lapangan sehingga dapat mengumpulkan informasi sebanyak dan seakurat mungkin yang diharapkan dapat membantu para pelaksana lapangan untuk membuat keputusan yang tepat.

WCS menjalankan penelitian pada empat tahap/tingkat:

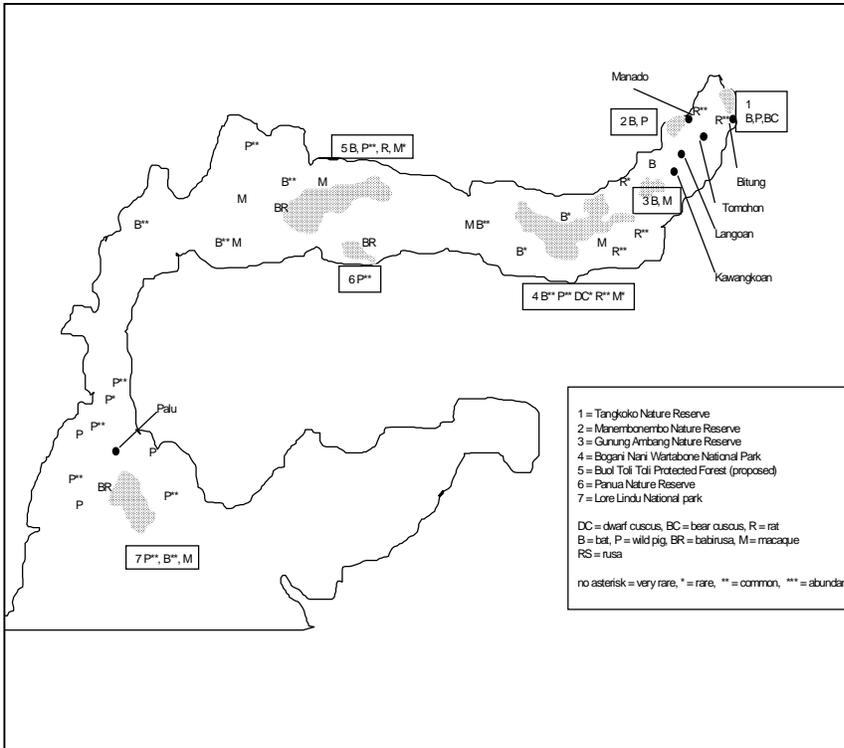
1. pengamatan biologis untuk menentukan status dari hidupan liar.
2. monitoring jangka panjang terhadap spesies satwa liar dan ekosistem.
3. studi mengenai ekologi untuk memahami kebutuhan hidupan liar.
4. studi untuk menilai dampak kegiatan manusia terhadap hidupan liar dan lahan-lahan belantara.

Dalam mengumpulkan informasi WCS bekerjasama dengan masyarakat setempat dan lembaga ilmiah, serta lembaga pemerintah untuk menentukan prioritas konservasi dan rencana tindak lanjut bagi kegiatan konservasi di masa mendatang.

Permasalahan Pengelolaan Kawasan Lindung di Sulawesi

WCS telah menjalankan penelitian ekologi dan dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan di Tangkoko, Manembonembo, Gunung Ambang, dan Bogani Nani Wartabone untuk memonitor populasi satwa dan dampak kegiatan manusia. WCS juga telah melaksanakan penelitian terhadap arus perdagangan satwa liar di pasar Minahasa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kunci yang menyebabkan populasi hidupan liar di kawasan lindung berada dalam tingkat penurunan

yang membahayakan. Kuncinya adalah perburuan, penambangan emas, pengambilan rotan, dan bentuk-bentuk gangguan lainnya.



Perburuan sebenarnya telah ada di Sulawesi Utara sejak ribuan tahun lalu. Tetapi dengan meningkatnya jumlah penduduk, pemusatan ekonomi, infrastruktur yang meningkat seperti jalan ber-aspal dan kendaraan bermotor, telah mengakibatkan akses terhadap satwa dan jumlah satwa yang diperdagangkan meningkat cukup tinggi. Pada saat yang bersamaan, ketika populasi hidupan liar menurun, pemburu justru

semakin meningkatkan kegiatan berburunya, yang berarti meningkatnya intensitas perburuan. Sekarang, pemburu yang biasa berburu di hutan di Sulawesi Utara sudah bergerak semakin jauh ke selatan ke Sulawesi Tengah untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar terhadap daging satwa liar.

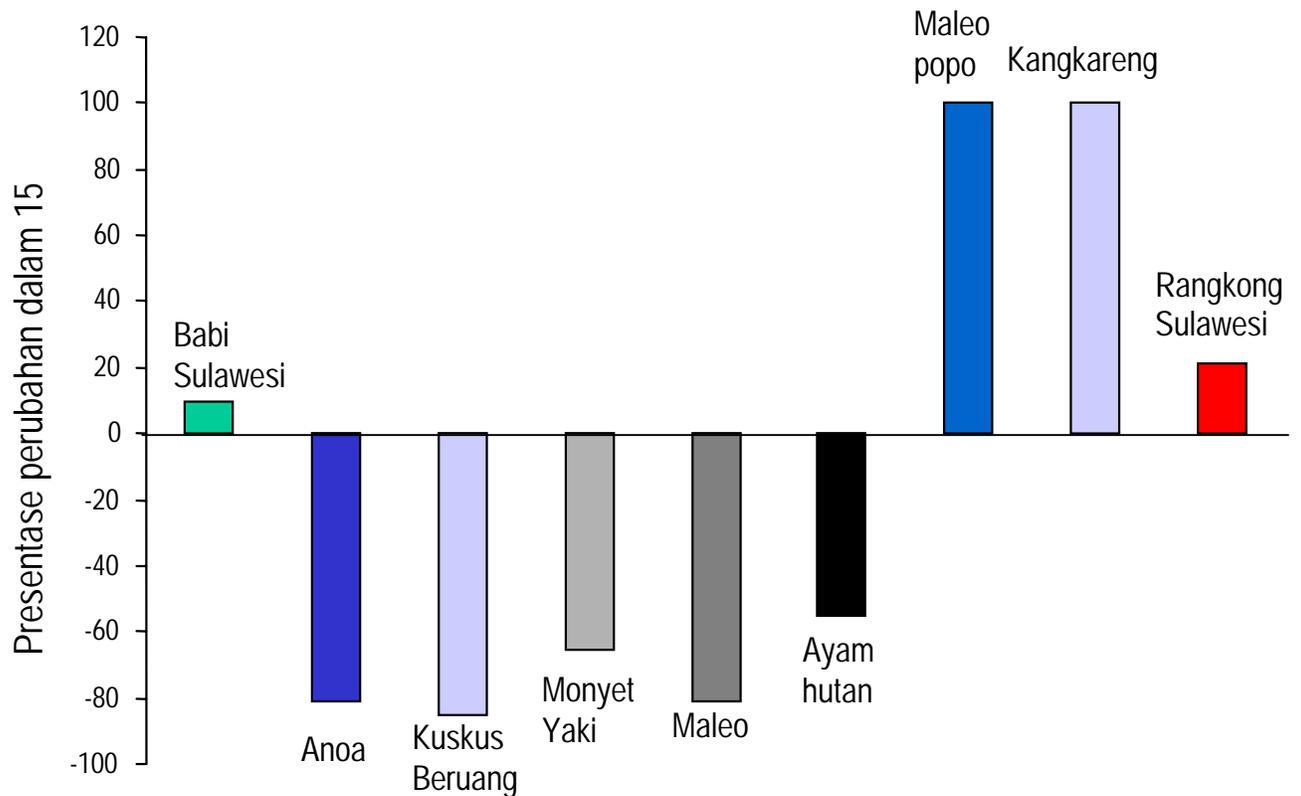
Dari perburuan saja, hidupan liar di Tangkoko, Manembo, dan Gunung Ambang telah menurun sebesar 95% dalam kurun waktu 20 tahun. Hidupan liar tersebut meliputi maleo, anoa, babirusa, yaki, dan kuskus. Sekali populasi ini mulai menurun, sangat sulit bagi mereka untuk kembali. Seperti halnya manusia, spesies-spesies ini memerlukan waktu yang lama untuk bereproduksi. Umpamanya, bagi manusia, 9 bulan masa kehamilan dan 2-3 tahun untuk menyapih. Untuk yaki (monyet), kira-kira 6 bulan masa kehamilan dan 1 tahun masa menyapih.

Perkiraan penggunaan daging satwa liar tahunan oleh masyarakat di sekitar CA Manembo-nembo dan Gunung Ambang.

Nama Umum	Nama Ilmiah	Jumlah satwa yg diambil (kg)	Status *
Tikus	Familia Muridae	133.611,0	TL
Kelelawar	Order Chiroptera	94.906,0	TL
Kuskus kerdil	Strigocuscus celebensis	3.449,0	L
Tarsius	Tarsius spectrum	464,0	L
Monyet hitam Sulawesi	Macaca nigra	365,0	L
Babi hutan	Sus celebensis	251,0	TL
Kuskus beruang	Ailurops ursinus	206,4	L
Rangkong Sulawesi	Rhyticeros cassidix	65,08	L
Biyawak	Varanus indicus	27,1	TL
Pithon	Python reticulatus	20,4	TL
Rusa	Cervus timorensis	14,0	L
Anoa	Bubalus depressicornis	5,6	L
Musang	Viverra zangalla	4,0	L
Babirusa	Babirusa babirusa	2,6	L
Jumlah berat (kg) per tahun		233.392,38	
L = dilindungi TL = Tidak dilindungi			

WCS telah mengadakan wawancara dengan penduduk desa di Menembonembo dan Gunung Ambang untuk mengetahui berapa banyak penduduk menggunakan hutan pada kawasan lindung untuk berburu. Hasilnya, di Manembonembo 92% penduduk berburu untuk kebutuhan konsumsi sendiri. Di Gunung Ambang 96% penduduk berburu untuk konsumsi sendiri. Dari gambaran ini dengan tidak melibatkan pemburu yang berburu untuk kebutuhan pasar, maka tingkat perburuan sebenarnya sangat tinggi, dan akan menimbulkan kepunahan lokal bagi sebagian besar spesies mamalia besar. Akibat penangkapan yang terus menerus, populasi kelelawar juga diperkirakan akan menurun secara pesat di masa datang.

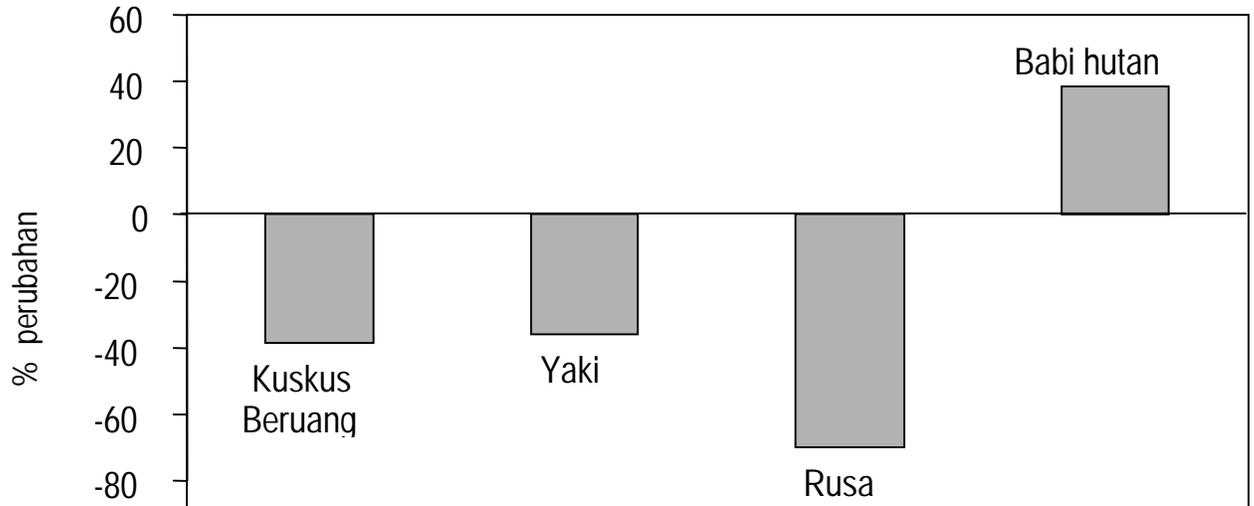
Kecenderungan populasi jenis mamalia dan burung kunci di Tangkoko-Duasudara



Faktor-faktor berikut turut memperbesar permasalahan populasi satwa:

1. Permintaan pasar yang tinggi akan daging satwa liar.
2. Tekanan yang tinggi dari perburuan untuk konsumsi sendiri.
3. Kurangnya patroli dan pengawasan terhadap kegiatan perburuan di dalam kawasan lindung.
4. Kurangnya pelaksanaan hukum perlindungan hidupan liar secara tegas.
5. Kurangnya perhatian masyarakat lokal pada kawasan lindung serta hukum-hukum perlindungan hutan dan satwa.

Kecenderungan populasi jenis mamalia kunci di Manembonembo antara Juni 1994 dan Desember 1995



Kawasan Lindung dan Desentralisasi

Saat ini, struktur pengelolaan dan keputusan belum dirasakan dapat menangani ancaman-ancaman terhadap sumber daya alami di dalam kawasan lindung.

Sehubungan dengan desentralisasi kebijakan, maka terdapat beberapa hal yang diharapkan dapat memperbaiki mekanisme kerja dalam hubungannya dengan efisiensi dan efektifitas lembaga pemerintah.

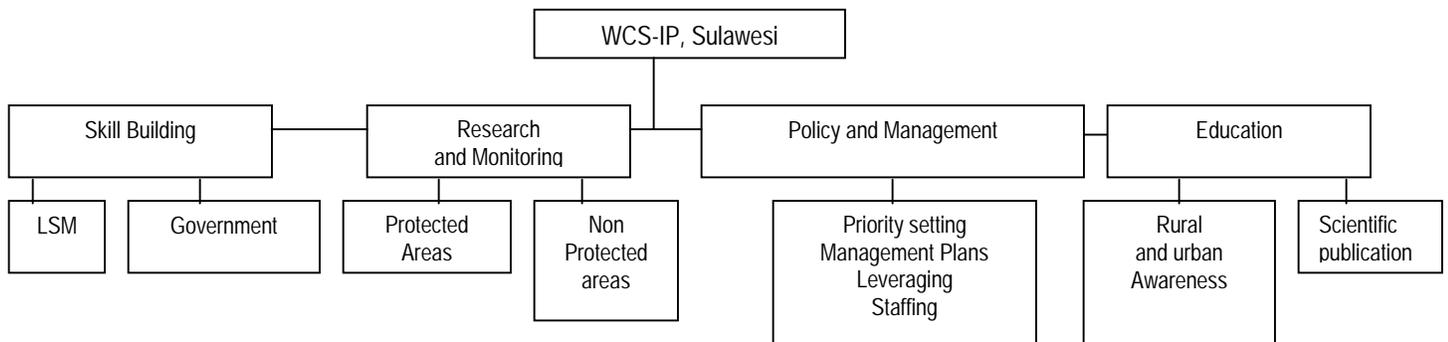
1. Bila lembaga di daerah memiliki lebih kesempatan untuk memperhatikan apa yang terjadi di kawasannya, maka informasi akan lebih cepat sampai.
2. Bila pembuat keputusan berada di daerah, maka keputusan yang diambil bisa lebih cepat.
3. Bila dana bisa di berikan ke daerah, maka akan lebih transparan mengenai anggaran dan dana yang digunakan.
4. Bila pemerintah melibatkan masyarakat setempat yang lebih mengenal daerahnya, maka dengan demikian mereka lebih berpengetahuan mengenai masalah-masalah dan cara-cara pemecahannya.

Namun hal yang lebih penting dengan adanya desentralisasi ini adalah meningkatnya kapasitas pada tingkat daerah di mana pelaksana setempat akan lebih mampu dan lebih baik untuk berkontribusi bagi kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan di daerahnya.

Sebagai contoh, di Cagar Alam Tangkoko, saat ini terdapat masyarakat setempat dan sejumlah LSM yang bekerja untuk mengkonservasi sumber daya alam Tangkoko. Hal ini menandakan potensi yang perlu diperhatikan untuk merangsang usaha-usaha konservasi selama proses desentralisasi.

Yang diperlukan adalah pelatihan agar mereka bisa menjadi praktisi lapangan yang baik. Karena bila berbicara masalah konservasi, hal itu tidak cukup dengan usaha mempertahankan populasi satwa-satwa tersebut, tetapi mereka harus dibekali dengan pemahaman mengenai lingkungan, habitat, populasi, serta kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Hal ini berarti bahwa kegiatan-kegiatan di masa mendatang harus dilengkapi dengan tujuan perlindungan populasi dan sumber dayanya. Untuk itu perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dan dengan mereka yang tidak duduk di pemerintahan.



Untuk tujuan ini, WCS bekerjasama dengan LSM lokal dan melatih mereka dalam teknik lapangan termasuk penilaian biodiversitas, monitoring, patroli, dan bekerjasama dengan petugas PKA dan melatihnya dari segi ilmiah, biologi, ekologi, prinsip-prinsip dan konsep konservasi, serta penggunaan komputer.

WCS juga memulai melakukan training bagi petugas PKA sehingga mereka tidak hanya peduli terhadap kegiatan LSM, tetapi mereka juga mulai menggunakan teknik-teknik yang mereka pelajari dalam tugasnya sebagai pengelola kawasan lindung.

Salah satu langkah untuk memfasilitasi kerjasama ini adalah dengan mengikuti patroli gabungan antara LSM lokal dan petugas PKA. Petugas PKA bersama dengan ilmuan dari LSM mengumpulkan informasi mengenai populasi hidupan liar dan kegiatan manusia di dalam kawasan lindung. Hal ini akan memberikan kehadiran kegiatan konservasi di dalam kawasan lindung. LSM lokal akan menjadi penghubung penting antara masyarakat dan lembaga konservasi, dan akan menjadi sebuah mediator. LSM lokal dan petugas PKA juga akan dapat melaksanakan kampanye penyuluhan bersama. Hal ini tidak hanya memiliki nilai langsung yang membuat masyarakat lebih peduli mengenai kawasan lindung dan sumber daya alam, tapi juga dapat memperkuat hubungan antara lembaga pemerintah dengan masyarakat setempat.

Terdapat banyak contoh kasus di dunia di mana desentralisasi pengelolaan kawasan lindung telah mengurangi beban sumber daya manusia dan dana dari pemerintah, khususnya dengan bantuan LSM. Contoh yang paling menarik mungkin dari America Latin. Empat LSM lokal di Honduras bersama dengan telah WCS menghasilkan rencana pengelolaan untuk kawasan lindung di mana mereka bekerja. Memang LSM ini dibentuk dengan tujuan khusus untuk mengelola kawasan lindung tersebut.

Contoh lainnya adalah di Nikaragua, di mana LSM bidang konservasi (*Fundacion Cocibolca*) telah mengambil alih pengelolaan sebuah cagar alam kecil dekat Managua. Ini merupakan bukti lain suatu keberhasilan dari adanya desentralisasi pengelolaan, sehingga pemerintah setempat kemudian memikirkan untuk menyerahkan pengelolaan kawasan lindung lainnya kepada LSM.

Di Bolivia, sebuah LSM asli daerah (CABI) mengelola suatu kawasan yang sangat besar, yaitu Taman Nasional Kaa-Iya. LSM ini juga dibentuk dengan tujuan khusus untuk pengelolaan suatu kawasan lindung. Izozenos telah berhasil mempertahankan suatu kawasan dari beberapa ancaman (penebangan hutan, pemasangan pipa). FAN mengelola Taman Nasional Noel Kempff Mercado. Mereka adalah LSM yang sangat baik dalam hal administrasi dan telah berhasil memperoleh dana pengelolaan kawasan untuk jangka waktu panjang.

Contoh yang paling sukses adalah Mamiraua di Brazil di mana mereka telah berhasil di segala bidang dalam pengelolaan kawasan: penelitian, training, administrasi, dan pencarian dana.

Sebagaimana mungkin telah diketahui, banyak lembaga penyandang dana internasional masih terus memfokuskan kepada LSM lokal sebagai katalisator untuk usaha-usaha kegiatan konservasi. Kami yakin bahwa pengaruh dari fokus ini akan meningkatkan pengelolaan kawasan lindung. Namun ini pun tidak mudah dilaksanakan, karena ketidakseragaman pandangan dan tingkat pengetahuan antara LSM dan lembaga pemerintah dapat membawa ke arah konflik dalam usaha pengelolaan. Keduanya harus berjalan di jalur yang sama dan saling membantu. WCS berusaha untuk dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran dengan menyediakan tenaga ahli untuk pengelolaan kawasan lindung untuk tercapainya tujuan ini.

Kesimpulan

Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan gangguan yang sukar dikendalikan pada kawasan lindung, yaitu kurangnya petugas konservasi di lapangan, baik petugas hutan ataupun anggota LSM, dan tidak lancarnya arus informasi yang datang dari lapangan kepada para pengelola kawasan lindung dan pembuat keputusan.

Faktor lainnya adalah rendahnya sumber daya manusia dan sumber dana dalam sistem pelaksanaan konservasi kawasan lindung, kurang kuatnya pelaksanaan sistem perundang-undangan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga.

Kebijakan desentralisasi memberikan harapan-harapan yang lebih baik dalam pengelolaan kawasan lindung ini, karena pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan dapat diambil lebih tepat dan segera.

Referensi dan Laporan

Dwiyahreni, A. A., M.F. Kinnaird, T.G. O' Brien, J. Supriatna, and N. Andayani. (in press) *Preliminary study of the diet and activity budget of the bear cuscus (Ailurops ursinus) at Tangkoko Duasudara Nature Reserve, North Sulawesi*. Journal of Mammalogy.

Kinnaird, M. F., T.G. O' Brien, Dwiyahreni, A.A., and Winarni, N.L. (1997) *Permanfaatan Sumber Daya Alam di Cagar Alam Tangkoko Duasudara, Sulawesi Utara: Permasalahan dan pemecahannya*. PHPA/WCS-IP Memorandum Teknis I.

Lee, R.J. (1995). *Population surveys and conservation status of the crested black macaque (Macaca nigra) in North Sulawesi, Indonesia*. Primate Conservation 16:63-65.

Lee, R.J. (1999). *Impact of subsistence hunting in North Sulawesi, Indonesia and conservation options*. In *Hunting for Sustainability in Tropical Forests* (eds. J.G. Robinson and E.L. Bennett). Columbia University Press.

Lee, R.J., T.G. O' Brien, M.F. Kinnaird, A.A. Dwiyahreni. (1999). *Dampak perburuan satwa liar di Sulawesi, Indonesia*. PHPA/WCS-IP Memorandum Teknis IV.

O' Brien, T.G. and M.F. Kinnaird. (1996). *Changing populations of birds and mammals in North Sulawesi*. Oryx 20(2): 150-156.

O' Brien, T.G. and M.F. Kinnaird. (1999). *Differential vulnerability of large birds and mammals to hunting in North Sulawesi, Indonesia and the outlook for the future*. In *Hunting for Sustainability in Tropical Forests* (eds. J.G. Robinson and E.L. Bennett). Columbia University Press.

Suriyadi, S., M.F. Kinnaird, and T.G. O'Brien. (1999). *Home ranges and daily movements of the Sulawesi Red-Knobbed Hornbill (Aceros cassidix) during the non-breeding season*. Proceedings of the second International Asian Hornbill Workshop, Bangkok, Thailand. April 1996, Pp. 159-170.

Sunarto, and N. Wirawan. (in press) *Bird distribution in Lore Lindu: notes for park management*. In Proceedings of the second International Conference of Eastern Indonesian-Australian Vertebrate Fauna, Lombok, Indonesia. (eds. D.J. Kitchener and A. Suyanto).

Penilaian Sumber Daya Alam (*Resource Valuation*)

oleh
NATURAL RESOURCES MANAGEMENT PROGRAM/EPI O

Bahan Presentasi

- * Pendahuluan
- * Gambaran Umum Nilai Sumberdaya Alam
- * Penggunaan Penilaian Sumberdaya dalam Proses Penyusunan Kebijakan
- * Studi Kasus Taman Nasional Bunaken
- * Implikasi Kebijakan
- * Penutup

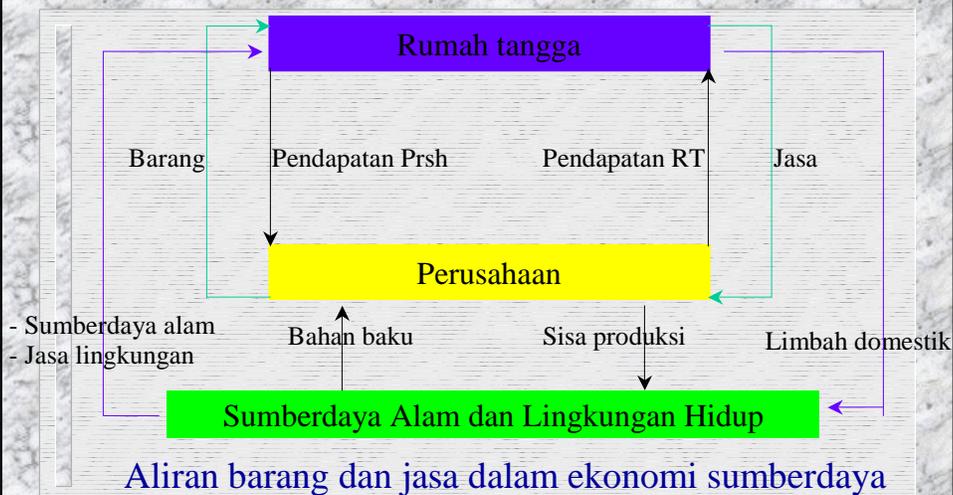
Pendahuluan

↳ Ekonomi konvensional vs Ekonomi sumberdaya



Aliran barang dan jasa dalam ekonomi konvensional

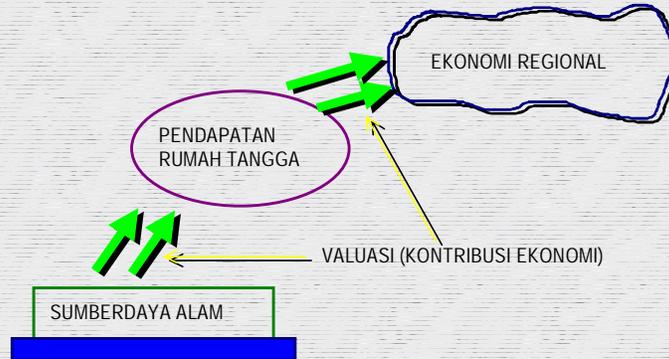
Pendahuluan



Aliran barang dan jasa dalam ekonomi sumberdaya

Pendahuluan

- Penilaian Sumberdaya Alam adalah upaya untuk menentukan nilai ekonomi dari sumberdaya alam



Gambaran Umum Penilaian SDA

Secara teoritis, Nilai Ekonomi Total (TEV) adalah sbb:

$$TEV = f(DUV, IUV, OV + BV, EV)$$

- TEV = Total Economic Value
- DUV = Direct use Value
- IUV = Indirect Use Value
- OV = Option Value
- BV = Bequest Value
- EV = Existence Value

Sumber: Perrings et. al., 1996

Gambaran Umum Penilaian SDA

- Nilai guna langsung (DUV) manfaat yang langsung diambil dari sumberdaya alam. Nilai ini dapat diperkirakan melalui kegiatan konsumsi atau produksi, misalnya ikan atau hasil hutan.
- Nilai guna tidak langsung (IUV) merupakan nilai secara tidak langsung dirasakan manfaatnya. Dapat berupa hal yang mendukung nilai guna langsung, seperti plasma nutfah dan daya asimilasi limbah dari hasil kegiatan manusia oleh lingkungan.

Gambaran Umum Penilaian SDA

- Nilai pilihan (OV) adalah nilai potensial yang dapat dimanfaatkan pada masa yang akan datang.
- Nilai warisan (BV) adalah dorongan untuk menjaga keberadaan dan kelestarian sumberdaya alam agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.
- Nilai keberadaan (EV) merupakan nilai kepedulian seseorang akan keberadaan suatu sumberdaya alam atau makhluk hidup lainnya, walaupun orang tersebut hanya mengetahuinya melalui foto atau film. Misalnya, paus biru atau badak sumatera.

Gambaran Umum Penilaian SDA

Beberapa metoda yang umum digunakan:

- Metoda fungsi produksi (*Production function method*)
- Metoda valuasi kontigensi (*Contingent valuation method*)
- Metoda biaya perjalanan (*Travel cost method*)
- Metoda biaya pengeluaran (*Expenditure cost method*)
- Metoda biaya pencegahan (*Prevention cost method*)
- Metoda biaya pemulihan (*Replacement cost method*)
- Metoda penilaian hedonis (*Hedonic pricing method*)

Penggunaan Nilai Sumberdaya Alam dalam Proses Penyusunan Kebijakan

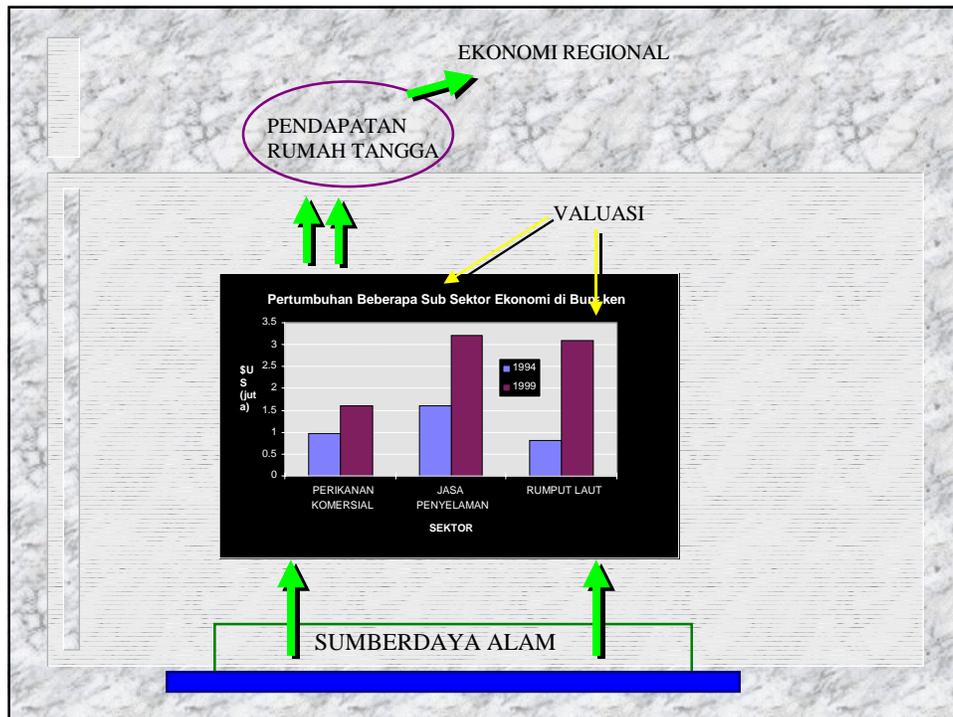
- ☞ Nilai dari sumberdaya bukan merupakan hasil akhir, tetapi merupakan input bagi tahap berikutnya
- ☞ Dengan adanya nilai SDA, maka terdapat suatu dasar secara kuantitatif untuk perencanaan (ekonomi atau tata ruang)
- ☞ Adanya suatu dasar yang lebih baik dan akurat bagi penentuan beberapa alternatif pilihan kebijakan
- ☞ Penilaian SDA yang komprehensif dapat menjadi titik tolak bagi konsep pengelolaan taman nasional yang lebih baik

Penggunaan Nilai Sumberdaya Alam dalam Proses Penyusunan Kebijakan

- ✓ Input bagi perencanaan pembangunan ekonomi regional
- ✓ Input bagi perencanaan tata ruang
 - ✓ misalnya dalam analisis biaya manfaat, AMDAL
- ✓ Input bagi pengelolaan taman nasional
 - ✓ dengan mengetahui nilai TN dapat ditentukan berapa dana yang harus dialokasikan untuk pengelolaan
 - ✓ dengan mengetahui kontribusi ekonomi dari TN, maka terdapat kemungkinan untuk meningkatkannya melalui pengelolaan dan upaya konservasi yang lebih baik
- ✓ Penentuan tarif retribusi atau pajak sumberdaya alam
- ✓ Penentuan kompensasi lingkungan bagi pencemar

Para pengguna potensial

- Bappenas
- Bappeda
- Bapedal
- Bapedalda
- Pemerintah Daerah
- Institusi sektoral (pertambangan, kehutanan dan perkebunan, industri, pertanian, keuangan, dll.)
- Masyarakat
- Perguruan Tinggi
- Swasta (kaitannya dengan AMDAL)
- Lembaga Swadaya Masyarakat (sebagai bahan advokasi)

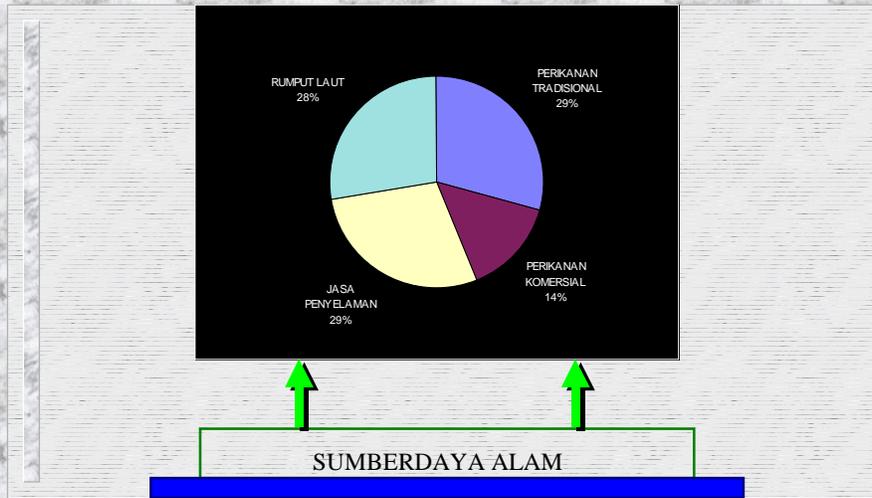


Studi Kasus Taman Nasional Bunaken

BEBERAPA NILAI EKONOMI SDA TN BUNAKEN:

	\$US (juta)
PERIKANAN TRADISIONAL	3,3
PERIKANAN KOMERSIAL	1,6
JASA PENYELAMAN	3,2
RUMPUT LAUT	+ 3,1
JUMLAH	\$US 11,2 JUTA/TAHUN

Studi Kasus Taman Nasional Bunaken



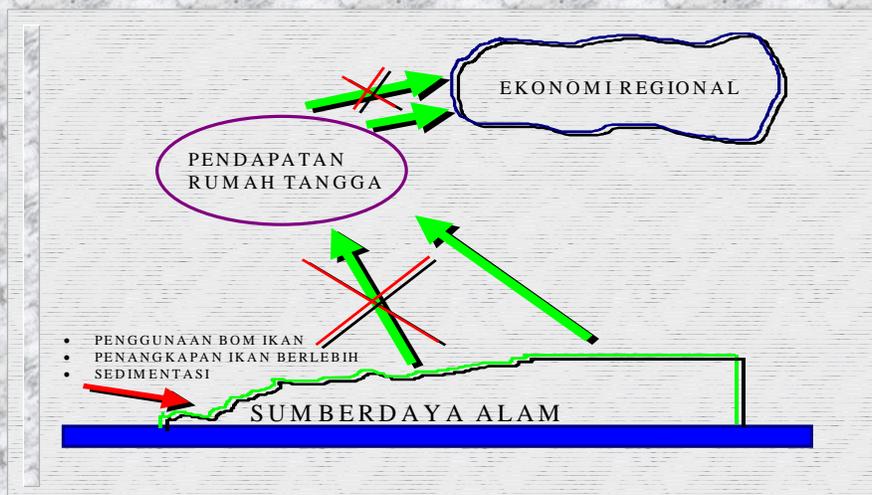
Implikasi Kebijakan

- ★ Sumberdaya alam dan lingkungan hidup harus diperhitungkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian (diperhitungkan sebagai aset)
- ★ Dengan mempertimbangkan nilai dari sumberdaya alam, maka diharapkan akan dilakukan pengelolaan yang lebih baik untuk mempertahankan kualitasnya agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan

Implikasi Kebijakan

- ✦ Melalui penilaian SDA, TN tidak lagi dipandang sebagai suatu area yang hanya menghabiskan biaya, tetapi juga sebagai tempat yang dapat memberikan banyak manfaat ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung (baik secara finansial maupun non-finansial, yaitu yang tidak kasat mata/intangible -- manfaat ekologis)
- ✦ Manfaat yang diperoleh dari taman nasional harus diperhitungkan oleh para pihak yang menikmatinya, dengan cara penerapan pengelolaan yang baik atau melalui upaya konservasi yang memadai

Implikasi Kebijakan



Penutup

- ❁ Dengan mengetahui aliran barang dan jasa dari sumberdaya alam yang diperlihatkan, maka dapat dibuktikan bahwa TN memberikan kontribusi ekonomi yang cukup penting bagi perekonomian regional
- ❁ Teknik penilaian merupakan salah satu instrumen yang penting untuk membuktikannya
- ❁ Melalui hasil penilaian dapat ditentukan langkah pengelolaan yang harus diambil

H. Taman Nasional

Daftar Isi

1. Sulawesi	
a) Prospek & Kontribusi Taman Nasional Bunaken terhadap Pembangunan Daerah, <i>oleh Ir. Dominggus, Kepala Balai TNB</i>	H1a- 1
b) Prospek & Kontribusi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Terhadap Pembangunan Daerah <i>oleh Suparman Rais, Kepala Unit TN Bogani Nani Wartabone</i>	H1b- 19
c) Prospek & Kontribusi Taman Nasional Taka Bonerate terhadap Pembangunan Daerah, <i>oleh Ir. Asep Sugiharta, MSc, Kepala Unit TN Taka Bonerate</i>	H1c- 27
d) Prospek & Kontribusi Taman Nasional Lore Lindu terhadap Pembangunan Daerah, <i>oleh Ir. Banjar Yulianto Laban, MM, Kepala Balai TN Lore Lindu</i>	H1d- 33
2. Maluku	
Prospek & Kontribusi Taman Nasional Manusela terhadap Pembangunan Daerah Maluku, <i>oleh Ir.Sahulata R. Yohana, Kepala Unit TN Manusela</i>	H2 - 1
3. Irian Jaya	
a) Prospek & Kontribusi Taman Nasional Wasur terhadap Pembangunan Daerah, <i>oleh Ir. Maraden Purba, Kepala Balai TNW</i>	H3a- 1
b) Prospek & Kontribusi Taman Nasional Teluk Cenderawasih terhadap Pembangunan Daerah <i>oleh Minto Basuki, Kepala Balai TN Teluk Cenderawasih</i>	H3b- 47
4. Sumatra	
Penerapan <i>Integrated Conservation and Development Project</i> di TN Kerinci-Seblat, <i>oleh Wandoyo Siswanto, Ketua Balai Taman Nasional Kerinci-Seblat</i>	H4 - 1

Prospek dan Kontribusi Taman Nasional Bunaken terhadap Pembangunan Daerah

oleh:
Ir. Dominggus¹

Pendahuluan

Propinsi Sulawesi Utara memiliki luas daratan 2.877.220 ha, di mana 1.524.918 ha atau 55,42 % adalah kawasan hutan yang terdiri dari hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata (396.565 ha), Hutan Lindung (331.225 ha), Hutan Bakau (23.778 ha), dan Hutan Produksi Tetap (169.966 ha), Hutan Produksi Terbatas (567.869 ha), dan Hutan Konversi (35.487 ha). Dari luas tersebut terdapat salah satu kawasan konservasi yaitu Taman Nasional (TN) Bunaken dengan luas (89.065 ha). TN Bunaken memiliki keistimewaan seperti terumbu karang yang khas dan menarik, hutan mangrove yang luas, keindahan alam perairan serta keragaman flora dan fauna yang tinggi dan beberapa yang endemik.

TN Bunaken memiliki sejarah yang cukup panjang sebelum ditunjuk sebagai taman nasional. Diawali penunjukannya sebagai Obyek Wisata Manado melalui SK Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 224/ 1980 untuk lokasi Pulau Bunaken, Pulau Siladen dan sekitarnya. Selanjutnya berdasarkan SK Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Utara No. 201/1984 telah ditunjuk wilayah Arakan-Wawontulap sebagai Perluasan Obyek Wisata Manado. Penunjukan sebagai Cagar Alam Laut Bunaken, Manado Tua dan Cagar Alam Laut Arakan Wawontulap melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 328/Kpts-II/1986. Kemudian oleh Pernyataan Menteri Kehutanan Nomor 444/Menhut-II/1989 tanggal 1 April 1989, yang menyatakan perubahan status dari kawasan suaka alam/hutan wisata menjadi taman nasional dengan nama Taman Nasional Laut Bunaken Manado Tua. Hingga akhirnya melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 730/Kpts-II/1991 tanggal 15 Oktober 1991 kawasan tersebut ditunjuk sebagai kawasan Taman Nasional Bunaken seluas 89.065 ha, yang meliputi wilayah Pulau-pulau Bunaken, Siladen, Manado Tua, Mantehage, Nain, sebagian wilayah pesisir Tongkaina, Wori, Tanjung Pisok; serta wilayah pesisir Arakan Wawontulap.

TN Bunaken merupakan kawasan wisata yang menjadi kebanggaan warga Sulawesi Utara dan bahkan kebanggaan masyarakat Indonesia karena memiliki nilai konservasi nasional, sebagai

¹ Kepala Balai Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara

perwakilan ekosistem perairan tropis Indonesia, dan TN Bunaken juga memiliki nilai konservasi internasional, mengingat lokasinya terletak di pusat keanekaragaman hayati laut dan pesisir kawasan Indo-Pasifik.

Potensi TN Bunaken yang besar dalam hubungannya dengan pariwisata alam telah banyak menarik wisatawan mancanegara maupun nusantara. Hal ini sejalan dengan salah satu program Pemerintah Daerah Sulawesi Utara dalam Panca Program Unggulan (PPU), yang meliputi: Agroindustri/ Agribisnis, Perikanan dan Sumber Daya Kelautan, Pariwisata, Pertambangan dan Energi, Peningkatan Sumber Daya Manusia. Disamping itu pengembangan TN. Bunaken di sektor pariwisata juga sejalan dengan program KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) Manado-Bitung.

Dalam kaitannya dengan Kegiatan KAPET kawasan TN Bunaken di wilayah Manado diarahkan sebagai pusat pariwisata. Diharapkan dari sektor pariwisata kawasan ini akan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan daerah. Harapan tersebut akan terpenuhi bila aktivitas wisata dan jumlah wisatawan yang berkunjung ke TN Bunaken meningkat. Pengelolaan pariwisata alam di TN Bunaken sudah selayaknya memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian alam yang serasi dan seimbang, dalam proporsi yang harmonis antara kemampuan ekologis kawasan dan kegiatan pariwisata alam.

Prospek dan kontribusi yang dimiliki TN Bunaken bagi pembangunan daerah Propinsi Sulawesi Utara akan disajikan pada bab-bab berikut ini.

Keadaan Umum

I. Fisik

1. Letak dan Luas

TN Bunaken terdiri atas dua bagian yaitu TN Bunaken bagian Utara (62.150 ha) dan TN Bunaken bagian selatan (16.906 ha). TN Bunaken bagian utara meliputi 5 pulau yaitu Bunaken, Manado Tua, Mantehage, Siladen dan Nain dan di sekitar Tanjung Pisok yaitu antara desa Molas hingga ke desa Tiwoho. Sedangkan TN Bunaken bagian Selatan meliputi wilayah perairan dari desa Poopoh hingga ke desa Popareng.

Wilayah TN Bunaken termasuk wilayah administratif Propinsi Sulawesi Utara. TN Bunaken bagian utara meliputi 2 kecamatan yaitu Wori (Kabupaten Minahasa) dan Kec. Molas (Kotamadya Manado). TN Bunaken bagian selatan meliputi 2 wilayah kecamatan,

yaitu Kec. Tombariri dan Kec. Tumpaan, keduanya berada dalam wilayah administrasi kabupaten Minahasa.

2. Aksesibilitas

Aksesibilitas dari kota terdekat, Manado, ke TN Bunaken sangat tinggi (sekitar 40 menit dengan speedboat 40PK). Lapangan terbang terdekat, Bandara Sam Ratulangi, terletak 14 km dari pusat kota Manado. Jarak dari pusat kota Manado hingga batas TN Bunaken bagian utara lewat darat adalah 13 km. Jalan yang menghubungkan desa-desa di TN Bunaken bagian selatan adalah sebagian jalan beraspal dan sebagian jalan berbatu. Pelabuhan terdekat yang dapat menerima kapal besar (10.000 ton) terletak di kota Bitung.

3. Topografi dan Batimetri

Kondisi topografi daratan Sulawesi Utara secara umum berbukit-bukit, menyebabkan tidak terdapat dataran rendah luas yang langsung berbatasan dengan wilayah perairan TN. Dataran tertinggi di TN Bunaken adalah pulau Manado Tua dengan ketinggian 800 meter, dengan kemiringan 25° sampai 45° .

Batimetri atau kedalaman perairan TN Bunaken sangat khas. Perairan dalam terdapat di selat-selat antara pulau dengan daratan utama Sulawesi Utara, serta selat-selat antar pulau. Kedalaman relatif minimal 200 m.

4. Geologi

Daerah pesisir antara pulau Tatapaan dan desa Poopoh terdapat endapan dan aluvium. Bagian timur dari pulau Bunaken dan Mantehage terdiri dari aluvium tersebut. Pulau Manado Tua dan Bunaken berasal dari batuan yang sama akibat kegiatan vulkanik. Ujung barat pulau Bunaken dan Siladen, terumbu pulau Nain dan Mantehage, serta sebelah utara Tanjung Pisok terbentuk dari batu gamping asal terumbu karang.

5. Iklim

Iklim di TN Bunaken pada umumnya adalah iklim basah tropik katulistiwa. Berdasarkan Schmidt dan Ferguson (1951) terdapat dua zona iklim di TN Bunaken, yaitu zona A (bagian utara) dimana terdapat 10 atau lebih bulan basah per tahun dan B (bagian selatan) dimana 7 hingga 9 bulan basah per tahun.

Di wilayah TN Bunaken terdapat dua musim, yaitu musim Barat (Oktober–Maret) dan musim Timur (Mei–Agustus), di mana musim Barat lebih basah dari musim Timur. Curah hujan rata-rata di TN Bunaken bagian utara adalah 3.001-3.500 mm/tahun, sedangkan di

bagian selatan adalah 2.501-3.000 mm/tahun. Kelembaban sering mencapai 100% pada musim penghujan. Suhu udara rata-rata adalah 27⁰C. Suhu udara bulanan minimal rata-rata 19⁰C, dan maksimal 34⁰C.

6. Oseanografi

Arus permukaan laut mengalir ke arah timur laut sepanjang tahun, sejajar dengan pantai utara Sulawesi Utara. Pada tempat dan saat tertentu terdapat arus yang kuat (>5 km/jam) dan putaran arus.

Suhu permukaan air laut di laut lepas berkisar antara 27⁰C hingga 29⁰C sepanjang tahun, meskipun demikian suhu air yang dangkal bisa lebih tinggi (>30⁰C).

Salinitas di laut lepas tetap pada salinitas air laut murni (34⁰/₀₀ – 35⁰/₀₀). Pengaruh sungai daratan Sulawesi relatif kecil.

Pada umumnya tinggi ombak perairan TN Bunaken tidak melebihi 1 m dan berjarak pendek. Ada kalanya pada waktu badai, ombak yang lebih besar bisa muncul dan sampai ke daerah dangkal.

Secara umum kejernihan perairan TN Bunaken berkisar 20 m hingga 30 m. Kejernihan sangat tergantung status pasang surut, keberadaan habitat bakau dan lamun laut, serta masuknya air tawar dari daratan.

Kisaran pasang surut di perairan TN Bunaken adalah 2.6m. Pola pasang surut yang dominan adalah semi-diurnal, yaitu dua kali pasang dalam satu hari.

II. Sosial, Ekonomi dan Budaya

1. Penduduk

Jumlah keseluruhan penduduk sesuai hasil survei pada bulan Oktober 1993 hampir mencapai 20.000 jiwa, sekitar 9.595 jiwa di antaranya bermukim di pulau-pulau.

2. Mata Pencaharian

Perekonomian masyarakat dalam kawasan TN Bunaken pada umumnya ditopang dua nafkah utama, yaitu hasil-hasil laut dan pertanian. Masyarakat pada umumnya melakukan pola nafkah ganda, petani sekaligus nelayan. Masyarakat desa Buhias dan Tangkasi mengandalkan ekonominya dari hasil kayu bakau. Sejak akhir tahun 1993 desa Nain mengandalkan sumber pendapatan utama dari pertanian rumput laut.

3. Sosial Budaya

Ragam budaya masyarakat dalam TN Bunaken relatif tinggi. Terdapat 8 kelompok etnis, yaitu Sangir, Siau, Bajo, Gorontalo, Bantik, Bugis, Buton, dan Minahasa. Umumnya masyarakat Bajo, Gorontalo, Buton dan Bugis memeluk agama Islam, sedangkan masyarakat Sangir, Siau, Bantik dan Minahasa memeluk agama Kristen.

Potensi Taman Nasional Bunaken

A. Potensi Geografis

Salah satu keunggulan TN Bunaken adalah letaknya yang sangat berdekatan dengan Manado, ibukota Propinsi Sulawesi Utara. Ini sangat menunjang potensi pariwisata alam TN Bunaken. Kondisi ini merupakan karakteristik tersendiri dari kawasan TN. Bunaken, yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal penataan kawasan, pemantauan, serta pengendalian kegiatan pemanfaatan.

B. Sumber Daya Alam

Taman Nasional Bunaken memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi sebagai obyek wisata alam maupun obyek penelitian.

1. Terumbu Karang

Kondisi habitat terumbu karang yang cukup luas (\pm 8.000 ha) dan relatif baik. Bahkan TN. Bunaken bagian selatan memiliki rataan terumbu terluas di Sulawesi Utara. Keanekaragaman jenis karang sangat tinggi, mengingat kawasan ini terletak di pusat keanekaragaman hayati laut dan pesisir Indo-Pasifik. Soekarno (1989) mencatat ada 44 genera karang keras di TN Bunaken.

2. Mangrove

Hutan bakau di TN. Bunaken sangat luas (2.693 ha) terutama di bagian selatan, serta bagian utara terutama di Pulau Mantehage. Luas total hutan bakau di TN Bunaken adalah 20% dari luas total hutan bakau di Sulawesi Utara.

TN Bunaken memiliki komunitas mangrove yang termasuk paling tua di Asia Tenggara. Kita masih bisa menemukan pohon-pohon bakau berukuran besar (diameter \pm 1,5 m) di wilayah bagian selatan TN Bunaken yang sudah sulit ditemukan di tempat lain. Di samping itu keragaman jenis mangrove sangat tinggi, ada 38 spesies mangrove yang ditemukan di TN Bunaken, bahkan terdapat jenis yang sebenarnya tidak termasuk dalam wilayah biogeografinya (Djamaluddin, 1999).

3. Padang Lamun

Padang lamun tropis yang luas terdapat di semua bagian kawasan TN. Bunaken, terutama di bagian selatan. Padang lamun di bagian ini merupakan habitat pakan bagi duyung (*Dugong dugon*) dan penyu hijau (*Chelonia mydas*). TN Bunaken bagian Selatan merupakan salah satu habitat dugong dengan populasi yang masih banyak.

4. Biota Laut

Keanekaragaman jenis biota laut di perairan TN. Bunaken sangat tinggi dan merupakan perwakilan dari biota-biota laut yang tersebar di habitat terumbu karang di Indo-Pasifik.

Kusen (1992) mencatat ada 160 spesies ikan karang yang ditemukan di TN Bunaken, yang meliputi jenis-jenis ekonomis penting dan jenis-jenis ikan hias. Baru-baru ini telah ditemukan jenis ikan purba (fosil hidup) yaitu ikan raja laut atau coelacanth (*Latimeria chalumnae*) menjadikan kawasan TN Bunaken makin terkenal.

Disamping itu terdapat berbagai jenis mamalia laut, reptilia laut, avertebrata dan taksa lainnya yang dilindungi oleh UU, seperti paus bongkok (*Megaptera novae*), *Physeter catodon*, *Globicephala melaena*, berbagai jenis lumba-lumba, penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) dan sebagainya.

5. Flora dan Fauna Terrestrial

Di pulau Manado Tua, kita masih dapat menemukan hutan asli dengan berbagai jenis pohon. Satwa khas endemik Sulawesi terdapat di hutan ini seperti monyet hitam (yaki), dan kuskus. Di pulau Mantehage dapat kita temukan rusa dan tarsius.

C. Pariwisata

Atraksi wisata utama TN. Bunaken adalah wisata selam, snorkeling dan ber-katamaran. Di samping itu terdapat berbagai obyek berupa keanekaragaman hayati pesisir dan laut, meliputi habitat terumbu karang, ikan-ikan karang, mammalia laut (dugong, paus, hiu dan lumba-lumba), serta pemandangan lepas pantai. Demikian pula dengan keanekaragaman jenis burung di habitat hutan bakau dan pantai.

Kegiatan pariwisata lain seperti mendaki gunung Manado Tua, budaya setempat, bersampan di dataran terumbu karang dan tubir sekitar pantai liang, pengamatan burung di hutan-hutan mangrove, memotret pemandangan sekitarnya baik di darat maupun bawah laut, berjemur di pasir pantai, santapan ikan laut di pondok-pondok wisata pantai liang.

D. Potensi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Interaksi antar budaya masyarakat dari 7 etnik relatif tinggi, terlihat dari penggunaan dialek bahasa yang sama, serta kesamaan teknik-teknik pemanfaatan potensi sumber daya alam. Jumlah penduduk setempat mencapai 19.474 jiwa (tahun 1994), yang bervariasi dari desa ke desa. Struktur populasi berdasarkan sumber nafkah menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki sumber nafkah dari hasil laut sekitar 29,86%. Selebihnya meliputi pemanfaatan hasil pertanian (59,07%), dan lainnya (11,07%) yang meliputi pemanfaatan hasil hutan, jasa transportasi air, produk cinderamata kerang-kerangan (moluska laut), pegawai negeri dan tukang kayu.

Tata guna dan pola pemanfaatan ruang wilayah di kawasan TN Bunaken relatif bervariasi. Di beberapa bagian kawasan TN Bunaken, mencakup tata guna dan pola pemanfaatan lahan untuk

berdagang, berkebun, dan pertanian lainnya. Untuk kegiatan melaut, pemanfaatan ruang wilayahnya lebih meluas, misalnya kegiatan perikanan menggunakan pukat oleh masyarakat setempat, yang dapat melingkup sebagian besar wilayah perairan TN Bunaken. Pola pemanfaatan ruang wilayah yang bersifat spesifik meliputi budidaya pesisir untuk rumput laut (seaweeds farming). Pemilikan lahan umumnya masih bersifat hak adat.

Pengelolaan Taman Nasional Bunaken

Pengelolaan TN Bunaken oleh Balai Taman Nasional Bunaken sudah berjalan hampir 2 tahun sejak ditetapkannya SK Menteri Kehutanan Nomor 185/Kpts-II/1997 tanggal 31 Maret 1997 tentang Organisasi Balai dan Unit Taman Nasional, sedangkan sebelumnya berada di bawah pembinaan dan pengelolaan Sub Balai KSDA Sulawesi Utara.

A. Tujuan dan Fungsi Pengelolaan

Tujuan utama pengelolaan TN Bunaken meliputi :

- Pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya untuk menjamin ketersediaan sumber plasma nutfah dalam jangka waktu panjang.
- Kesejahteraan masyarakat setempat, melalui pengaktifan pola pemanfaatan sumberdaya alam di dalam kawasan.
- Peningkatan pendapatan daerah melalui pengembangan dan pengelolaan pariwisata alam di dalam kawasan.

Pengelolaan di TN. Bunaken memiliki tiga fungsi, yaitu :

- sebagai tempat kegiatan pelestarian keanekaragaman hayati;
- sebagai pendukung kehidupan hampir 20.000 jiwa penduduk di dalam kawasan melalui pemanfaatan ekstraktif terbatas; dan
- sebagai pengembangan pariwisata khusus (penyelaman).

B. Sistem Zonasi TN. Bunaken

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan pelestarian alam seperti TN. Bunaken dikelola berdasarkan sistem zonasi. Tahun 1997 telah diterbitkan SK Direktur Jenderal PHPA No. 147/Kpts/DJ-VI/1997

tanggal 29 September 1997 tentang Zonasi Taman Nasional Bunaken. Dalam SK ini disebutkan pembagian masing-masing zona adalah Zona Inti seluas 1.391,05 ha, Zona Pemanfaatan dengan luas 1.153,34 ha, Zona Rehabilitasi seluas 191,98 ha, Zona Pemulihan seluas 26,27 ha, Zona Pendukung Perairan seluas 11.680,31 ha, Zona Pendukung Daratan seluas 2.342,29 ha serta Zona Pendukung Umum dengan luas 72.279,77 ha.

C. Program dan Kegiatan Pokok Pengelolaan Taman Nasional Bunaken

Kegiatan Instansi Balai Taman Nasional Bunaken baru berjalan secara resmi sejak dilantiknya pejabat Kepala Balai TN Bunaken di bulan Januari 1998, dan diikuti oleh pejabat-pejabat eselon IV lainnya. Kegiatan-kegiatan pokok pengelolaan TN Bunaken yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai TN Bunaken adalah sebagai berikut :

- Penataan Kawasan
- Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Pemanfaatan Kawasan
- Penelitian dan Pengembangan
- Perlindungan dan Pengamanan Potensi
- Pembinaan Kelembagaan
- Koordinasi
- Pembangunan Sarana Prasarana
- Partisipasi Masyarakat
- Pemantauan dan Evaluasi

Prospek dan Kontribusi Taman Nasional Bunaken

A. Prospek

TN Bunaken memiliki prospek yang cukup baik di masa yang akan datang. Bidang-bidang yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan TN Bunaken adalah seperti berikut ini.

1. Pariwisata Alam

TN Bunaken memiliki peluang yang besar untuk pengembangan pariwisata alam, karena potensi alamnya, seperti berikut ini:

- Terumbu karang yang indah kekhasan pada keterjalan profil terumbu karang (drop-off) yang menarik wisatawan untuk menyelam atau snorkeling. Beberapa lokasi penyelaman dengan karakteristik yang bervariasi terdapat di TN Bunaken.
- TN Bunaken dihuni oleh masyarakat dari berbagai etnis yang dapat menyajikan atraksi seni dan budaya yang khas.
- Letak geografis yang sangat berdekatan dengan kota Manado sehingga mempunyai aksesibilitas yang tinggi. Jarak dari pusat-pusat layanan seperti hotel, bandar udara, pelabuhan laut, terminal bis, dan pusat kota relatif dekat.
- Telah tersedianya sarana dan prasarana pendukung dari dan ke TN Bunaken, melalui sejumlah operator selam (dive centre), cottage dan hotel yang menyediakan paket-paket wisata.
- Adanya potensi wisata lain TN Bunaken yang berpotensi untuk dikembangkan, misalnya trekking di Pulau Manado Tua dan jalur trekking di hutan bakau.

Prospek yang cerah tersebut diperkuat dengan sejumlah peluang yang dimiliki, seperti:

- Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Utara. Kecenderungan peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Sulawesi Utara dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Wisatawan ke Sulawesi Utara

Tahun	Jumlah Wisatawan		Total
	Mancanegara	Nusantara	
1988	5.0136	95.012	100.148
1989	5.707	102.228	107.935
1990	6.799	103.632	110.431
1991	10.390	105.577	115.967
1992	13.078	110.180	123.258
1993	18.767	110.986	129.753
1994	23.762	130.417	154.179
1995	30.285	643.283	673.568
1996	42.155	822.839	1.035.132
1997	48.821	1.828.530	1.877.351

Sumber: B.H.M. Roring, Seminar Hasil Penelitian, 1999

- Pengembangan pariwisata merupakan salah satu dari program Panca Unggulan Sulawesi Utara.
- Adanya jalur penerbangan internasional secara langsung dari Singapore ke Manado oleh Silk Air (2 kali seminggu).
- Adanya kerjasama BIMP-EAGA yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang promosi wisata TN Bunaken, serta berada dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).
- Banyaknya investasi baru dalam bidang usaha wisata, perhotelan/resort, restoran, angkutan wisata dll.

Prospek pariwisata alam TN Bunaken yang cerah bagi pembangunan daerah Sulawesi Utara akan terealisasi dengan sejumlah asumsi antara lain:

- Kelestarian potensi sumber daya alam dapat terjaga, dimana aktivitas wisata alam ramah lingkungan dapat diterapkan oleh para operator wisata dan wisatawan, ditunjang dengan kegiatan monitoring yang efektif, dan koordinasi antar instansi terkait yang mantap termasuk dengan masyarakat setempat.
- Keselamatan dan keamanan pengunjung dapat terjaga melalui koordinasi dengan aparat keamanan, dalam hal ini, Satpolairud (Satuan Polisi Air dan Udara).
- Sarana dan prasarana pendukung yang memadai serta lalu lintas laut yang teratur.
- Profesionalisme tinggi dan pelayanan yang berkualitas dengan memberikan kursus-kursus singkat bagi manajemen usaha wisata alam di kawasan tersebut.
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata alam baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, sehingga masyarakat lokal mendapatkan keuntungan dan manfaat dari pariwisata alam di TN Bunaken.

2. Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pendidikan

Keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki terutama biota laut memberikan obyek yang tak habis-habisnya bagi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk pendidikan seperti:

- Keanekaragaman karang keras sangat tinggi, dimana tercatat ada 44 genera karang keras yang menciptakan terumbu karang yang kaya dengan berbagai jenis biota terumbu.
- Jenis-jenis mangrove yang sangat beragam, tercatat ada 38 jenis di TN Bunaken, dan terdapat berbagai jenis burung dan satwa lain.

- Hidupan liar berupa satwa endemik Sulawesi, seperti monyet hitam, Kus-Kus, dll. serta mamalia laut seperti paus, lumba-lumba dan duyung .
- Ikan raja laut atau Coelacanth (*Latimeria Chalumnae*), fosil hidup di TN Bunaken yang menarik minat peneliti untuk mempelajarinya

3. Peningkatan Pendapatan Daerah

TN Bunaken berpotensi sebagai salah satu tujuan wisata utama di Sulawesi Utara dan obyek promosi untuk menarik wisatawan. Jumlah pengunjung yang semakin meningkat memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk memperoleh devisa. Pengembangan hotel, restoran, cottage, usaha jasa wisata akan memberikan pemasukan bagi daerah dari pajak yang dihasilkan. Pengembangan pariwisata akan memberikan dampak positif bagi pengembangan sektor-sektor lain seperti transportasi, industri dan perdagangan, ketenagakerjaan, komunikasi, dan sektor lainnya.

4. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Masyarakat dapat menikmati hasil dari pengembangan pariwisata di TN Bunaken antara lain membuka lapangan pekerjaan baru misalnya pengembangan homestay, jasa transportasi wisata laut, menjadi pemandu wisata selam pada dive operator atau penjualan cenderamata. Disamping itu dengan terjaganya sumber daya alam TN Bunaken dapat menjamin keberlangsungan pemanfaatan sumber daya alam laut yang selama ini telah menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat lokal.

A. Kontribusi

1. Aspek Ekonomi

a) Pariwisata

Kontribusi yang dapat diberikan TN. Bunaken bagi Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Utara adalah pendapatan yang diperoleh dari bidang pariwisata. TN Bunaken adalah tujuan wisata utama di Sulawesi Utara. Dengan semakin banyaknya kunjungan maka pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak, pendapatan masyarakat dalam bidang jasa, semakin meningkat pula. Kontribusi yang langsung akan diperoleh dengan menerapkan karcis pungutan masuk ke dalam kawasan bagi wisatawan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Utara untuk sektor Pariwisata adalah berasal dari Hotel dan Restoran. Setiap tahun terjadi kenaikan PDRB sektor ini (Roring, 1999) seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. PDRB Sektor Pariwisata Sulut (jutaan rupiah)

Tahun	PDRB	Prosentase Kenaikan
1988	10.644	7.52
1989	12.710	19.41
1990	14.459	13.76
1991	16.896	16.86
1992	20.204	19.58
1993	34.602	71.26
1994	44.256	27.90
1995	52.732	19.15
1996	70.882	34.42
1997	83.414	17.68

Sumber: B.H.M. Roring, Seminar Hasil Penelitian, 1999

Dalam studi yang dilakukan oleh NRMP (Weber, L dan L. Saunders, 1996), perkiraan jumlah kunjungan wisatawan ke TN Bunaken adalah rata-rata 13.000 orang per tahun. Dalam studi tersebut, telah diestimasi nilai per kunjungan ke TN Bunaken adalah US\$ 328, dan nilai total kunjungan wisatawan ke TN Bunaken per tahun adalah US\$ 4,2 juta atau 9.8 miliar rupiah. Dengan bertambahnya jumlah wisatawan ke TN Bunaken, nilai tersebut dapat meningkat di tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan studi yang baru-baru ini dilakukan oleh Virza dan LaFranchi (1999), terjadi peningkatan jumlah kunjungan ke TN Bunaken pada tahun ini. Dari data yang diambil pada 15 dive operator, diestimasi pengeluaran oleh wisatawan ke TN Bunaken adalah \$ 223,260 juta atau Rp 1,674 miliar per tahun.

b) Perikanan

Aktivitas perikanan rakyat di dalam kawasan TN Bunaken termasuk juga pertanian rumput laut, memberikan kontribusi bagi ekonomi daerah. Dalam studi yang dilakukan oleh NRMP tahun 1996, total nilai ekonomis perikanan dalam TN Bunaken yang dilakukan oleh nelayan lokal diperkirakan kurang lebih US\$ 3,84 juta per tahun. Dari studi yang dilakukan oleh Virza dan LaFranchi (1999), nilai

perdagangan rumput laut di pulau Nain dan Mantehage adalah US\$ 3,114 juta atau Rp 23,355 miliar.

2. Aspek Ekologis

Secara ekologis TN Bunaken memiliki peranan penting. Terumbu karang yang luas yang mengelilingi seluruh pulau-pulau dan daratan merupakan pelindung pantai yang sangat baik dari abrasi. Sedangkan hutan bakau, selain sebagai pelindung pantai juga merupakan penahan terhadap rembesan air laut, sehingga mampu mempertahankan cadangan air tawar bagi penduduk setempat.

TN Bunaken juga berfungsi dalam pengaturan tata air, khususnya di tempat-tempat yang memiliki permukaan yang tinggi seperti pulau Manado Tua dan Nain dimana masyarakat dapat menikmati sumber air tawar.

Dengan dibentuknya TN Bunaken, maka potensi sumber daya alam dan ekosistem kawasan ini akan terjaganya, termasuk ikan-ikan serta biota-biota laut ekonomis penting.

Ditemukannya ikan raja laut di TN Bunaken menarik perhatian lembaga donor internasional. Misalnya JICA bekerja sama dengan LIPI akan membuat suatu program pengembangan masyarakat nelayan di TN Bunaken yang berkaitan dengan keberadaan ikan raja laut tersebut.

3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Potensi dan karakteristik sumberdaya alam TN Bunaken serta sosial budaya masyarakat setempat merupakan obyek menarik bagi para peneliti baik lokal, nasional maupun internasional untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ada banyak sekali penelitian yang telah dan sementara dilakukan di dalam TN Bunaken, seperti berikut ini:

- Survai sosial ekonomi perikanan dan masyarakat di TN Bunaken, oleh SBKSDA & NRMP.
- Survai potensi laut TN Bunaken, oleh SBKSDA & NRMP.
- Survai kondisi terumbu karang TN Bunaken, oleh SBKSDA & Fak. Perikanan UNSRAT.
- Kajian pengembangan strategi komunikasi, informasi dan pendidikan, oleh SBKSDA & NRMP.

- Kajian pengembangan strategi pariwisata alam, oleh SBKSDA & NRMP.
- Studi mangrove dan pemanfaatan tradisional mangrove oleh masyarakat, oleh SBKSDA dan NRMP
- Profil kependudukan masyarakat di TN Bunaken, SBKSDA dan NRMP.
- Studi daerah penangkapan ikan oleh masyarakat dan parataksonomi ikan-ikan ekonomis, SBKSDA dan NRMP.
- Valuasi ekonomi perikanan, pertanian dan pariwisata di TN Bunaken, oleh NRMP.
- Survei populasi monyet hitam di P. Manado Tua, oleh SBKSDA dan NRMP.
- Studi ekologi mangrove untuk pengembangan strategi pengelolaannya, SBKSDA dan NRMP.
- Studi mengenai ikan raja laut (Coelacanth) oleh LIPI.

Kegiatan penelitian yang masih berjalan saat ini ada tujuh peneliti yaitu 1 peneliti dari Universitas Indonesia, 1 peneliti dari Institut Pertanian Bogor, 3 peneliti dari Universitas Sam Ratulangi, 1 peneliti dari Universitas Berkeley Amerika Serikat, dan 1 peneliti dari Universitas di Australia. Dalam waktu dekat akan diadakan ekspedisi untuk pengumpulan data dan pengambilan gambar bawah laut sebagai bahan pembuatan buku dan film dokumenter oleh National Geographic TV Channel Asia.

4. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Pengembangan pariwisata alam di TN Bunaken juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat setempat, antara lain:

- Membuka lapangan pekerjaan di bidang pengembangan homestay, restoran dan pemandu wisata.
- Pendapatan alternatif di bidang transportasi laut atau perahu wisata.
- Pendapatan alternatif dari souvenir dan makanan ringan.

Permasalahan

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai TN. Bunaken dalam mengelola kawasan TN. Bunaken disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3. Permasalahan-Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

No.	Permasalahan	Upaya Pemecahan
1	Dalam SK penunjukan TN Bunaken, dimasukkan daratan lima pulau sebagai bagian dari TN Bunaken, sedangkan daratan tersebut telah lama dimiliki masyarakat setempat sebagai lahan pemukiman dan pertanian.	Mengusulkan peninjauan kembali dengan mengeluarkan daratan tersebut dari bagian wilayah TN Bunaken (enclave).
2	Zonasi TN Bunaken sesuai SK Dir-jen PHPA No. 147/Kpts/DJ-VI/97 sulit diterapkan karena pada beberapa zonanya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.	Melakukan pengkajian kembali zonasi yang ada, dan mengusulkan revisi sistem zonasi TN Bunaken.
3	Penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan racun serta pengambilan batu karang.	Meningkatkan penyuluhan, pendekatan pada masyarakat dan patroli pengamanan kawasan. Melakukan koordinasi secara terpadu (Pemda Tk. I dan Tk. II, Polri, Dinas Perikanan).
4	Penebangan bakau untuk diperdagangkan dan pemakaian sendiri untuk kayu bakar, patok rumput laut, bahan bangunan.	Meningkatkan penyuluhan, pendekatan pada masyarakat dan patroli pengamanan kawasan. Melakukan koordinasi secara terpadu (Pemda Tk. I dan Tk. II, Polri, Satpolairud). Mengadakan penelitian untuk mencari alternatif lain dalam sistem budidaya rumput laut.
5	Penjualan kerang-kerang dan ikan hias yang diambil dalam kawasan taman nasional.	Meningkatkan penyuluhan, pendekatan pada masyarakat dan patroli pengamanan kawasan Melakukan koordinasi secara terpadu (Pemda Tk. I dan Tk. II, instansi terkait). Upaya alternatif budidaya terumbu karang dan ikan hias.
6	Pembangunan cottage/home stay yang belum punya izin dan tata letak yang tidak tepat, seperti pembangunan akomodasi, restoran, tempat menjual cendera mata yang berada di sekitar pantai (daerah pasang surut).	Meningkatkan penyuluhan, pendekatan pada masyarakat dan patroli pengamanan kawasan. Melakukan koordinasi secara terpadu (Pemda Tk. I dan Tk. II, Dinas Pariwisata).

7	Belum tertibnya arus pelayaran dari dan ke TN. Bunaken.	Koordinasi dengan instansi terkait. Perlu penertiban lewat satu pintu.
8	Adanya pengguna jasa jetski yang dapat membahayakan pengunjung.	Petugas lapangan telah memberikan teguran. Kerjasama dengan pihak Swasta.
9	Belum adanya tata batas laut dan tata batas zonasi Taman Nasional Bunaken sehingga berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum dan menyebabkan kumpang tindih pemanfaatan.	Mengusulkan pembuatan tata batas laut dan tata batas zonasi TN Bunaken.
10	Selama ini belum ada pendapatan daerah langsung dari TN. Bunaken untuk PAD.	Koordinasi dengan instansi terkait Perlu penerapan karcis masuk kawasan taman nasional, seperti di taman nasional lain.
11	Keadaan personil dan sarana prasarana yang ada masih belum memadai.	Mengusulkan penambahan personil dan sarana prasarana. Menoptimalkan personil dan sarana prasarana yang ada.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang menjadi prioritas dalam penyelesaiannya, sebagai berikut:

1. Masalah perbaikan zonasi TN Bunaken.
2. Masalah penetapan lokasi pintu masuk TN Bunaken.
3. Masalah karcis masuk kawasan taman nasional.
4. Masalah penertiban cottage dan restoran.

Prospek dan Kontribusi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Terhadap Pembangunan Daerah

Oleh:
Dr. Suparman Rais¹

I. Pendahuluan

Taman Nasional sebagai salah satu bentuk kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaan jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Semua makhluk hidup, baik aneka jenis flora dan fauna maupun manusia, membutuhkan dan berhak menikmati fungsi kawasan pelestarian alam ini secara berkelanjutan, karena selain merupakan bagian dari ekosistem kawasan, mereka dan hidup mereka juga sangat tergantung pada kawasan ini.

Mewujudkan nilai riil atau nilai ekonomi langsung dalam bentuk rupiah (*tangible value*) keanekaan hayati dan sumber daya alam dari taman nasional merupakan suatu hal yang sulit, karena nilai tersebut tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi tetapi juga oleh faktor etika. Nilai ekonomi yang memberikan nilai rupiah langsung tidak dapat diberikan oleh taman nasional, karena memanen produk-produk alam seperti kayu dan atau hasil hutan lainnya tidak diperkenankan mengingat kegiatan tersebut akan mengakibatkan gangguan ekologis, sekaligus akan mengganggu fungsi taman nasional secara keseluruhan.

Nilai ekonomi yang disediakan taman nasional bagi masyarakat, bahkan makhluk hidup secara umum, adalah nilai riil yang tidak langsung (*intangible value*), yaitu berupa proses-proses lingkungan dan jasa ekologis yang diberikan oleh keanekaan sumber daya alam hayati. Meskipun nilai tersebut tidak langsung dirasakan, namun setiap saat manfaatnya sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Beberapa nilai ekonomi tidak langsung tersebut menurut Rais (1996) dan Primack (1998), berupa:

1. Produktivitas ekosistem; energi yang diserap oleh tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, kayu bakar, dan sumber plasma nutfah.

¹ Kepala Balai TN Bogani Nani Wartabone, Sulawesi Utara

2. Perlindungan sumber air dan tanah; sebagai pelindung hidro-orologi berupa pengatur resapan air serta pencegah banjir dan kekeringan.
3. Pengatur iklim; mempengaruhi iklim lokal, regional, dan global.
4. Sarana penelitian dan pendidikan; sebagai laboratorium alam.
5. Obyek rekreasi dan wisata alam.
6. Media pengembangan kreativitas.

Jika pengelolaannya dilakukan secara mantap dan benar secara ekologis, keberadaan taman nasional ini akan menjadi aset sumber daya alam yang memiliki prospek dan kontribusi tiada tara nilainya bagi pembangunan dan kelangsungan hidup generasi sekarang dan generasi mendatang.

II. Potensi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

Secara umum potensi kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dapat digambarkan melalui faktor-faktor internal dan eksternal yang dimilikinya, yaitu faktor kekuatan, faktor peluang, serta kendala (kombinasi faktor kelemahan dan faktor ancaman), sebagai berikut.

A. Kekuatan

Terdapat beberapa unsur kekuatan yang mendukung konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, di antaranya adalah: status kawasan, peraturan perundang-undangan, ekosistem khas, keanekaan hayati, perlindungan sumber air, obyek wisata alam, dan aksesibilitas.

1. **Status kawasan.** Taman Nasional Bogani Nani Wartabone ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1127/Kpts-II/1992 tanggal 12 Desember 1992. Berdasarkan keputusan tersebut, luas kawasan tercatat 287.115 hektar atau lebih kurang 10% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Utara. Secara astronomis, kawasan ini terletak pada 0 20'-051' Lintang Utara dan 123 06'-124 18' Bujur Timur, dan secara administratif berada di Kabupaten Bolaang Mongondouw (277.115 hektar atau 62%) dan di kabupaten Gorontalo (110.000 hektar atau 38%).
2. **Peraturan perundang-undangan.** Telah ada pedoman pokok dalam kaitannya dengan pengelolaan kawasan di antaranya adalah UU Nomor 5 tahun 1967, UU nomor 4 tahun 1982, dan UU nomor 5 tahun 1990 serta telah ditetapkannya lembaga/instansi pengelola Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan

nomor 185/Kpts-II/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional dan Unit Taman Nasional.

3. **Ekosistem khas.** Terdapat empat tipe ekosistem yang menonjol, yaitu hutan sekunder, hutan hujan daratan rendah, hutan hujan pegunungan, dan hutan lumut.
4. **Keanekaayaan hayati.** Diperkirakan terdapat 400 jenis pohon, dengan lebih kurang 24 jenis anggrek, 120 jenis epifit, dan 90 jenis tumbuhan obat yang tumbuh di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Jenis pepohonan khas dan langka antara lain adalah kayu hitam (*Dyospiros spp*), kayu besi (*Intsia spp*), kayu matayangan (*Pholidocarpus ihur*), dan pohon ara pencekik yang menyediakan buah berlimpah bagi banyak satwa. Buah pohon ara adalah makanan utama bagi kera yaki (*Macaca nigra*) dan julang sulawesi (*Rhyticetos cassidix*). Selain itu, terdapat beberapa jenis palem seperti palem sarai (*caryota mitis*), palem landak (*Oncosperma horridum*), palem tinggi berdaun kipas (*Livistona rotundifolia*), dan palem liar penghasil gula (*Arenga spp*). Jenis lainnya adalah kantong semar (*Nepenthes sp*) dan kayu hitam (*dyospiros celebica*). Fauna yang sudah diketahui di kawasan ini 24 jenis mamalia, 11 jenis reptilia, 2 jenis amfibia, 68 jenis aves, 36 jenis kupu-kupu, 200 jenis kumbang, dan 19 jenis ikan. Jenis-jenis mamalia endemik Pulau Sulawesi yang terdapat di kawasan ini adalah babirusa (*Babyrousa babyrousa*) yang bertumbuh seperti babi, mempunyai taring panjang yang melengkung ke atas dan tidak makan umbi-umbian, tetapi makan buah-buah yang jatuh; anoa besar (*Bubalus depressicornus*) dan anoa kecil (*bubalus quar-lesi*) sering disebut sebagai kerbau kerdil; musang sulawesi (*Macrogalidia musschenbroeckii*) yang sulit sekali ditemui; serta kuskus beruang (*Phalanger ursinus*) dan kuskus kerdil (*Phalanger celebensis*), satwa ini adalah mamalia bergantung. Jenis primata endemik adalah monyet yaki (*Macaca nigra*) dan tarsius atau tangkasi (*Tarsius spectrum*). Jenis aves yang paling unik adalah burung maleo (*macrocephalon maleo*), burung ini tidak mengerami telurnya melainkan memendamnya di di dalam tanah dan dibiarkan menetas sendiri karena panas bumi atau pantai. Sedikitnya ada 125 jenis burung dengan 45 jenis di antaranya adalah endemik. Jenis endemik lainnya adalah julang sulawesi (*rhyticetos cassidix*), burung berparuh besar yang memiliki warna bulu hitam, ekor dan paruh kuning, serta berjambul merah. Burung ini termasuk bertubuh paling besar dibandingkan dengan 54 jenis rangkong yang tersebar di daerah tropis Asia dan Afrika.
5. **Perlindungan sumber-sumber air.** Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone merupakan hulu dari sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondouw dan Kabupaten Gorontalo. Kawasan ini merupakan daerah tangkapan air bagi

Daerah Aliran Sungai (DAS) Ongkag-Dumoga dan DAS Mongondouw yang keduanya terletak di Kabupaten Gorontalo. Sedikitnya ada 20 sungai yang sumbernya berada di kawasan ini.

6. **Obyek wisata alam.** Terdapat beberapa obyek wisata alam di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondouw di antaranya adalah tempat peneluran dan habitat maleo (*macrocephalon maleo*) di Tambun, sekitar 50 km dari Kotamobagu, habitat tarsius (*tarsius spectrum*) di Kosinggolan dan Toraut, kurang lebih 65 km dari Kotamobagu, panorama alam dan air terjun di Toraut, kawah belerang Muayat di Gunung Ambang, serta air terjun Unayan di Kecamatan Bolaang Uki. Di samping itu, terdapat tempat rekreasi Danau Mooat dan Agrowisata di Mooat, sekitar 40 km dari Kotamobagu serta kuburan pahlawan Sulawesi Utara Bogani Nani Wartabone di Desa Sining, Kecamatan Dumoga dan kuburan raja-raja setempat di Kelurahan Matatai, Kecamatan Kotamobagu. Obyek wisata alam yang menonjol di wilayah Kabupaten Gorontalo antara lain adalah panorama alam, air terjun, dan sumber air panas di Lombongo.
7. **Aksesibilitas.** Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dapat dicapai melalui dua pintu gerbang, yaitu Doloduo, Kabupaten Bolaang Mongondouw dan Lombongo, Kabupaten Gorontalo. Kota Manado-Doloduo yang berjarak sekitar 245 km (rute Manado-Kotamobagu-Doloduo) dengan kondisi jalan baik dapat ditempuh dengan kendaraan umum darat sekitar 530 kkm (rute Manado-Gorontalo-Lombongo) dengan kondisi jalan baik dapat ditempuh dengan kendaraan umum/darat sekitar 12 jam.

B. Peluang

Berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya mendukung pengelolaan Taman Nasioal Bogani Nani Wartabone di antaranya adalah:

1. **Wisatawan.** Minat masyarakat dunia untuk mengunjungi tempat-tempat wisata pada akhir-akhir ini terus meningkat dan kecenderungan untuk beralih ke obyek-objek wisata alam sangat besar. Untuk wisatawan nusantarapun Kompas (1998) mencatat bahwa berdasarkan pengamatan di 12 kota besar di Indonesia, sekitar 47% (dan 54% menurut Direktorat Jenderal Pariwisata) mereka mengunjungi obyek-obyek wisata alam.

2. **Kerjasama antar-instansi.** Dalam aspek kepariwisataan, telah ada suatu bentuk kerjasama antara Departemen Kehutanan (dan Perkebunan) dengan Departemen Parpostel (dan seni Budaya) yang dikenal dengan istilah KKPOD (Komisi Kerja Sama pengembangan Obyek dan daya Tarik Wisata Alam). KKPOD ini merupakan salah satu media yang baik dalam pengembangan obyek wisata alam secara terpadu, baik lokal, regional, maupun internasional.
3. **Kemitraan.** Dalam aspek perlindungan, pengawetan, dan pengembangan pemanfaatan, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone juga telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti dengan perguruan tinggi setempat (Universitas Dumoga Kotamobagu, Universitas Sam Ratulangi Manado, dan IKIP Manado), dengan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Yayasan Pengembangan Wallacea dan *Wildlife Conservation Society* (WCS), serta dengan Generasi Muda Pencinta Alam (GEMPALA), baik kader konservasi, pramuka, maupun kelompok peduli lingkungan lainnya.
4. **Program-program lintas sektoral.** Dalam menyeimbangkan kemajuan pembangunan daerah secara nasional di seluruh Nusantara, sejak PELITA VI pemerintah telah memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan Kawasan Timur Indonesia, diantaranya melalui Inpres Desa Tertinggal (IDT), Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER), dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).

C. Kendala (Masalah)

Berbagai permasalahan, baik kelemahan maupun ancaman, yang dihadapi dalam upaya pengelolaan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone antara lain adalah:

1. **Penguasaan potensi.** Belum semua potensi sumber daya alam kawasan, khususnya jenis flora dan fauna taman nasional, diketahui secara pasti.
2. **Aspek pengelolaan.** Sumber daya pengelolaan, baik kuantitas maupun kualitas, seperti sumber daya pegawai, fasilitas pengelolaan (pondok kerja, pos jaga, sarana transportasi, sarana komunikasi, dan lain-lain), fasilitas rekreasi dan wisata alam, serta dana pengelolaan masih sangat terbatas.
3. **Informasi dan promosi.** Berkaitan erat dengan butir 1 dan 2 di atas, kegiatan informasi dan promosi mengenai upaya konservasi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone masih sangat terbatas.

4. **Kesadaran dan kepedulian konservasi.** Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya konservasi masih perlu terus dipupuk dan ditingkatkan. Hal ini erat sekali kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, khususnya yang menyangkut pendidikan, wawasan, serta keterbatasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, modal kerja, sarana produksi, dan keterbatasan informasi.
5. **Gangguan kawasan dan jenis.** Terjadinya gangguan terhadap ekosistem dan jenis hingga saat ini masih terus berlangsung. Berbagai aktivitas yang mengganggu dan mengakibatkan rusaknya sumber daya alam, antara lain adalah penebangan liar, perambahan kawasan, perladangan liar, perburuan liar, dan penambangan emas tanpa ijin (PETI). Gangguan tersebut, tidak hanya mengancam kelestarian sumber daya alam tetapi seringkali mengancam keselamatan jiwa para petugas.

III. Prospek dan Kontribusi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

Pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat telah dan akan mengakibatkan kebutuhan dan ketergantungan terhadap sumber daya alam juga akan semakin besar. Hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi sumber daya alam, Khususnya bagi taman nasional yang akan mendapat tekanan yang lebih besar. Dilihat dari sisi konservasi, potensi yang dimiliki taman nasional justru akan memberikan manfaat yang besar bagi penduduk, jika keberadaan taman nasional dan fungsinya dapat terpelihara.

Berdasarkan potensi yang dimilikinya sebagaimana telah disajikan pada Bab II, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone merupakan aset alam yang memiliki prospek sangat baik bagi meningkatkan penghasilan masyarakat dan pendapatan negara dari waktu ke waktu serta mempunyai kontribusi yang besar bagi pembangunan, baik daerah maupun nasional, secara berkesinambungan.

Adapun prospek dan kontribusi utama yang dapat diberikan oleh Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dalam kaitannya dengan pembangunan daerah antara lain:

1. **Perlindungan hidrologis.** Terpeliharanya daerah tangkapan air yang terdapat di dalam kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone akan menjamin ketersediaan produksi air bagi ketiga bendungan yang ada di sekitar kawasan taman nasional (bendungan Kasinggolan dan bendungan Toraut di Kecamatan Dumoga serta bendungan Lolak di Kecamatan Bolaang Uki), sehingga dengan sendirinya suplai air bagi lahan pertanian, baik di hilir maupun

disekitar taman nasional dengan luas kurang lebih 10.815 hektar, akan tetap tersedia. Bendungan ini sangat membantu bagi pertanian, sehingga Kecamatan Dumoga merupakan lumbung beras andalan bagi Propinsi Sulawesi Utara. Produksi Domestik Bruto dari sektor pertanian untuk Kabupaten Bolaang Mongondouw adalah 16% dan Kabupaten Gorontalo sebesar 32%, hal ini menunjukkan betapa pentingnya kawasan taman nasional Bogani Nani Wartabone sebagai sumber air bagi pertanian.

Di samping itu, produksi air bersih dari kawasan taman nasional yang dikelola oleh PDAM akan menjamin kebutuhan air minum bagi masyarakat, khususnya yang ada di sekitar kawasan dan umumnya yang ada di Sulawesi Utara bagian tengah dan timur.

2. **Budidaya flora.** Kekayaan jenis tumbuhan yang dimiliki Taman Nasional Bogani Nani Wartabone merupakan aset yang sangat besar, baik bagi masyarakat Sulawesi Utara maupun masyarakat Indonesia. Sebagai gudang plasma nutfah, kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone berfungsi sebagai pengawetan berbagai jenis sumber daya hayati yang memungkinkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan jenis-jenis yang mungkin bisa dibudidayakan, baik untuk kepentingan protein nabati, kosmetika, maupun obat-obatan. Banyaknya jenis tumbuhan obat merupakan tantangan bagi kemajuan bidang farmasi, kedokteran, rekayasa genetika, serta Iptek secara luas.
3. **Budidaya fauna.** Keanekaragaman jenis satwa liar yang terdapat di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone sangat menunjang bagi pelaksanaan penangkaran, baik oleh masyarakat ataupun pemerintah daerah. Di samping untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, hasil penangkaran berbagai satwa liar tersebut dapat menambah penghasilan bagi masyarakat setempat dan pendapatan daerah melalui perdagangan satwa. Selain itu, serangga-serangga yang dapat membantu penyerbukan bagi berbagai tanaman pertanian dan memerlukan hutan ini sebagai tempat hidupnya, merupakan aset yang sangat vital bagi para petani.

IV. Kelembagaan dan Pengelolaan Taman Nasional

Taman Nasional Bogani Nani Wartabone adalah Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, yang secara teknis pembinaannya berada di bawah Direktorat Kawasan Konservasi, dan operasionalisasinya di daerah berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Sulawesi Utara.

Berkaitan dengan rencana otonomi daerah, keberadaan dan pengelolaan taman nasional perlu ditegaskan lagi, serta beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan, khususnya yang berkaitan dengan tata ruang, adalah:

1. Kawasan taman nasional tidak hanya terletak di daerah administratif tertentu, tetapi secara alamiah keberadaannya kadang-kadang melewati batas-batas administratif, baik daerah tingkat II maupun daerah tingkat I. Melihat fungsi taman nasional yang meliputi cakupan yang luas, seperti fungsi pengatur hidrologis dan fungsi iklim, keberadaannya di suatu wilayah akan memberikan dampak/pengaruh yang sangat luas bagi daerah-daerah yang letaknya jauh diluar batas administratif di mana taman nasional tersebut berada. Secara teknis mungkin hal ini tidak menjadi masalah, tetapi secara administrasi perlu mendapat kajian mendalam kaitannya dengan otonomi pengelolaan taman nasional.
2. Pengelolaan taman nasional memerlukan dana yang tidak sedikit, dan selama ini sumber dana berasal dari anggaran rutin, APBN, DPL, dan BLN. Berikut adalah besarnya dana pengelolaan/pembangunan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone selama enam bulan terakhir (tahun 1993/1994 hingga tahun 1998/1999).

(dalam ribuan rupiah)

Sumber Dana	1993/1994	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999
Rutin	171.373	249.211	287.972	346.003	402.498	473.466
APBN	200.000	219.656	495.264	439.098	475.000	333.000
DPL	123.538	242.569	182.788	205.728	205.559	237.021
BLN	-	-	624.910	-	-	-
Jumlah	494.910	711.436	1.590.934	990.829	1.085.057	1.043.487

Sumber: Laporan Tahunan Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (tahun 1993/1994 sampai dengan 1998/1999).

V. Penutup

Taman Nasional Bogani Nani Wartabone merupakan salah satu aset sumber daya alam yang memiliki prospek dan kontribusi tiada tara nilainya bagi pembangunan, baik daerah maupun nasional, serta bagi kelangsungan hidup generasi sekarang dan generasi mendatang.

Namun mengingat kawasan taman nasional letaknya tidak dibatasi batas-batas administratif serta keberadaannya memberikan pengaruh yang sangat luas sesuai dengan batas alamiah, maka berbagai aspek pengelolaan taman nasional perlu mendapat kajian mendalam dalam kaitannya dengan otonomi daerah.

Prospek dan Kontribusi Taman Nasional Taka Bonerate Terhadap Pembangunan Daerah¹

Oleh :
Ir. Asep Sugiharta, M.Sc²

I. Pendahuluan

Taman Nasional Taka Bonerate memiliki karakteristik berupa terumbu karang tipe atol yang terbesar ketiga di dunia setelah Kwajifein di Kepulauan Marshall dan Suvadiva di Kepulauan Moldiva yaitu seluas 220.000 Ha. Secara administratif Pemerintahan, Taman Nasional ini merupakan bagian wilayah Kecamatan Persiapan Pasitallu, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Secara geografis terletak di Laut Flores yaitu antara 120°55' - 121°25' BT dan 6°20' - 7°70' LS. Sebagai suatu kawasan pelestarian alam, Taman Nasional Taka Bonerate mempunyai fungsi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis biota serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Taman Nasional Taka Bonerate memiliki potensi sumber daya laut berupa Terumbu Karang (231 jenis), Ikan (285 jenis), Moluska (216 jenis), Penyu (4 jenis), Echinodermata (4 jenis), Lamun (10 jenis), serta Alga (47 jenis). Sebagai suatu kawasan konservasi, pengelolaan sumber daya alam laut yang terkandung di dalamnya harus dilakukan secara bijaksana agar menunjang budidaya, dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pengelolaan dan pengembangan Taman Nasional Taka Bonerate merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah setempat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wilayah tersebut.

¹ Makalah ini disampaikan dalam rangka *Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Indonesia Bagian Timur*.

² Kepala Unit Taman Nasional Taka Bonerate, Sulawesi Utara

II. Prospek

Sebagai suatu kawasan pelestarian alam, Taman Nasional Taka Bonerate mengacu pada UU No.5 Tahun 1990 dikelola dengan sistem zonasi. Zonasi yang ada di Taman Nasional Taka Bonerate adalah zona inti, zona pemanfaatan tradisional, zona pemanfaatan intensif, dan zona cadangan. Zona inti Taman Nasional Taka Bonerate meliputi perairan dan pulau Latondu Kecil (untuk perlindungan karang), Perairan dan Pulau Tinanja (untuk perlindungan karang), Perairan dan Pulau Ampalasa (untuk perlindungan penyu, burung laut, dan flora darat) serta Perairan Taka Balalong Timur dan Taka Kumai Barat (untuk perlindungan karang dan ganggang laut). Zona pemanfaatan intensif Taman Nasional Taka Bonerate meliputi Perairan dan Pulau Lantigian, Perairan dan Taka Sepe, Perairan dan Pulau Silebu, serta Perairan dan Pulau Tinabo Kecil. Zona pemanfaatan tradisional dalam Taman Nasional Taka Bonerate meliputi Perairan dan Taka Gantarang, Perairan dan Taka Lamungan, Perairan dan Taka Sepe, Perairan dan Taka Bongko, serta Perairan dan Taka Tros.

Zona cadangan dalam Taman Nasional Taka Bonerate meliputi seluruh areal yang ada di luar zona inti, zona pemanfaatan tradisional dan zona pemanfaatan intensif. Dengan adanya sistem zonasi tersebut, pengelolaan kawasan Taman Nasional Taka Bonerate diharapkan dapat mencapai fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial suatu kawasan pelestarian alam.

Zona inti taman nasional adalah kawasan yang menekankan fungsi ekologi. Zona inti merupakan suatu daerah yang mutlak dilindungi dengan tujuan agar flora/fauna khas, endemik, terancam punah serta flora/fauna peka dapat dilindungi sehingga sumber daya ikan dan laut lainnya tetap tersedianya secara lestari. Zona inti ini dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk kepentingan penelitian. Zona Pemanfaatan Intensif di Taman Nasional Taka Bonerate mempunyai fungsi ekonomi sekaligus fungsi ekologi. Pemanfaatan zona ini adalah dalam bentuk jasa lingkungan (wisata bahari, pendidikan konservasi alam/lingkungan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta menunjang budidaya). Wisata bahari yang dapat dilakukan seperti snorkeling, menyelam, memancing dan berkatamaran (perahu berdasar kaca) sambil mengamati keindahan beragam ikan hias dan terumbu karang, menikmati pemandangan matahari terbit dan terbenam, bersampan di atas terumbu karang, berjemur di pasir putih, pemandangan laut lepas dan berkemah dipulau-pulau karang. Salah satu upaya untuk mendorong pengembangan Wisata bahari adalah dibangunnya fasilitas wisata di Pulau Tinabo yang dijadikan sebagai pusat pengujung di kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.

Zona pemanfaatan tradisional di Taman Nasional Taka Bonerate mempunyai fungsi ekonomi dan sosial. Keberadaan zona ini memungkinkan penduduk setempat yang mayoritas adalah nelayan dapat mengambil hasil laut untuk kebutuhan sendiri sekaligus sumber peningkatan keluarga. Kawasan yang termasuk zona ini adalah Perairan dan Taka Gantarang, Perairan dan Taka Lamungan, Perairan dan Taka Sepe, Perairan dan Taka Bongko, serta perairan dan Taka Tros. Dalam aktivitas pengambilan ikan, penduduk juga mencari di zona-zona lainnya kecuali zona inti.

Dengan adanya kegiatan wisata bahari di kawasan Taman Nasional Taka Bonerate ini diharapkan memberikan suatu prospek yang memungkinkan adanya pemasukan bagi Pemerintah termasuk Pemerintah daerah setempat. Pemasukan dana tersebut berasal dari karcis pungutan masuk kawasan taman nasional. Sampai saat ini Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 878/KPTS-II/1992 menjadi dasar diberlakukannya pungutan masuk kawasan konservasi. Jika Peraturan Pemerintah Nomor : 59 tahun 1998 diterapkan di kawasan konservasi seperti taman nasional, maka pemasukan bagi negara akan bertambah besar. Hal ini dimungkinkan karena pengunjung yang melakukan aktivitas tertentu seperti penelitian, pembuatan film, serta pemotretan dikenakan pungutan beraktivitas. Kegiatan yang dikenakan pungutan beraktivitas seperti penelitian (*researchers*), bagi peneliti domestik dan mancanegara yang mengadakan penelitian selama 1/2 bulan dikenakan pungutan masing-masing sebesar Rp.20.000 dan Rp.60.000. Kegiatan penelitian di atas 1 tahun pungutannya sebesar Rp.150.000 dan Rp.450.000. Aktivitas lain yang dikenakan pungutan adalah olah raga seperti menyelam (*diving*) masing-masing sebesar Rp.30.000 dan Rp. 40.000, Snorkling sebesar Rp.20.000 dan Rp.30.000 serta aktivitas pengambilan gambar. Melalui kegiatan penelitian, dan wisata bahari akan menciptakan peluang bagi peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Masyarakat setempat dapat memanfaatkan adanya kegiatan pengunjung tersebut dalam bentuk usaha *home stay*, jasa pemanduan (*guide*), warung, dan penjualan cinderamata. Hasil usaha mereka akan membantu peningkatan pendapatan mereka serta dapat menurunkan tingkat ketergantungan terhadap sumber daya alam laut. Kegiatan wisata bahari juga akan memberi peluang kepada sektor swasta dalam bentuk jasa perhotelan, restoran, angkutan, pemanduan, dan cinderamata.

III. Kontribusi

Fungsi ekologi merupakan suatu kontribusi yang umumnya tidak terukur, di mana kawasan konservasi taman nasional berperan sebagai suatu sistem penyangga kehidupan. Demikian pula

dengan adanya terumbu karang Taman Nasional Taka Bonerate merupakan aset yang menyimpan potensi sumber daya laut lainnya. Fungsi ekonomi dan sosial adalah pemanfaatan sumber daya laut dalam bentuk pemanfaatan ekstraktif seperti penangkapan ikan oleh penduduk setempat sebagai sumber mata pencaharian, dan dalam bentuk jasa seperti penelitian, pendidikan, menunjang budidaya dan wisata alam.

Fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial tersebut harus dioptimalkan pada setiap zona yang ada dalam kawasan Taman Nasional Taka Bonerate, sehingga kegiatan konservasi serta peningkatan kesejahteraan rakyat dapat sejalan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Departemen Kehutanan dan Perkebunan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam telah menempatkan 40 orang tenaga pengamanan kawasan (Polhut) yang disebar di 8 pos pengamanan, dalam upaya menjaga tetap terpeliharanya kawasan Taman Nasional Taka Bonerate dari ancaman perusakan /penangkapan ikan dengan racun sianida dan bahan peledak (bom) oleh pelaku yang tidak bertanggungjawab. Dengan demikian pemberdayaan tenaga pengamanan kawasan konservasi tersebut secara tidak langsung ikut menciptakan peluang bagi terselenggaranya kegiatan penelitian, pendidikan dan pariwisata, yang pada akhirnya akan mendorong kontribusi Taman Nasional Taka Bonerate bagi pembangunan daerah.

Kontribusi taman nasional yang terukur bagi upaya pembangunan daerah adalah adanya pungutan karcis masuk dari Taman Nasional Taka Bonerate. Sejak diberlakukannya pungutan karcis masuk ke Taman Nasional Taka Bonerate bulan April 1998 sampai dengan bulan Juli 1999 jumlah pengunjung yang masuk ke kawasan Taman Nasional Taka Bonerate adalah 4.090 orang dengan total besarnya pungutan yang masuk Rp.4.800.500,- Hasil pungutan karcis masuk berdasarkan SK Menteri Kehutanan tersebut di atas didistribusikan untuk Pemda TK.I (30 %), Pemda TK.II (30 %), Ditjen PKA (15 %), dan Bendahara Kas Negara (25 %). Dengan adanya kontribusi tersebut diharapkan pengelolaan dan pengembangan kawasan Taman Nasional Taka Bonerate didukung oleh Pemerintah Daerah setempat di samping dukungan dari pihak swasta dan masyarakat.

Peranan swasta diharapkan tumbuh dan mendukung percepatan pengembangannya antara lain melalui bantuan promosi. Sampai saat ini keterlibatan swasta dalam memanfaatkan Taman Nasional Taka Bonerate sebagai obyek wisata bahari belum tampak. Keterlibatan masyarakat untuk mendukung pengembangan wisata bahari di Taman Nasional Taka Bonerate juga penting. Masyarakat diupayakan untuk proaktif dalam upaya membantu pengembangan taman nasional tersebut yaitu dapat berperan sebagai tuan rumah yang ramah, melaksanakan budaya bersih serta

memanfaatkan kedatangan pengunjung dengan mengusahakan cinderamata, jasa pemanduan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan mereka.

IV. Penutup

Peranan dan fungsi Taman Nasional Taka Bonerate merupakan suatu komitmen nasional yang ditentukan oleh peran dan komitmen Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam dalam hal ini pihak Departemen Kehutanan dan Perkebunan bersama dengan Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat untuk turut mendukung pengembangannya sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dimasa yang akan datang.

Pendayagunaan potensi yang ada seperti kegiatan penelitian, pendidikan, serta pengembangan pariwisata bahari merupakan prospek yang tidak ternilai yang nantinya akan turut mendukung peningkatan pendapatan daerah, dan masyarakat.

Pemerintah Daerah yang juga memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya nasional dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan di daerahnya diharapkan dapat aktif mendukung program pengembangan Taman Nasional Taka Bonerate, dengan mengimplementasikan kebijakan yang searah dengan kebijakan pengelolaan taman Nasional.

Prospek dan Kontribusi Taman Nasional Lore Lindu Terhadap Pembangunan Daerah

Oleh :

Ir. Banjar Yulianto Laban, MM¹

I. Idealisme Taman Nasional

" Takut akan Tuhan adalah permulaan Pengetahuan, tetapi orang bodoh menghinakan hikmat dan didikan." (Amsal I :7).

- Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam berupa ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi.
- Sasaran Pengelolaan tersebut adalah 3 P:
 - Perlindungan ekosistem sebagai penyangga kehidupan.
 - Pengawetan Plasma Nutfah.
 - Pemanfaatan SDAH dan Ekosistemnya secara lestari.
- Agar strategi politik sasaran pengelolaan tersebut tepat secara holistik, maka diperlukan sinergi 3 E:
 - Ekologi
 - Emosi
 - Ekonomi
- Dengan sinergi tersebut maka Taman Nasional dapat menampung kegiatan dan kebutuhan masyarakat untuk :
 - Penelitian
 - Pendidikan
 - Penunjang Budidaya
 - Ekowisata

¹ Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah

- Dengan demikian diperlukan pendekatan menuju idealisme melalui skala prioritas sebagai berikut:
 - Dukungan dari dan koordinasi dengan Pemda (Otonomi Daerah)
 - Staff yang memenuhi syarat dan proaktif (mediator masyarakat lokal)
 - Kecakapan kepemimpinan (fungsi dekonsentrasi)
 - Cukupnya anggaran intern (APBN dan dukungan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah)
 - Rencana pengelolaan (eco-populism yang mendukung prospek ekonomi kerakyatan).
 - Kumpulan data dan informasi biofisik (mendukung upaya penerangan dan pencerdasan masyarakat lokal).
 - Dukungan LSM/ORNOP (pendampingan masyarakat lokal, pengembangan hibah/fund raising, monev program TN secara independen).

II. Permasalahan di Taman Nasional Lore Lindu

"Pasar ilang kumandhange, Kali ilang kedhunge" (Ronggo Warsito)

- Akselerasi pematapan status, dalam rangka perubahan pendekatan dari *species approach* menuju *ecosystem approach* sangat lambat :
 - Deklarasi 1982
 - Penunjukan 1993
 - Penataan batas temu gelang 1996
 - Organisasi 1997
 - Aksi organisasi mulai 1998
 - *In-park* dan *zoning management plan* mulai 1999 (hibah TNC/USAID).
- Termasuk kategori *Open access* yaitu sumber daya yang tidak dimiliki oleh seorangpun, tetapi juga milik setiap orang.
 Dari kacamata BTNLL, sejak tahun Anggaran 1997/1998 telah terjadi :
 - Penyerobotan lahan (± 150 ha)
 - Penebangan pohon, pengolahan kayu dan pemungutan HHNK secara ilegal.
 - Tuntutan atas lahan atau issue atas lahan dalam kawasan untuk pemakaian lain (kebun coklat dan kopi masyarakat sebelum tata batas ± 1000 Ha).

- Pengelolaan sebagaimana pengelolaan hutan pada umumnya yaitu melalui pendekatan sistem "*state based forestry*".
 - Konsekuensinya adalah kebijaksanaan *Top down centralistic* dan *Blue print planning*.
 - Indikasinya antara lain :
 - Marginalisasi masyarakat lokal, resettlement dan trans yang salah lokasi.
 - Konflik dengan masyarakat tradisional yang hidupnya sangat tergantung pada mekanisme regenerasi SDAH asli.

Contoh : - Rencana pemindahan paksa komunitas adat tradisional Katu

- Status hukum lahan resettlement masyarakat Dodolo sejak 1989 tidak jelas
- Lokasi Trans Siliwanga belum terakses fungsi Taman Nasional Lore Lindu sebagai penunjang budidaya (janji irigasi permanen untuk 360 Ha sawah sejak 1993 belum terealisasi dengan alasan perlu dibuat bendungan di dalam kawasan TN Lore Lindu)
- Terputusnya pengelolaan Maleo secara tradisi adat di Saluki Tuwa Kec. Kulawi Kab. Donggala sejak tata batas TNLL, sehingga terjadi penurunan populasi.

- Praktek *community forestry* dan *social forestry* yang diamanatkan moto "*forestry for people*" dari Kongres kehutanan sedunia ke VII di Jakarta tahun 1978 kurang efektif menerapkan syarat keterlibatan dan peran serta masyarakat lokal sehingga timbul issue negatif antara lain :
 - TN Lore Lindu kawasan haram pembangunan
 - TN Lore Lindu lahan tidur
 - Jagawana produk militer dan intimidator.
 - Dengan adanya Dephutbun berarti TN boleh diubah jadi kebun.
- TN Lore Lindu sebagai komoditas proyek unggulan dan janji program dicirikan antara lain:
 - Dinamika konservasi yang stereotipe.
 - Hari-hari kerja Kepala Balai yang penuh Berita Acara kriminalitas pelanggaran UU. Dengan demikian yang mendominasi proyek pengamanan hutan saja.

- Standarisasi program yang tepat tetapi rawan janji.
- Mengupas kondisi sosial dan potensi biofisik yang tidak dapat disamaratakan untuk setiap bagian TN di standardkan melalui program Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KK-M), dilanjut dengan upaya penguatan kelembagaan LSM lokal melalui kesepakatan kemitraan dengan TN Lore Lindu.
- Program tersebut seharusnya diimplementasikan melalui mini workplan pada april-september 1999 oleh NRM/EPIQ. Namun program tersebut patut diharapkan karena sampai akhir bulan Agustus 1999 ini belum jalan, padahal perkiraan budget telah disebutkan yaitu \$ 28,981.
- Muncul antagonisme, perbenturan nilai-nilai berbagai aspek kehidupan karena suatu kepentingan arogansi sektoral.
 - Contoh: - Pembangunan/rehabilitasi jalan diprioritaskan, irigasi dan persawahan terabaikan.
 - Pemberantasan focus cystosomiasis hanya di luar kawasan TNLL.

III. Revitalisasi Pencerahan

"Kemakmuran suatu negara tidak tergantung dari penghasilan keuangannya yang berlimpah-limpah, juga tidak dari kekuatan pertahanannya serta keindahan gedung-gedungnya, tetapi dari penduduknya yang berbudaya, banyaknya warga yang berpendidikan, watak dan mampu memperhatikan sifat pencerahan " (Martin Luther, Wittenburg 31 Oktober 1517).

- Meningkatkan peran wilayah adat atau tanah tradisional masyarakat lokal sebagai wahana pertumbuhan budaya, pendidikan budi perkerti, pembangunan watak bangsa dan political will spesifik.
 - Contoh : Aplikasi mapping tanah tradisional lembaga masyarakat adat desa Doda, Katu dan Toro.
- Meningkatkan supremasi Sosio-Eco-Cultural (SEC) melaui revitalisasi kemampuan masyarakat lokal/adat untuk memperlihatkan sifat pencerahan dengan cara :
 - Pendampingan LSM untuk Inner empowering dalam rangka penyadaran dan penguatan diri atas property right yang meliputi: *genetic resources (G), Information (I), Funds (F), Tecnology (T) dan System (S)*.
 - Menghindari **sistem pagar** kepedulian, tetapi mengembangkan **sistem sarang** kepedulian sehingga bukan fisik orang adat/lokal yang muncul, tetapi kearifan dan

- pengetahuan asalnya yang menonjol dan berkembang pengaruhnya melalui pencerahan.
- Menolak unifikasi dan standarisasi pendekatan kultural.
 - Menampilkan pilar keanekaragaman tata nilai yang harmonis dengan cara menghindari "fenomena" antara lain berupa :
 - Nilai budaya yang seharusnya dapat menolak unifikasi, ternyata dilecehkan oleh nilai ekonomi yang sangat dominan dipengaruhi praktek konglomerasi dan standarisasi .
 - Nilai sosial dipurukkan oleh pelayanan pemerintah yang pilih kasih dan tidak berbasis pada masyarakat lokal, akhirnya bermuara pada nilai bio-fisik yang semakin lemah dalam sistem sentralistik.
 - Lemahnya nilai bio-fisik tersebut berpengaruh pula terhadap perannya sebagai alat penyadaran dan penguatan masyarakat lokal terhadap Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.
 - Mengembangkan penyadaran masyarakat bahwa secara politis telah terjadi penyempitan focus soliditas Ekosistem yang berkaitan dengan upaya KSDAH.
 - UU No 5 tahun 1990 apabila diterapkan di kawasan hanya pada lingkup kawasan lindung, lebih terfokus lagi pada KSA (antara lain Taman Nasional) sesuai PP No. 68 tahun 1998.
 - Penyempitan fokus tersebut menyebabkan dinamika konservasi sangat rawan intervensi pembangunan ekonomi yang pola gerakannya superaktif dan ekstraktif. Pola gerak tersebut boleh jadi semakin dipacu oleh potensi TN yang fragile and delicate disamping pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan di daerah.
 - Menurut STRP, 1996: kawasan lindung di Sulawesi Tengah hanya 32 % dan TN Lore Lindu hanya 3 % luas Propinsi.

IV. Prospek dan Kontribusi

" *Setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru* "

(Ki Hadjar Dewantoro)

Tujuan utama Balai TN Lore Lindu adalah melayani masyarakat untuk prospek dan kontribusi terhadap pembangunan di daerah dengan melaksanakan dan mendukung kegiatan sebagai berikut:

- Sosialisasi dan dialog kesepakatan konservasi dengan masyarakat (KK-M).
- Melakukan tindakan reaktif bagi orang/kelompok orang yang tidak bertanggung jawab.
- Melaksanakan rekonstruksi batas yang dilegimitasi masyarakat lokal melalui KK-M.
- Memperjelas jalur batas dengan tanaman multi guna yang pelaksanaannya bersama masyarakat lokal.
- Bersama masyarakat lokal memelihara pal dan jalur batas.
- Mengembangkan kemitraan, dan forum stake holders yang peduli TN Lore Lindu.
- Merekomendasi pengembangan KK-M melalui dokumen community mapping dan perencanaan tata ruang sekaligus pemanfaatan SDA secara lestari yang disusun bersama masyarakat lokal.
- Menyusun rencana pengelolaan TNLL yang didasarkan pada sistem zonasi dan pemetaan partisipatif.
- Pelatihan metode dan pelaksanaan inventarisasi dan indentifikasi potensi flora, fauna dan asset budaya/sejarah bersama LSM dan masyarakat lokal.
- Pelatihan dan pelaksanaan monitoring mutu hutan/habitat bersama LSM dan masyarakat lokal.
- Pelatihan Jagawana yang berkaitan dengan sosio ekologi dan pendekatan partisipatif masyarakat.
- Pelatihan dan pengembangan credit union kepada masyarakat lokal dalam rangka pembangunan ekonomi kerakyatan berdasarkan hasil *Total Economic Resouces Valuation* (TEV).
- Pelatihan dan pelayanan ekowisata berdasarkan supremasi *Socio-Eco-Culture* (SEC)

Prospek dan Kontribusi Taman Nasional Manusela terhadap Pembangunan Daerah Maluku

Oleh:

Ir. Sahulata R. Yohana¹

A. Gambaran Umum

1. Taman Nasional Manusela (TNM) ditetapkan dengan Surat Pernyataan Menteri Pertanian No. 732/Mentan/x/1982, tanggal 18 Oktober 1982 dengan luas 189.000 Ha, merupakan Taman Nasional Manusela darat yang sebagian arealnya berbatasan dengan laut, terletak di Pulau Seram Maluku Tengah, Propinsi Maluku.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 185/Kpts/II/1997 tanggal 31 Maret 1997, Taman Nasional Manusela telah ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknid (UPT) Direktorat Jenderal PKA dengan nama Unit Taman Nasional Manusela.
3. TNM memiliki 7 tipe ekosistem/tipe vegetasi antara lain:
 - Tipe Hutan Pantai (0-5 m dp l) seluas 280 Ha.
 - Tipe Hutan Mangrove (0-5 m dp l) seluas 1.380 Ha.
 - Tipe Hutan Daratan rendah (5-100 m dp l) seluas 5100 Ha.
 - Tipe Hutan Hujan Primer Daratan Rendah (100-500 m dp l) seluas 61.805 Ha.
 - Tipe Hutan Hujan Primer Daratan Tinggi (500-2500 m dp l) seluas 89.480 Ha.
 - Tipe Hutan Vegetasi Lumut (2500-2575 m dp l) seluas 22.395 Ha.
 - Tipe Vegetasi Zone Alpin Miskin Vegetasi (2575-3027 meter dp l) seluas 1015 Ha.
4. TNM memiliki peran yang penting terutama sebagai pelindung sumber keanekaragaman plasma nutfah di P. Seram, guna pengembangan ilmu pengetahuan.

¹ Kepala Unit Taman Nasional Manusela, Maluku

5. Letak geografis

Secara geografis Indonesia dibagi kedalam tiga wilayah pokok yaitu wilayah oriental, wilayah Wallacea dan Wilayah Australesia.

TNM di P. Setam (Maluku) terletak pada garis Meyer di wilayah Wallacea, antara wilayah oriental dan Australesia, tentunya memiliki keanekaragaman hayati yang mirip/cenderung sama dengan jenis yang ada di Australia dan di Asia, serta merupakan aset yang tidak ternilai harganya bagi pembangunan daerah Maluku.

6. Topografi Kawasan

- TNM bagian selatan, berbukit sampai bergunung terjal.
- TNM bagian utara, darat, bergelombang ringan sampai berat.
- Kemiringan tempat 0 - 3027 meter dpl pada puncak tertinggi Gunung Binaya (Gunung yang tertinggi di Maluku).

7. Laut yang cukup tinggi, dapat digunakan sebagai obyek wisata minat khusus selancar, ski air, selam dan lain-lain.

8. Kawasan TNM memiliki fungsi produksi, fungsi lindung, fungsi hidrologis, fungsi orologis yang sama dengan kawasan TN lainnya, sehingga diperlukan pengelolaan secara lestari/berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek Ekologi dan sosial.

9. TNM dalam perkembangan pengelolannya tetap berpegang pada misi Ditjen PKA antara lain:

- Perlindungan sistem penyangga kehidupan
- Pengawetan keanekaragaman
- Jenis flora fauna beserta ekosistemnya
- Pemanfaatan secara lestari SDA hayati beserta ekosistemnya

B. Potensi

1. Potensi Fauna

TNM memiliki potensi fauna yang cukup tinggi antara lain:

- Mamalia 58 jenis dari 32 famili, 4 jenis di antaranya endemik pulau Seram.
- Reptil 46 jenis dari 10 famili, 3 jenis diantaranya endemik pulau Seram, antara lain Ular Seram (*Calamaria ceramensis*).
- Amphibi 8 jenis dari 3 famili dengan jenis endemik *Rana ceramensis*.
- Burung 196 jenis dari 50 famili, 8 jenis diantaranya endemik [pulau Seram, antara lain *Cacatu a molucensis*.
- Insekta 90 jenis, dengan jenis endemik (*desias manuselaensis*), *Prosotaspia ceeremensis*, *miletus ceramensis*.
- Berbagai jenis ikan air tawar.

2. Potensi Flora

- Tumbuhan berkayu 187 jenis dari 55 famili
- Pakis/Paku 598 jenis dari 26 famili dengan jenis endemik pulau Seram *Cyathea binaya*
- Anggrek alam 97 jenis dari 5 famili (anggrek tanah dan anggrek pohon).
- Pandan 28 jenis.

Selain itu terdapat jenis bunga bangkai (*Amorphophalus sp*). Potensi lain yang dapat digunakan masyarakat terutama masyarakat di daerah penyangga adalah: *Cinnamomum culilawan* sebagai bahan pembuatan minyak lawang dan tangkai buah cengkeh untuk pembuatan minyak cengkeh. Juga terdapat 29 jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan secara tradisional untuk mengobati berbagai jenis penyakit.

Potensi flora fauna seperti tersebut di atas merupakan sumber plasma nutfah yang dapat menarik minat dunia luar untuk berkunjung ke TNM.

3. TNM dapat memberi dukungan terhadap perkembangan pariwisata alam karena adanya obyek wisata alam yang dapat dikunjungi/dinikmati oleh pengunjung.

Tabel 1. Potensi Obyek Wisata Alam/Budaya yang ada di TNM sebagai berikut:

No.	Jenis Owa / Budaya	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4
<u>Dalam Kawasan</u>			
1.	Pemandangan alam pantai, Goa alam (bekas tempat persembunyian Dr. Soumakil dan goa kapur penghuni kelelawar/wisata bahari).	Hatu, Saka/Sawai	dengan speed boat \pm 15 menit dari Saka
2.	Pantai pasir putih (wisata pantai/bahari) ekosistem mangrove yang menarik, pengamatan burung gorong dan tempat bertelur penyu hijau, kehidupan buaya di muara sungai Wai Mual dan Wai Teluarang.	Wahai/Pasahari	dari Wahai/Pasahari \pm 15 menit
3.	Berkemah, pengamatan burung dan safari rusa dipadang Pasahari dan lain-lain.	Sasarata-Pasahari	dari Wahai dengan kendaraan carter umum \pm 10 menit
4.	Ekosistem hutan daratan rendah, olahraga pancing dan berperahu menyusuri: - Sungai - Wai Teluarang - Wai Isal - Wai Kawa - Wai Nua	Dataran Mual Lembah Wai Kawa	jalan khaki melalui jalan setapak dari Sasarata-Solea Tehoru/Wai Kawa, jalan kaki \pm 1 hari
5.	- Pemandangan air terjun Juuli dan Mamuana di hulu sungai Wai Isal \pm 3 km dari desa Hatuolo - Air terjun Wai Toto	Hatuolo Sawai	dari Sasaarata ke Hatuolo, jalan khaki \pm 2 hari jalan khaki \pm 2 jam
6.	Tebing batu karang yang dapat digunakan untuk olahraga panjat tebing	Sawai - Saleman	jalan kaki dari Sawai \pm 2 jam
7.	Pengamatan keanekaragaman jenis kupu-kupu dilembah Piliانا	Piliانا	jalan khaki dari Tehoru-Saunulu-Piliانا \pm 2 hari
8.	- Gunung binaya 3027 m dp l dapat digunakan oleh pencinta alam/olah raga mendaki gunung dan - Pengamatan hutan hujan vegetasi lumut	Gn. Binaya	jalan khaki dari TNM Utara (Wahai,Besi), maupun dari TNM Selatan (Tehoru-Mosso/Hatumete
9.	Pengamatan jenis anggrek alam	seluruh TN	- sda-
10.	Pengamatan Pakis endemik dan jenis-jenis satwa liar	G. Kobipoto G. Binaya dan Murkele	-sda-
11.	Mempelajari kebudayaan suku asli pulau Seram (Adatistiadat dan upacara)	Manusela-Maraina-Kanikeh	-sda-

Luar Kawasan			
1.	Gua Akohi dengan keindahan kristal stalaktik dan stalaknik	Tamilow	dari Masohi dengan kendaraan umum \pm 1 jam
2.	Air panas di Tehoru	Tehoru	jalan khaki dari Tehoru \pm 2 jam
3.	Keindahan karang pantai, gugusan pulau kecil yang ditumbuhi Mangrove dan budidaya Mutiara	Sawai-Saleman	dengan speed boat dari Saka \pm 15 s/d 20 menit
4.	Pengamatan burung migran jenis pelikan di pulau Kasuari dan pulau Sopalewa	Sawai-Besi	dengan speed boat dari Saka \pm 15 s/d 20 menit
5.	Pasir putih pantai Aisele	Wahai-Air besar	dari Wahai dengan kendaraan umum \pm 10 menit

Obyek wisata alam seperti tersebut di atas akan berfungsi bila ada kegiatan promosi/ppromosi inventasi, pada event-event nasional maupun internasional sehingga pengusaha/masyarakat dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam memanfaatkan/mengembangkan ODTW yang mempunyai ciri berwawasan lingkungan.

4. Potensi Hidrologi

Terdapat lebih dari 73 buah sungai yang berhulu di kawasan TNM dengan sungai besar yang dapat digunakan untuk kegiatan olahraga/berperahu menyusuri sungai antara lain: Wai Nua, Wai Kwa, Wai Mual, Wai Teluarang, Wai Isal, Wai Samata, sugai Sopalewa dan lain-lain.

Sungai-sungai tersebut sangat diperlukan untuk menunjang berbagai kepentingan masyarakat. Selain itu dapat digunakan untuk kepentingan irigasi, PLTA, sebagai sumber perikanan air tawar, sebagai obyek untuk melaksanakan kegiatan wisata minat khusus arung jeram, pancing dll.

5. Potensi Geografi

Letak TNM (P. Seram) yang bertepatan pada wilayah Wallace sangat berpengaruh terhadap potensi flora dan fauna yang ada di TNM.

Jenis-jenis fauna yang ada di TNM, sebagian mirip dengan jenis fauna Australia, antara lain : jenis satwa berkantong seperti mepea/banndikot (*Rynchomeles prattorum*) yang hanya terdapat di TNM, yang semakin sulit ditemukan, burung kasuari (*Casuarius*) dll.

Jenis flora khas Australia yang terdapat di TNM antara lain : *Melaleuca leucadendron* dan *Eucalyptus deglupta*, sedangkan jenis flora khas Asia antara lain : *Meranti* (*Shorea* sp), jenis dipterokarp yang paling timur pertumbuhannya di Indonesia.

C Prospek Dan Kontribusi Taman Nasional Manusela Terhadap Pembangunan Daerah Maluku

1. Sumber daya alam sebagai modal (aset pembangunan)

Keanekaragaman hayati beserta ekosistem yang ada di Taman Nasional Manusela dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah, terutama upaya peningkatan pendapatan (daerah dan masyarakat). Jasaekologis yang diberikan Taman Nasional dapat membantu pembangunan ekonomi menjadi lebih murah, sehat dan berlanjut.

- Jasa wisata di taman nasional dapat meningkatkan pendapatan daerah di sektor pariwisata, karena sumber daya alam yang ada di taman nasional dapat digunakan untuk kepentingan rekreasi, penelitian, pendidikan, dll.
- Produksi air dari kawasan TNM dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, sehingga PDAM tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pengadaan air bersih.
- TN memberi perlindungan terhadap DAS dan mencegah bahaya banjir (fungsi hidrologis) sehingga sektor Pekerjaan Umum (PU) tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk pembuatan/pemeliharaan DAS, bendungan dan jembatan.

- Produksi udara bersih (oksigen) dari Taman Nasional kepada masyarakat sekitarnya ikut menjamin kesehatan masyarakat dan menekan pengeluaran biaya yang besar dari sektor kesehatan.
- TNM menjamin kebutuhan air untuk sektor pertanian (pengairan sawah, perikanan air tawar) dan listrik tenaga air (PLTA) sehingga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan sektor-sektor tersebut dibandingkan jika TNM tidak ada atau rusak.
- Adanya pengusaha pariwisata alam akan membayar pungutan pariwisata alam maupun iuran yang dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah (dalam bentuk uang).

2. Fasilitas Akomodasi dan Sarana Pariwisata Alam

Sarana pariwisata yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan devisa negara antara lain :

- Sarana akomodasi (pondok wisata alam, pondok apung, bumi perkemahan, penginapan remaja, home stay), fasilitas akomodasi (ruang pertemuan, fasilitas bermain anak-anak), fasilitas umum (pelayanan informasi, telepon umum, gardu padang, mushola, dll).
- Rumah makan dan minum (restoran, kedai, kios makan, kafetaria).
- Sarana wisata tirta (kendaraan air, peralatan scuba diving, dll).
- Sarana angkutan lokal/transportasi (kuda, sepeda, kendaraan air sungai, dll).
- Kios cenderamata/koperasi, toko, fasilitas kesehatan, dll.

Sarana Wisata tersebut di atas dapat diusahakan oleh pihak ketiga (baik pengusaha maupun masyarakat).

Pengunjung atau pengguna sarana tersebut di atas dapat membayar biaya penggunaan fasilitas pariwisata alam.

3. Kontribusi TNM terhadap Pembangunan Daerah

Kontribusi/sumbangan yang dapat diberikan taman nasional kepada Pemerintah Daerah tidak selamanya dapat diukur dalam bentuk uang nilainya. Belum banyak pengambil kebijakan di tingkat Pemerintah Daerah dapat memahami kondisi ini.

Kontribusi tersebut dapat berbentuk :

- Nilai uang (langsung)
- Nilai ekologis (yang tidak terbatas nilainya)

a. Jenis penerimaan dan perimbangan pembagian hasil pungutan/iuran di taman nasional sbb:

Tabel 2. Daftar Jenis Penerimaan Bukan Pajak dari TN

No.	Jenis Penerimaan	Perhitungan	Dasar Aturan	Pembagian/Setoran
1	2	3	4	5
1	Pungutan masuk ke TN	Tarif per Rayon	- Persetujuan Menkeu S.978/MK.003/92 - SK. Menhut 687/Kpts-II/89 878/Kpts-II/92 - SK. Dirjen PHPA 77/Kpts/D1-VI/1992	- 30% ke Pemda Tingkat I - 40% ke Pemda Tingkat II - 15% ke BUN/ Kas Negara - 15% ke DEPHUT (Rek. Ditjen PHPA)
2	Iuran Usaha Pariwisata Alam (IUPA)	6% dari omset per tahun	- Persetujuan Menkeu S.850/MK.013/90 - SK. Menhut 687/Kpts-II/89 441/Kpts-II/90	- 45% ke Pemda - 20% ke BUN - 15% DEPHUT (Rek. Menhut) - 15% Pemb. PBB

3	Tarif Rayon kali luas areal		- Persetujuan Menkeu S.850/MK.013/90 - SK. Menhut 867/Kpts-II/89 441/Kpts-II/90	- 45% ke Pemda Tingkat I - 40% ke Pemda Tingkat II - 15% ke BUN/Kas Negara - 15% ke DEPHUT (Rek. Ditjen PHPA)
4	Iuran menangkap/mengambil satwa liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi	6% dari harga patokan	- Persetujuan Menkeu S.850/MK.013/90 - SK. Menhut 442/Kpts-II/90	- 85% ke BUN - 15% ke DEPHUT

- Pungutan masuk ke TNM untuk kepentingan penelitian/pendidikan/rekreasi alam Rp. 1000 per orang sekali masuk.
- PUPA dilaksanakan sesuai rayon dan luas kawasan. PUPA di TNM sebesar Rp. 90.000 per Ha.
- Rencana perluasan jenis PUPA untuk kegiatan di TNM sekali masuk antara lain:
 - Pembuatan film Rp. 200.000,-
 - Pembuatan video Rp. 50.000,-
 - Pengambilan foto Rp. 5.000,-
 - Memancing Rp. 5.000,-
 - Perkemahan atau Tenda Rp. 5.000,- (maksimun 2 hari)

b. Penciptaan kesempatan kerja/berusaha serta peningkatan pendapatan.

TN memberikan sumbangan dalam perekonomian daerah antara lain:

- Penciptaan kesempatan kerja dan berusaha, baik swasta dan terutama masyarakat dan menekan jumlah pengangguran sehingga pendapatan masyarakat menjadi lebih baik, termasuk penyediaan jasa pemanduan.
- Peningkatan sektor industri antara lain melalui pengembangan pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam menyediakan hasil kerajinan bagi pengunjung yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- Peningkatan pendapatan masyarakat dapat dicapai melalui pengembangan daerah penyangga. Sumber-sumber yang dapat digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat pada daerah penyangga di TNM antara lain:
 - Pembuatan minyak lawang dari jenis kayu lawang.
 - Pembuatan minyak cengkeh dari tangkai buah jengkeh.
 - Pembuatan dodol durian (belum mencapai kualitas ekspor).
 - Penangkaran kupu-kupu.
 - Budidaya tanaman apel dan kentang, tembakau dll.
 - Pengembangan/pembuatan obat-obatan tradisional, pemanfaatan damar dll.
 - Pembuatan ketrampilan/kerajinan tangan dari bahan baku yang ada di TNM.

Dengan menekan jumlah pengangguran dan peningkatan peran industri dan pengembangan di daerah penyangga diharapkan bahwa fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dalam pengelolaan taman nasional dapat berjalan baik dan strategis/sasaran konservasi dapat tercapai.

D. Permasalahan dan Saran Tindak Lanjut

Tabel 3. Data Permasalahan dan Saran Tindak Lanjut

No.	Permasalahan	Upaya yang telah dilakukan	Saran tindak lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Belum adanya kesamaan persepsi antara pengelola TN dengan pihak Pemda, TN selalu dipandang sebagai penghambat, terutama dalam upaya pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Pemda - Pemasarakatan TN kepada instansi terkait - Penyuluhan konservasi Sumber Daya Alam kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Akan diadakan rapat koordinasi TN di Masohi - Pemasarakatan TN kepada instansi terkait 	Nop. 1999
2.	Masih adanya perhitungan ekonomis yang keliru dari TN menyangkut kontribusi yang tidak dapat diukur dengan uang, dibandingkan jika hasil yang ada didalamnya dieksploitasi dan dipasarkan, akan cepat meningkatkan pendapatan.	Koordinasi dengan pihak Pemda dan pemuka-pemuka desa/lembaga adat dalam desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat koordinasi - Pembinaan/ pendidikan Kader Konservasi untuk pemuda/dan masyarakat di sekitar TNM. - Sarasehan sehari untuk aparat desa dan pemuka agama 	DUP. TA 2000/2001
3.	Potensi Sumber Daya Alam yang ada di dalam Kawasan TN belum seluruhnya diketahui secara pasti, sehingga pemanfaatan TNM belum dapat dilaksanakan secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data sekunder/hasil penelitian yang pernah dilakukan di TNM. - Survei potensi secara bertahap. - Mengumpulkan informasi potensi dari petugas lapangan. - Kerjasama dengan mitra (Birdlife dan MP). 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data potensi/penelitian yang pernah dilakukan di TNM. - Survei potensi secara bertahap. - Mengumpulkan informasi dari petugas lapangan/ masyarakat. - Diupayakan pelaksanaannya melalui kerjasama dengan kemitraan, LIPI, BPK dan Perguruan Tinggi. 	DUP. TA 2000/2001

1	2	3	4	5
4.	<p>Sarana prasarana menuju TNM dan di kawasan penyangga yang kurang mendukung antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan trans Seram - Jembatan-jembatan - Sarana transportasi 		<ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan kepada Pemda untuk pembuatan jalan yang sesuai dengan kondisi setempat : * Jalan Masohi-Saka * Jalan Masohi-Tehoru - Pembuatan jembatan penyeberangan aksesibilitas pengunjung terjamin. - Penyediaan sarana 	Dengan proposal tersendiri ke Pemda TK. II Maluku Tengah.
5.	<p>Kurangnya pemasaran dan promosi potensi maupun promosi investasi dalam rangka pengusahaan pariwisata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pencetakan brosur/ leaflet - Pencetakan buku informasi - Bekerjasama dengan Disparda Tk. I Maluku untuk Promosi ke Mancanegara. - Mengumpulkan data/survei OWA. - Koordinasi dengan hotel dan restoran setempat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencetakan/ Penggandaan brosur melalui kerjasama dengan mitra. - Kerjasama dengan instansi dalam menyusun paket dan promosi secara berkala pada event-event tertentu. - Survei OWA di TNM secara bertahap. 	DUP. TA 2000/2001
6.	<p>Keterbatasan sarana penunjang pariwisata dalam TNM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan secara bertahap - Bekerjasama dengan mitra - Mendayakan bangunan yang sudah ada. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan secara bertahap - Kerjasama dengan mitra dan instansi terkait lainnya. - Pemeliharaan bangunan yang sudah ada. 	DUP. TA 2000/2001

1	2	3	4	5
7.	Kesadaran masyarakat disekitar TNM sangat kurang.	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penyuluhan - Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan dana JPS - Pembinaan dan pengembangan daerah penyangga secara bertahap - Pengadaan sarana penyuluhan secara bertahap. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan/ penyuluhan terpadu - Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pengembangan daerah penyangga dan budidaya - Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pengembangan daerah penyangga dan budidaya tanaman pertanian oleh TNM dan instansi terkait. - Pengadaan sarana penyuluhan secara bertahap. - Melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan lapangan. - Diklat pemandu wisata alam. - Diklat kader konservasi. 	DUP. TA 2000/2001
8	Pengembangan kemitraan baik dengan swasta maupun masyarakat belum terbina baik.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan koordinasi - Pengembangan pola kemitraan melalui jalur pemerintahan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan secara bertahap - Kerjasama dengan mitra dan instansi terkait lainnya. - Pemeliharaan bangunan yang sudah ada. 	

1	2	3	4	5
6.	Keterbatasan sarana penunjang pariwisata dalam TNM.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan secara bertahap - Bekerjasama dengan mitra - Mendayakan bangunan yang sudah ada. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan secara bertahap - Kerjasama dengan mitra dan instansi terkait lainnya. - Pemeliharaan bangunan yang sudah ada. 	DUP. TA 2000/2001
7.	Kesadaran masyarakat disekitar TNM sangat kurang.	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penyuluhan - Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan dana JPS - Pembinaan dan pengembangan daerah penyangga secara bertahap - Pengadaan sarana penyuluhan secara bertahap. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan/penyuluhan terpadu - Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pengembangan daerah penyangga dan budidaya - Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pengembangan daerah penyangga dan budidaya tanaman pertanian oleh TNM dan instansi terkait. - Pengadaan sarana penyuluhan secara bertahap. - Melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan lapangan. - Diklat pemandu wisata alam. - Diklat kader konservasi. - Sarasehan sehari. 	DUP. TA 2000/2001
8.	Pengembangan kemitraan baik dengan swasta maupun masyarakat belum terbina baik.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan koordinasi - Pengembangan pola kemitraan melalui jalur pemerintahan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan koordinasi - Libatkan mitra sebagai bagian dari pengelola TNM. 	-

E. Penutup

1. Prospek dan kontribusi yang dapat TNM berikan kepada Pemerintah Daerah Maluku tidak selamanya dapat diukur dengan nilai uang (langsung), tetapi juga dari nilai fungsi yang tidak dapat diukur dengan uang (tidak langsung) seperti:
 - Penyediaan air bersih
 - Penyediaan udara bersih (oksigen, bebas polusi)
 - Pengendalian cuaca (iklim mikro) dll.
2. Penyediaan air bersih/volume air yang cukup banyak, berarti menekan/mengurangi pengeluaran Pemerintah Daerah melalui:
 - PDAM untuk menyediakan air bersih bagi kebutuhan masyarakat.
 - Sektor pertanian untuk pembuatan bendungan dan irigasi (sawah), serta perikanan (air tawar).
 - Sektor Pekerjaan Umum (PU) untuk pembuatan bendungan dan jembatan pencegah banjir, DAS dll.
 - Sektor Pertambangan dan Energi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
 - Penyediaan udara bersih dan bebas polusi, berarti menekan/mengurangi pengeluaran Pemerintah Daerah melalui sektor kesehatan untuk biaya pengobatan/perawatan.
 - Pengaturan iklim mikro dan pengendalian cuaca berarti memberikan udara yang sejuk sehingga terhindar dari udara panas berikan udara bersih yang sejuk sehingga terhindar dari panas.
3. Secara nyata TN dapat memberikan kesempatan kerja dan berusaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat, yang berarti:
 - Ikut membantu program Pemerintah Daerah memecahkan masalah pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.
 - Ikut menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan partisipatif (masyarakat merupakan salah satu obyek penting dalam pengelolaan kawasan secara lestari), Pengembangan daerah penyangga, jasa pemanduan dll.
4. TNM sebagai habitat flora fauna khususnya jenis endemik dan OWA serta keindahan ekosistem lainnya akan menarik minat penyunjung untuk kegiatan penelitian/pendidikan/parwisata, sehingga ada kontribusi bagi Pemerintah Daerah melalui sektor pariwisata dari sumber:

- Biaya kunjungan (perorangan/kelompok)
 - Biaya penggunaan sarana pariwisata (PUPA)
 - Iuran perusahaan pariwisata.
5. Semakin banyak pengunjung ke TN akan semakin meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah melalui:
- Sektor perhubungan (transportasi pesawat, kapal laut dan jasa angkutan lainnya).
 - Sektor pariwisata (hotel, restoran dll).
6. Dengan mempromosikan kontribusi yang dapat diberikan taman nasional bagi pembangunan ekonomi daerah, jelas terlihat antara taman nasional dan pembangunan daerah merupakan 2 elemen penting yang saling berhubungan/mendukung dan tidak dipisahkan oleh kebijaksanaan yang keliru.
7. Pemenuhan sarana prasarana baik jalan utama menuju kawasan (untuk kelancaran aksesibilitas ke TNM) maupun sarana dalam kawasan membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga diperlukan.

Prospek dan Kontribusi Taman Nasional Wasur Terhadap Pembangunan Daerah

Oleh:

Ir. Maraden Purba, MM¹

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pembangunan Taman Nasional Wasur dimulai sejak tahun 1991, melalui kerjasama Departemen Kehutanan / Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Irian Jaya dengan Proyek WWF ID-0105 Merauke. Kawasan ini merupakan penggabungan dari 2 (dua) bagian Suaka Alam yaitu Suaka Margasatwa Wasur dan Cagar Alam Rawa Biru yang dideklarasikan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 1990.

Kegiatan pembangunan yang telah dilakukan selama ini meliputi antara lain penelitian biofisik, sosial ekonomi dan budaya dengan maksud antara lain pemantapan data dasar dalam rangka penataan kawasan; pengembangan ekonomi masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya alam tertentu secara berkelanjutan, terutama sumber daya alam yang mempunyai prospek pasar yang baik; serta perlindungan kawasan melalui pengamanan kawasan maupun pengendalian tumbuhan dan satwa eksotik.

Hasil evaluasi Balai Taman Nasional Wasur menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan selama ini cukup berhasil, namun masih terdapat banyak kendala yang belum dapat diatasi sebagai akibat kurangnya personil, sarana prasarana dan dana.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian adalah pembangunan regional; flora dan fauna eksotik; perburuan liar; pemukiman liar di sepanjang jalan Trans Irian; penjualan tanah di dalam kawasan; kebakaran hutan tak terkendali; air bersih dan pendidikan / keterampilan masyarakat.

¹ Kepala Balai Taman Nasional Wasur, Irian Jaya

Taman Nasional Wasur memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi baik flora dan fauna maupun ekosistemnya, merupakan aset daerah yang perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan guna menunjang pembangunan daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tingkat II Kabupaten Merauke sampai bulan Juli 1999 sebesar Rp.3.131.354.025 (*tiga miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua puluh lima rupiah*) dari target sebesar Rp.13.608.000.000,- (*tiga belas miliar enam ratus delapan juta rupiah*).

Sumbangan Sektor Kehutanan dan Perkebunan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merauke sampai tahun 1999 sebesar Rp.447.774.453,- (*empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah*) dari target tahun 1999/2000 sebesar Rp.4.847.040.000,- (*empat miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah*), hal ini disebabkan masih belum optimalnya sumbangan yang diberikan oleh sektor kehutanan dan perkebunan, antara lain masih terbatasnya pemanfaatan potensi kawasan Taman Nasional Wasur dan pengaturan pemanfaatannya belum sepenuhnya didukung dengan peraturan perundangan yang memadai. Di samping itu masih banyak potensi sumber daya alam yang terdapat di Taman Nasional Wasur belum terinventarisir dan belum dimanfaatkan secara optimal serta belum dapat terukur kontribusi yang dapat diberikan dalam pembangunan daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penulisan makalah ini adalah untuk menyajikan tentang perkembangan Taman Nasional Wasur sejak tahun 1999, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama ini dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan tersebut serta prospek dan kontribusinya bagi pembangunan daerah.

Penulisan makalah ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada pihak terkait di bidang pengelolaan taman nasional sebagai tindak lanjut UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999.

C. Visi dan Misi Pengelolaan Taman Nasional Wasur

Visi:

Terjaganya kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem pendukungnya melalui pengembangan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan Taman Nasional Wasur.

Misi:

1. Menjaga kelestarian keanekaragaman hayati Taman Nasional Wasur dan ekosistem pendukungnya
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan Taman Nasional Wasur melalui pembangunan yang berkelanjutan sesuai kaidah-kaidah konservasi hayati
3. Melibatkan partisipasi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan Taman Nasional Wasur dengan dukungan penuh dari kelompok yang berkepentingan dalam suatu kerangka pengelolaan kawasan yang terpadu
4. Memantapkan optimalisasi fungsi dan pemanfaatan kawasan Taman Nasional Wasur untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang budidaya, rekreasi dan wisata alam serta peningkatan kesejahteraan masyarakat

II. Gambaran Umum Taman Nasional Wasur

A. Dasar Hukum, Luas dan Letak Kawasan

Kawasan hutan Wasur sejak tahun 1978, telah ditunjuk sebagai suaka alam yang terdiri dari Suaka Margasatwa Wasur berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 252/Kpts/Um/5/1978 tanggal 3 Mei 1978, dengan luas 206.000 hektar dan Cagar Alam Rawa Biru dengan luas 4.000 hektar. Kemudian pada tahun 1982 luasan Suaka Margasatwa Wasur ditambah sebanyak 98.000 hektar berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 15/Kpts/Um/1/82, sehingga luasannya bertambah menjadi 304.000 hektar. Pada Tahun 1990 kedua kawasan tersebut (CA. Rawa Biru dan Suaka Margasatwa Wasur) dideklarasikan sebagai Taman Nasional Wasur, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 448/Kpts-II/1990 tanggal 24 Maret 1990 dengan luas keseluruhan 308.000 hektar.

Selanjutnya pada tahun 1997 Taman Nasional Wasur ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 282/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997, dengan luas 413.810 hektar.

Secara astronomis Taman Nasional Wasur terletak antara 08°06'00" LS sampai 09°12'00" LS. Dan 140°18'00"BT sampai 141°00'00" BT. Secara administratif kawasan tersebut berada di wilayah kerja Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Propinsi Irian Jaya.

Batas-batas kawasan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Suaka Margasatwa Tonda di Papua New Guinea,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Merauke,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura,
- Sebelah Utara berbatasan dengan kawasan Sungai Maro.

Kondisi topografi Taman Nasional Wasur relatif datar dengan kemiringan 0 sampai 8 persen. Jenis tanah yang dijumpai adalah Organosol Aluvial, Podsolik Merah Kuning dan Hidromorf kelabu. Kawasan ini merupakan salah satu ekosistem lahan basah penting di Indonesia, karena memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi.

Taman Nasional Wasur mengalami dua musim yaitu musim kering selama 5 sampai 6 bulan (Juni / Juli - Desember) dan musim basah selama 6 sampai 7 bulan (Januari - Juni / Juli) dalam setahun. Kawasan ini memiliki iklim moonson.

B. Potensi Taman Nasional Wasur

1. Sumber Daya Alam Hayati (Biotik)

a. Flora

Vegetasi Taman Nasional Wasur membentuk 10 (sepuluh) formasi Hutan sebagai berikut:

- 1) **Hutan Dominan Melaleuca** seluas luas 33.535 hektar, dengan spesies-spesies dominan sebagai berikut:

(*Melaleuca spp*, *Lophostemon lactifluus*, *Xanthostemon sp*, *Acacia leptocarpa*, *Salsar*, *Asteromyrtus symphiocarpa*, *Eucalyptus spp*, *Alstonia actinopilla*, dll.)

- 2) **Hutan Co-Dominan Melaleuca – Eucalyptus** seluas 33.874 hektar, dengan spesies dominan sebagai berikut :
(*Melaleuca spp*, *Eucalyptus sp*, *Asteromyrtus symphiocarpa*, *Salsar*, *Xanthostemon sp*, *Acacia leptocarpa*, *Alstonia actinopilla*, *Dilenia alata*, dll.)
- 3) **Hutan Jarang** seluas 34.559 hektar, dengan spesies dominan sebagai berikut :
(*Lophostemon lactifluus*, *Melaleuca sp*, *Dilenia alata*, *Eucalyptus sp*, *Asteromyrtus symphiocarpa*, *Acacia leptocarpa*, *Xanthostemon sp* yang dibawahnya ditumbuhi berbagai semak)
- 4) **Hutan Pantai** seluas 4.748 hektar, dengan beberapa spesies dominan sebagai berikut :
(*Alstonia actinopilla*, *Barringtonia sp*, *Lophostemon lactifluus*, *Cocos nucifera* dan berbagai jenis palem)
- 5) **Hutan Musim** luasnya belum diketahui secara pasti.
(*Eucalyptus sp*, *Acacia mangium*, *Dilenia alata*, *Alstonia actinopilla*, *Salsar*, dll)
Bamboo sp, *Graminae spp*.
- 6) **Hutan Riparian** (Pinggir Sungai)
(*Eucalyptus sp*, *Acacia mangium*, *Dilenia alata*, *Alstonia actinopilla*, *Salsar*, *Bamboo sp*, *Graminae sp*)
Luas hutan musim dan pinggir sungai secara pasti belum diketahui, namun jumlah keseluruhan adalah 43.372 ha.
- 7) **Hutan Bakau** seluas 51.752 hektar, dengan jenis-jenis dominan sebagai berikut :
(*Sonneratia sp*, *Avicenia sp*, *Rhizophora sp*, *Bruguiera sp*, *Nypa frcticans* dan palem)
- 8) **Hutan Savana** seluas 169.809 hektar, dengan spesies dominan sebagai berikut :
(*Lophostemon lactifluus*, *Banksia dentata*, *Asteromyrtus symphiocarpa*, *Eucalyptus sp*, *Melaleuca sp*)
- 9) **Padang Rumput** seluas 28.911 hektar, dengan spesies dominan sebagai berikut :
(*Graminae sp* dan *Pandannus sp*)

10) **Padang Rumput Rawa** seluas 13.250 hektar, dengan spesies dominan sebagai berikut :

(*Pandanus sp*, *Phragmites karka*, *Hanguana sp*, anggrek dan teratai).

Jenis tumbuhan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Taman Nasional Wasur antara lain Kayu Putih (*Asteromirtus symphocarpa*), dan *Melaleuca cajuputi*, Kelapa (*Cocos nucifera*), Kemiri (*Aleurites moluccana*), Bambu (*Bambusa spp.*), Anggrek (*Dendrobium spp.*), Sagu (*Metroxylon sago*), Gayam (*Inocarpus sp*), Tumbuhan obat, Pakis Haji (*Cycas sp.*), Pisang dan ubi-ubian.

b. F a u n a:

1) Mamalia:

Diperkirakan terdapat 80 spesies, telah diidentifikasi 34 spesies (32 spesies endemik). Berikut ini adalah beberapa spesies mamalia di Taman Nasional Wasur yang telah diidentifikasi: Kanguru lincah (*Macropus agilis*); Kanguru biasa (*Darcopsis veterum*); Kanguru bush (*Thylogale brujnii*); Musang hutan (*Dasyurus spartacus*); Kuskus berbintik (*Spilocuscus maculatus*); Landak moncong pendek; tikus berkantung; Kucing berkantung, kalong, kelelawar, dll

2) A v e s / Unggas

Telah terdaftar 419 spesies namun baru diidentifikasi 403 spesies (74 jenis endemik, 114 jenis dilindungi), antara lain: Garuda Irian (*Aquila gurneyi*); Cenderawasih (*Paradisea apoda novaeguineae*), Kakatua (*Cacatua spp*); Mambruk (*Goura spp*); Kasuari (*Casuarius sp*).

Burung Migran

Bangau abu-abu/Cranes trans fly; Pelikan/Pelican; Ibis/Straw-necked glossy; Boha/magpie geese; Gajahan kecil/little curlew; Paruh sendok/Royal spoonbill, dll

Burung Endemik Trans Fly Region / Trans Boundary Reserves

Megalurus albolimbatus; Lonchurna sp (2 jenis); *Alcedo pusila pusila; Dacelo tyroarchboldi*

3) Pisces

Diperkirakan terdapat 72 spesies, telah diidentifikasi 39 jenis (32 jenis di Rawa Biru, 7 jenis di Sungai Maro). Berikut ini adalah beberapa spesies unik :

Scleropages jardinii; Cochlefelis sp; Doiichthys sp; Tetranesodon sp; Iriatherina sp; Kiunga sp, dll.

4) Reptil

Diidentifikasi 21 jenis , berikut ini adalah spesies yang telah diidentifikasi:

Buaya 2 jenis yaitu Buaya air tawar(*Crocodylus novaeguineae*) dan Buaya Muara (*Crocodylus porosus*); Biawak 3 jenis (*Varanus spp*); Kura-kura terdapat 4 spesies yaitu Kura-kura Dada Merah (*Emydura subglobosa*), Kura-kura Dada Putih (*Cuora signota*), Kura-kura Darat (*Testudo forsteni*), dan Kura-kura Ambon (*Cuora amboinensis*; Kadal (*Mabouya sp*), 5 jenis; Ular (*Condoia sp, Liasis spp, Python spp.*); ada 8 spesies Bunglon.

5) Amphibia

Telah diidentifikasi 3 spesies: *Hylla crureelea; Litoria infrafronata; Rana macrodon*

6) Serangga

Diidentifikasi 48 spesies, antara lain Rayap (*Tumulitermis sp, Protocapritermis sp*); Kupu-kupu (*Ornithoptera priamus*); Semut (*Formicidae, Nyptalidae, Pieridae*), dll.

Jenis satwa bernilai ekonomis dan atau konsumtif di Taman Nasional Wasur antara lain Rusa (*Cervus timorensis*), Babi Hutan (*Sus scrofa*), Kanguru Tanah (*Darcopsis spp.*, *Macropus spp.*, dan *Tylegale sp.*), Ikan Arwana Irian (*Schleropages jardinii*), Ikan Kakap, Ikan bandeng, Udang, Kepiting, Kura-kura, dan Buaya (*Crocodylus porosus* dan *Crocodylus novaeguineae*) serta berbagai jenis burung endemik. Selain itu terdapat beberapa jenis burung migran dari Australia dan Siberia.

2. Sumber Daya Alam Non Hayati (Abiotik)

Danau Rawa Biru

Rawa Biru merupakan salah satu sumber air yang pokok bagi kebutuhan air bersih kota Merauke, yang dimanfaatkan sejak jaman Belanda sampai saat ini. Dalam kurun waktu yang cukup lama belum pernah terpikirkan untuk menarik manfaat langsung dari penggunaan air tersebut bagi masyarakat yang bermukim di dalam Taman Nasional Wasur. Jika mungkin sangat bijaksana bila dipikirkan untuk memberikan semacam kompensasi dari penggunaan air tersebut kepada masyarakat di Taman Nasional Wasur, dengan demikian diharapkan mereka dapat ikut melindungi Rawa Biru sebagai sumber air dan habitat berbagai jenis satwa, antara lain ikan, burung air, buaya dan kura-kura.

Luas danau Rawa Biru diperkirakan 12.570 hektar pada tahun 1950, namun dengan adanya sedimentasi lumpur/tanah dan serasah tumbuhan air, terutama tebu air yang menginvasi danau tersebut, sehingga sampai saat ini luas aktualnya menjadi 100 ha (hasil pengukuran tahun 1997).

3. Sosial Budaya

Di Taman Nasional Wasur terdapat 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kampung yaitu

- a. Desa Wasur (di sektor Jalan Trans Irian)
- b. Desa Rawa Biru (di sektor Jalan Trans Irian)
- c. Desa Yanggandur (di sektor Jalan Trans Irian)
- d. Desa Sota (di sektor Jalan Trans Irian)

- e. Desa Kuller (di sektor pantai)
- f. Desa Onggaya (di sektor pantai)
- g. Desa Tomer (di sektor pantai)
- h. Desa Tomerauw (di sektor pantai)
- i. Desa Kondo (di sektor pantai)
- j. Desa Soa (di sektor Sungai Maro)
- k. Desa Tambat (di Sektor Sungai Maro)
- l. Kampung Bokrum (di sektor Sungai Maro).

Penduduk asli yang menghuni Taman Nasional berasal dari 4 (empat) suku yaitu Suku Kanum, Suku Marori Men-Gey, Suku Marind dan Suku Yei. Dalam perkembangannya masuk beberapa suku dari luar melalui cara kawin dan persahabatan. Sebagian besar areal di sepanjang Jalan Trans Irian dan Sungai Maro, yang saat ini dihuni oleh Suku Muyu merupakan pemberian masyarakat asli sebagai emas kawin atas putri-putri mereka yang kawin dengan masyarakat asli. Selain Suku Muyu, masih ada suku lain seperti Suku Timor, Kei, Jawa, dan Bugis. Jumlah penduduk yang ada di dalam Taman Nasional Wasur sebanyak 1.453 orang yang tersebar pada 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kampung (Sensus, WWF ID-0105 Merauke, Tahun 1997).

Adat Budaya masyarakat meliputi: Dusun, Obat Tradisional / Tanaman Wati (untuk upacara adat)

a. Kearifan Tradisional:

Pembakaran Tradisional (*traditional burning*)

Pengontrolan Banjir (*flooding control*)

Penyesuaian Iklim Mikro

Pengolahan Lahan

Sistem sasi (menghentikan pemanfaatan sumber daya alam tertentu pada suatu tempat dalam kurun waktu tertentu).

b. Adaptasi Lingkungan:

Asosiasi Habitat

Pengenalan Jenis Flora Fauna

Pengenalan Jenis Obat-Obatan Tradisional

c. Anthropologi:

Tempat-Tempat Sakral

Pengetahuan Metafisika

Pemanfaatan Dusun sebagai Arena Belajar Budaya

4. Ekowisata

Ekosistem Taman Nasional Wasur yang indah dengan padang rumput dan rawa yang dihuni oleh berbagai jenis satwa, merupakan suatu potensi yang dapat dijual/dipromosikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan cara melibatkan masyarakat sebagai penjual jasa, baik sebagai pemandu wisata (local guide) maupun pelayan rumah tamu (guest house).

Taman Nasional Wasur dihuni oleh 4 (empat) suku asli yaitu suku Kanum, Marori Men-Gey, Marind dan Yei) dan memiliki berbagai jenis budaya yang dapat dikembangkan dan dijual dalam rangka kunjungan wisata alam ke Taman Nasional Wasur. Beberapa jenis budaya yang telah dikembangkan antara lain tarian adat, masakan tradisional (Sep), menguburkan badan di dalam pasir untuk menguatkan tubuh, upacara adat (kegiatan sakral) dan berburu secara tradisional menggunakan tombak dan panah.

III. Kebijaksanaan dan Strategi

A. Kebijaksanaan Nasional

1. Pembangunan kawasan konservasi bertujuan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan kawasan konservasi mempunyai embanan yaitu sebagai:
 - a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan.
 - b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
 - c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. Pembangunan kawasan konservasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang pelaksanaannya harus dikoordinasikan sehingga saling menunjang dengan pembangunan sektor lain.
4. Pembangunan kawasan konservasi harus berkelanjutan melalui pemanfaatan secara rasional dan dengan kebijaksanaan menyeluruh dan memperhatikan generasi yang akan datang.
5. Pembangunan kawasan konservasi harus mencerminkan peranannya sebagai pendukung lingkungan hidup dan sebagai pencipta prakondisi yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan pembangunan lainnya sehingga dapat berjalan secara berdayaguna dan berhasil guna.
6. Kawasan konservasi sebagai salah satu faktor penentu lingkungan hidup dalam fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan, harus dialokasikan secara nyata baik untuk kepentingan konservasi daratan, perairan maupun fungsi lainnya sebagai pemelihara proses ekologis.
7. Kawasan konservasi sebagai salah satu perwakilan tipe ekosistem di Indonesia, harus mampu mengekspresikan dan mempertahankan kualitasnya melalui upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan dan potensi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya secara rasional.
8. Dalam pengelolaan kawasan konservasi perlu adanya upaya peningkatan partisipasi masyarakat secara positif aktif dan selalu diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam beserta ekosistemnya sehingga terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan lingkungannya.

B. Kebijakan Regional

1. Meningkatkan dan mengembangkan produksi hasil hutan dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
2. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
3. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintahan dan masyarakat dalam upaya pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan konservasi hutan lahan kering, hutan rawa, hutan perairan, flora dan fauna untuk melindungi berbagai plasma nutfah, keanekaragaman hayati dan ekosistem lingkungan.
5. Melestarikan objek-objek wisata alam.

C. Kebijakan Pengembangan Wilayah

1. Menjaga dan menciptakan keserasian penggunaan ruang diantara berbagai kepentingan.
2. Mendukung terciptanya keseimbangan pembangunan baik antar wilayah maupun antar sektor.
3. Menjamin terselenggaranya pembangunan secara berkelanjutan.
4. Menjamin pemanfaatan ruang secara optimal melalui alokasi ruang dan tempat secara rasional dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.
5. Meningkatkan upaya-upaya keterkaitan antar kepentingan sehingga dapat terhindar dari perbedaan-perbedaan dalam alokasi dan pemanfaatan ruang.
6. Penetapan peruntukan ruang dan peruntukannya.
7. Penetapan spesifikasi ruang dan peruntukannya.
8. Terciptanya strategi alokasi dan pemanfaatan ruang secara optimal dan serasi diantara berbagai kepentingan.

Berdasarkan arahan tersebut di atas, penataan ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke ditentukan meliputi kawasan-kawasan:

Kawasan Lindung:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya.
- b. Kawasan perlindungan setempat.
- c. Kawasan Konservasi dan cagar budaya

Kawasan Pengembangan/Budidaya

- a. Kawasan pertanian hutan rakyat
- b. Kawasan pertanian tanaman tahunan
- c. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering
- d. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah
- e. Kawasan pertanian peternakan
- f. Kawasan pertanian perikanan (darat, laut)

Kawasan Pengembangan Non Pertanian:

- a. Kawasan pemukiman perkotaan
- b. Kawasan pemukiman pedesaan
- c. Kawasan industri
- d. Kawasan pertambangan

- e. Kawasan pariwisata
- f. Kawasan khusus (ABRI)

D. Kebijakan Pengelolaan TN Wasur

1. Pengelolaan Taman Nasional Wasur diarahkan untuk melindungi fungsi sistem penyangga kehidupan di dalam dan sekitar kawasan dengan memperhatikan *aspek ekologis, sosial-ekonomi* dan *budaya masyarakat tradisional* di dalam kawasan.
2. Perlindungan keanekaragaman jenis-jenis burung air, burung migrasi, burung endemik, perwakilan burung-burung trans-fly dan habitatnya.
3. Keberadaan masyarakat lokal perlu diakomodasikan dan diberdayakan sebagai satu kesatuan pengelolaan Taman Nasional Wasur (*community base development*).
4. Hal ini sebagai upaya pelestarian budaya dan kearifan tradisional masyarakat yang berfungsi bagi pengelolaan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Pengaruh budaya tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun, perlu dipertahankan dan dikembangkan sebagai warisan nilai-nilai budaya masyarakat tradisional dalam Taman Nasional Wasur.
6. Taman Nasional Wasur sebagai salah satu kawasan yang memiliki perwakilan keanekaragaman hayati lahan basah di daerah Trans-fly Selatan, yang dapat menjadi obyek penelitian flora, fauna dan ekosistem serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pengembangan fasilitas dan pengelolaan Taman Nasional Wasur memiliki fungsi sebagai wahana bagi pendidikan konservasi masyarakat.
8. Merupakan sumber plasma nutfah yang diharapkan menjadi sumber benih gen-gen murni, antara lain spesies seperti ikan, walabi / kanguru, burung, anggrek, palem, cycas dan sebagainya.

9. Peningkatan fasilitas/sarana dan prasarana pariwisata alam serta sarana dan prasarana pengelolaan kawasan Taman Nasional Wasur diharapkan antara lain dapat meningkatkan kegiatan wisata alam dan budaya, pengamanan kawasan, penelitian, pendidikan, penyuluhan.
10. Pengembangan Taman Nasional Wasur merupakan peluang untuk pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan kesempatan berusaha, kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar Taman Nasional Wasur.
11. Pengembangan Taman Nasional Wasur menjadi salah satu obyek wisata alam andalan di Kabupaten Merauke diharapkan dapat menunjang peningkatan pendapatan daerah kabupaten Merauke khususnya dan devisa negara pada umumnya.
12. Peningkatan koordinasi dan kerjasama serta kemitraan dengan berbagai instansi/lembaga/pihak terkait lainnya guna memantapkan pengelolaan taman nasional.

E. Strategi Pengelolaan Taman Nasional Wasur

1. Peningkatan upaya pengelolaan Taman Nasional Wasur seperti misalnya, perencanaan, prakondisi zona, pengamanan kawasan, pembangunan sarana prasarana, dll.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam rangka memantapkan kemampuan aparatur pengelolaan baik melalui pendidikan dan pelatihan pegawai, pemantapan organisasi, penyusunan prosedur hubungan kerja dan pelayanan umum, dll.
3. Peningkatan peranan Taman Nasional Wasur dalam rangka optimalisasi manfaat kawasan baik secara langsung bagi penyelamatan dan pelestarian sistem penyangga kehidupan umat manusia.
4. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat baik di dalam maupun di sekitar kawasan sehingga dapat berperan aktif dalam upaya perlindungan, pengaweta dan pelestarian kawasan Taman Nasional Wasur pada khususnya dan sumber daya alam beserta ekosistem pada umumnya.

5. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam rangka menjamin keberhasilan pengelolaan Taman Nasional Wasur melalui koordinasi dan kerjasama serta kemitraan secara terpadu dengan/antara instansi/lembaga/pihak terkait lainnya baik ditingkat nasional maupun internasional.

F. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan TN Wasur

Tujuan:

1. Perlindungan fungsi hidrologi, keseimbangan ekologi, kestabilan iklim mikro dan kesuburan tanah, mengingat dampak kerusakan fungsi-fungsi tersebut di dalam kawasan TNW akan dirasakan oleh daerah di sekitar kawasan yang akibatnya akan ditanggung oleh masyarakat di sekitar kawasan sendiri.
2. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem asli, Trans-Fly dan habitat burung-burung migrasi, mengingat keanekaragaman jenis flora-fauna beserta ekosistemnya tersebut merupakan ciri asli TNW yang unik dengan nilai potensi sangat tinggi, yang tidak hanya milik bangsa Indonesia tetapi juga milik bangsa-bangsa lain di dunia.
3. Peningkatan upaya penggalian kearifan tradisional masyarakat dan penelitian flora-fauna TN Wasur, baik untuk kepentingan pengelolaan kawasan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial-ekonomi dan budaya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan.
4. Peningkatkan dan pengembangan tradisi masyarakat yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penggunaan kawasan beserta seluruh potensinya sebagai wahana pendidikan konservasi alam, dalam rangka mencapai tingkat kesadaran dan apresiasi masyarakat yang tinggi terhadap kepentingan konservasi alam

5. Peningkatan peran kawasan TNW sebagai sumber plasma nutfah potensial dalam menunjang budidaya, mengingat kekayaan dan potensi kawasan yang sangat tinggi dalam penyediaan sumber sifat-sifat genetik flora-fauna unggul seperti misalnya, tanaman obat-obatan, tanaman hias, burung, mamalia.
6. Peningkatan kegiatan pariwisata dan rekreasi di dalam kawasan TNW baik untuk tujuan wisata alam, minat khusus dan budaya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas kunjungan sebagai upaya peningkatan pemanfaatan kawasan sekaligus upaya peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap konservasi alam serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan TNW sebagai upaya pengalihan tekanan/gangguan terhadap kawasan melalui pengelolaan TNW dalam pengembangan budidaya flora-fauna potensial, kerjasama dan koordinasi dengan instansi/lembaga/pihak terkait dalam rangka memaduserasikan kegiatan pengelolaan kawasan dengan pembangunan daerah di sekitarnya.

Sasaran :

1. Terpeliharanya fungsi hidrologi dan daerah tangkapan air di dalam kawasan TNW.
2. Terpeliharanya keseimbangan ekologi
3. Terpeliharanya kelestarian dan kesuburan tanah
4. Terpeliharanya iklim mikro yang stabil
5. Terjaminnya keberadaan flora fauna asli, terutama jenis endemik dan langka.
6. Terjaganya keanekaragaman sumber daya hayati dan ekosistemnya di dalam kawasan TNW.
7. Diketahuinya potensi seluruh kawasan.
8. Tersusunnya tindak lanjut bagi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan.
9. Terpacunya pengembangan IPTEK
10. Tercapainya peningkatan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap kawasan TNW.
11. Tersedianya wahana dan fasilitas pendidikan konservasi di dalam kawasan TNW.
12. Tersedianya sumber plasma nutfah untuk dibudidayakan
13. Terpeliharanya objek-objek pariwisata alam dan rekreasi di dalam kawasan
14. Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata alam dan rekreasi beserta fasilitas pendukung lainnya

15. Terciptanya lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi masyarakat di dalam maupun di luar kawasan TN Wasur.
16. Terpeliharanya pengetahuan/budaya arif masyarakat suku asli yang mendukung konservasi dan pengelolaan Taman Nasional Wasur.

IV. Fungsi dan Peranan Taman Nasional Wasur

Taman Nasional Wasur memiliki karakteristik tersendiri, jika dibandingkan dengan kawasan Taman Nasional lainnya di Indonesia yaitu adanya aspek budaya masyarakat adat, kesamaan ekologis dengan Tonda WMA dan Kakadu NP, serta juga merupakan lahan basah penting di Indonesia bahkan di dunia karena berada pada jalur migrasi burung air antara Asia dan Australia. Hal ini menyebabkan orientasi pengelolaan Taman Nasional Wasur berbasis masyarakat (community based development/management) yang meliputi aspek ekologis, Sosial ekonomi dan budaya.

A. Ekologis

Manfaat ekologis TN Wasur meliputi : stabilitas iklim, menjaga keseimbangan ekosistem dan sumber daya gene / gene bank (future value), sebagai contoh manfaat ekologi bagi iklim antara lain : mengurangi pemanasan global (global warming), efek rumah kaca (green house effect) , supply oksigen, pengendalian banjir (flood control), pencegahan erosi, pengendalian erosi, pollution control , melindungi biodiversity serta sebagai laboratorium alam yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

B. Sosial Ekonomi

Manfaat **Sosial** meliputi: kesinambungan mata pencaharian, budaya dan norma sosial serta pendidikan.

Manfaat **ekonomi** meliputi: keanekaragaman sumber daya makanan (dusun dan kebun masyarakat adat, pemanfaatan secara lestari, bahan baku makanan dan obat-obatan, eko-wisata, nilai estetika dan lapangan usaha serta pekerjaan.

C. Budaya

Manfaat **budaya** meliputi: perlindungan daerah-daerah sakral (upacara adat) yang telah ada di masyarakat adat secara turun temurun, melestarikan berbagai adat istiadat yang berkaitan dengan konservasi tradisional (sistem sasi, pembakaran tradisional yang arif dan bijaksana dan totem).

D. Nilai Strategis Konservasi Taman Nasional Wasur

1. Keterkaitan Ekologis Antara Wasur NP dan Tonda WMA.

Taman Nasional Wasur (Wasur National Park) dan Tonda Wildlife Management Area (Tonda WMA), sama-sama berada pada Trans-Fly Region sehingga memiliki kesamaan sistem ekologi antara lain dalam aspek biodiversity. Permasalahan ekologi di Taman Nasional Wasur juga merupakan masalah di Tonda WMA. Apabila terjadi perubahan pada salah satu kawasan, akan mempengaruhi ekosistem kawasan lainnya.

Untuk itu diperlukan keterpaduan pengelolaan kedua kawasan konservasi tersebut terutama untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sedang dan akan terjadi, antara lain survei biodiversity, perubahan vegetasi dan suksesi, pengendalian kebakaran dan pengendalian jenis tumbuhan dan satwa eksotik.

2. Taman Perdamaian

Selain aspek ekologis yang sama antara Taman Nasional Wasur dan Suaka Margasatwa Tonda (Tonda Wildlife Management Area) di Papua New Guinea, kedua kawasan tersebut didiami oleh masyarakat adat yang mempunyai adat istiadat yang sama secara turun temurun, sebelum kawasan-kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Masyarakat adat dimaksud mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat erat serta kepemilikan hak ulayat yang tidak dapat dipisahkan oleh batas kedua negara. Beberapa suku Kanum dan Yei, antara lain yang berada di Sota, Kondo, Erambo, Torai, Kwel dan Bupul mempunyai hak-hak tradisional di PNG demikian sebaliknya. Sebagai contoh masyarakat Kanum di Sota mempunyai tanah adat (hak tradisional) di Woriber dan Weam demikian pula masyarakat Woriaber dan Weam juga mempunyai tanah adat

(hak tradisional) di Sota. Masyarakat adat yang berada di Merauke dapat memanfaatkan hasil bumi pada dusun-dusunnya di PNG antara lain pemanenan anakan ikan Arwana.

Hubungan kekerabatan antara masyarakat adat kedua negara selama ini selalu dibina antara lain pada hari ulang tahun kemerdekaan masing-masing, masyarakat adat saling mengunjungi dan mengikuti pertandingan persahabatan yang diselenggarakan oleh masing-masing negara (Sota dan Weam). Hal ini perlu segera diresponi dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kerjasama antar kedua negara, sehingga masing-masing masyarakat adat terdorong untuk dapat bekerjasama membantu pemerintah dalam pengelolaan bersama (collaborative management) kedua kawasan konservasi (Wasur NP dan Tonda WMA), bahkan hal ini dapat pula mendorong masyarakat untuk dapat saling menghargai eksistensi masing-masing negara (RI – PNG).

Di samping Tonda WMA, pemerintah perlu juga menjalin kerjasama dengan Kakadu National Park di Australia khususny dalam pengelolaan bersama tiga kawasan konservasi, mengingat Taman Nasional Kakadu juga mempunyai kesamaan ekologis maupun pola budaya masyarakat tradisional yang ada di sana dengan kedua kawasan lainnya (Wasur NP dan Tonda WMA).

3. Situs Ramsar (Ramsar Site)

Taman Nasional Wasur merupakan salah satu lahan basah penting bagi burung air di Indonesia, khususnya burung air dari Australia dan Selandia Baru maupun dari Cina Utara dan Siberia. Oleh karena itu kawasan ini mempunyai arti penting secara internasional karena merupakan tempat persinggahan berbagai jenis burung migran antara Australia dan Asia. Jenis burung air yang biasa mengunjungi / menyinggahi Taman Nasional Wasur antara lain bangau abu-abu / Cranes Trans fly, Pelican, Ibis, Boha / Magpie geese dan Paruh sendok / Royal spoonbill.

V. Pemanfaatan Kawasan dan Pemberdayaan Masyarakat

A. Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Pemanfaatan kawasan lebih dititikberatkan untuk memberikan bekal pendidikan dan pemahaman akan arti penting konservasi sumber daya alam dan lingkungan, baik kepada anak sekolah maupun masyarakat umum, sarana penelitian dan budidaya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Kemah Pramuka Saka Wanabhakti (Persami) di Ndalir dan orientasi lapangan dalam pembuatan bumi perkemahan di daerah Ndalir, Perkemahan dan Lomba Lintas Alam Ceria Taman Nasional Wasur dalam rangka Bina Cinta kepada generasi muda. Kegiatan tersebut untuk pertama kali dilaksanakan pada bulan Juli 1999 oleh Balai Taman Nasioanal Wasur dan Yayasan Wasur Lestari, bekerjasama dengan berbagai Instansi terkait (Dinas Kesehatan Merauke, Yayasan Santo Antonius, Dinas Pariwisata, Kandep P dan K Merauke, Kandep Penerangan Merauke, Sub Seksi KSDA Merauke, WWF Bioregional Sahul Merauke, Kwarcab Pramuka Merauke, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Merauke, serta dukungan dari masyarakat di dalam kawasan. Kegiatan tersebut merupakan even daerah karena memperrebutkan Piala Bergilir BUPATI CUP dan akan terus diselenggarakan setiap tahun. Materi-materi yang diberikan dalam kegiatan tersebut meliputi pengetahuan Pramuka, SAR dan P3K, Penyuluhan Konservasi, Pengenalan Potensi, fungsi dan Manfaat Taman Nasional Wasur, Perilaku Hidup Sehat, Perilaku Generasi Muda di Jalan Raya serta hiburan dan film. Sedangkan pemanfaatan kawasan untuk tujuan penelitian dan budidaya, pelaksanaan yang telah dilakukan adalah survei/orientasi pohon-pohon induk, dan rencana pengembangan tanaman budidaya dan obat-obatan di daerah Wasur, Rawa Biru dan Yanggandur, dan sejumlah penelitian lain yang dilaksanakan oleh WWF ID-0105 maupun beberapa perguruan tinggi di Indonesia antara lain UNCEN dan UGM.

Kegiatan lain yang dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan mempersiapkan masyarakat sehingga dapat mampu berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan adalah Pendidikan dan Pelatihan Kader Konservasi dan Pemandu Wisat Alam.

B. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kegiatan-kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi:

1. Pariwisata Alam dan Rekreasi

Pemanfaatan kawasan untuk tujuan ini dikembangkan sedemikian rupa, sehingga Taman Nasional tidak hanya sebagai objek rekreasi semata, namun juga sebagai objek dalam pendidikan cinta alam. Guna mendukung pemanfaatan ini, telah dilakukan beberapa upaya kegiatan yang disertai pembinaan pengunjung yang memasuki kawasan. Upaya kegiatan tersebut antara lain:

- a) Pembuatan jalan trail wisata di daerah/desa Yanggandur dan Rawa Biru dan sekitarnya.
- b) Perbaikan dan pemeliharaan tempat sarasehan dan pemeliharaan pusat informasi di Wasur.
- c) Penataan dan pemeliharaan pintu masuk kawasan di Wasur dan Ndalir.
- d) Pemasangan papan petunjuk/informasi (25 buah) di sektor Ndalir (Kuler, Tomer dan Tomerau) dan sepanjang jalan Trans Irian.
- e) Melaksanakan pemungutan karcis masuk kawasan terhadap pengunjung untuk tujuan rekreasi dan wisata alam.

Kegiatan pariwisata alam / ekowisata atau wisata ekologi di Taman Nasional Wasur dilakukan sejak tahun 1991. Setiap wisatawan mancanegara yang menggunakan paket ekowisata di taman nasional dikenakan pungutan masuk kawasan sebesar Rp. 10.000 per orang sekali masuk, sedangkan untuk pengunjung domestik yang melakukan rekreasi dikenakan pungutan masuk kawasan sebesar Rp.1.000,- per orang dewasa dan Rp.500,- untuk pelajar dan mahasiswa. Pungutan masuk untuk kendaraan roda dua sebesar Rp.500,- roda 4 sebesar Rp.1.000,- dan roda 6 sebesar Rp.5.000. Pemanfaatan pondok wisata (guest house) di dalam kawasan dikenakan Rp15.000 per kamar per hari dan kepada pengunjung manca negara dikenakan sumbangan untuk beasiswa anak-anak suku asli di dalam Taman Nasional Wasur. Besar sumbangan adalah Rp.5.000,- per orang yang dikelola oleh Yayasan Wasur Lestari. Selain itu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maka kegiatan pemanduan ekowisata dilakukan oleh masyarakat setempat.

2. Rawa Biru

Pemanfaatan danau Rawa Biru sebagai sumber air bersih utama bagi penduduk di kota Merauke, dengan jumlah air yang dibutuhkan masih berfluktuasi antara 40 hingga 225 liter per detik, tergantung pada musim (musim kering dan musim hujan). Perhitungan secara kasar nilai air yang dimanfaatkan berkisar antara Rp.2.522.880.000 hingga

Rp.14.191.200.000 setiap tahun, dengan patokan harga Rp.2 per liter dibandingkan biaya yang dikeluarkan apabila membeli air bersih di kota sebesar Rp.10 per liter.

3. Penyulingan Minyak Kayu Putih

Kegiatan penyulingan minyak kayu putih dimulai sejak tahun 1993 sampai 1997 pada 4 (empat) desa yaitu Desa Yanggandur, Wasur, Rawa Biru dan Tomerauw. Hasil produksi selama kurun waktu tersebut adalah 23.901 liter dengan nilai sebesar Rp.262.905.500,- . Sedangkan produksi dari tahun 1997 – 1999 sebanyak 712 liter atau Rp.10.680.000,- yang langsung diterima oleh masyarakat.

Kegiatan penyulingan minyak kayu putih yang telah dikembangkan pada 4 (empat) desa yaitu Wasur, Rawa Biru, Yanggandur dan Tomerauw), Kapasitas produksinya tidak dapat kontinu, terutama pada musim kemarau karena kesulitan air dalam proses penyulingan. Untuk menunjang kontinuitas kegiatan tersebut perlu dibangun sumur atau tempat penampungan air pada lokasi penyulingan dan penanaman kembali pohon kayu putih pada zona pemukiman. Kegiatan penyulingan minyak kayu putih saat ini sedang dikembangkan / ditingkatkan pada 4 (empat) desa yang mempunyai potensi kayu putih yaitu Desa Wasur, Yanggandur, Rawa Biru dan Tomerauw yang difasilitasi oleh Yayasan Wasur Lestari. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan produksi minyak kayu putih antara lain reboisasi hutan /dusun kayu putih yang relatif mudah dijangkau pada desa-desa tersebut (di sekitar zona pemukiman). Minyak kayu putih merupakan salah satu potensi yang akan memberikan kontribusi cukup berarti bagi daerah, jika dapat dikelola dengan baik dan kontiniu.

4. Koperasi

Kegiatan pengembangan koperasi dimaksudkan sebagai wadah untuk menyediakan sembilan bahan pokok bagi masyarakat di dalam taman nasional sekaligus menampung dan menyalurkan hasil produksi masyarakat, antara lain minyak kayu putih, kemiri, dendeng rusa dan babi, serta ikan, udang dan kepiting.

Selama ini baru dikembangkan Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) pada 2 (dua) desa di dalam kawasan yaitu Desa Yanggandur dan Onggaya.

Koperasi Embewai Tetepu yang dibentuk dan dikembangkan di Taman Nasional Wasur telah berbadan hukum, namun pengelolaannya belum dapat dilakukan oleh masyarakat setempat mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan manajemen koperasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, pendampingan masih terus dilakukan sampai saat ini dan beberapa orang dari anggota masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan koperasi.

5. Penginapan (*guest house*)

Telah dibangun 3 (tiga) buah penginapan (*guest house*) oleh WWF ID 0105 Merauke, masing-masing pada Desa Yanggandur, Desa Onggaya dan Desa Soa. Pengelolaan penginapan dilakukan oleh masyarakat desa tersebut.

Pembangunan penginapan dimaksud, cukup membantu para wisatawan mancanegara menyalurkan keinginannya dekat dengan alam.

Jumlah penginapan akan ditambah pada lokasi-lokasi lain yang cukup strategis dan memiliki potensi wisata alam cukup menarik, antara lain di Rawa Biru, Ukra, Mamanggal dan Maar dan Poo.

Jasa penginapan sebesar Rp.15.000 per kamar per hari, yang dibayarkan kepada masyarakat melalui Yayasan Wasur Lestari sebagai fasilitator, yang mengelola rekening desa.

6. Agroforestry

Kegiatan *agroforestry* (wanatani) dilakukan di dalam maupun di sekitar kawasan (daerah penyangga) menggunakan jenis-jenis lokal yang mempunyai potensi meningkatkan daya dukung kawasan antara lain penanaman pohon bakau / mangrove serta jenis-jenis yang mempunyai prospek pasar baik, antara lain pengembangan kayu putih di sekitar zona pemukiman, kemiri, sagu, pisang, jeruk, kacang tanah, bawang dan kelapa.

7. Agrofisery

Kegiatan *agrofishery* akan dikembangkan terutama pada daerah-daerah yang mempunyai potensi perikanan antara lain Desa-desanya di sektor pantai (Desa Kuler, Desa Onggaya, Tomer, Tomerau dan Kondo) dan, Desa Rawa Biru serta Desa Poo. Peningkatan

kemampuan produksi, pemasaran hasil dan pengolahan hasil antara lain pembuatan ikan asin, abon ikan, terasi udang dan udang kering (ebi), merupakan kegiatan yang sedang dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan hasil perikanan oleh masyarakat di dalam kawasan, khususnya pada beberapa desa di sektor Sub Seksi Konservasi Wilayah Ndalir (Kuler, Onggaya, Tomer, Tomerau) dan sektor Sub Seksi Konservasi Wilayah Yanggandur (Rawa Biru) dilakukan oleh masyarakat pemilik dusun (masyarakat adat) dengan bantuan pemasaran (pengangkutan) dari masyarakat di kota Merauke. Potensi perikanan di Taman Nasional Wasur sangat tinggi namun belum dimanfaatkan secara optimal. Data hasil pengangkutan di sektor Ndalir pada bulan Juli 1999, sebagai berikut: Udang = 1.627 kg; Ikan berbagai 4 jenis = 4.355 ekor; Kepting = 636 kg. Sedangkan dari Rawa Biru sebagai berikut: ikan mujair = 1.132 kg; ikan sembilan = 564 kg dan ikan gabus = 1000 kg.

8. Penangkaran Rusa

Kegiatan penangkaran rusa yang dilaksanakan sebagai percontohan merupakan upaya untuk memotivasi masyarakat, sehingga dapat terdorong untuk mencoba melakukan kegiatan penangkaran pada tingkat desa atau keluarga. Tujuan kegiatan ini antara lain untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi tekanan terhadap kawasan akibat ketergantungan masyarakat kepada sumber daya alam yang tersedia pada ekosistem alam Taman Nasional Wasur.

9. Pemanfaatan Hasil Hutan dan Kebun

Berdasarkan hasil rekomendasi Lokakarya Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Wasur tahun 1999, masyarakat asli pemilik dusun di dalam kawasan di ijinakan memanfaatkan sumber daya alam secara tradisional dan dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setelah mendapatkan Surat Keterangan Angkut hasil buruan tradisional dan hasil bumi oleh Kepala Balai Taman Nasional Wasur berdasarkan rekomendasi dari Kepala Desa dan Ketua Lembaga Adat setempat. Rekomendasi tersebut menjelaskan tentang asal / status kependudukan dan kepemilikan dusun (hak ulayat) masyarakat yang melakukan pemanfaatan. Sumber daya alam yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat di dalam kawasan, antara lain rusa, babi, ikan dan ubi-ubian (gumbili, keladi, ubi jalar).

Di samping itu, diberikan pula ijin angkut kepada beberapa anggota masyarakat di dalam kawasan yang mengajukan permohonan pemanfaatan kayu/bambu di zona pemukiman yang telah mendapat dukungan rekomendasi dari Kepala Desa setempat sebagai bahan baku bangunan rumah dan sebagian dijual untuk membeli keperluan lain (semen, paku, dll) untuk membangun rumah masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Wasur.

10. Karcis Masuk Kawasan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 878/Kpts-II/1992, kegiatan pungutan karcis masuk kawasan untuk tujuan wisata alam dan rekreasi di Taman Nasional Wasur telah dilaksanakan sejak bulan Oktober 1998 sampai dengan saat ini. Hasil penerimaan karcis masuk sampai dengan bulan Maret 1999 adalah sebesar Rp.884.500,- (delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dan telah disetor ke rekening masing-masing penerima sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPA No. 77/Kpts/VI/92 (Pemda TK I, Pemda TK II, Bendaharawan Umum Negara dan Departemen Kehutanan).

C. Nilai Manfaat Lainnya

Kontribusi / nilai manfaat lain yang diberikan oleh Taman Nasional Wasur, yang belum dapat terukur pada saat ini adalah:

1. Pengatur iklim mikro kota Merauke dan sekitar Taman Nasional Wasur
2. Pengendali siklus udara (penyerapan karbon dioksida dan suplai / produksi oksigen)
3. Menyimpan banyak sumber genetik / plasma nutfah (*gene resources*) yang mempunyai nilai masa depan (*future value*).

VI. Masalah, Tantangan, Kendala dan Peluang

A. Masalah

1. Pembangunan Regional

a. Pemukiman Transmigrasi

Pelepasan sebagian areal kawasan menjadi Lokasi Pemukiman Transmigrasi Sota Unit Pemukiman Transmigrasi berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No.1639/Menhut-VII/1995 tanggal 14 Nopember 1995, dengan luas 2.300 ha. Apabila dalam usaha / kegiatan pertanian tidak menggunakan pestisida yang ramah lingkungan, atau tidak menggunakan pupuk organik akan merupakan ancaman bagi kualitas air Rawa Biru dan kelangsungan hidup berbagai jenis satwa di sekitarnya.

b. Pembangunan Jalan

Pelepasan ruas jalan Ndalir - Tomer yang dibangun di dalam Taman Nasional Wasur, berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No.1343/Menhut-VI/1996 tanggal 26 September 1996 dengan panjang 25 Km.

Jalan disatu sisi sebagai sarana transportasi terutama untuk menunjang kelancaran perekonomian penduduk di sekitarnya, namun disisi lain apabila dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku antara lain studi Amdal, maka menimbulkan kerugian antara lain desa / kampung tergenang pada musim hujan sebagai akibat (dampak negatip) pembangunan tersebut.

2. Flora dan Fauna Eksotik / feral

a. *Mimosa pigra* (Putri Malu Raksasa)

Penyebarannya di sepanjang tepi Kali Maro dan beberapa rawa (oxbow lake) yang merupakan bekas aliran Kali Maro, dengan luas 35 hektar. Mulai ditemukan di daerah Akrindo, di sekitar Desa Poo, percabangan Kali Wanggo sampai jembatan Kali Wanggo dan sekitar Desa Torai.

Jenis ini cenderung tumbuh rapat pada daerah peralihan antara rawa dan tanah tinggi (dek). Tumbuhan memiliki duri yang besar dan keras dan tumbuh sangat rapat sehingga kehadirannya mengganggu atau menghalangi lalulintas satwa liar antara lain Rusa, Kangur dan Kasuari, menuju rawa untuk mendapatkan air minum.

Penyebaran putri malu raksasa di Kabupaten Merauke dan Taman Nasional Wasur pada kususnya belum diketahui secara pasti. Namun secara pasti diketahui bahwa putri malu raksasa bukan merupakan tumbuhan asli kota Merauke. Diketahui bahwa putri malu raksasa merupakan tumbuhan asli dari daerah Amerika Selatan, dimana pada daerah asalnya bukan merupakan gulma pengganggu sebab pertumbuhan dan penyebarannya dikendalikan oleh agen hayati alami seperti kelompok jamur, kumbang, dan ngengat yang senantiasa dapat menekan laju perkembangannya sebagai sumber pakan atau tempat perkembangbiakan dari semua fase kehidupan serangga. Namun perkembangannya di daerah yang baru, di luar daerah asalnya sangat cepat karena musuh alaminya relatif tidak ada dan pertumbuhannya didukung oleh keadaan habitat yang sesuai.

Putri malu raksasa tumbuh dan berkembang dengan subur terutama pada daerah-daerah dataran banjir musiman (floodplain), daerah tepi sungai, rawa dan danau tapal kuda (oxbow lake). Taman Nasional Wasur yang memiliki tipe habitat seperti di atas memungkinkan terjadinya invasi putri malu raksasa seperti daerah-daerah Ukra, Rawa Biru, Rawa Pemul dan Rawa Ndalir.

Pertumbuhan dan perkembangan putri malu raksasa di Taman Nasioanal Wasur saat ini, telah menginvasi daerah tepi sungai Maro dari dusun / Rawa Pemul hingga sungai Wanggo yang berada didaerah perbatasan RI – PNG. Peyebaran putri malu raksasa di kota Merauke dan Taman Nasional Wasur pada khususnya, diduga berasal dari material – material bahan bangunan yang di datangkan dari luar kota Merauke.

Perkembangan dan penyebaran putri malu raksasa di tepi kali Maro diperkirakan 15,6 Ha dan diketahui terdapat 149 titik penyebarannya. Bentuk pertumbuhannya belt / sabuk yang terputus-putus dengan lebar ± 10 meter dan panjang 270 meter. Dampak yang ditimbulkan oleh putri malu raksasa antara lain:

- Sebagai benteng / penghalang bagi satwa herbivor atau satwa lainnya untuk mendapatkan air minum / makan dari sungai Maro.
- Adanya ornamen duri sepanjang batang tumbuhan membuat satwa tidak dapat menerobos penghalang semak berduri.
- Mendesak dan menekan pertumbuhan tanaman / vegetasi lainnya.
- Mengancam dan bahkan menghilangkan keberadaan tumbuhan asli.

b. *Chromolaena odorata* (Rumput Siam)

Penyebarannya di sepanjang jalan Trans Irian, terutama pada areal-areal terbuka atau bekas kebun masyarakat. Mulai ditemukan pada dusun Bembi pada kilometer 28 sampai 31 dan Kali Beo pada kilometer 35 - 36.

Selain itu ditemukan juga pada dusun Samleber (4 km dari jembatan Wanggo ke arah Sota). Sebagian besar terdapat di pinggir jalan hingga 150 meter ke arah hutan. Luasan keseluruhan mencapai 7,52 hektar.

Luasan tanah tinggi (dek) yang digunakan masyarakat sebagai lahan berkebun sangat terbatas pada daerah-daerah tertentu. Kehadiran Jenis tumbuhan ini merupakan ancaman bagi lahan-lahan pertanian (kebun) masyarakat, karena tumbuhnya hanya pada lahan kering / tanah tinggi (dek) dan sangat rapat sehingga dapat mematikan tumbuhan lainnya (tanaman masyarakat).

c. *Stachytarpheta urticaefolia* (Rumput Ekor Tikus)

Dijumpai di sepanjang jalan Trans Irian, ruas jalan Ndalir sampai Tomerauw, Padang Rumput Ukra, Yauram, Ulapar dan Krayempor. Luasannya mencapai 400,47 hektar.

Pada daerah / areal yang ditumbuhi oleh jenis tumbuhan ini cenderung mematikan jenis rumput lain yang merupakan pakan satwa liar (mamalia). Apabila luasannya semakin bertamah akan mengurangi daya dukung dan produktivitas kawasan, sejalan dengan menyustnya luasan padang rumput.

d. *Eichhornia crassipes* (Eceng Gondok)

Penyebarannya di bagian hulu kali (sungai) Maro dan beberapa anak sungai di daerah Soa, Mimi, Poo dan Sungai Wanggo. Populasi Eceng gondok biasanya akan berkurang dengan sendirinya pada saat musim kering dan berkembang pada musim hujan. Hal ini disebabkan pada musim kering air laut (asin) masuk sampai ke hulu Kali Maro sehingga mematikan jenis tersebut.

Akar tumbuhan ini mampu mengikat lumpur sehingga ancaman utama yang ditimbulkan adalah dapat menyebabkan pendangkalan rawa atau rawa menjadi kering akibat endapan lumpur dan serasah tumbuhan tersebut.

e. Ikan Betik, dan Ikan Gabus Toraja

Jenis Ikan Betik (*Anabas testudineus*), adalah salah satu jenis eksotik yang mampu beradaptasi dan berkembang-biak ke seluruh kawasan Taman Nasional Wasur. Jenis ikan ini mempunyai sirip dengan duri yang keras dan tajam sehingga dapat menyebabkan kematian jika dimakan oleh burung-burung air.

Jenis eksotik lain, yang berkembang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir adalah jenis Ikan Gabus yang lebih dikenal dengan sebutan Gabus Toraja. Jenis ikan ini berasal dari Sulawesi Selatan dan didatangkan ke Jayapura pada tahun 1993 kemudian pada tahun 1995 didatangkan ke Merauke.

Sejak tahun 1997 jenis ikan ini sudah ditemukan di sepanjang Kali Maro, pada kolam-kolam di sepanjang Jalan Trans Irian dan Rawa Biru, bahkan pada tahun 1999 sudah ditemukan di beberapa kecamatan lain di Kabupaten Merauke. Jenis ikan ini sangat buas sehingga dikuatirkan akan mengganggu atau menjadi ancaman serius terhadap jenis ikan lain yang juga merupakan mata pencaharian masyarakat setempat.

f. Pengembalaan Sapi di dalam kawasan

Jumlah ternak sapi di dalam kawasan sampai saat ini sebanyak lebih kurang 1.524 ekor dari 8 (delapan) kelompok peternak. Pada musim kering dimana kesulitan air di dalam kawasan, ternak tersebut digembalakan ke arah rawa Mblatar yang merupakan

habitat burung air dan satwa lainnya sehingga mengganggu dan merusak habitat tersebut. Air pada rawa tersebut cepat habis dan menjadi kering karena diminum oleh ternak tersebut.

Sesuai rekomendasi hasil lokakarya Rencana Pengelolaan Taman Nasional Wasur tahun 1992, ternak sapi yang ada di dalam kawasan akan dikeluarkan secara bertahap dengan prioritas peternakan di daerah Tomerau dan Kondo. Lokasi peternakan di luar kawasan yang lebih cocok antara lain di daerah Kumbe atau diarahkan ke daerah transmigrasi. Sedangkan untuk ternak sapi milik masyarakat setempat perlu dibatasi jumlah dan areal penggembalaannya di zona pemukiman.

g. R u s a (*Cervus timorensis*)

Rusa merupakan jenis satwa eksotik yang didatangkan ke Merauke pada tahun 1928, kemudian dapat beradaptasi dan berkembangbiak pada hampir seluruh Propinsi Irian Jaya, dan sampai ke Papua New Guinea. Perkembangan populasi Rusa di Taman Nasional Wasur perlu dikendalikan agar tidak terjadi persaingan dengan jenis endemik seperti Kanguru Tanah, terutama persaingan dalam mendapatkan makanan. Rusa diketahui mengkonsumsi *Pragmites karka* (Tebu rawa) dan jenis lain yang juga merupakan makanan bagi jenis endemik seperti Kanguru Tanah. *Pragmites karka*, juga diketahui sebagai tumbuhan penutup tanah yang dapat menahan air (mengurangi evaporasi), sehingga kehilangan tumbuhan tersebut akan memberi peluang kawasan lebih cepat kering dan terjadi suksesi Kayu Putih (*Melaleuca spp.*) yang mengancam luasan padang rumput sebagai sumber pakan khususnya bagi Kanguru dan Rusa.

Populasi rusa berkembang dengan cepat dan menyebar sampai ke kecamatan-kecamatan Okaba, Muting, Kimaam, Bade, Mindiptana bahkan sampai ke negara Papua Nugini.

Sejak tahun 1950-an rusa timor sudah mulai di buru, namun perburuan itu di atur oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan ketat. Setelah tahun 1962 rusa timor mulai di buru secara tidak beraturan dan selama 10 tahun terakhir jumlah populasi rusa menurun secara drastis, karena perburuan dilakukan dengan menggunakan peralatan modern yaitu kendaraan bermotor roda empat dan roda dua yang dilengkapi dengan lampu sorot dan senjata api.

Kegiatan perburuan ini mulai dapat dikendalikan setelah Kawasan Cagar Alam Rawa Biru dan Suaka Marga Satwa Wasur ditingkatkan pengelolaannya menjadi Taman Nasional Wasur melalui pernyataan Menteri Kehutanan No. 488/ MENHUT- VI/ 1990 tanggal 6 Maret 1990 dan telah berfungsinya proyek WWF ID.0105 Pembangunan Taman Nasional Wasur pada tahun 1991. Sejak saat itu, perburuan rusa dapat di kendalikan sehingga ada kecendrungan populasi rusa timor meningkat kembali.

Kepadatan populasi rusa timor hasil survay udara pada tahun 1991 adalah 11,5 ekor / Km persegi (Franzmann, 1991) dan pada tahun 1992 adalah 11,9 ekor/ Km persegi (Craven, 1992). Kepadatan populasi rusa timor telah menekan dan mendesak pertumbuhan populasi satwa endemik antara lain kangguru (*Macropus sp*) dalam hal persaingan makan dan ruang aktifitas. Kepadatan populasi rusa ini secara langsung maupun tidak langsung membahayakan terhadap keseimbangan populasi satwa endemik dan ekosistem asli.

3. Perburuan Liar

Perburuan liar masih berlangsung di dalam kawasan Taman Nasional Wasur, terutama pada musim kering. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan oleh masyarakat dari Kota Merauke dengan menggunakan senjata api, atau oleh masyarakat di dalam taman nasional yang mendapatkan dukungan / bantuan dari masyarakat kota Merauke berupa pinjaman senjata dan peluru.

4. Pemukiman Liar Sepanjang Jalan Tarans Irian

Pemukiman di sepanjang Jalan Trans Irian terjadi akibat jual beli tanah oleh masyarakat asli dengan masyarakat di luar kawasan. Kegiatan jual beli tersebut terjadi sebelum kawasan ini ditunjuk sebagai kawasan konservasi. Areal-areal pemukiman liar yang masih dipertahankan sampai saat ini adalah di dusun Bembi, Beo, Wam dan Samleber (Jalan Trans Irian). Areal tersebut biasanya digunakan sebagai tempat berkebun. Dari upaya koordinasi Sub Seksi KSDA Merauke dan Proyek WWF ID-0105 Merauke dengan Departemen Transmigrasi maka sebagian masyarakat tersebut telah mengikuti program transmigrasi di luar kawasan Taman Nasional Wasur.

5. Penjualan Tanah di dalam Kawasan

Kegiatan penjualan tanah saat ini dilakukan di Desa Tomer. Menurut informasi sementara penjualan tersebut dilakukan oleh salah seorang Tuan Dusun kepada pembeli dari Kota Merauke. Lokasi yang dijual berada di sepanjang ruas jalan antara Desa kuler dan Tomer.

6. Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan di Taman Nasional Wasur terjadi pada musim kering dan biasanya komponen yang terbakar hanya terbatas pada jenis-jenis rumput penutup tanah dan tidak termasuk pohon-pohonan karena jenis pohon yang ada di Taman Nasional Wasur seperti Kayu Putih (*Melaleuca spp*), *Eucaliptus spp*. dan *Acasia spp*. adalah jenis pohon yang tahan api (kebakaran).

Untuk menghindari terjadinya kebakaran dusun masyarakat pada musim kering, maka biasanya dilakukan pembakaran pada awal musim kering di sekitar dusun-dusun sagu atau kebun-kebun masyarakat. Kebiasaan ini positif apabila dapat dikendalikan dan perhitungan pergantian musim yang cermat sehingga perlu dipertahankan dalam pengelolaan Taman Nasional Wasur.

Pada tahun 1997 terjadi kebakaran hebat, termasuk dusun-dusun sagu di Desa Yanggandur dan Wasur yang dapat terinventarisir, luasnya mencapai lebih kurang 65,5 hektar. Kebakaran tersebut disinyalir dilakukan oleh para pemakai jalan Trans Irian, secara sengaja maupun karena kelalaian membuang puntung rokok sebelum dimatikan.

7. Air Bersih

Pada musim kering hampir semua desa di dalam Taman Nasional Wasur kesulitan air bersih, kecuali Desa Rawa Biru yang terletak ditepi Danau Rawa Biru. Pilihan yang murah adalah membangun sumur bor, namun tidak jarang air sumur mengandung sulfur atau terasa asin. Rawa Biru sebagai sumber air bersih bagi kota Merauke, sedang mengalami penyempitan akibat akupasi jenis tumbuhan air, antara lain *Hanguana malayana*, dan *Pandanus spp*. Selain itu juga terjadi pendangkalan akibat endapan lumpur maupun sisa-sisa tumbuhan *Hidrilla spp*. maupun jenis lainnya.

8. Sumber Daya Manusia

Tingkat pendidikan masyarakat di dalam Taman Nasional Wasur, khususnya suku-suku asli sangat rendah. Umumnya mereka menamatkan Sekolah Dasar dan tidak dapat menyelesaikan SLTP, karena alasan biaya pendidikan.

Selain itu masyarakat kurang memiliki kemauan (motivasi) untuk belajar, termasuk dorongan dari orang tua. Pada musim-musim tertentu anak-anak yang masih sekolah turut membantu orang tua ke dusun, tempat berburu atau tempat lainnya untuk mencari nafkah dalam kurun waktu cukup lama.

B. Tantangan

1. Penguatan Kawasan Taman Nasional

Pemantapan kawasan konservasi merupakan kegiatan prakondisi yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum kawasan secara yuridis formal dan fisik di lapangan. Kegiatan pemantapan antara lain meliputi penunjukkan kawasan, penguatan dan penataan batas, perpetaan, penetapan kawasan dan inventarisasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-II/1997 tanggal 23 Mei 1997, kawasan hutan Wasur telah ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Wasur dengan luas 413.810 ha, yang sampai saat ini kawasan tersebut masih belum dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan. Selain itu pemancangan pal batas antara Ndalir – Poo (Tahap I dan II), dilaksanakan pada tahun 1980 - 1985 yang sampai sekarang juga masih belum dilaksanakan rekonstruksi pal batas. Sedangkan antara Poo – Wanggo (Tahap III) dilaksanakan pemancangan pal batas pada tahun 1989/1990.

Pembangunan di berbagai sektor khususnya di luar sub sektor Kehutanan yang memerlukan lahan dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga belum mantapnya kawasan akan menimbulkan ketidakpastian status hukum dalam pengelolaannya. Selain itu persepsi masyarakat terhadap arti pentingnya keberadaan kawasan konservasi termasuk TN. Wasur masih belum terbina dengan baik. Keadaan ini, apabila terus berkelanjutan akan kurang mendukung upaya pelestarian dan pemanfaatan Taman Nasional Wasur baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

2. Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Wasur

Balai Taman Nasional Wasur merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru di bawah Direktorat Jenderal PHPA sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 185/Kpts-II/1997 tanggal 31 Maret 1997. Sampai saat ini Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Wasur masih dalam proses penyusunan/penyempurnaan yang dilaksanakan bersama-sama antara Balai Taman Nasional Wasur dengan WWF Bio Regional Sahul. Dalam RPTN tersebut berbagai aspek perlu mendapat perhatian antara lain sosialisasi batas kawasan, pemantapan data dasar, peningkatan kegiatan penggalan potensi sumber daya alam dalam menunjang ilmu pengetahuan, pendidikan dan budidaya maupun kegiatan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun di sekitar kawasan, sehingga Taman Nasional Wasur dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik dalam aspek pemangkuan, perlindungan/pelestarian, pengawetan dan pemanfaatannya.

3. Ketergantungan Dana, Tenaga dan Sarana Prasarana yang Terbatas

Sebagai UPT baru, ketersediaan dana, tenaga (SDM) dan sarana prasarana pada Balai Taman Nasional Wasur masih terbatas sehingga hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya dukungan dana, sarana prasarana dan tenaga baik kualitas maupun kuantitas yang memadai, pelaksanaan kegiatan operasional maupun kegiatan penunjang lainnya, diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga tugas dan fungsi Balai Taman Nasional Wasur sebagai pengelola kawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam beserta ekosistemnya dapat terlaksana dengan baik. Memperhatikan kebijaksanaan, nasional tentang zero growth dalam pertumbuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keadaan krisis ekonomi akhir-akhir ini Balai Taman Nasional Wasur berupaya seoptimal mungkin untuk mendayagunakan dana, tenaga dan sarana prasarana yang ada, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat tercapai (efektif dan efisien).

4. Pemanfaatan Potensi Kawasan yang Belum Optimal

Taman Nasional Wasur memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang cukup tinggi baik potensi flora, fauna dan ekosistem maupun panorama dan gejala alamnya yang unik. Namun demikian pemanfaatan dan penggalan sumber daya alam pada kawasan ini masih

terbatas pada rusa, kanguru dan tumbuhan kayu putih yang pemanfaatannya masih bersifat tradisional.

Sumber daya alam di dalam kawasan Taman Nasional Wasur yang cukup potensial untuk dikembangkan baik untuk tujuan ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, pariwisata alam dan rekreasi antara lain, potensi flora dengan 10 (sepuluh) biota ekosistem utama mulai Formasi pantai "pascaprae", hutan bakau, hutan littoral, hutan savana Neuclea-Baringtonia-Livistona, hutan monsson campuran, hutan bamboo (bulu-bulu), padang rumput dan hutan rawa air tawar permanen. Sedangkan potensi fauna terdiri dari 400 jenis burung dengan 114 jenis diantaranya di lindungi dan 74 jenis endemik Irian Jaya, 20 jenis mamalia dengan 17 jenis diantaranya endemik, 32 jenis ikan, 2 jenis buaya dan 4 jenis kura-kura.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang terampil, sarana prasarana yang memadai serta ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, kiranya penggalan potensi sumber daya alam di dalam kawasan akan lebih bermanfaat pada upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan yang lestari, ilmu pengetahuan, pendidikan dan budidaya serta peningkatan promosi dan informasi wisata maupun dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun di sekitar kawasan Taman Nasional.

Di samping itu belum adanya pengaturan pemanfaatan sumber daya alam flora dan fauna Taman Nasional Wasur, yang dapat memberikan kontribusi secara langsung bagi pembangunan daerah. Pengaturan tersebut dapat ditetapkan antara lain pemberian kewenangan dari Pusat ke Daerah yang ditindaklanjuti dalam suatu PERDA yang mengatur tentang tatacara pemanfaatan, antara lain **prosedur perijinan, pihak yang melakukan pungutan, pihak yang dikenakan pungutan dan besarnya pungutan** yang dikenakan dalam pemanfaatan potensi kawasan, antara lain hasil buruan secara tradisional seperti rusa, babi dan hasil hasil perikanan seperti ikan, udang dan kepiting).

5. Tingkat Ketergantungan Masyarakat Terhadap Alam Sekitarnya yang Cukup Tinggi

Keberhasilan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam dan ekosistemnya erat kaitannya dengan tingkat kehidupan dan pendidikan masyarakat yang ada di sekitarnya. Masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan dengan pendidikan relatif

rendah, pada umumnya mempunyai pola kehidupan yang masih subsisten dengan mencari, memanfaatkan serta menggantungkan hidupnya pada kelimpahan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Hampir semua desa di dalam dan atau di sekitar kawasan konservasi, Taman Nasional Wasur termasuk desa tertinggal. Angka pencari kerja cukup tinggi dengan ketersediaan lapangan kerja terbatas sering mengakibatkan tingginya angka pengangguran di pedesaan, sehingga mengakibatkan pula meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam di pedesaan khususnya di dalam dan di sekitar kawasan konservasi. Mengingat hal tersebut, Balai Taman Nasional Wasur dan pihak-pihak terkait lainnya telah dan terus berupaya dalam peningkatan dan pemberdayaan tata ekonomi rakyat khususnya pada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan melalui program-program pengembangan ekonomi masyarakat desa hutan yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah setempat. Upaya yang telah dan terus dilakukan Balai TN. Wasur dan Yayasan Wasur Lestari antara lain adalah usaha penyulingan minyak kayu putih, pengusahaan pondok wisata dan pemandu wisata, pengaturan perburuan satwa rusa secara tradisional.

Pembinaan dan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui Kredit Usaha Kecil (KUK) dengan bunga rendah perlu mendapat prioritas guna meningkatkan kemampuan modal kerja dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam yang sekaligus dapat memberikan kesempatan usaha dan lapangan kerja (penyulingan minyak kayu putih, lebah madu, penagkaran satwa, tanaman obat, pondok wisata maupun pemandu wisata). Hal ini merupakan tantangan yang cukup berat, mengingat dampak krisis ekonomi sudah terasa pada masyarakat luas sehingga mengakibatkan menurunnya daya beli karena hilangnya kesempatan kerja dan peningkatan penghasilan.

6. Kemitraan Lembaga Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Pembangunan Konservasi yang Belum Optimal

Kelembagaan baik dalam pemerintahan, swasta maupun masyarakat, merupakan hal yang paling sensitif dalam pengembangan dan penerapannya dan sering menjadi faktor penghambat dalam mencapai keberhasilan. Demikian pula pranata-pranata sosial yang ada dalam masyarakat juga belum berkembang dengan baik.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pembangunan Taman Nasional, perlu adanya pembinaan kemitraan lembaga yang lebih intensif dan penguatan kelembagaan berbasis (*local community base organization*) dan kelompok independen

lainnya (*stakeholders*) masyarakat yang mampu meningkatkan manfaat dari setiap hasil kegiatan dan pembangunan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di dalam dan di sekitar kawasan Taman Nasional melalui Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kader Konservasi dan lain-lain. Selain itu pembinaan kemitraan ini juga ditujukan untuk meningkatkan persamaan persepsi akan arti dan fungsi kawasan Taman Nasional, kemampuan, kepedulian dan peran serta Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian fungsi kawasan Taman Nasional baik secara ekologis, ekonomi maupun sosial serta sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan.

7. Penguatan Pihak/Kelompok Independen Terkait

Penguatan lembaga masyarakat adat (*Local CBO / community based organisation*) dan kelompok independen lainnya sebagai pihak terkait (*stakeholder*) masih lemah, Kelompok pecinta alam, kader konservasi, dll belum terbentuk.

8. Potensi Ekowisata / Ekoturisme

Taman Nasional Wasur sangat potensial untuk pengembangan ekowisata atau wisata ekologis, namun sampai saat ini fasilitas / sarana untuk mendukung hal tersebut boleh dikatakan hampir tidak ada atau sangat tidak memadai. Sarana wisata alam saat ini baru ada 3 (tiga) buah penginapan (*guest house*) dan 2 (dua) menara pengamatan.

Belum adanya investor / pengusaha menanamkan investasinya dalam pengusahaan pariwisata alam di Zona pemanfaatan Taman Nasional Wasur, sehingga potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya masyarakat kota Merauke yang sangat membutuhkan tempat rekreasi yang bernuansa alami.

9. Keterkaitan Ekologis Antara TN. Wasur dan Tonda WMA

Taman Nasional Wasur (Wasur National Park) dan Tonda *Wildlife Management Area* (Tonda WMA), sama-sama berada pada Trans-Fly Region sehingga memiliki kesamaan sistem ekologi antara lain dalam aspek biodiversity. Permasalahan ekologi di Taman Nasional Wasur juga merupakan masalah di Tonda WMA. Apabila terjadi perubahan pada salah satu kawasan, akan mempengaruhi ekosistem kawasan lainnya.

C. Kendala

1. Aksesibilitas Kawasan Yang Relatif Sulit Terjangkau

Kawasan konservasi pada umumnya terletak di daerah yang jauh dari fasilitas/sarana prasarana umum dan infra struktur yang tersedia. Demikian pula Taman Nasional Wasur juga masih relatif sulit terjangkau baik dari ibukota propinsi maupun kabupaten (untuk beberapa lokasi). Ketersediaan sarana prasarana jalan maupun angkutan umum serta sarana prasarana penunjang kegiatan lain (pengamatan, penelitian dan pariwisata alam) juga masih terbatas. Rendahnya aksesibilitas ini erat kaitannya dengan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada umumnya masih dipengaruhi oleh mekanisme ekonomi masyarakat yang masih bersifat subsisten.

2. Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Konservasi Masih Rendah

Kerusakan/penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam lebih besar disebabkan oleh faktor manusia. Masih adanya beberapa kelompok atau anggota dan sebagian kecil masyarakat/aparat pemerintah yang masih belum memahami peranan dan fungsi kawasan baik untuk tujuan pemanfaatan, pengawetan maupun pelestarian. Peran serta aktif masyarakat dalam memelihara kelestarian fungsi dan mutu lingkungan masih belum tersebar luas. Dengan kata lain, pemahaman konservasi masih belum membudaya dalam kehidupan masyarakat.

Keterbatasan persepsi terhadap esensi pembangunan konservasi ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan ekonomi jangka pendek menjadi lebih menonjol dibanding pemenuhan kebutuhan jangka panjang. Selain itu, gerakan swadaya masyarakat dalam penanganan sumber daya alam masih belum kuat karena belum sepenuhnya didukung oleh kekuatan organisasi, pranata sosial, pengetahuan dan teknologi yang memadai, dan justru lebih menonjol kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang bersifat destruktif terhadap kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

3. Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat yang Masih Rendah

Kondisi ekonomi sosial masyarakat khususnya yang berada di dalam /di sekitar Taman Nasional Wasur, umumnya masyarakat yang tergolong prasejahtera yang disertai dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah pula dengan pola kehidupan yang

masih subsisten. Di sisi lain beberapa kebijakan pelaksanaan pembangunan masih belum sepenuhnya memberikan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keadaan inilah yang dalam kenyataannya sering menimbulkan tekanan dan gangguan terhadap keutuhan kawasan. Hal tersebut akan memberikan peningkatan dampak negatif, mengingat tenaga kehutanan yang tersedia baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih terbatas dan sarana prasarana penunjang lainnya masih belum memadai.

4. Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat (membakar rumput) di Dalam Kawasan

Salah satu kebiasaan masyarakat yang berada di dalam /di sekitar Taman Nasional adalah membakar rumput pada musim kemarau. Pembakaran rumput ini mempunyai tujuan memudahkan dalam perburuan rusa secara tradisional, dimana dengan terbakarnya rumput yang tinggi akan meningkatkan jarak pandang dalam berburu rusa dan menghambat pertumbuhan semak/perdu lain yang kompetitif dengan rumput sebagai pakan kanguru dan rusa. Salah satu hal yang kurang menguntungkan dalam kebiasaan pembakaran ini adalah apabila pembakaran tersebut kurang memperhatikan aspek alam lain seperti kecepatan dan arah angin, pergantian musim hujan/kemarau, tingkat pertumbuhan perdu/semak yang ada serta tehnik/pola pembakaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Namun demikian apabila pembakaran rumput yang menjadi kebiasaan masyarakat tersebut dapat dibina dan diarahkan dengan memperhatikan aspek-aspek lain yang bersifat konservatif, dapat memberikan manfaat ganda baik dalam menghambat pertumbuhan perdu/semak yang mendesak padang rumput sebagai pakan kanguru dan rusa maupun dalam mencegah meluasnya kebakaran yang biasa terjadi pada puncak musim kemarau.

5. Terdesaknya Jenis Endemik oleh Flora Fauna Eksotik

Salah satu potensi khas di Taman Nasional Wasur adalah kanguru yang bahan pakan utamanya rumput. Keadaan rumput di dalam kawasan Taman Nasional Wasur saat ini semakin terdesak dengan populasi pohon bush (*Melaleuca spp*) yang berkembang relatif cepat dan tahan kekeringan. Dengan semakin meningkatnya populasi pohon bush tersebut di dalam dan di sekitar padang rumput, dikhawatirkan akan semakin mendesak keberadaan padang rumput sehingga dapat mengurangi daya dukung kawasan dan mengancam kelangsungan hidup populasi kanguru.

Taman Nasional Wasur saat ini sudah cukup banyak jenis-jenis flora fauna eksotik yang sengaja maupun tidak sengaja telah di introduksi ke dalam kawasan. Jenis flora fauna tersebut antara lain, enceng gondok, putri malu, rumput siam, rumput ekor tikus, ikan betik, ikan gabus Toraja, sapi maupun rusa. Agresivitas jenis-jenis eksotik tersebut umumnya cukup tinggi, sehingga di khawatirkan akan mendesak jenis-jenis endemik dan bahkan menurunnya/hilangnya keanekaragaman hayati di dalam kawasan ini apabila tidak ada upaya pengendalian antara lain secara agen hayati, mekanis dan kimia (ramah lingkungan).

D. Peluang

1. Lokasi Taman Nasional Wasur Yang Strategis

Letak geografis Taman Nasional Wasur yang strategis pada jalur perdagangan dunia, memberikan peluang memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dan pangsa pasar hasil hutan khususnya di kawasan Asia Pasifik. Begitu pula letak geografis di daerah tropis dengan curah hujan dan sinar matahari yang cukup akan mendorong pertumbuhan tanaman yang cukup baik. Selain itu, pada Balai Taman Nasional Wasur telah terjalin hubungan kerjasama tripartit antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia dan Papua New Guinea dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional yang saling menguntungkan, yang kesemuanya ini tak terlepas pula dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya baik dalam rangka perlindungan, pengawetan dan pelestariannya maupun pemanfaatan dalam arti ekonomis. Pada masa sekarang ini, terdapat kecenderungan masyarakat untuk kembali ke alam (*back to nature*).

Dengan adanya kerjasama tripartit tersebut di atas, letak geografis yang menguntungkan, semakin meningkatnya industri pariwisata serta berkembangnya informasi global, maka pemanfaatan Taman Nasional khususnya dalam jasa lingkungan dan kepariwisataan alam (*ecotourism*) mempunyai prospek yang menggembirakan, dengan tidak mengesampingkan aspek perlindungan dan pengawetan.

2. Keragaman Potensi Sumber Daya Alam yang Tinggi

Potensi daya alam (flora-fauna dan ekosistem) baik dalam jumlah dan keanekaragaman jenis yang tinggi seperti yang telah disebutkan di muka, memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat di dalam maupun di luar negeri. Potensi sebagai sumber plasma nutfah, selain potensial dalam mempertahankan kondisi lingkungan hayati secara lestari, juga sangat potensial untuk dikembangkan. Hal tersebut akan lebih menguntungkan terlebih adanya kecenderungan masyarakat untuk lebih mengutamakan komoditi hasil alami dan disamping itu, juga merupakan peluang untuk memenuhi diversifikasi produk hayati baik untuk penyediaan bahan makanan, obat-obatan dan berbagai komoditas lain yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan negara.

3. Partisipasi Aktif Lembaga Swadaya Masyarakat

Sesuai dengan pasal 4 undang-undang No. 5 tahun 1990 bahwa, pembangunan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Demikian pula peran serta aktif masyarakat sangat diperlukan guna peningkatan kualitas sumber daya alam, pemanfaatan serta pelestariannya sehingga sumber daya alam dapat sebagai pendukung salah satu fungsi sistem penyangga kehidupan.

Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni WWF Merauke yang selama ini ikut berperan aktif dalam pengembangan pengelolaan Taman Nasional Wasur khususnya dalam meningkatkan peran serta aktif masyarakat maupun dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan Taman Nasional Wasur, dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan Taman Nasional khususnya dalam memantapkan program pengentasan kemiskinan.

4. Semakin Mantapnya Pengalaman dan Sistem Kelembagaan Kehutanan

Pengalaman yang telah dimiliki oleh petugas dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di dalam kawasan konservasi, memberikan peluang yang sangat berharga dalam merumuskan dan mengembangkan pola dan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang berkelanjutan dimasa mendatang. Tradisi dan budaya serta kearifan masyarakat yang berada di dalam/di sekitar kawasan Taman Nasional, dapat pula

dimanfaatkan untuk mengelola, memanfaatkan dan mengamankan serta melestarikan segala potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada di dalam Taman Nasional. Hal ini erat kaitannya dalam mendukung pelaksanaan, pengelolaan kawasan Taman Nasional secara lestari, yang sekaligus dapat sebagai sarana interaksi kepada masyarakat di alam dan di sekitar kawasan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

5. Kemauan Politis Dalam Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Adanya kemauan politis dari pemerintah yang mengarah pada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pengembangan industri kecil/koperasi dapat mendorong percepatan upaya-upaya konservasi sumber daya alam maupun peningkatan pendapatan masyarakat di dalam/di sekitar kawasan khususnya dalam zona-zona pemanfaatan tradisional di dalam Taman Nasional.

Semakin disadarinya pembangunan berwawasan lingkungan yang berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dan didukung dengan peraturan perundangan yang berlaku, meningkatnya pendidikan dan pengetahuan serta iklim keterbukaan, maka akan memberikan peluang terhadap pencapaian pelaksanaan pembangunan konservasi sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Demikian pula dengan semakin disadarinya arti penting hutan, tanah dan air baik oleh aparat pemerintah dan masyarakat akan memberikan peluang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha konservasi sehingga gangguan dan tekanan terhadap keberadaan sumber daya alam semakin berkurang dan upaya pemanfaatan yang lestari dan pelestarian yang bermanfaat sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

6. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, yang semakin meningkat akses masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap mutu lingkungan hidup dan sumber daya hutan, tanah dan air sehingga hal ini merupakan peluang yang cukup besar dalam meningkatkan pembangunan/pengelolaan TN. Wasur. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia khususnya peneliti kehutanan, fasilitas dan sarana prasarana penelitian dan pengembangan kehutanan maupun kegiatan dan hasil-hasil

penelitian dapat lebih mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan mutu lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat luas. Demikian pula dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat pula menggali pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya untuk mendapatkan hasil komoditas baru baik dalam bentuk barang maupun jasa lingkungan.

7. Adanya Institusi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Di Propinsi Irian Jaya, terdapat institusi Balai Latihan Kehutanan dan Perkebunan (BLK) Manokwari yang dapat dimanfaatkan sebagai sentra pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan dapat melaksanakan tugas di lapangan secara profesional. Kerjasama tripartit dengan pemerintah Australia dan Papua New Guinea dalam pengelolaan tiga kawasan konservasi Kakadu NP dan Tonda WMA, Taman Nasional Wasur dapat pula dimanfaatkan untuk saling tukar menukar informasi dan menimba pengalaman dalam pengelolaan Taman Nasional Wasur sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.

8. Meningkatnya Pengawasan Internal / Eksternal

Pola dan kualitas pengawasan semakin meningkat baik secara internal dan eksternal maupun pengawasan dari masyarakat yang merupakan bagian dari proses manajemen, dapat sebagai pendorong dalam peningkatan efisiensi pencapaian sasaran pembangunan. Adanya pengawasan yang disertai manajemen organisasi, sumber daya manusia serta dukungan sarana prasarana yang memadai, diharapkan dapat tercapai upaya pembangunan konservasi sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

VI. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab-Bab terdahulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Prospek dan kontribusi Taman Nasional Wasur bagi pembangunan daerah sesuai dengan fungsi dan perannya meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

Ekologis: antara lain menunjang stabilitas iklim mikro, menjaga keseimbangan ekosistem dan sumber daya gene / gene bank (future value), sebagai contoh manfaat ekologi bagi iklim antara lain: mengurangi pemanasan global (global warming), efek rumah kaca (green house effect) , supply oksigen, pengendalian banjir (flood control), pencegahan erosi, pengendalian erosi, pollution control , melindungi biodiversity serta sebagai

Sosial Ekonomi: antara lain kesinambungan mata pencaharian, budaya, norma sosial dan pendidikan.

Budaya: antara lain perlindungan daerah-daerah sakral, (upacara adat) dan laboratorium budaya bagi 4 (empat) suku asli di dalam Taman Nasional Wasur.

2. Nilai Strategis Konservasi: antara lain keterkaitan ekologis antara Taman Nasional Wasur dan Tonda Wildlife Management Area di PNG, Taman Perdamaian dan Situs Ramsar.
3. Pemanfaatan kawasan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sosial ekonominya meliputi aspek-aspek :
 - a. Penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, antara lain meliputi kegiatan-kegiatan: Pemanfaatan kawasan lebih dititikberatkan untuk memberikan bekal pendidikan dan pemahaman akan arti penting konservasi sumber daya alam dan lingkungan, baik kepada anak sekolah maupun masyarakat umum, sarana penelitian dan budidaya / penangkaran dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
 - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, meliputi kegiatan-kegiatan : Pariwisata alam dan rekreasi; Rawa biru sebagai sumber air bersih utama bagi masyarakat kota Merauke dan juga sebagai sumber penghasil pangan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan; Penyulingan minyak kayu putih; Koperasi; Penginapan (guest house); Agroforestry; Agrofisery; Penangkaran rusa; pemanfaatan hasil hutan dan kebun, karcis masuk kawasan
4. Nilai Manfaat Lainnya

Kontribusi / nilai manfaat lain yang diberikan oleh Taman Nasional Wasur, yang belum dapat terukur pada saat ini adalah: pengatur iklim mikro kota Merauke dan sekitar Taman Nasional Wasur, Pengendali siklus udara (penyerapan karbon dioksida dan suplai / produksi oksigen, Menyimpan banyak sumber genetik / plasma nutfah (gene resources) yang mempunyai nilai masa depan (future value).

B. Saran / Rekomendasi

1. Perlu adanya kebijaksanaan pengaturan pemanfaatan sumber daya alam flora dan fauna khususnya di zona pemukiman / budidaya desa dan zona pemanfaatan intensif, antara lain pemberian / pelimpahan kewenangan dari Pusat ke Daerah yang ditetapkan dalam suatu PERDA.
2. Perlu adanya penilaian ekonomi sumber daya Taman Nasional Wasur yang meliputi nilai guna langsung, nilai guna tidak langsung, nilai masa depan dan nilai manfaat non konsumtif. Hal tersebut seyogianya dapat dilakukan oleh pihak konsultan profesional pada bidang tersebut dengan kerjasama dengan Balai Taman Nasional Wasur dan pihak / lembaga yang terkait di daerah.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan baik pengelola kawasan maupun masyarakat pemilik dusun / hak ulayat di dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional Wasur. Pendidikan dan pelatihan dimaksud merupakan salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dan prioritas secara sungguh-sungguh, sehingga tujuan pengelolaan Taman Nasional Wasur dapat terwujud sesuai yang diharapkan.

Prospek dan Kontribusi TN Teluk Cenderawasih Terhadap Pembangunan Daerah

Oleh:
Ir. Minto Basuki¹

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Irian Jaya merupakan wilayah biogeografis terbesar ketiga di Indonesia, dengan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistem baik di darat maupun perairan yang cukup besar. Sebagai upaya penyelamatan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya di Propinsi Irian Jaya, pemerintah telah menetapkan sebagian kawasan hutan dan atau kawasan perairan menjadi kawasan konservasi.

Berdasarkan data Statistik Kehutanan Propinsi Irian Jaya Tahun 1995/1996, di Propinsi Irian Jaya tercatat telah ditetapkan kawasan konservasi seluas 13.561.990,02 ha yang terdiri dari kawasan cagar alam 7.585.739,66 ha, suaka margasatwa 2.490.857,00 ha, taman wisata alam 274.599,02 ha, dan taman nasional 3.215.000,00 ha serta hutan lindung 11.082.480,00 ha. Salah satu Taman Nasional (TN) yang telah ditetapkan adalah Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC).

Taman Nasional sebagai salah satu bentuk kawasan konservasi, mempunyai fungsi dan peranan yang paling lengkap bila dibandingkan dengan bentuk kawasan konservasi lainnya. Taman Nasional mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Setiap TN mempunyai nilai yang tinggi dalam bentuk keanekaragaman hayati, keunikan dan kelangkaannya serta dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung.

¹ Kepala Balai TN Teluk Cenderawasih, Irian Jaya

Manfaat tersebut antara lain adalah sebagai sumber plasma nutfah guna menunjang budidaya tumbuhan dan satwa, serta sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, pariwisata dan rekreasi.

Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) sebagai salah satu TN yang berada di Propinsi Irian Jaya (Wilayah Timur Indonesia) mempunyai keunikan dan peranan yang sangat strategis.

Keunikan kawasan ini adalah adanya keanekaragaman sumber daya hayati laut dan daratan pulau yang cukup tinggi. Keanekaragaman jenis satwa yang tercatat di dalam kawasan TNTC, antara lain : Coral (karang) 200 jenis, Ikan 355 jenis, Moluska 153 jenis, Reptil 5 jenis, Mamalia air 2 jenis, dan Aves 37 jenis serta terdapat 46 jenis vegetasi daratan pulau, mulai dari vegetasi hutan pantai sampai vegetasi hutan pegunungan daratan pulau (ketinggian 467 m).

Sedangkan strategis karena kawasan ini berada pada salah satu kawasan yang cukup berperan dalam pembangunan Biak sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi terpadu (KAPET). Selain itu dengan adanya rencana pemekaran Propinsi di Irian Jaya menjadi lebih dari 1 (satu) propinsi dimana Kota Manokwari telah terpilih sebagai alternatif salah satu ibukota propinsi, sehingga menjadikan kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih mempunyai peran yang sangat penting dilihat dari aspek ekologis, sosial budaya dan sosial ekonomi.

B. Kebijakan Pembangunan Wilayah

Kebijakan dan strategi pembangunan kawasan konservasi harus selaras dengan kebijaksanaan pengembangan tata ruang wilayah, sehingga tumpang tindih (*Overlapping*) fungsi dan peruntukan kawasan dapat dihindarkan. Dalam hal ini kebijaksanaan pembangunan di Daerah Tingkat II didasarkan pada pembagian wilayah pembangunan yang mengutamakan pencapaian keseimbangan pembangunan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya.

Berdasarkan kebijakan dan rencana tata ruang Kabupaten Dati II Manokwari dan Nabire, wilayah Kecamatan Ransiki, Windesi dan Wasior sebagai daerah pendukung Taman Nasional Teluk Cenderawasih termasuk wilayah pembangunan III dan IV, ketiga wilayah

kecamatan tersebut memiliki potensi pengembangan untuk pertanian tanaman pangan, perikanan, pertambangan (Granit, Nikel, Gas Alam Cair, Petrokimia), kehutanan, perkebunan, transmigrasi dan pariwisata. Di samping itu dalam rencana struktur tata ruang Propinsi Irian Jaya, menetapkan pula Wasior dan Lembah Isim di Ransiki sebagai kawasan andalan untuk pembangunan perkebunan dan peternakan serta sebagai kawasan lindung.

Oleh karena itu kebijaksanaan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar peningkatan aksesibilitas dan prasarana dasar (Transportasi, Pengentasan kemiskinan dan Pariwisata), di samping tetap memperhatikan adanya kelestarian kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana telah ditetapkan melalui PERDA No. 11 Tahun 1994 tentang RUTR.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran dan informasi yang berkaitan dengan prospek pengelolaan dan pengembangan kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih pada saat ini dan masa yang akan datang serta untuk mengetahui seberapa besar kontribusinya terhadap pembangunan daerah di Irian Jaya khususnya Kabupaten Dati II Manokwari dan Kabupaten Dati II Nabire serta daerah sekitarnya.

II. Keadaan Umum Kawasan

A. Umum

Kawasan TNTC ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 472/Kpts-II/1993 seluas 1.453.500 ha dan merupakan TN Laut (perairan) yang terluas di Indonesia.

Dari luas kawasan tersebut terbagi ke dalam luas daratan 68.200 ha, terdiri dari :

- Pesisir pantai : 12.400 ha (0,9 %)
- Daratan pada pulau-pulau : 55.800 ha (3,8 %)

Serta lautan seluas 1.385.300 ha yang terbagi kedalam :

- Terumbu karang : 80.000 ha (5,5 %)
- Lautan : 1.305.300 ha (89,8 %)

Kawasan TNTC terletak membentang dari arah timur semenanjung Kwatisore sampai ke utara di bagian atas P. Rumberpon dan meliputi sekitar 500 km garis pantai Pulau Induk Irian Jaya dengan terumbu karangnya. Mencakup pula daerah pesisir pantai dan terumbu karang pulau Wairundi, serta ke – 18 buah pulau dalam rangkaian kepulauan Auri.

Secara geografis TNTC terletak pada koordinat 01°43' – 03°22' Lintang Selatan dan 134°06' – 135°10' Bujur Timur. Sedangkan secara administratif pemerintahan kawasan TNTC terletak pada dua wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Dati II Manokwari meliputi 3 kecamatan (Ransiki, Windesi dan Wasior) dan Kabupaten Dati II Nabire dengan 1 kecamatan (Kwatisore). Untuk lebih jelasnya kawasan TNTC berdasarkan pembagian luas wilayah Kabupaten Dati II, sebagaimana tersaji pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Luas dan Letak TNTC berdasarkan wilayah Kabupaten Dati II dan Sub Seksi Wilayah Konservasi (SSWK)

No	Kabupaten Dati II	Luas Wilayah Sub Seksi Wilayah Konsevasi			Jumlah (Ha)
		Yambekiri	Wasior	Kwatisore	
1	2	3	4	5	6
1.	Manokwari	432.031,25	571.175,25	-	1.003.188,50
2.	N a b I r e	-	-	450.311,50	450.311,50
	J u m l a h	432.031,25	571.175,25	450.311,50	1.453.500,00

Batas wilayah TNTC secara garis besar adalah sebagai berikut: Bagian Utara, perpotongan lurus dari arah barat desa kecamatan Ransiki mengarah kesebelah timur yang berbatasan langsung dengan titik perpotongan batasan timur (Selatan – Utara) dengan kabupaten Yapen Waropen, Bagian Timur, tegak lurus dari arah selatan desa Sima, kecamatan Kwatisore (Kabupaten Nabire) mengarah ke perairan utara berbatasan langsung dengan wilayah laut kabupaten Yapen Waropen sampai pada titik pertemuan perpotongan lurus dari arah barat, Bagian Selatan dan Barat berbatasan dengan Pulau Induk Irian.

B. Keanekaragaman Hayati

Ekosistem

Potensi kawasan TNTC berdasarkan tipe ekosistemnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Ekosistem hutan tropis daratan pulau.
- b. Ekosistem hutan mangrove.
- c. Ekosistem hutan pantai.
- d. Ekosistem padang lamun.
- e. Ekosistem terumbu karang.

Flora

Keanekaragaman ekosistem di dalam kawasan menjadikan kawasan TNTC sebagai habitat berbagai jenis tumbuhan dan satwa baik yang terdapat di darat maupun di perairan. Tercatat terdapat 46 jenis vegetasi daratan pulau, mulai dari vegetasi hutan pantai sampai vegetasi hutan pegunungan daratan pulau (ketinggian 467 m) antara lain beberapa jenis tumbuhan bakau (*Avicenia spp*, *Rhizophora spp*, *Bruguiera sp*), *Barringtonia spp*, nipah (*Nypa fructican*), sagu (*Metroxylon sago*), pandan (*Pandanus sp*), cemara pantai (*Casuarina equisetifolia*), ketapang (*Terminalia catapa*), *Xylocarpus granatum* dan lain-lain.

Terumbu Karang dan Ikan

Potensi terumbu karang di kawasan TNTC tercatat sebanyak 200 jenis terdiri dari 67 genera dan sub genera dan 183 jenis karang scleractinia yang tersebar pada 18 tepi pulau baik pulau besar maupun kecil. Persen penutupan karang berbeda untuk setiap lokasi dan dipengaruhi antara lain oleh tingkat intervensi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Balai Penelitian Kehutanan Manokwari (1998), bahwa persentase penutupan karang hidup pada 10 stasiun pengamatan di kawasan TNTC adalah antara 30,40 % - 65,64 %.

Ekosistem terumbu karang di TNTC pada umumnya terbagi menjadi dua zona yaitu zona rata-rata terumbu (*reef flat*) dan zona lereng terumbu (*reef slope*). Pada zona rata-rata terumbu pada sisi yang dekat garis pantai (daerah intertidal) hanya didominasi oleh substrat pasir dan lamun.

Kawasan TNTC juga mempunyai keanekaragaman jenis ikan yang sangat tinggi, termasuk jenis ikan muara, ikan hutan mangrove, ikan karang dan ikan-ikan pelagic dan suku-suku penting secara ekonomis.

Moluska

Keanekaragaman sumber daya laut lain yang terdapat di TNTC adalah dari jenis Molusca. Tercatat terdapat 153 jenis moluska di TNTC. Jenis yang sangat penting adalah moluska katup ganda dari famili Tridacnidae (kima/kerang raksasa). Tercatat ada enam species kima yang bisa dijumpai di kawasan TNTC, yaitu kima raksasa (*Tridacna gigas*), kima selatan (*Tridacna derasa*), kima sisik (*Tridacna squamosa*), kima besar (*Tridacna maxima*), kima lubang (*Tridacna crocea*) dan kima pasir (*Hipopus hipopus*). Jenis-jenis lain yang bisa dijumpai adalah keong cowries (*Cypraea spp*), keong strombidae (*Lambis spp*), dan keong kerucut (*Conus spp*), triton terompet (*Charonia tritonis*), kepala kambing (*Cassis cornuta*) dan lola (*Trochus niloticus*).

Satwa lainnya

Jenis satwa lain yang dapat dijumpai di kawasan TNTC antara lain jenis reptil 5 jenis, mamalia air 2 jenis, dan aves 37 jenis. Jenis reptil yang dapat dilihat yaitu penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyu hijau (*Chelonia mydas*) kadang-kadang dapat dijumpai pula penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*) dan penyu belimbing (*Dermochelys imbricata*). Duyung (*Dugong dugon*) dan ketam kelapa (*Birgus latro*) dapat dijumpai pula di kawasan TNTC

C. Potensi Pariwisata

Kawasan TNTC mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik wisata alam. Selain potensi flora-fauna, kawasan TNTC terdapat beberapa tempat yang telah dihuni oleh penduduk asli yang mempunyai keanekaragaman sejarah, budaya dan adat istiadatnya merupakan obyek dan daya tarik wisata yang perlu dikemas dan dikembangkan. Kegiatan wisata yang sangat menonjol yang dapat dikembangkan di kawasan TNTC adalah kegiatan wisata bahari antara lain diving (menyelam), snorkling, fotografi bawah air, wisata pantai dan memancing ikan.

D. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Di dalam kawasan TNTC terdapat lebih kurang 25 gugus pulau. Dari beberapa pulau yang relatif besar tersebut telah dihuni oleh masyarakat asli Irian Jaya antara lain P. Rumberpon, P. Roon, P. Mioswaar, dan P. Yoop.

Penduduk dalam kawasan TNTC tersebar di empat wilayah Kecamatan yang termasuk dalam dua kabupaten dan terdiri dari \pm 30 desa, dengan jumlah penduduk tidak kurang dari 28.000 jiwa. Dalam satu desa biasanya terdiri dari 2 sampai 3 kampung. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk kampung-kampung ini telah dimekarkan menjadi desa baru.

Desa-desanya di dalam kawasan TNTC ini yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pengelolaan kawasan. Desa-desanya ini tersebar sepanjang pesisir pantai daratan rendah sampai pegunungan.

Desa-desanya yang berada di dataran rendah dan pantai sebanyak 27 desa sedangkan sisanya di daerah pegunungan. Desa-desanya yang berada di pantai umumnya berada di tepi pantai sepanjang pesisir kawasan taman nasional ini.

Penduduk di dalam kawasan ini mendiami desanya secara turun-temurun, sebelum ditetapkan sebagai kawasan taman nasional. Mata pencaharian masyarakat desa setempat ini sebagian besar sangat tergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sebagian besar desa-desanya tersebut adalah desa miskin, dan termasuk dalam pembinaan pemerintah dari program IDT.

III. Prospek dan Kontribusi Taman Nasional Teluk Cenderawasih Terhadap Pembangunan Daerah

Tujuan dari penetapan Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) adalah untuk melindungi proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan, mengawetkan jenis flora, fauna dan ekosistem yang ada di kawasan taman nasional serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, kegiatan penunjang budidaya, serta kepariwisataan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Yang secara keseluruhan merupakan aset pembangunan yang diarahkan pada sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

Didasarkan pada potensi sumber daya alam hayati dan ekosistem kawasan TNTC serta letak geografisnya dan sejalan dengan kegiatan pembangunan di daerah maka pengembangan pengelolaan TNTC mempunyai prospek yang cukup baik serta memberikan kontribusi yang

tidak kecil terhadap pembangunan daerah Irian Jaya, khususnya Kabupaten Dati II Manokwari dan Kabupaten Dati II Nabire dan daerah disekitarnya.

Dengan pengkajian yang seksama terhadap seluruh aspek sumber daya yang ada dan berdasarkan pada azas konservasi diharapkan arah pengembangan kawasan khususnya pada aspek pemanfaatan dapat dilaksanakan secara lestari dan berkesinambungan.

Melalui pendekatan prinsip konservasi, prospek pengembangan kawasan TNTC memiliki keunggulan dalam menunjang pembangunan regional maupun nasional.

A. Peluang

1. Aspek Sumber Daya Alam (Ekologis)

Taman Nasional Teluk Cenderawasih memiliki kekayaan potensi sumber daya alam yang tinggi guna mewakili kawasan konservasi laut di Indonesia khususnya Indonesia Bagian Timur. Beberapa aspek sumber daya alam tersebut antara lain sebagai berikut:

- Taman Nasional Teluk Cenderawasih memiliki lima tipe ekosistem dan potensi Terumbu Karang dengan lima tipe pertumbuhan, yaitu Terumbu Karang Patahan (Fringing Reef), Terumbu Karang Penghalang (Barrier Reef), Terumbu Karang Cincin (Atol), Terumbu Karang Rataan (Flat Reef), dan Terumbu Karang Perairan Dangkal (Shallow Water Reef), dengan prosentasi penutupan baik 70% terdiri dari 67 genera dan 145 jenis karang *Scleractinia* yang dapat dijumpai hingga kedalaman 50 meter, secara ekologis merupakan daerah penyangga bagi kawasan pesisir pulau induk Irian, terutama di Teluk Cenderawasih serta merupakan potensi yang dapat diunggulkan untuk tujuan wisata bahari.
- Kawasan perairan ini juga memiliki daya tarik khusus pada biota laut, seperti Lumba-lumba (*Dolphinus dolphin*), Duyung (*Dugong dugon*), Penyu Sisik (*Eretmocelys imbricata*) dan Penyu hijau (*Chelonia mydas*), Paus biru (*Balaenoptera musculus*), Kima raksasa (*Tridacna gigas*), Kepala kambing (*Chasis cornuta*), Triton (*Charonia tritonis*) dan biota laut lainnya.
- Dalam aspek ekonomi kawasan ini merupakan penghasil ikan yang secara ekonomis penting bagi daerah Irian Jaya pada umumnya. Jenis-jenis ikan yang dihasilkan antara

lain Kerapu, Kakap, Napoleon, Cakalang, Tuna, Tongkol, Udang, Teripang, Ikan puri dll.

- Daerah pesisir pantai, khususnya pada pulau-pulau yang berjumlah ± 25 buah memiliki potensi berupa hutan daratan kepulauan yang merupakan habitat berbagai jenis satwa burung, seperti dara laut (*Ripidura sp*), burung gosong (*Megapodius Sp*), elang (*Haeliactus sp*), junai mas (*Chaleonas nicobarica*), pelican (*Pelecanus conspiculatus*), bebek laut (*Esacus sp*), dan beberapa jenis burung paruh bengkok lainnya. Lantai hutan kepulauan dan pantai berpasir putih selain menjadi habitat bagi ketam kenari (*Birgus latro*), biawak/soa-soa (*Varanus sp*), juga merupakan tempat bagi peneluran penyu.
- Kawasan hutan mangrove sebagai salah satu habitat penting dalam kelangsungan biologis dan ekologis, merupakan kawasan yang potensial sebagai penyangga kawasan pantai serta dapat dikembangkan sebagai obyek wisata.
- Salah satu gejala alam yang unik di kawasan taman nasional ini adalah adanya sungai dengan sumber air panas yang bermuara ke laut di Pulau Mios Waar, dalam bahasa lokal disebut “ **Warbesam** ”.

1. Aspek Sosial Budaya dan Sejarah

- Pemukiman masyarakat (*Community Village*) di kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih terbentuk sedemikian rupa, dimana perkampungan cenderung berdekatan dengan lokasi hutan sagu (*Metroxylon sago*), atau disebut “*Dusun Sagu*”. Keberadaan hutan Sagu sangat penting bagi masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional ini karena merupakan makanan pokok mereka. Kondisi ini menyebabkan pola pemanfaatan lahan yang terpusat pada beberapa pulau tertentu sehingga beberapa pulau di kawasan ini tidak berpenghuni, seperti *P. Anggrameos*, *P. Abaruki*, *P. Maransabadi*.
- Kawasan Teluk Cenderawasih memiliki peninggalan sejarah penting bagi perkembangan agama Nasrani, dimana di salah satu desa di Pulau Roon sampai saat ini masih dapat dijumpai makam Pendeta berkebangsaan Jerman G.L Bink, yang pertama kali membawa ajaran kristen dan peninggalan lainnya berupa bangku tua dan kitab injil tahun 1885.

- Perang Dunia II (Pacific War) yang bersejarah, antara Jepang dan Sekutu meninggalkan saksi bisu berupa sisa-sisa bom, dan kerangka pesawat tempur yang sampai saat ini masih dapat dijumpai di perairan sekitar Pulau Rouw dan Maransabadi.
- Budaya masyarakat yang masih asli dapat menjadi aset wisata yang menarik, seperti upacara peresmian perahu di P. Rumberpon, Parade musik tiup di P. Roon. Keterikatan masyarakat terhadap adat istiadat yang masih kuat merupakan ciri khas kawasan Taman Nasional ini.

B. Ancaman.

Sebagai kawasan perairan yang terbuka dan berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik, maka ditinjau dari berbagai aspek, kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih mempunyai posisi rawan terjadinya gangguan kawasan. Bentuk-bentuk gangguan yang dapat membahayakan keseimbangan ekologis kawasan ini antara lain :

1. Aspek Pemanfaatan

- Pemanfaatan perairan yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih sebagai jalur Pelayaran lokal (perintis), Nasional dan Internasional menimbulkan dampak negatif yang bersumber dari pembuangan limbah (sampah, air ballas dll) ke perairan di sekitarnya.
- Masuknya kapal-kapal penangkap ikan dari luar dan percepatan produksi industri perikanan, dikhawatirkan akan menimbulkan eksploitasi secara berlebihan yang tidak sesuai dengan daya dukung sumber daya perikanan yang ada. Gejala ini mulai tampak dari hasil monitoring di kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih Tahun 1998, dimana populasi biota laut jenis Teripang (*Holothuridae*) dan Lobster (*Panulirus sp*) saat ini telah mengalami penurunan yang mengkhawatirkan dibanding hasil monitoring pada tahun sebelumnya (1985).
- Pemanfaatan dengan menggunakan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), Potasium Sianida, Bom sampai saat ini masih menjadi pilihan oleh beberapa pengusaha perikanan dan masyarakat. Aktifitas demikian dikhawatirkan akan dapat berpengaruh negatif

terhadap kelestarian biologis dan ekologis kawasan ini serta dapat menghilangkan nilai ekonomis kawasan.

2. Pertambahan Penduduk

- Sampai saat ini tercatat tidak kurang dari 35 (tiga puluh lima) desa yang ada di Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih (pada sebagian pulau-pulau yang relatif besar), dengan rata – rata jumlah kepala keluarga 40 KK tiap desa.
- Dari satu sisi adanya penduduk di dalam kawasan Taman Nasional tersebut merupakan potensi sumber daya yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan di daerah termasuk pengelolaan dan pengembangan taman nasional.
- Disisi lain, perkembangan jumlah penduduk dengan pola kehidupan dan mata pencahariannya yang masih sangat tergantung pada sumber daya alam di sekitarnya dikhawatirkan akan menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap daya dukung kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih.
- Pertambahan jumlah penduduk juga disebabkan adanya pendatang yang berasal dari daerah lain untuk tujuan perdagangan dan usaha penangkapan ikan.

3. Apresiasi Masyarakat

- Pemahaman masyarakat umumnya tentang kegiatan konservasi sumber daya alam masih relatif rendah, sehingga konsep sumber daya alam dalam jumlah terbatas guna memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas sering terabaikan. Akibatnya aktifitas pembangunan konservasi sumberdaya alam sering dilihat sebagai penghambat kelancaran pembangunan bidang lainnya.
- Sebagaimana dalam banyak kasus di kawasan Taman Nasional, karena rendahnya apresiasi masyarakat, maka tertib kunjungan dalam suatu kawasan Taman Nasional untuk berbagai maksud dan kepentingan sering diabaikan.

4. Dampak Pembangunan Lintas Sektoral

- Pembangunan lintas sektoral yang tidak dilaksanakan secara bijaksana dan terpadu dapat menjadi faktor ancaman terhadap kawasan taman nasional. Pembukaan Lahan Perkebunan dan perkembangan pembangunan di daratan dan pesisir pulau induk Irian yang merupakan daerah penyangga kawasan TNTC, dikhawatirkan dapat pula mengganggu keseimbangan ekosistem kawasan.

C. Hambatan

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih antara lain:

- Sumber daya manusia yang masih belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitasnya dibandingkan dengan luas kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih seluas 1.453.500 ha dimana 90% merupakan kawasan perairan (lautan) yang pada prinsipnya memerlukan tenaga dengan kualifikasi khusus (Tenaga mekanis, Penyuluh, dan Teknisi).
- Letak kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih secara geografis merupakan kawasan laut terbuka dan berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik. Posisi pulau-pulau sangat terpencil sehingga menjadi kendala dalam aspek pengawasan dan pengamanan kawasan. Selain itu dengan belum adanya penataan batas kawasan masih sering ditemui adanya tumpang tindih berbagai aspek kepentingan dengan sektor lain terhadap kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih.
- Masih terbatasnya sarana pendukung pengelolaan, menjadi bagian penting dalam menghambat kinerja Balai Taman Nasional Teluk Cenderawasih, antara lain karena belum adanya bangunan Kantor Pusat Pengelola, dan Perumahan Pegawai, Kantor Sub Seksi Konservasi, terbatasnya Pondok Kerja, Pondok Jaga dan sarana pengelolaan lainnya.
- Terbatasnya sarana komunikasi dan mobilitas petugas di lapangan.

- Kemudahan pencapaian kawasan sangat tergantung pada sarana dan prasarana transportasi lokal (di daerah), sampai saat ini meskipun dapat dijangkau melalui jalan darat dan laut, namun masih relatif mahal khususnya bagi pengunjung maupun petugas Taman Nasional sendiri.
- Disamping prasarana jalan, Infrastruktur lainnya yang mendukung percepatan pembangunan industri wisata masih terbatas, sehingga masih menjadi kendala guna mencapai kawasan Taman Nasional.

D. Kekuatan

Faktor–faktor pendukung yang menjadi kekuatan dalam program pengembangan kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih antara lain sebagai berikut:

1. Aspirasi Masyarakat Dalam Kawasan

- Masyarakat khususnya dalam kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih memiliki peranan aktif dalam pembangunan kawasan, sejak awal pengelolaan. Kondisi demikian menjadi modal yang kuat guna pengembangan kawasan Taman Nasional sesuai dengan fungsinya.
- Kegiatan pembinaan daerah penyangga dalam bentuk bantuan peningkatan usaha perekonomian masyarakat di kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih, selain dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, juga dapat memberikan nilai tambah tentang pemahaman, persepsi dan apresiasi masyarakat terhadap konservasi sumber daya alam khususnya taman nasional.
- Pembinaan terhadap masyarakat di kawasan Taman Nasional ini telah dilaksanakan pada 5 (lima) desa di tiga Kecamatan.
 - a. Peningkatan Usaha Penangkapan Ikan pada nelayan tradisional dengan memberikan bantuan berupa mata kail, nylon, pemberat, dan pembuatan rumpon apung.
 - b. Peningkatan usaha pengolahan ikan garam dengan memberikan bantuan berupa parang, peti penggaraman, pondok plastik penjemuran, dan garam curai.
 - c. Pembinaan populasi dan budidaya dengan pembuatan kandang teripang, dan rumput laut.

- d. Kegiatan rehabilitasi lahan dilaksanakan dengan memberikan bantuan berupa bibit pohon bernilai ekonomis antara lain pinang.
- e. Pembinaan usaha pandai besi serta pengolahan minyak kelapa.

2. Kemauan Politik

- Pemerintah Daerah dalam hal ini PEMDA Dati II Manokwari dan PEMDA Dati II Nabire beserta jajarannya dari tingkat bawah, Desa, Kecamatan yang dalam wilayah kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih, berperan aktif mendukung kegiatan pengelolaan dan pembangunan kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Dalam pelaksanaan beberapa kegiatan antara lain Perencanaan (Rakorbang Taman Nasional), Pemerintah Daerah Tk II, berperan langsung dalam mengkoordinir setiap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih.
- Pemerintah Daerah melalui Kadinda dan Dinas Pariwisata, berperan aktif dalam upaya promosi dan penyebar luasan informasi tentang kondisi sumber daya alam khususnya yang berkaitan dengan aspek pariwisata. Kegiatan promosi dan informasi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional (Expo Pembangunan Irian Jaya di Darwin, Australia).
- Dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam (perikanan), Pemda Tingkat II dan Tingkat I melalui Dinas Perikanan telah memberikan pembatasan ijin penangkapan ikan/biota laut kepada para pengusaha perikanan dengan peralatan yang tidak merusak lingkungan hidup.

3. Integrasi dan Koordinasi

- Dukungan pengawasan dan pengamanan kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih sebagai kawasan wisata bahari erat hubungannya dengan kegiatan pembangunan kemaritiman oleh Angkatan Laut Republik Indonesia, beberapa kegiatan Patroli telah dilaksanakan bersama dengan Armada KALRI, POLRI dan Balai Taman Nasional serta instansi terkait lainnya.

- Di bidang penelitian, beberapa kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi antara lain, Balai Penelitian Kehutanan dan Perkebunan (Balitbanghutbun), Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi (P3O-LIPI), Faperta Uncen, serta LSM (WWF-Nabire) telah turut mendukung pengelolaan kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih.

- Bidang Pemanfaatan, pemanfaatan dalam aspek eksploitasi sumber daya perikanan dan pariwisata menjadi bagian terpenting bagi tercapainya tujuan pengelolaan kawasan Taman Nasional. Oleh sebab itu jalinan kerjasama antara pengelola Taman Nasional dengan kedua Instansi telah berlangsung, dimana beberapa kegiatan telah dilaksanakan bersama seperti Operasi Pengawasan dan Pengamanan, Pendidikan Dan Latihan Selam dan Metodologi Pengamatan Terumbu Karang (1998) serta kegiatan pembinaan masyarakat di daerah penyangga dilaksanakan bersama instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

4. Kelembagaan

- Dengan telah ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Balai Taman Nasional Teluk Cenderawasih beserta peraturan perundangan yang ada, antara lain UU No. 5 Tahun 1990, PP 18 Tahun 1997 dan peraturan perundangan lainnya akan lebih memantapkan upaya pengelolaan dan pengembangan Taman Nasional Teluk Cenderawasih dalam rangka mendukung pembangunan di tingkat daerah, regional maupun nasional.

- Dengan diberlakukannya otonomisasi di daerah sesuai UU No. 22 Tahun 1999 akan menjadikan Daerah Tingkat II menjadi sentra dan konsentrasi dari kegiatan pembangunan, dimana Taman Nasional merupakan salah satu aset yang sangat potensial bagi terwujudnya pembangunan dimaksud.

- Adanya Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) yang mantap dan pengaturan kawasan dalam sistem zonasi yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi ekologis kawasan akan memberikan peluang yang cukup baik terhadap pembangunan sektor lain di daerah.

IV. Penutup

Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih merupakan kawasan perairan (laut) dengan gugusan-gugusan pulau di dalamnya, meliputi areal seluas 1.453.500 ha yang merupakan kawasan taman nasional laut terluas di Indonesia.

Kawasan ini sangat penting secara geografis maupun karena keanekaragaman komunitas terumbu karangnya dan biota laut lainnya, antara lain beberapa jenis kima, ikan hias, ikan ekonomis, duyung, lumba-lumba serta penyu sisik dan penyu belimbing serta hutan daratan pulau yang ada di dalam kawasan.

Meskipun luas dan rendahnya aksesibilitas menuju kawasan, sumber daya lautnya banyak mengalami ancaman. Permasalahan utamanya adalah pemanfaatan yang tidak sesuai dengan azas konservasi. Kegiatan pemanfaatan ini banyak dilakukan oleh nelayan-nelayan dari luar dan telah berlangsung lama. Kegiatan pemanfaatan ini antara lain adalah penangkapan ikan dengan melakukan penyelaman, menggunakan dinamit, pukot dan racun (bahan kimia).

Selain potensi terumbu karangnya yang relatif masih bagus, di dalam kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih terdapat pulau-pulau dengan potensi sosial budaya masyarakat yang ada di dalamnya serta kondisi perairannya yang cukup bagus, dapat dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik wisata alam.

Dengan rencana dikembangkannya kota Manokwari menjadi salah satu ibukota propinsi di Irian Jaya dan telah ditetapkannya Kapet Biak, maka Taman Nasional Teluk Cenderawasih mempunyai prospek yang cukup baik serta dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di daerah utamanya pembangunan bidang kepariwisataan maupun pemanfaatan sumber daya alam lautnya. Untuk itu hendaknya setiap kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara bijaksana dan terpadu antar Pemerintah Daerah dan Sektor lain terkait.

Penerapan *Integrated Conservation And Development Project* di Taman Nasional Kerinci Seblat¹

Oleh

Ir. Wandojo Siswanto²

Ir. Amon Zamora³

Latar Belakang

Pengelolaan kawasan Kerinci Seblat dengan sistem Taman Nasional dimulai dengan Pengumuman Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982 tanggal 10 Oktober 1982 tentang Calon-calon Taman Nasional di Indonesia pada saat dilangsungkannya Kongres Taman Nasional Sedunia III di Denpasar, Bali. Pelaksanaan Kegiatan pembangunan kawasan ini dimulai pada tahun 1984, yaitu dengan dibentuknya Proyek Pembangunan TNKS yang berada di bawah koordinasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam II Tanjung Karang. Namun upaya pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat secara lebih intensif baru dimulai pada tahun 1992, yaitu dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional Kerinci Seblat yang selanjutnya diubah kembali pada tahun 1997 menjadi Balai Taman Nasional Kerinci Seblat.

Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan salah satu kawasan pelestarian alam darat terbesar di Indonesia dengan luas sekitar 1.368.000 hektar, mencakup hutan hujan dataran rendah pada ketinggian 300 m dpl, lahan basah dataran tinggi dan hutan pegunungan yang khas sampai sub alpin di puncak Gunung Kerinci pada ketinggian 3.805 m dpl. Garis batas kawasan ini mencapai lebih dari 2000 km dan termasuk ke dalam 4 wilayah Propinsi, yaitu Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Menurut pembagian wilayah kabupaten termasuk ke dalam Kabupaten Dati II Kerinci, Sarolangun Bangko dan Bungo Tebo (Jambi); Pesisir Selatan Solok dan Sawahlunto Sijunjung (Sumatera Barat); Bengkulu Utara dan Rejang Lebong (Bengkulu); Musi Rawas (Sumatera Selatan). Kondisi ini menyebabkan banyaknya variasi kebijaksanaan pembangunan daerah yang selanjutnya berdampak terhadap kelestarian kawasan TNKS yang

¹ Dipresentasikan pada Lokakarya Pembangunan Taman Nasional Indonesia Bagian Timur, Manado 24-27 Agustus 1999.

² Kepala Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Sungai Penuh.

³ Staf Teknis Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS di Sungai Penuh.

berada di wilayah kabupaten atau propinsi yang bersangkutan. Selain itu, pola penggunaan lahan pada daerah-daerah yang berbatasan dengan kawasan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Beberapa jenis penggunaan lahan tersebut antara lain hutan produksi, termasuk hutan produksi terbatas, yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH), hutan lindung, lahan pertanian (ladang, kebun, sawah), pemukiman (termasuk areal transmigrasi), areal pertambangan dan perkebunan. Berbagai pola penggunaan lahan di sekitar dan dalam “*enclave*” (Kabupaten Kerinci) taman nasional ini menyebabkan terjadinya tekanan atau dukungan yang berbeda terhadap kawasan dan sumber daya kawasan. Namun umumnya merupakan ancaman terhadap kelestarian TNKS beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan laporan lapangan pada Balai TNKS, kerusakan kawasan, khususnya akibat perambahan dan penebangan liar pada tahun 1996/1997 mencapai 28.453 ha. Pada tahun berikutnya, yaitu 1997/1998 terjadi kenaikan jumlah kerusakan kawasan yang hampir dua kali lipat, yaitu seluas 43.938 ha, namun pada tahun 1998/1999 terjadi penurunan jumlah kerusakan yang cukup tajam menjadi sekitar 6.670 ha. Walaupun data tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut, namun dapat memberikan gambaran bahwa perusakan kawasan masih akan terus berlangsung dalam tahun-tahun mendatang sepanjang pertumbuhan permintaan/kebutuhan akan lahan dan kayu masih terjadi dan belum dapat dipenuhi dari lahan budidaya.

Berdasarkan hasil pengamatan selama ini, tekanan yang terjadi terutama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan (*information*), kesadaran (*awareness*), pengakuan (*recognition*), persepsi (*perception*), penghargaan (*appreciation*), peranserta (*participation*) dan keterlibatan (*involvement*) masyarakat setempat serta pihak dan instansi terkait terhadap upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di dan dalam kaitan dengan TNKS, di samping adanya tumpang tindih (konflik) kepentingan diantara pihak terkait dan masyarakat. Dari sisi masyarakat, tekanan yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh adanya interaksi yang bersifat negatif dan telah berlangsung sejak lama dalam bentuk pemanfaatan sumber daya hayati serta kawasan/lahan. Kecenderungan interaksi negatif ini mulai tampak sejak dua puluh tahun terakhir akibat meningkatnya jumlah penduduk dan aksesibilitas sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan lahan dan sumber daya alam hayati untuk berbagai kepentingan.

Mengingat kekayaan alam yang terkandung di dalam kawasan TNKS mempunyai nilai strategis sebagai sistem penyangga kehidupan, baik di tingkat daerah, regional, nasional maupun internasional, maka dilakukan berbagai upaya untuk menselaraskan dan mengintegrasikan upaya konservasi sumber daya alam hayati TNKS ini dengan kegiatan pembangunan daerah sekitarnya.

Salah satu upaya yang mendapat dukungan dari dunia internasional adalah penerapan *Integrated Conservation and Development Program/Project* (ICDP) atau Program/Proyek Konservasi dan Pembangunan Wilayah Terpadu.

ICDP-Taman Nasional Kerinci-Seblat (ICDP-TNKS)

Tujuan

Secara konseptual, ICDP ditujukan untuk melindungi kawasan dan sumber daya alam hayati serta ekosistemnya, di samping menangani masalah utama yang berkaitan dengan kelembagaan, kebijaksanaan dan kegiatan pembangunan daerah setempat. Pendekatan yang digunakan adalah penyeimbangan antara pengelolaan taman nasional dengan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat setempat serta antara tujuan pembangunan taman nasional dengan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II terkait.

Secara khusus, pelaksanaan ICDP-TNKS ditujukan untuk melindungi keaneka-ragaman hayati TNKS dan menghentikan berlangsungnya fragmentasi habitat dengan: (a) meningkatkan perlindungan dan pengelolaan taman nasional, termasuk keterlibatan masyarakat setempat, dan (b) mengembangkan pengelolaan yang berkelanjutan dan mempertahankan keberadaan hutan di daerah penyangga yang telah dibebani HPH. Di samping itu, pengembangan model ICDP yang secara simultan melakukan upaya perlindungan keanekaragaman hayati TNKS dan kawasan lain yang berdekatan sekaligus membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan peluang berusaha yang sejalan dengan tujuan pelestarian/ konservasi taman nasional. Desain proyek diharapkan akan dapat memenuhi tujuannya dengan memperkuat kelembagaan di daerah tentang perencanaan terpadu; melaksanakan kegiatan, pemantauan dan penegakan hukum secara terkoordinasi dan berkala di tingkat propinsi dan kabupaten; membangun kemampuan kelembagaan melalui penambahan pegawai dan pelatihan; serta meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pengelolaan sumber daya dan pelayanan.

Desain

Latar belakang untuk penentuan desain dan komponen proyek didasarkan atas delapan belas Laporan Teknis yang selesai disusun pada tahun 1993 dan dilanjutkan dengan Desain Terinci/Detail. Dalam persiapan dan penyusunan desain proyek, konsultasi dengan masyarakat dan berbagai pihak terkait merupakan faktor penting. Kegiatan persiapan dimulai dengan

melakukan *Rapid Rural Appraisal* di desa-desa yang berbatasan dengan kawasan untuk menyusun profil desa, mengetahui pola penggunaan lahan dan hubungan antara masyarakat dengan taman nasional serta mendapatkan umpan balik dari pihak terkait tentang desain ICDP. Sepanjang memungkinkan kegiatan proyek akan dikembangkan dari pengetahuan dan kegiatan masyarakat setempat yang sejalan dengan upaya konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya alam hayati di dan dalam kawasan TNKS. Komponen utama dari IDCP-TNKS mencakup: (a) Pengelolaan Taman Nasional; (b) Pembangunan Wilayah dan Desa; (c) Pengintegrasian keanekaragaman hayati dalam pengelolaan HPH; (d) Pemantauan dan Evaluasi. Selain itu, juga dilakukan beberapa kegiatan pendukung, yaitu: (a) Kebijakan dan Perencanaan; (b) Pelatihan dan Fasilitasi Masyarakat; (c) Peningkatan kesadaran konservasi; dan (d) Telaahan/studi.

Komponen dan Kegiatan ICDP-TNKS

Pengelolaan Taman Nasional

Salah satu kegiatan utama dalam pengelolaan Taman Nasional adalah menyusun Rencana Pengelolaan serta Penerapannya dan zonasi TNKS. Komponen ini akan mengupayakan peningkatan perlindungan, pengelolaan, penegakkan hukum dan penyusunan rencana partisipatif melalui penguatan kelembagaan petugas taman nasional, pelatihan serta dukungan sarana dan prasarana. Selain itu, komponen ini juga akan mendukung pelaksanaan rasionalisasi batas kawasan, inventarisasi jenis, pemantauan ekologis, penelitian sosial-ekonomi dan telaahan lain yang diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pengelolaan kawasan serta daerah penyangga. Komponen ini dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional yang didukung oleh bantuan teknis dari berbagai pihak, seperti konsultan, perguruan tinggi serta lembaga penelitian.

Pembangunan Wilayah/Desa

Komponen Pembangunan Wilayah/Desa ini dilakukan untuk memperbaiki perencanaan penggunaan lahan, hak penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya masyarakat di desa-desa sekitar kawasan dalam zona interaksi, termasuk yang berbatasan serta sekitar dan dalam HPH. Hal ini akan didasarkan atas proses pembangunan partisipatif secara bertahap yang mencakup empat tahap, yaitu: telaahan situasi; perancangan rencana pembangunan desa; penerapan dan pemantauan; serta kaji ulang dan evaluasi yang mengarah pada suatu rancangan yang lebih baik. Tujuan dari proses ini adalah untuk mencapai *suatu Kesepakatan Konservasi Desa (KKD)* yang

memberikan legalitas akses terhadap sumber daya di dalam kawasan dan daerah penyangga (misalnya terhadap hasil hutan non kayu, intensifikasi sistem produksi pertanian dan hutan kemasyarakatan) atau manfaat sosial (seperti pemasaran yang lebih baik, peningkatan sarana/prasarana, termasuk pengolahan hasil dan penyimpanannya) serta menjamin bantuan pembangunan tertentu sebagai imbal balik untuk kerjasama masyarakat dalam perlindungan kawasan dan pelestarian sumber daya alam hayati di lahan desa. Walaupun petani miskin sumber daya dan sangat tergantung pada kawasan yang menjadi target utama dari kegiatan ini, namun seluruh masyarakat desa harus menjadi bagian dari KKD ini. Bagi desa-desa yang berbatasan dengan areal HPH, kegiatan yang dilakukan adalah pengenalan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Pengintegrasian Keanekaragaman Hayati dalam Pengelolaan HPH

Tujuan utama dari komponen ini adalah:

- Membangun dasar kelembagaan yang jelas dan kebijaksanaan bagi pengelolaan yang efektif terhadap kawasan hutan yang berbatasan dengan taman nasional agar dapat berfungsi sebagai daerah penyangga keanekaragaman hayati yang efektif.
- Mengidentifikasi, memantau dan melindungi lokasi-lokasi keanekaragaman hayati yang bernilai konservasi dalam areal HPH; dan
- Menghubungkan pengelolaan HPH dengan seluruh prioritas penggunaan lahan regional yang didukung oleh proyek ini.

Salah satu kegiatan utama yang dilakukan adalah telaahan ekologi dan keanekaragaman hayati dari areal HPH sekitar taman nasional sehingga Pemerintah Indonesia dapat mengalokasikan kembali kawasan hutan untuk tata guna lahan yang sesuai dan upaya pengelolaan yang diperlukan bagi HPH yang bersangkutan. Dalam proses ini, juga dilakukan identifikasi terhadap lokasi dengan keanekaragaman hayati tinggi atau daerah aliran sungai yang bernilai konservasi sehingga lokasi tersebut dapat disisihkan sebagai kawasan berhutan tetap dalam areal HPH. Selain itu, dilakukan audit independen untuk mengkaji dan memantau kegiatan penebangan dan konservasi terhadap beberapa (sembilan) HPH di sekitar kawasan.

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi (P&E) merupakan komponen pendukung yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan Taman Nasional, Pembangunan Wilayah/Desa dan pengelolaan HPH untuk kepentingan keanekaragaman hayati. Komponen ini dimaksudkan untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan pada ketiga komponen dimaksud dan merupakan kunci bagi pelaksanaannya secara efektif. Kegiatan pemantauan ini mendukung tiga perencanaan utama dan fungsi pengelolaan sumber daya, yaitu: (a) pemantauan kemajuan teknis dan keuangan; (b) analisis dampak; dan (c) evaluasi kinerja. Tujuan khusus pelaksanaan pemantauan terhadap ketiga komponen dimaksud adalah:

Pengelolaan Taman Nasional

- Menyediakan alat yang sesuai untuk pemantauan perambahan, perburuan dan dampak pembangunan lainnya dalam batasan taman nasional; dan
- Mengembangkan indikator pemantauan dan kinerja untuk menelaah keutuhan dan kelestarian taman nasional, seperti stabilitas batas, keadaan habitat, kelangsungan dan penyebaran jenis.

Pembangunan Wilayah/Desa

- meningkatkan kemampuan kelembagaan untuk menganalisis dampak kegiatan pembangunan pedesaan terhadap taman nasional; dan
- memfasilitasi penelaahan terhadap keefektifan proyek dalam mengembangkan pembangunan sosial dan ekonomi bagi masyarakat di perbatasan kawasan.

Pengntegrasian Keanekaragaman Hayati dalam Pengelolaan HPH

- Membuat sistem pemantauan batas persekutuan antara taman nasional dengan areal HPH, termasuk keefektifan pemeliharaan keanekaragaman hayati; dan
- Mengembangkan kemampuan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan dalam areal HPH, termasuk keberhasilan lokasi konservasi dalam batas areal HPH.

Kegiatan Pendukung

Selain komponen dan kegiatan di atas, dalam ICDP-TNKS juga dilakukan beberapa kegiatan yang merupakan pendukung, di antaranya adalah:

1. **Kebijaksanaan dan Perencanaan**, diutamakan pada perbaikan Petunjuk Pelaksanaan untuk kegiatan tata ruang antar propinsi dan kegiatan perencanaan daerah dengan tujuan memberikan warna pembangunan ekonomi wilayah sekitar Kerinci Seblat yang lebih luas dengan arah “berwawasan lingkungan”
2. **Pelatihan dan Fasilitas Masyarakat**. Beberapa pelatihan tertentu yang diperlukan untuk setiap komponen dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas keberhasilan pelaksanaan proyek. Proyek ini membantu membuat desain dan melaksanakan penelaahan kebutuhan pelatihan bagi pihak terkait, pelaksanaan program pelatihan yang relevan, baik teori maupun praktek, mengadakan kontrak jasa pelatihan, serta pengawasan dan pemantauan dampak pelatihan.
3. **Kesadaran konservasi**. Program Promosi Konservasi Keanekaragaman hayati yang ada dalam proyek ini mempunyai peranan penting dalam kegiatan pengelolaan kawasan dan pembangunan pedesaan melalui penyebarluasan informasi bagi masyarakat desa perbatasan, instansi pemerintah, serta masyarakat pada umumnya tentang nilai kawasan untuk keanekaragaman hayati, perlindungan DAS dan pembangunan daerah.
4. **Telaahan/Studi**, antara lain mencakup:
 - Keberlanjutan Pendanaan, berkaitan dengan pengkajian struktur untuk mendapatkan dana bagi pengelolaan kawasan serta merumuskan suatu pendekatan untuk menjamin keberlanjutan sumber pembiayaan, termasuk mekanisme desentralisasi pendanaan yang berpedoman pada kondisi setempat.
 - Eko-wisata, dimaksudkan untuk menelaah potensi dan hambatan pengembangan ekowisata TNKS dengan bantuan bantuan teknis yang tersedia dalam Komponen Pengelolaan Taman Nasional.
 - Rencana Bantuan Masyarakat Kubu, menyangkut pengkajian kondisi aktual ketergantungan masyarakat Kubu terhadap sumber daya kawasan dan daerah penyangga sebagai dasar bagi penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun dengan tetap dalam batasan pengelolaan TNKS dan daerah penyangganya.

Kegiatan Proyek di Balai TNKS

Kegiatan yang dilakukan oleh Balai TNKS dalam bentuk proyek, khususnya berkaitan dengan Komponen Pengelolaan Taman Nasional dengan intensitas kecil dan masih dalam batas kemampuan pelaksanaan, baik secara swakelola maupun dengan bantuan pihak lain, secara umum mencakup:

1. Perencanaan Pengelolaan, seperti konsultasi di tingkat propinsi dan kabupaten, pengumpulan data serta survei lapangan;
2. Pengadaan peralatan dan kendaraan;
3. Pengadaan konsultan;
4. Pelatihan dan peningkatan kesadaran konservasi;
5. Pembuatan bangunan dan kegiatan yang berkaitan dengan batas kawasan;
6. Penelitian keanekaragaman hayati.

Secara lebih khusus, kegiatan proyek dengan judul Pembangunan TNKS atau terakhir Pemantapan Pengelolaan TNKS yang dilaksanakan mulai dari Tahun Anggaran 1997/1998 sampai 1999/2000, antara lain:

1. Pengelolaan Keanekaragaman hayati, terdiri dari: Pemeliharaan anggrek alam, perawatan gajah dan pengadaan peralatan taman nasional;
2. Pengelolaan kawasan pelestarian alam/taman nasional, terdiri dari: pembuatan bangunan dan konstruksi, pembuatan pal batas dan papan informasi, jalur hijau batas dan pohon kehidupan;
3. pengadaan peralatan kantor dan lapangan;
4. Belanja operasional;
5. Pelatihan;
6. Kesadaran Konservasi, terdiri dari pembinaan Kelompok Pencinta Alam/Kader Konservasi, pameran, penyuluhan, patroli penyuluhan kawasandan patroli mobil;
7. Hubungan masyarakat, undangan khusus dan konsultasi desa;
8. Perencanaan pengelolaan, terdiri dari konsultasi tingkat propinsi dan kabupaten;
9. Survei dan penelitian keanekaragaman hayati
10. Operasi pengamanan dan pemeriksaan batas kawasan.